



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH



LPPD TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *lillahirrobbil'alamin*, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan tahun 2025 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka laporan ini minimal menyajikan 2 (tiga) substansi pokok capaian kinerja yang disajikan, antara lain : 1. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : a. capaian kinerja makro; b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome (hasil); c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. 2. capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan.

Penyusunan LPPD Kota Balikpapan Tahun 2025 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 100.2.7/989/OTDA tanggal 12 Februari 2026, perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2025. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan

komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Balikpapan dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga terwujudnya Kota Balikpapan sebagai kota aman dan nyaman. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

“Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal, Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa)”

Balikpapan, 30 Maret 2026
WALI KOTA BALIKPAPAN

Dr. H. RAHMAD MAS'UD, S.E., M.E.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1 PENJELASAN UMUM.....	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
B. Data Geografis Wilayah	2
C. Jumlah Penduduk.....	13
D. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan.....	14
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	15
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	17
1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	19
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah	20
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah.....	24
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	32
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	83
1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	137
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	145
2.1 Capaian Kinerja Makro	145
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	145
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	146
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	164
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	171
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	416

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR

PELAYANAN MINIMAL.....	417
1 Jenis Pelayanan Dasar.....	417
1. Pendidikan.....	417
2. Kesehatan.....	417
3. Pekerjaan Umum.....	418
4. Perumahan Rakyat	418
5. Trantibumlinmas	418
6. Sosial.....	419
2 TARGET PENCAPAIAN.....	420
1. Pendidikan.....	420
2. Kesehatan.....	420
3. Pekerjaan Umum.....	421
4. Perumahan Rakyat	422
5. Trantibumlinmas	422
6. Sosial.....	423
3 ANGGARAN	424
1. Pendidikan.....	424
2. Kesehatan.....	428
3. Pekerjaan Umum.....	429
4. Perumahan Rakyat	431
5. Trantibumlinmas	434
6. Sosial.....	437
4 DUKUNGAN PERSONIL	438
1. Pendidikan.....	438
2. Kesehatan.....	439
3. Pekerjaan Umum.....	440
4. Perumahan Rakyat	440
5. Trantibumlinmas	441
6. Sosial.....	443
5 HASIL CAPAIAN.....	444
1. Pendidikan.....	444
2. Kesehatan.....	448
3. Pekerjaan Umum.....	461
4. Perumahan Rakyat	464

5	Trantibumlinmas	466
6	Sosial.....	470
6	PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	476
1.	Pendidikan.....	476
2.	Kesehatan.....	478
3.	Pekerjaan Umum.....	480
4.	Perumahan Rakyat	484
5.	Trantibumlinmas	486
6.	Sosial.....	586
BAB V PENUTUP		488

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan	3
Tabel 1.2	Daerah Aliran Sungai (Das) Kota Balikpapan	7
Tabel 1.3	Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032.....	11
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin pada setiap Kecamatan Tahun 2025 ...	13
Tabel 1.5	Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan	14
Tabel 1.6	Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.7	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 1.8	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.9	Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2025 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	17
Tabel 1.10	Rincian Belanja Daerah Tahun 2025 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	18
Tabel 1.11	Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI).....	19
Tabel 1.12	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-20263	34
Tabel 1.13	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	42
Tabel 1.14	Perjanjian Kinerja Murni Balikpapan Tahun 2025	83
Tabel 1.15	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025	85
Tabel 1.16	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025– 2029	87
Tabwl 1.17	Program dan Perangkat Daerah Pengampu beserta Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2025	89
Tabel 1.18	Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2025.....	105
Tabel 1.19	Program, kegiatan dan Sub kegiatan SPM Bidang Pendidikan	138
Tabel 1.20	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan.....	140
Tabel 1.21	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum	141
Tabel 1.22	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan.....	141
Tabel 1.23	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas.....	141
Tabel 1.24	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang sosial.....	144
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2025	145

Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	147
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	164
Tabel 2.4	Predikat Capaian Kinerja.....	172
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	174
Tabel 2.6	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	185
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025	198
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029	299
Tabel 2.9	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.....	201
Tabel 2.10	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan.....	206
Tabel 2.11	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.....	210
Tabel 2.12	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.....	213
Tabel 2.13	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.....	216
Tabel 2.14	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.....	220
Tabel 2.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kota Balikpapan dengan Capaian Nasional, Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021– 2026.....	223
Tabel 2.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kota Balikpapan dengan Capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.....	230
Tabel 2.17	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.....	236

Tabel 2.18 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.....	303
Tabel 2.19 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	355
Tabel 2.20 Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025	393
Tabel 2.21 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025	394
Tabel 2.22 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja.	398
Tabel 2.23 Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025	404
Tabel 2.24 Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Tahun 2025	406
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025	420
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025	420
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025	421
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Pencapaian SPM Perumahan Rakyat 202 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025.....	422
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025	422
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025	423
Tabel 4.7 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025	424
Tabel 4.8 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	428
Tabel 4.9 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	429
Tabel 4.10 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	431
Tabel 4.11 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2025	434
Tabel 4.12 Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025	437
Tabel 4.13 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025.....	438
Tabel 4.14 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025 Jabatan Jumlah	439
Tabel 4.15 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	440
Tabel 4.16 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025.....	440
Tabel 4.17 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang TrantibumLinmas Satpol PP Tahun 2025	441
Tabel 4.18 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025.....	443
Tabel 4.19 Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025	445
Tabel 4.20 Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dasar Tahun 2025	446
Tabel 4.21 Realisasi SPM pendidikan Kesetaraan.....	447

Tabel 4.22	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025	448
Tabel 4.23	Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025	448
Tabel 4.24	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025	460
Tabel 4.25	Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025	461
Tabel 4.26	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	464
Tabel 4.27	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Perumahan Rakyat	464
Tabel 4.28	Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	465
Tabel 4.29	Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM TrantibumLinmas	466
Tabel 4.30	Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang TrantibumLinmas Tahun 2025	470
Tabel 4.31	Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2025	470
Tabel 4.32	Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2025	476
Tabel 4.33	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pendidikan	476
Tabel 4.34	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Kesehatan	478
Tabel 4.35	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum	482
Tabel 4.36	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat	484
Tabel 4.37	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Trantibumlinmas	486
Tabel 4.38	Permasalahan dan solusi SPM Urusan Sosial	486

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis, dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

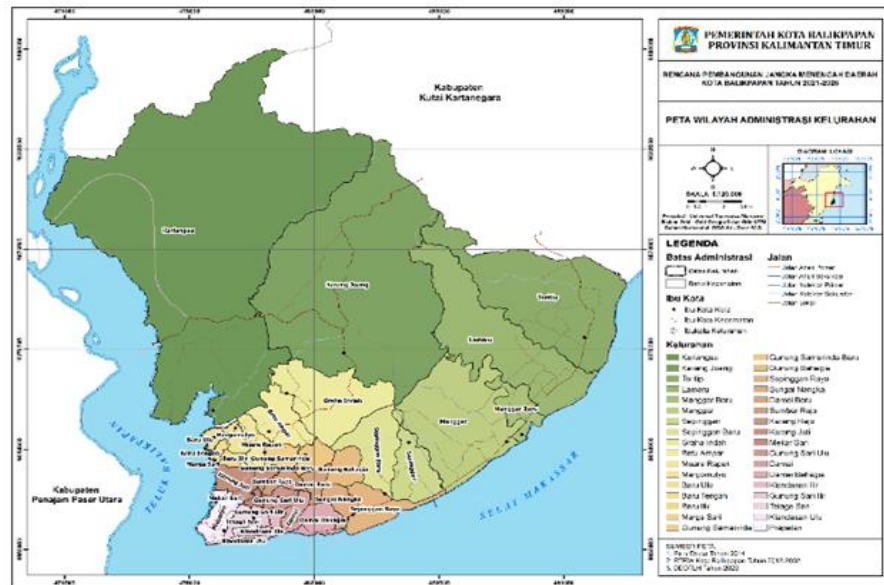
b. Data Geografis Wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 511,01 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Balikpapan.

Gambaran Kota Balikpapan dapat dilihat pada Peta di bawah ini:



Gambar 1.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan yang terbagi menjadi 34 (tiga puluh empat) kelurahan sesuai dengan pembagian pada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang bervariasi.

Kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan terluas di Kota Balikpapan dengan cakupan area sebesar 38% dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,07% dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat.

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95
5	Sepinggan Raya	662,58

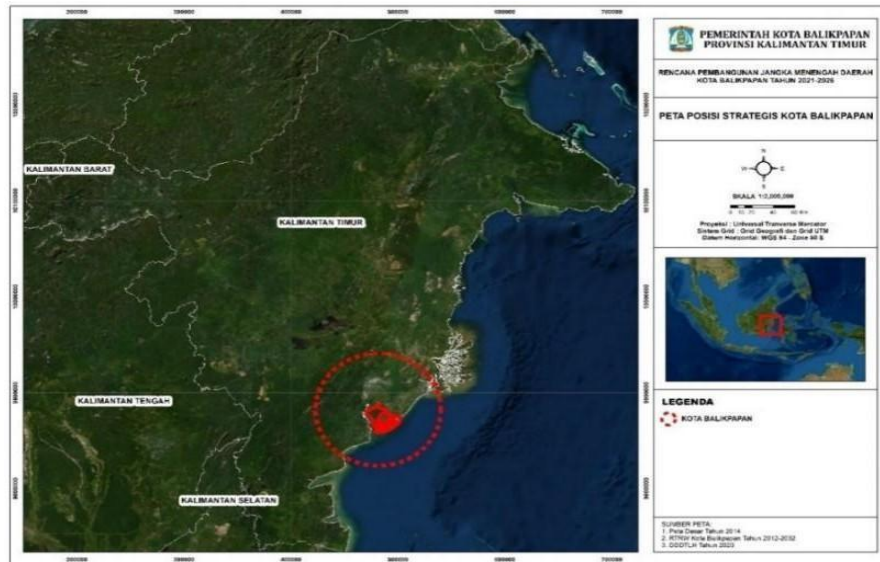
No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan. Berkaitan dengan rencana

pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan memiliki nilai lebih dikarenakan berbatasan langsung dengan Selat Makassar. Selain itu, Kota Balikpapan juga disiapkan sebagai Buffer Zone (Zona Penyangga) bagi IKN baru yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian alam. Letak dan posisi strategis Kota Balikpapan terhadap IKN dapat dilihat pada gambar berikut.



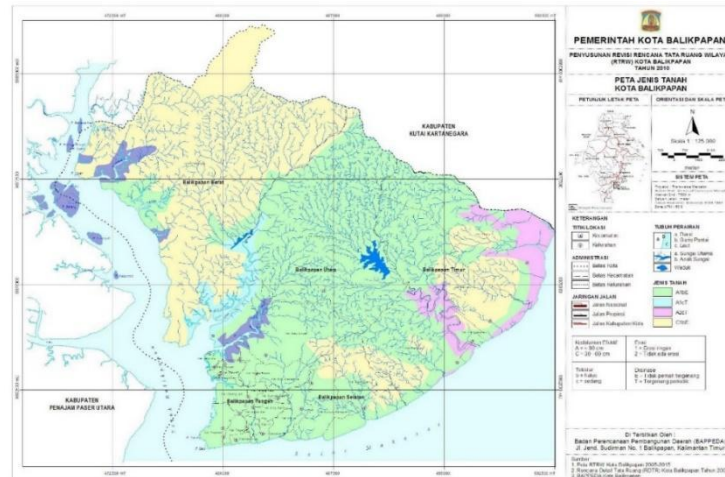
Gambar 1.2 Peta Peta Administrasi Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Jika dilihat dari peta, Kota Balikpapan terletak berbatasan langsung dengan IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal tersebut menjadikan Kota Balikpapan memiliki potensi yang besar, khususnya di bidang ekonomi. Daerah yang terletak di sekitar Ibu Kota sebuah negara pasti akan mendapatkan dampak dari dinamika perekonomian di ibu kota negara tersebut.

1. Geologi

Berikut merupakan gambaran secara spasial jenis tanah di Kota Balikpapan.



Gambar 1.3 Peta Jenis Tanah Kota Balikpapan
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Ada lima jenis tanah/batuan yang ada di Kota Balikpapan, di antaranya adalah aluvial, fluvio marin, vulkan, marin, dan tektonik/struktural.

- Tanah pada Grup Aluvial

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan 50-75 persen, dan terjadi pada kelerengan 1-3 persen dengan bahan induk “Aluvium”.

- Tanah pada Grup Fluvio Marin

Ada dua jenis tanah pada grup ini; yang pertama lahan dengan bentuk dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengan <1 persen dan bahan induk aluvium. Umum ditemukan di sepanjang Sungai Manggar Besar. Kedua, berupa dataran fluvio marin dengan kelerengan <1 persen dan bahan induknya adalah aluvium. Umumnya ditemukan di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

- Tanah pada Grup Vulkan

Bentukan lahannya setara dengan regosol berupa bahan induk vulkan. Tanah ini berada di pantai Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Tanah pada Grup Marin

Bentukan lahan pada jenis tanah ini berupa pasang surut lumpur serta memiliki kelerengan <1 persen dengan bahan induk aluvium. Banyak ditemukan di sekitar Sungai Wain Besar dan Sumber.

- Tanah pada Grup Tektonik/Struktural

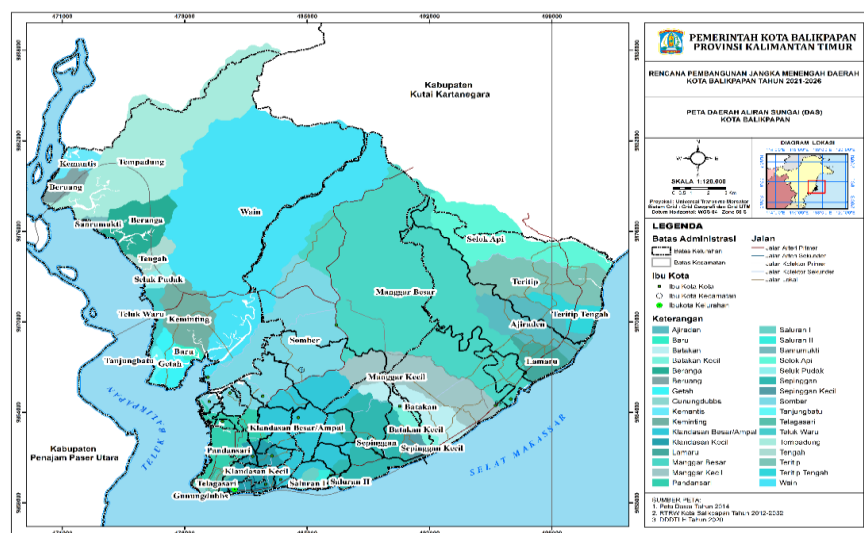
Jenis tanah pada grup tektonik dibagi lagi menjadi lima jenis, yaitu:

- Dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak antara 3-8 persen dengan bahan induk batu liat dan batu pasir.
- Dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15 persen dengan bahan induk batu liat dan batu gamping.
- Dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30 persen dengan bahan induk berupa batu liat dan batu pasir.
- Dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil 15-30 persen dengan bahan induk batu liat dan batu pasir.

Perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30 persen dan bahan induk berupa batu liat, batu pasir, dan batu gamping.

2. Hidrologi

Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai).



Gambar 1.4 Peta DAS Kota Balikpapan

Sumber: DDDTLH, 2020

Balikpapan juga termasuk dalam WS (Wilayah Sungai) strategis nasional Mahakam dengan mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Di bawah ini merupakan data luasan DAS di Kota Balikpapan:

Tabel 1. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand (Ha)	Total
1	Gunung Dubbs	42.05	
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	
17	Teluk Waru	479.71	
18	Tempadung	6571.97	

No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)	No.	Nama DAS	Grand Total (Ha)
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

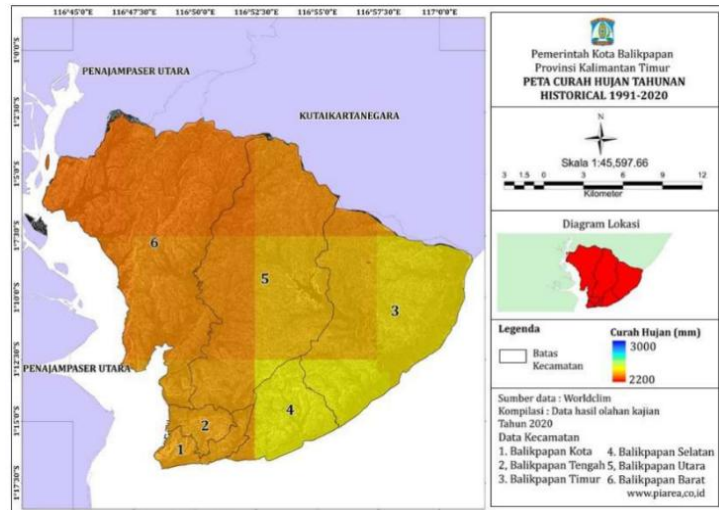
Sumber: DPRD Kota Balikpapan, 2021

Dari tiga puluh dua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Balikpapan, area terluas ada di Sungai Wain sebesar 25349.31 Hektar, karena DAS Sungai Wain masuk ke dalam area hutan lindung Sungai Wain. Sedangkan Daerah Aliran Sungai Gunung Dubbs merupakan area terkecil dengan luas sebesar 42.05 Hektar. Berikut merupakan visualisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan.

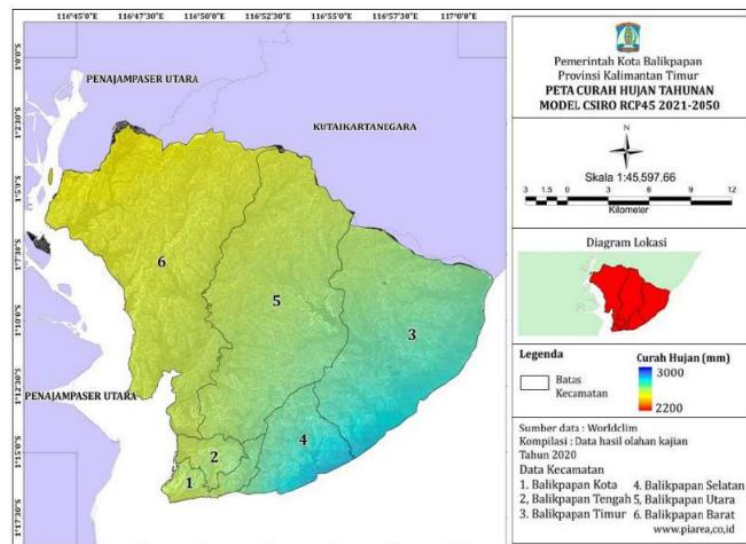
Sesuai dengan kondisi fisiografi dan topografi wilayah Kota Balikpapan yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang berbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan dengan klasifikasi cukup baik. Banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih karena keterbatasan penyediaan air bersih dari PDAM.

3. Klimatologi

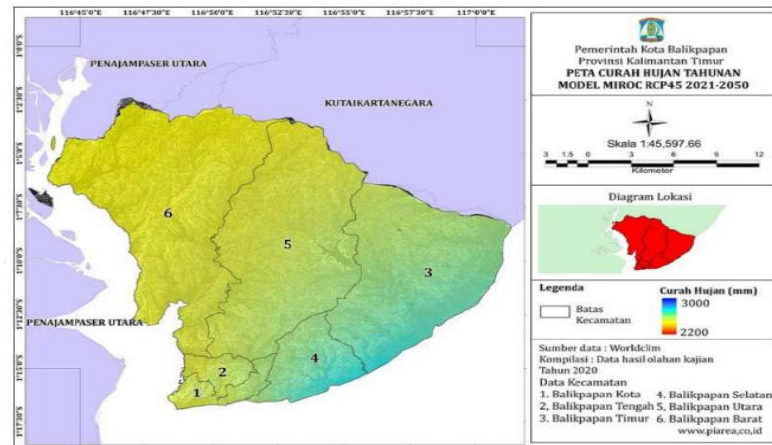
Curah hujan tahunan kota Balikpapan dari tahun 1991-2020 memiliki rentang dari 2220 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Ada peningkatan pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir. Hal tersebut ditandai dengan sebaran warna kuning yang berada di daerah pesisir dan warna jingga-merah berada di daerah tinggi atau perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Proyeksi curah hujan Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan secara merata di masa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.



Gambar 1.5 Peta Curah Hujan Tahunan Historikal 1991-2020
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



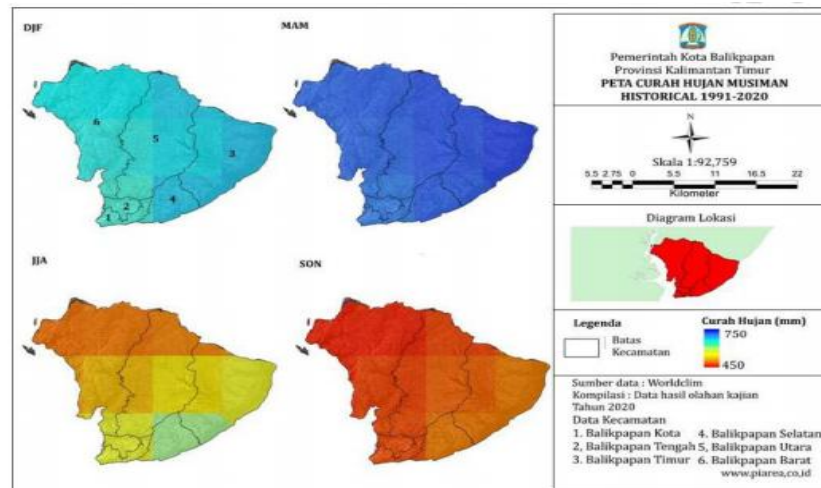
Gambar 1.6 Peta Curah Hujan Tahunan Model CSIRO RCP452021-2050
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.



Gambar 1.7 Peta Curah Hujan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Proyeksi curah hujan Kota Balikpapan akan mengalami peningkatan secara merata di masa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.



Gambar 1.8 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah Hujan tertinggi historikal dari tahun 1991-2020 terdapat pada bulan Maret, April, dan Mei yang ditunjukkan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulan lain. Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada di kisaran 750 – 450 mm.

1) Penggunaan Lahan

Rencana komposisi penggunaan lahan, baik darat maupun laut di Kota Balikpapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 dengan total keseluruhan kawasan seluas 84.686,84 hektar yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a. Kawasan Lindung

Merujuk pada RTRW Kota Balikpapan periode tahun 2012-2032, total kawasan lindung di Kota Balikpapan yaitu sebesar 33.940,07 hektar. Kawasan lindung diarahkan untuk tersedianya kawasan hutan lindung yang terdiri dari kawasan hutan lindung, perluasan Hutan Lindung Sungai Wain, dan *Buffer Zone* Hutan Lindung. Kawasan lindung memiliki luas lahan sebesar 19.194,08 Ha atau 22,66 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan.

b. Kawasan Budidaya

Total kawasan budidaya di Kota Balikpapan adalah sebesar 50.746,76 ha, peruntukan terbesar diarahkan untuk kawasan perikanan dengan luas wilayah sebesar 16.633,55 ha atau sekitar 19,68 persen dari keseluruhan lahan di Kota Balikpapan.

Tabel 1. 3 Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW Kota Balikpapan 2012-2032

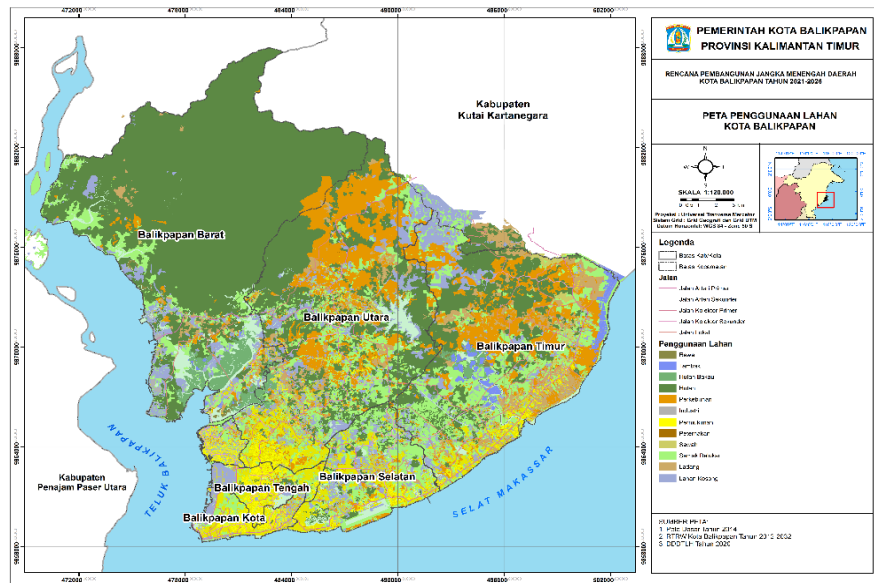
No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
I. KAWASAN LINDUNG				
A.	Kawasan Hutan Lindung	19,194.08	22.66	
1	Kawasan Hutan Lindung	14781.80		
2	Perluasan HLSW	1402.39		
3	Buffer Zone Hutan Lindung	3009.89		
B.	Kawasan Perlindungan Bawah	920.25	1.09	
1	Kawasan Resapan Air			
C.	Kawasan Perlindungan Setempat	6,531.18	7.71	
1	Kawasan Waduk dan Embung	1914.22		
2	Kawasan Sempadan Waduk dan Embung	1254.59		
3	Kawasan Sungai	672.39		
4	Kawasan Sempadan Sungai	144.48		
5	Kawasan Sempadan Pantai	317.76		
6	Kawasan Sempadan Jalan Tol	229.69		
7	Kawasan Hutan Bakau	1871.67		
8	Kawasan Buffer Zone (Pernakan, TPA, Sub Pusat Kota 2, KIKS)	126.40		
D.	Kawasan RTH Kota	529.78	0.63	
1	Kawasan Hutan Kota	226.53		
2	Kawasan RTH Kota (Makam, Lapangan, Taman)	303.26		
E.	Kawasan Suaka Alam, Pedestrian Alam dan Cagar Budaya	345.98	0.41	
1	Kawasan Agro Wisata	67.84		
2	Kawasan Kebun Raya	254.76		
3	Kawasan Wanawisata	19.16		
4	Kawasan Penangkaran Buaya	4.22		
F.	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.50	0.23	
1	Kawasan Jalur Migrasi Satwa	196.5		
G.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut	6,222.30	7.35	Wil. Pesisir dan Laut
1	Konservasi Pulau – Pulau Kecil	303.19		Wil. Pesisir dan Laut
2	Daerah Perlindungan Mangrove & Laut (DPML)	61.04		Wil. Pesisir dan Laut
3	Daerah Rawan Ranjau	5727.25		Wil. Pesisir dan Laut

No	PEMANFAATAN LAHAN	2012-2032		KETERANGAN
		LUAS (Ha)	%	
4	Zona Terlarang	114.82		Wil. Pesisir dan Laut
5	Terumbu Karang dan Padang Lamun	16		Wil. Pesisir dan Laut
TOTAL KAWASAN LINDUNG		33,940.07	40.08	
II. KAWASAN BUDIDAYA				
A.	Kawasan Peruntukan Pertanian	3,531.36	4.17	
1	Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura	1.251.67		
2	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	145.45		
3	Kawasan Perkebunan	2076.17		
4	Kawasan Peternakan	58.06		
B.	Kawasan Peruntukan Perikanan	16,663.55	19.68	
1	Kawasan Perikanan Darat	582.19		
2	Kawasan Minapolitan	190.56		
3	Kawasan Perikanan Budidaya Laut	3178.48		Wil. Pesisir dan Laut
4	Kawasan Perikanan Tangkap	12712.32		Wil. Pesisir dan Laut
C.	Kawasan Peruntukan Perumahan		12.87	
	Kawasan Perumahan	10902.02		
D.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	2,523.58	2.98	
1	Kawasan Perdagangan dan Jasa	2523.58		
E.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	56.14	0.07	
1	Kawasan Perkantoran	56.14		
F.	Kawasan Peruntukan Industri	5,107.86	6.03	
1	Industri Besar	4705.33		
2	Industri Sedang	379.33		
3	Industri Kecil	23.21		
G.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	449.40	0.53	
1	Kawasan Pariwisata	449.4		
H.	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan	264.47	0.31	
1	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	264.47		
I.	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	10,821.83	12.78	
1	Kawasan Bandara	372.05		
2	Kawasan Pelabuhan	31.45		
3	Kawasan Terminal	9.40		
4	Kawasan Alur Kapal	10142.87		Wil. Pesisir dan Laut
5	Kawasan Fasilitas Pemerintah	215.49		
6	Kawasan TPA	18.17		
7	RSUD	0.93		
8	Kawasan Masjid Agung Balikpapan	0.94		
9	Kawasan Gereja	1.22		
10	Kawasan Dome	4.87		
11	Kawasan Stadion Olahraga	24.45		
J.	Kawasan Pendidikan	426.56	0.5	
1	Kawasan ITK	340.73		
2	Kawasan PONPES Syarif Hidayatullah	85.83		
Total Kawasan Budidaya		50,746.76	59.92	
Total Keseluruhan Kawasan		84,686.84	100	

Sumber: RTRW Kota Balikpapan, 2012-2032

Dari keseluruhan kawasan lahan di Kota Balikpapan, penggunaan terbesar masih didominasi oleh kawasan budidaya sebesar 59,92 persen, dan kawasan lindung sebesar

40,08 persen. Supaya mendapat gambaran lebih jelas, berikut visualisasi peta penggunaan lahan Kota Balikpapan:



Gambar 1.9 Peta Penggunaan Lahan Kota Balikpapan

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Penggunaan Lahan di Kota Balikpapan masih didominasi di daerah urban seperti Balikpapan Kota serta bagian selatan. Daerah yang masih perlu ditingkatkan penggunaan lahannya ada di Balikpapan Barat dengan tetap memperhatikan prinsip penggunaan lahan yang berkelanjutan supaya tetap memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan.

c. Jumlah Penduduk

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Balikpapan pada tahun 2025 sebanyak 766.052 jiwa. Dari jumlah tersebut, 391.248 diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 374.804 lainnya berjenis kelamin perempuan. Keseluruhan penduduk tersebar tidak merata di enam kecamatan dengan persebaran tertinggi di Balikpapan Utara, yakni mencapai 199.564 jiwa, sebaliknya, Balikpapan Kota merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni sebanyak 85.835 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin pada setiap Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	L	P	
Balikpapan Timur	56.421	53.253	109.674

Kecamatan	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	L	P	
Balikpapan Barat	51.436	47.915	99.351
Balikpapan Utara	101.680	97.884	199.564
Balikpapan Tengah	53.927	52.087	106.014
Balikpapan Selatan	84.116	81.498	165.614
Balikpapan Kota	43.668	42.167	85.835

Sumber: Disdukcapil Kota Balikpapan, 2025, diolah.

d. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan

Secara administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiridari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Pada tahun 2012 terdapat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tigapuluh empat) Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Selatan	
1	Damai Baru
2	Damai Bahagia
3	Sepinggan Baru
4	Sungai Nangka
5	Sepinggan Raya
6	Gunung Bahagia
7	Sepinggan
Kecamatan Balikpapan Kota	
1	Prapatan
2	Telaga Sari
3	Klandasan Ulu
4	Klandasan Ilir
5	Damai

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Timur	
1	Manggar
2	Manggar Baru
3	Lamaru
4	Teritip
Kecamatan Balikpapan Tengah	
1	Gunung Sari Ilir
2	Gunung Sari Ulu
3	Mekar Sari
4	Karang Rejo
5	Sumber Rejo
6	Karang Jati
Kecamatan Balikpapan Barat	
1	Baru Ilir
2	Margo Mulyo
3	Marga Sari
4	Baru Tengah
5	Baru Ulu
6	Kariangau
Kecamatan Balikpapan Utara	
1	Gunung Samarinda
2	Muara Rapak
3	Batu Ampar
4	Karang Joang
5	Gunung Samarinda Baru
6	Graha Indah

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Balikpapan berdasarkan data terbaru tercatat sebanyak 3.911 orang, jumlah PPPK sebanyak 4.056 Orang dan PPPK paruh waktu sebanyak 711 orang, Para PNS dan PPPK tersebut tersebar di berbagai perangkat daerah dan instansi pemerintah yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah PNS dan PPPK ini menjadi salah satu indikator dalam perencanaan kebutuhan pegawai dan peningkatan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil dan PPPK di Pemerintah Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.6 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	I/a	-	-	0
2	I/b	-	-	0
3	I/c	1	-	1
4	I/d	12	-	12
Jumlah Gol I		13	0	13
5	II/a	33	2	35
6	II/b	31	7	38
7	II/c	126	98	224
8	II/d	122	113	235
Jumlah Gol II		312	220	532
9	III/a	375	359	734
10	III/b	301	562	863
11	III/c	142	267	409
12	III/d	219	548	767
Jumlah Gol III		1.037	1.736	2.773
13	IV/a	87	112	199
14	IV/b	60	155	215
15	IV/c	49	129	178
16	IV/d	1	-	1
Jumlah Gol IV		197	396	593

Tabel 1.7 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	58	11	69
2	V	482	490	972
3	VII	77	326	403
4	IX	685	1863	2548
5	X	11	51	62
6	XI	-	2	2
Total		1313	2743	4056

Tabel 1.8 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Guru	5	38	43
2	Nakes	-	11	11
3	Pelaksana	362	295	657
Total		367	344	711

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

1. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Target Pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tertuang dalam APBD sebesar Rp4.262.775.405.772,80 dan direalisasikan sebesar Rp4.139.316.291.538,57 atau mencapai sebesar 97,10%. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.9 Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2025
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

KODE	URAIAN	PENERIMAAN SETELAH PERUBAHAN		
		TARGET	REALISASI	%
	Pendapatan Daerah	4.262.775.405.772,80	4.139.316.291.538,57	97,10
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.380.061.001.970,80	1.249.214.469.661,57	90,51
4.2	Pendapatan Transfer	2.865.714.403.802,00	2.876.625.593.515,00	100,38
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.000.000.000,00	13.476.228.362,00	79,27

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi pendapatan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 setelah perubahan sejumlah Rp1.380.061.001.970,80 Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi jajaran perangkat daerah dapat merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp1.249.214.469.661,57. perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 90,51% atau menurun dari target sejumlah Rp130.846.532.309,23
- Target Pendapatan Transfer tahun 2025 setelah perubahan sejumlah Rp2.865.714.403.802,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan dapat merealisasikan Pendapatan Transfer sejumlah Rp2.876.625.593.515,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan capaian kinerja yang melampaui target sebesar 100,38% atau naik dari target sejumlah Rp10.911.189.713,00; dan

- c. Target Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 setelah perubahan sejumlah Rp17.000.000.000,00. Terkait target tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui koordinasi perangkat daerah terkait dapat merealisasikan Rencana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp13.476.228.362,00. Artinya perbandingan antara realisasi terhadap target menunjukkan penurunan yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 79,27% atau menurun dari target sejumlah Rp3.523.771.638,00

2. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.755.014.992.631,80 dan dapat direalisasikan Rp4.274.824.049.648,05 atau mencapai 89,90% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.10 Rincian Belanja Daerah Tahun 2025
(Sebelum dilakukan audit BPK-RI)**

KODE	URAIAN	PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
5.1	Belanja Operasi	3.174.132.496.772,89	2.768.657.638.725,74	87,22
5.2	Belanja Modal	1.565.827.018.972,91	1.492.593.329.080,31	95,32
5.3	Belanja Tidak Terduga	12.055.476.886,00	10.573.081.842,00	87,70
5.4	Belanja Transfer	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
	Total Belanja Daerah	4.755.014.992.631,80	4.274.824.049.648,05	89,90

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi belanja daerah Tahun 2025 dengan penjelasan sebagai berikut:

- Belanja Operasi Tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp3.174.132.496.772,89 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp2.768.657.638.725,74 atau 87,22%;
- Belanja Modal Tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp1.565.827.018.972,91 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp1.492.593.329.080,31 atau 95,32%;

- c. Belanja Tak Terduga Tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp12.055.476.886,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp10.573.081.842,00 atau 87,70%; dan
- d. Belanja Transfer Tahun 2025 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp3.000.000.000,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp3.000.000.000,00 atau 100,00%.

3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2025 dianggarkan sejumlah Rp492.239.586.859,00 dan terealisasi sejumlah Rp614.740.926.485,36 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 124,88%, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun Anggaran 2025 dengan target sejumlah Rp0,00 dan telah terealisasi sejumlah Rp0,00 artinya kinerja penerimaan pembiayaan tercapai 0,00%.

Tabel 1.11 Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2025 (Sebelum dilakukan audit BPK-RI)

KODE	URAIAN	PEMBIAYAAN SETELAH PERUBAHAN		
		ANGGARAN	REALISASI	%
6.1	Penerimaan Pembiayaan	492.239.586.859,00	614.740.926.485,36	124,88
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	492.239.586.859,00	614.740.926.485,36	124,88

Sumber data : BKAD Kota Balikpapan

1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen fundamental dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju tujuan strategis yang telah ditetapkan. Melalui proses yang sistematis, terukur, dan berbasis data, perencanaan berfungsi untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan, menetapkan prioritas kebijakan, serta menyusun kerangka program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah. Dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berlangsung konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.

Dalam praktiknya, perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen tata kelola yang memperkuat konsistensi kebijakan,

koordinasi lintas sektor, serta akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Proses ini sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan yang terus berkembang, mulai dari dinamika sosial dan ekonomi, tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan masyarakat, hingga penyesuaian terhadap perubahan regulasi dan kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan juga berperan untuk menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan yang terukur serta terjabarkan dalam kebijakan dan program yang memiliki dampak nyata. Kesesuaian antar dokumen perencanaan jangka Panjang (RPJPD), menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) menjadi aspek penting agar arah pembangunan daerah tetap terjaga dan berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Pada bagian ini, pembahasan terkait perencanaan pembangunan daerah akan mencakup permasalahan strategis pemerintahan daerah, visi dan misi Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025.

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Dalam proses penyusunan arah pembangunan daerah, diperlukan pemahaman yang utuh mengenai permasalahan yang dihadapi daerah berdasarkan kondisi faktual. Permasalahan pembangunan pada dasarnya merupakan kesenjangan antara harapan dengan capaian yang berlangsung di lapangan, sehingga perumusannya harus mencerminkan situasi riil yang terjadi. Rumusan permasalahan ini mencakup persoalan yang berkaitan dengan prioritas pembangunan daerah, pelayanan dasar, serta tugas dan fungsi perangkat daerah pada masing-masing urusan pemerintahan.

Mengacu pada Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan melakukan identifikasi dan analisis terhadap sejumlah permasalahan pembangunan sebagai dasar penentuan fokus dan strategi intervensi pada tahun 2025. Proses ini mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan, dinamika sosial ekonomi, kebutuhan pelayanan masyarakat, serta perkembangan kebijakan regional dan nasional yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan permasalahan tersebut kemudian menjadi pijakan dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah dan arah penanganannya melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Adapun permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2025 yang menjadi acuan penting

dalam memastikan pembangunan daerah berjalan terarah, efektif, dan berkesinambungan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan terakselerasi ke angka 6,49 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2019, khususnya setelah sempat terkontraksi ke angka 0,91 persen pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengindikasikan perekonomian yang menggeliat sejalan dengan berjalannya sejumlah proyek strategis nasional dan daerah. Daya beli masyarakat yang terjaga serta momentum pemilu juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Kinerja ekspor tercatat mengalami kenaikan seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan angka yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Indeks gini Kota Balikpapan tahun 2023 mengalami penurunan 0,011 poin dibandingkan tahun 2022 tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Padahal, PDRB per kapita Kota Balikpapan terus menunjukkan kenaikan mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional yakni sebesar 6,09 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan pembangunan ekonomi Kota Balikpapan masih menyisakan persoalan dalam pendistribusian pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dibutuhkan sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif, khususnya yang memihak kelompok masyarakat rentan.

2. Daya Saing SDM Berbasis Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Dasar, Daya Saing Tenaga Kerja, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Anak

Pembangunan manusia di Kota Balikpapan secara umum sudah memiliki tingkat yang cukup tinggi. IPM Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 81,66 merupakan salah satu IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, Kota Balikpapan masih memiliki beberapa permasalahan dalam pembangunan manusia di Kota Balikpapan, diantaranya adalah belum optimalnya penanganan stunting dengan prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 19,6, masih adanya kasus kematian ibu sebesar 73 orang pada tahun 2020, penurunan tingkat pengangguran yang belum optimal dengan TPT tahun 2023 sebesar 6,09, dan belum optimalnya partisipasi

perempuan di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender sebesar 69,27 pada tahun 2022. Penyelesaian berbagai permasalahan ini menjadi perlu untuk memastikan peningkatan daya saing sumber daya manusia masyarakat Kota Balikpapan secara lebih lanjut. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berdaya saing diperlukan untuk mendorong lebih lanjut pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara kontinu. Pembangunan manusia yang berdaya saing sendiri menjadi prasyarat penting dalam pembangunan daya saing daerah secara umum. Peningkatan daya saing sumber daya manusia Kota Balikpapan dilakukan melalui berbagai upaya dalam pembangunan manusia seperti pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, peningkatan daya saing tenaga kerja, penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di segala lini bermasyarakat.

3. Reformasi Birokrasi Berdampak Nyata Bagi Kinerja Pembangunan Berbasis Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Transformasi Digital Tata Kelola, dan Penguatan Sistem Merit

Reformasi birokrasi berdampak menjadi isu strategis yang krusial dalam rangka tata kelola pemerintahan di Kota Balikpapan. Agar dapat berdampak secara nyata dan luas, reformasi birokrasi perlu ditopang oleh penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital tata kelola, dan penguatan sistem merit. Pemaknaan reformasi birokrasi sebagai sebuah paradigma tata kelola pemerintahan; agar dapat naik level menjadi berdampak dapat dimulai dengan meningkatkan capaian nilai indeks reformasi birokrasi. Ada penurunan skor reformasi birokrasi Kota Balikpapan sebesar 2,78 poin pada tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang diukur menggunakan skor SAKIP juga mengalami penurunan sebesar 0,75 poin pada tahun 2023. Perlu dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan melalui intensifikasi dan optimalisasi aspek-aspek pendukung SAKIP yaitu: perencanaan, pengukuran, pembangunan, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian Transformasi tata kelola berbasis digital juga menjadi prasyarat penting dalam mencapai reformasi birokrasi berdampak. Salah satu indikator digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah indeks SPBE; capaian Kota Balikpapan yang sudah cukup baik beberapa tahun terakhir perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penguatan arsitektur SPBE serta manajemen dan integrasi satu data harus dilakukan bersamaan dengan penguatan akuntabilitas kinerja. Pilar penting birokrasi; yaitu aparatur sipil negara (ASN) perlu dikelola dengan baik menggunakan sistem merit agar juga dapat mendukung reformasi birokrasi

berdampak di Kota Balikpapan. Adanya penurunan indeks profesionalitas (IP) ASN pada satu tahun terakhir tentu sangat berpengaruh terhadap capaian indeks sistem merit Kota Balikpapan. Kualitas aparatur sipil perlu ditingkatkan secara holistik dan berkelanjutan yang dibarengi dengan implementasi sistem merit ke seluruh aparatur pendukung birokrasi. Dengan demikian, seluruh aspek pendukung tata kelola pemerintahan dapat berkontribusi secara baik terhadap reformasi birokrasi berdampak di Kota Balikpapan.

4. Akselerasi Infrastruktur Kota yang Berkualitas, Inklusif, serta Pengembangan Kawasan Terintegrasi

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur seperti jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Lebih dari itu, secara spesifik, pada tahun 2023 terdapat sekitar 62,56 km jalan dalam kondisi rusak berat. Pada infrastruktur permukiman, peningkatan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi menghadapi tantangan berupa defisit kebutuhan sumber daya air dan terbatasnya lahan yang sesuai untuk pengembangan layanan sanitasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan identifikasi sumber mata air dan pengembangan inovasi melalui optimasi pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

5. Pengendalian Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tingginya angka bencana kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran permukiman/gedung di Kota Balikpapan mengancam produktivitas lahan. Terjadinya kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau, sehingga lahan yang kering mudah mengalirkan panas yang menyebabkan kebakaran. Selain itu, kondisi wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor, berdasarkan hasil simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor tinggi dengan skor berkisar 0,23 – 0,73. Bahaya banjir juga mengancam wilayah Kota Balikpapan hampir seluruh wilayah terutama wilayah utara berdasarkan pemodelan CSIRO dan MIROC. Ancaman tanah longsor dan banjir juga dipengaruhi intensitas curah hujan tinggi pada musim penghujan pada bulan Desember, Januari, Maret dan April. Berdasarkan beberapa ancaman bencana tersebut, adaptasi terhadap perubahan iklim diperlukan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Balikpapan.

6. **Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Air**

Konservasi lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya air. Lingkungan yang terpelihara dengan baik akan membantu menyimpan cadangan sumber daya air yang dibutuhkan untuk keperluan perngairan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penyediaan air baku Kota Balikpapan berdasarkan data dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) tahun 2021 meningkat menjadi 1.572,17. Kebutuhan air minum Kota Balikpapan pada tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi sebesar 1.780 liter/detik, sehingga selisih ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku sebesar 207,83 liter/detik. Perlu adanya mekanisme konservasi mata air serta pengembangan kawasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Balikpapan.

b. **Visi dan Misi Kepala Daerah**

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan pembangunan daerah yang berada pada masa peralihan antara periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Dalam tahun transisi ini, pelaksanaan pembangunan daerah masih mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 untuk menjaga konsistensi kebijakan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada periode tersebut, sekaligus mulai menerapkan arah pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Dalam konteks tersebut, visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 masih menjadi dasar dalam penetapan prioritas dan pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2025. Visi tersebut menggambarkan kondisi akhir yang ingin dicapai pada penghujung periode perencanaan 2021–2026 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama tahun berjalan.

Adapun visi Wali Kota Balikpapan sebagaimana yang termuat dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 adalah:

**"Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni,
Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"**

Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

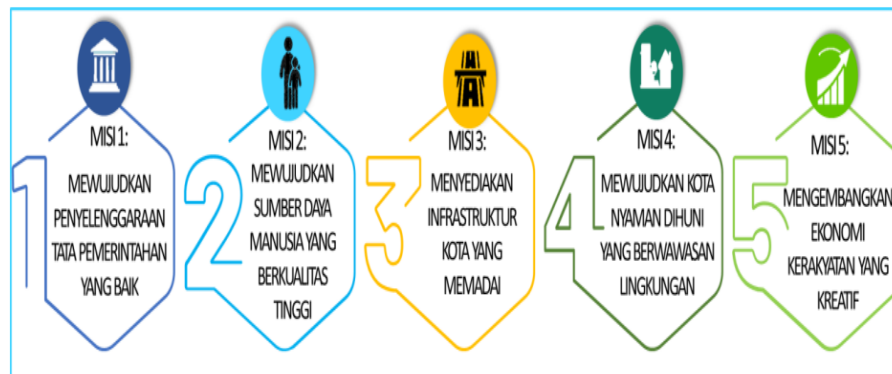
1. Kota Balikpapan sebagai **Kota Terkemuka** dapat diartikan bahwa dalam lima tahun ke depan, Kota Balikpapan diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan dan Budaya baik dalam

Skala Regional, Nasional maupun Global dengan ditunjang oleh fasilitas penunjang perkotaan yang memadai. Kondisi kota juga semakin berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, dan udara). Rencana pengembangan pusat perekonomian baru dalam kawasan *Coastal Area*, pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah, pengembangan objek wisata dan ekonomi kreatif masyarakat, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan dan pengembangan infrastruktur strategis lainnya, ditunjang dengan posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur dan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru diharapkan secara langsung berdampak pada perkembangan perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kota Balikpapan Sebagai **Kota yang Nyaman Dihuni**, Kota Balikpapan akan terus memperbaiki kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan yang memadai serta berwawasan lingkungan agar Kota Balikpapan semakin nyaman dijadikan sebagai tempat tinggal dan tempat beraktifitas bagi warganya.
3. Kota Balikpapan sebagai Kota yang **Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman** adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 serta dengan mempertimbangkan faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi, maka ditetapkan misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.



Gambar 1.10 Misi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Adapun misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;

Pada hakikatnya pemerintahan yang baik mencakup beberapa prinsip utama yakni: partisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, kesempatan yang sama, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan visi yang strategis. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memerlukan berbagai upaya dari seluruh pemangku kepentingan khususnya sektor pemerintah itu sendiri. Dalam konteks ini tidak hanya pemerintah, namun meliputi tiga domain yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM. Mewujudkan daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram dengan tetap memprioritaskan perbaikan yang signifikan dalam sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan berjalannya reformasi birokrasi;

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
Pembangunan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, dimulai sejak individu berada pada usia dini sampai dengan usia produktif. Pembangunan pendidikan yang berkualitas dan merata perlu diupayakan guna melahirkan dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mandiri, berdaya saing dan mengembangkan ekonomi lokal melalui kewirausahaan.
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
Infrastruktur adalah kelengkapan dasar fisik kota. Infrastruktur perkotaan meliputi, antara lain, sistem drainase atau pengendalian banjir, air bersih atau air minum, persampahan, sanitasi atau limbah, jaringan jalan dan transportasi umum, listrik, gas, dan telekomunikasi. Pembangunan infrastruktur perkotaan penting bagi masyarakat luas, kondisi kuantitas dan kualitas infrastruktur amat diperlukan untuk mendukung aktivitas warga sehari-hari dan karenanya sangat penting bagi ekonomi perkotaan.
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
Nyaman dihuni adalah kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman menandakan kota ini dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai serta berwawasan lingkungan. Mewujudkan kota yang nyaman dihuni dan berwawasan lingkungan dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (green city) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (zero waste) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
Pengembangan ekonomi kerakyatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan khususnya di bidang ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengolah sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru ekonomi Indonesia yang diperlukan untuk mencapai target pembangunan jangka panjang. Industri kreatif ini dapat menjadi pilar utama dalam pembentukan ekonomi kreatif dan ekonomi kreatif ini sangatlah penting bagi Indonesia karena diyakini ekonomi kreatif akan memberikan dampak positif bagi kehidupan dan bernegara. Industri kreatif perlu

dikembangkan karena industri kreatif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan dan menciptakan iklim bisnis yang positif. Pengembangan ekonomi kreatif sejalan dengan tujuan dari ekonomi kerakyatan yang selama ini telah ada yaitu antara lain:

- a. Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan;
- b. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan;
- c. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat; dan
- d. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Sejalan dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, Pemerintah Kota Balikpapan mulai melaksanakan arah pembangunan jangka menengah periode berikutnya melalui penerapan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Dokumen RPJMD Tahun 2025–2029 memuat visi dan misi Kepala Daerah untuk periode lima tahun mendatang yang menjadi dasar dalam penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah pada periode tersebut.

Adapun visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman”

Visi tersebut mencerminkan Kota Balikpapan sebagai kota maju berperadapan tinggi yang nyaman dihuni dengan spriritualitas yang mewarnai seluruh aktifitas penduduk kota. Kalimat visi tersebut memiliki tiga kata kunci yang berarti kota global, nyaman untuk semua, dan madinatul iman yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Kota Global Kota global merujuk pada kondisi yang mencerminkan Kota Balikpapan yang maju, modern, tangguh, inovatif, dan setara dengan kemajuan kota besar yang ada didunia. Kota global juga mencerminkan kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan publik. Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung peran pembangunan wilayah Pulau Kalimantan sebagai Superhub Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Kawasan Perkotaan Besar, Kota Balikpapan juga memiliki

peran besar terhadap pusat perdagangan barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur;

2. Nyaman untuk Semua Nyaman untuk semua mencerminkan upaya menciptakan lingkungan, layanan, dan kebijakan yang dapat dinikmati dan diakses oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang, fisik, usia, dan status sosial. Nyaman untuk semua bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan dan aksesibilitas bagi setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan Kota Balikpapan sebagai kota milik bersama yang inklusif, damai dan kondusif;
3. Madinatul Iman Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewarnai seluruh aktivitas penduduk Kota Balikpapan. Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip Sebagai aspek spiritual, konsep madinatul iman memiliki lima prinsip yaitu: 1) Spiritualitas menjadi roh dari seluruh kegiatan masyarakat; 2) Manusia dengan spiritualitas menjadi pusat pembangunan; 3) Seluruh masyarakat ikut terlibat aktif dalam perencanaan dan implementasi rencana kota; 4) Transparansi dalam seluruh kegiatan masyarakat dan pemerintah; 5) Kolaborasi/kerjasama lebih diprioritaskan daripada kompetisi disegala aspek kehidupan.

Visi pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 tersebut diwujudkan melalui misi pembangunan yang menjadi arah pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun mendatang. RPJMD Tahun 2025–2029 menetapkan lima misi pembangunan yang mencerminkan dimensi pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

Misi 1: Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintahan yang bersih menjadi landasan utama untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kota Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

Selain itu, profesionalitas ASN menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui

peningkatan kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, efektif, dan efisien. Dari hal tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah yang benar-benar berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.

Berangkat dari hal tersebut, pemerintahan yang bersih dan profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kinerja birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dan keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat serta mampu menciptakan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua. Prasyarat yang dibutuhkan untuk mendorong misi ini adalah komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat yang semakin meningkat.

Misi 2: Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan

Misi “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan” bertujuan untuk memberikan layanan infrastruktur terpadu dan menjangkau seluruh wilayah yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Balikpapan. Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum, pengendalian banjir, pengembangan konektivitas berkelanjutan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi massal, penataan pedestrian dan utilitas kota, pengembangan kawasan permukiman yang layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan Terang.

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mengembangkan layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan, sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Keterpaduan layanan infrastruktur diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi, perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Balikpapan, sehingga mampu meningkatkan daya saing kota.

Misi 3: Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik

Rumusan misi "Membangun dan Mengembangkan Kehidupan Sosial yang Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik" bertujuan untuk memberikan

penekanan terhadap pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif mencakup berbagai aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum, serta layanan publik yang inklusif, merujuk pada keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat. Adanya kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung aktivitas sehari-hari Masyarakat secara lebih nyaman, berpartisipasi dalam pembangunan, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, misi ini juga memberikan penekanan pada dua aspek utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan Masyarakat secara lebih merata, guna mewujudkan Masyarakat yang sehat dan sejahtera. Pada bidang pendidikan, pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas guna menciptakan generasi yang cerdas dan berdaya saing. Dengan adanya masyarakat yang sehat dan terdidik, diharapkan pembangunan Kota Balikpapan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan sosial dan ekonomi Kota Balikpapan semakin meningkat.

Misi 4: Mengembangkan Perekonomian yang Tumbuh Berkeadilan untuk Semua

Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk di Kota Balikpapan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bernilai tambah tinggi menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara lebih spesifik, UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif akan diarahkan menjadi pengungkit perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam mewujudkan perekonomian yang berkeadilan untuk semua. Selain itu, nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan multiplier effect kepada seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman untuk Semua

Misi ini merepresentasikan tekad untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan agar lingkungan tetap terjaga dan lestari. Muara lebih lanjut lagi dari kondisi tersebut yakni lingkungan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat dan berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan daerah adalah mengurangi pencemaran yang dapat muncul akibat aktivitas industri, urbanisasi, dan eksploitasi sumber daya alam. Pencemaran udara, air, dan tanah dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan, seperti pengelolaan limbah yang efektif, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan pengurangan emisi karbon, harus diterapkan secara konsisten dalam setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan juga sangat penting. Upaya pelibatan tersebut ditempuh melalui peningkatan kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi dan kampanye kesadaran lingkungan, dengan harapan agar masyarakat dapat memahami pentingnya keseimbangan ekosistem dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, pola kinerja kolaborasi antar pihak perlu dikuatkan untuk menjaga lingkungan, diantaranya melalui kerjasama dalam mengadakan program penghijauan, perlindungan daerah tangkapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya hidup ramah lingkungan di tingkat lokal. Dengan langkah-langkah konkret yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam setiap keputusan pembangunan, kedepan diharapkan dapat menciptakan daerah yang maju tanpa mengorbankan keseimbangan alam, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, RPJMD Kota Balikpapan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang dirancang untuk menjawab isu strategis serta permasalahan pembangunan daerah dalam periode perencanaan. Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun,

sedangkan sasaran menunjukkan hasil pembangunan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut dan diukur melalui indikator kinerja yang terukur dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, pembangunan daerah berada pada masa transisi antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, sehingga arah pembangunan pada tahun berjalan mengacu pada kedua dokumen tersebut. RPJMD Tahun 2021–2026 berfungsi menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode, sedangkan RPJMD Tahun 2025–2029 mulai memberikan arah pembangunan jangka menengah berikutnya.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.12 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
MISI 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	68,99	75,5	75,52	75,54	75,56	75,58	75,58
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	N/A	79	80	81	82	83	83
			Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	24,21%	36,88%	41,42%	44,17%	44,74%	44,40%	44,40%
			Indeks SPBE	Poin	N/A	3.1	3.3	3.6	3.7	4.0	4.0
			Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,69	0,73	0,76	0,80	0,84	0,84
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	N/A	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05	85,05
MISI 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7487	0,7500	0,7506	0,7512	0,7518	0,7524	0,7524
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397	0,8397
		Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	N/A	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,020	0,021	0,022	0,023	0,024	0,025	0,025
		Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4920	0,4960	0,4962	0,4964	0,4965	0,4975	0,4975
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	14,43%	17%	25%	35%	45%	60%	60%
MISI 3 : Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai.	Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	77,8	78,2	78,78	79,12	79,55	80,02	80,02
			Persentase Permukiman Layak Huni	%	98,59%	99,05%	99,32%	99,55%	99,78%	100%	100%
MISI 4 : Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan	Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51	68,51
			Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	89%	89,2%	89,4%	89,6%	89,8%	90%	90%
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	108	107	105	103	101	99	99
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,5601	0,8000	0,8267	0,8575	0,8675	0,8794	0,8794
MISI 5 : Mengembangkan	Meningkatkan Pemerataan	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	3,09%	3,14%	3,17%	3,19%	3,33%	3,45%	3,45%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 0)	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2022	2023	2024	2025	2026	
Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.	Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan Ekonomi Inklusif	Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	9	9	8,46	8,22	7,98	7,74	7,74
			Tingkat Kemiskinan	%	2,57	2,42	2,39	2,38	2,37	2,36	2,36
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	3,330	3,530	3,780	4,080	4,440	4,440
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	87	87	88	89	90	90
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,20	1,50	1,90	2,50	3,40	3,40
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	N/A	2,20%	2,42%	2,66%	2,93%	3,22%	3,22%
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-0,56%	3,50%	3,97%	4,00%	4,25%	5,00%	5,00%

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Struktur tujuan, sasaran, dan indikator dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan keterhubungan antara visi dan misi pembangunan daerah dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja pembangunan. Indikator tersebut dilengkapi satuan ukuran, *baseline*, target tahunan, dan target akhir periode sebagai dasar penilaian capaian pembangunan jangka menengah. Dalam konteks SAKIP, indikator tersebut digunakan sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang kemudian diturunkan ke Indikator Kinerja Utama perangkat daerah serta dievaluasi setiap tahun.

Indikator dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 juga menjadi rujukan dalam penyusunan *baseline* pembangunan daerah untuk periode RPJMD berikutnya, sejalan dengan prinsip kesinambungan pembangunan (*development continuity*) serta mendukung keterpaduan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Berakhirnya periode RPJMD Tahun 2021–2026 menandai dimulainya penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai arah pembangunan jangka menengah berikutnya. Dokumen tersebut menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk periode lima tahun dan digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, serta pengukuran kinerja pembangunan daerah pada periode selanjutnya. Pengukuran capaian pada Tahun 2025 mencerminkan capaian akhir periode RPJMD Tahun 2021–2026 sekaligus menjadi *baseline* awal RPJMD Tahun 2025–2029.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.13 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman - MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESSIONAL BERORIENTASI PADA PELAYANAN MASYARAKAT - MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR TERPADU YANG DAPAT MEMENUHI SELURUH KEBUTUHAN MASYARAKAT BALIKPAPAN	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,23	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75
			Tingkat Kemiskinan	%	2,23	2,15	2,06	1,98	1,89	1,81	1,72	1,72
			Indeks Gini	Indeks	0,324	0,312	0,307	0,301	0,296	0,290	0,285	0,285
		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	214,11	223,74	234,37	246,09	259,01	273,26	288,97	288,97
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,75	7,87	7,99	8,12	8,25	8,38	8,52	8,52
			Tingkat Inflasi	%	1,1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11	7,12	7,13	7,13	7,14	7,14	7,15	7,15
			Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	64,50	66,10	67,69	69,69	72,26	75,05	78,15	78,15
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,22	6,12	5,94	5,75	5,57	5,38	5,20	5,20
		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	N/A	78,93	79,56	80,20	80,84	81,49	82,14	82,14

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG KONDUSIF UNTUK MENCIPTAKAN MASYARAKAT YANG SEHAT DAN TERDIDIK	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	70,61	73,01	75,41	77,81	80,20	82,60	85,00	85,00
			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,62	50,62	51,12	51,62	52,12	52,62	53,12	53,12
			Penurunan intensitas emisi GRK	%	12,67*	24,84	38,99	41,02	43,05	45,04	47,25	47,25
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,40	71,64	71,81	71,98	72,15	72,32	72,49	72,49
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	101,43	99,43	97,34	95,43	93,43	91,43	89,43	89,43
- MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG TUMBUH BERKEADILAN UNTUK SEMUA	SDM yang berdaya saing		Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,07	4,08	4,10	4,11	4,13	4,14	4,15	4,15
		SDM Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,62	83,09	83,39	83,69	84,00	84,30	84,60	84,60
		Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,178	0,176	0,174	0,172	0,170	0,168	0,166	0,166
- KONSISTEN MENJAGA LINGKUNGAN HIDUP YANG	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	78,06	78,30	78,52	78,64	78,76	78,88	79,00	79,00
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Nilai AKIP	Nilai	69,06	70,02	70,42	70,70	70,98	71,26	71,54	71,54
			Indeks Pengelolaan	Poin	82,068	82,890	83,090	83,290	83,490	83,690	83,890	83,890

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
SEHAT DAN NYAMAN UNTUK SEMUA		yang bersih dan akuntabel	Keuangan Daerah									
			Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	75,08	77,50	78,20	79,00	79,70	80,50	81,20	81,20
		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,93	84,95	85,64	86,34	87,05	87,76	88,48	88,48
			Indeks SPBE	Indeks	3,96	3,85	-	-	-	-	-	-
			Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Struktur tujuan, sasaran, dan indikator pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menunjukkan arah pembangunan daerah yang berbasis hasil (*outcome-based*) dan mendukung pengukuran kinerja secara terukur dan akuntabel. Indikator kinerja tersebut mencakup dimensi perekonomian, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan, lengkap dengan baseline, target tahunan, dan target akhir periode. Penetapan indikator dan target menunjukkan penahapan capaian pembangunan yang direncanakan secara progresif selama Tahun 2025–2029.

RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 mulai digunakan sebagai acuan penyelarasan arah pembangunan jangka menengah berikutnya untuk menjaga kesinambungan kebijakan pembangunan antarperiode serta mengantisipasi dinamika isu strategis yang berkembang. Namun, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025 tetap berada dalam koridor RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 karena dokumen tersebut masih menjadi dasar perencanaan jangka menengah yang berlaku dalam siklus anggaran berjalan. Kedudukan RPJMD Tahun 2021–2026 sebagai dokumen operasional menjadikan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2025 tetap disusun dan dilaksanakan berdasarkan prioritas, target, dan struktur kebijakan pada periode tersebut, sedangkan RPJMD Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai acuan awal dalam penyiapan arah dan prioritas pembangunan untuk periode lima tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, program pembangunan daerah pada Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai dasar operasional pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan. Adapun program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.13 Program Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	MISI 1: MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK															
	TUJUAN: MENINGKATKAN PROFESIONALITAS DAN TRANSPARANSI BIROKRASI	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	67,33	68,17		68,70		69,06		69,70		70,04		70,04		
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	NILAI SAKIP	68,99	75,5		75,52		75,54		75,56		75,58		75,58		
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	N/A	97,73%	30.195.754.400	100%	31.134.403.284	100%	41.924.809.057	100%	44.075.427.643	100%	53.414.644.598	100%	200.745.038.982	Sekretariat Daerah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomia n, Administrasi Pembanguna n, dan PBJ yang dilaksanakan	N/A	100%	2.584.146. 500	100%	2.584.146. 500	100%	2.822.561. 150	100%	3.278.937. 940	100%	4.236.565. 558	100%	15.506.357. 648	Sekretariat Daerah
3	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	29.830	32.760	3.065.614. 000	32.769	2.867.000. 000	32.778	3.650.000. 000	32.787	4.200.000. 000	32.796	4.800.000. 000	32.796	18.582.614. 000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Penelitian dan Pengembang an
4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.510	23.460	0	23.466	70.000.00 0	23.472	70.000.00 0	23.478	70.000.00 0	23.484	70.000.00 0	23.484	280.000.00 0	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Penelitian dan Pengembang an
5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembang an yang Ditindaklanju ti	100%	100%	2.900.000. 000	100%	2.656.800. 000	100%	3.325.000. 000	100%	3.695.000. 000	100%	4.130.000. 000	100%	16.706.800. 000	Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah Penelitian dan Pengembang an

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	N/A	79		80		81		82		83		83		
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P- APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	N/A	100%	20.725.00 0.000	100%	18.937.72 6.000	100%	24.840.19 2.000	100%	28.517.34 5.000	100%	33.732.83 3.000	100%	126.753.09 6.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
7	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	N/A	100%	19.000.00 0.000	100%	20.690.55 0.000	100%	22.990.00 0.000	100%	25.289.00 0.000	100%	27.817.90 0.000	100%	115.787.45 0.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAERAH	24,21%	36,88%		41,42%		44,17 %		44,74%		44,40%		44,40%		
8	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)	474,4 Milyar	780,71 Milyar	3.953.540. 690	852,37 Milyar	6.114.076. 097	1.062, 03 Milyar	6.297.498. 380	1.192,01 Milyar	12.594.99 6.760	1.321,97 Milyar	17.003.24 5.625	1.321,9 7 Milyar	45.963.357. 552	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA	INDEKS SPBE	N/A	3.1		3.3		3.6		3.7		4.0		4.0		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL															
9	PROGRAM PENYELENGGAR A AN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunaka n data statistik dalam menyusun perencanaan pembanguna n daerah	N/A	80%	272.000.0 00	80%	283.955.1 19	85%	326.341.0 95	90%	360.691.2 25	90%	401.829.0 05	90%	1.644.816.4 44	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah	80%	80%	500.000.0 00	80%	491.976.3 21	80%	549.891.7 18	80%	613.035.3 41	80%	688.656.2 59	80%	2.843.559.6 39	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi	80%	80%	0	80%	30.000.00 0	80%	50.000.00 0	80%	50.000.00 0	80%	50.000.00 0	80%	180.000.00 0	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
11	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	N/A	80%	2.724.000.000	80%	2.634.936.468	80%	3.028.253.393	80%	3.347.002.400	80%	3.728.736.796	80%	15.462.929.057	Dinas Komunikasi dan Informatika
12	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara	80%	80%	4.211.000.000	80%	4.261.000.000	80%	4.516.000.000	80%	4.816.500.000	80%	5.221.500.000	80%	23.026.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegerasi	80%	80%	2.052.000.000	80%	2.277.275.397	80%	2.998.243.661	80%	3.488.680.678	80%	4.030.908.304	80%	14.847.108.040	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SASARAN: MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL	MATURITA S SPIP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 4		Level 4		Level 4		
13	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PENGAWASAN	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	81,33%	83,33%	687.377.0 00	85,33%	717.589.0 35	87,33 %	824.703.5 39	89,33%	911.510.4 87	91,33%	1.015.470. 647	91,33%	4.156.650.7 08	Inspektorat
14	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	50%	51,67%	779.103.0 00	63,33%	813.346.6 35	75%	934.754.8 74	86,67%	1.033.145. 646	98,33%	1.150.978. 615	98,33%	4.711.328.7 70	Inspektorat
	SASARAN: MENCIPTAKAN APARATUR BIROKRASI YANGKAPABEL	INDEKS SISTEM MERIT	0,62	0,69		0,73		0,76		0,80		0,84		0,84		
15	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja	N/A	88%	1.033.944. 000	88,80%	620.559.0 00	88,91 %	711.876.5 00	89,16%	790.250.5 00	90,81%	790.250.5 00	90,81%	4.019.183.0 00	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber Daya Manusia
16	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembang an	40%	17,39%	6.965.093. 609	14,91%	7.020.468. 750	24,64 %	8.161.940. 250	18,95%	9.041.542. 700	24,10%	10.101.95 6.250	100%	41.291.001. 559	Badan Kepegawaia n dan Pengembang an Sumber

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kompetensi Sesuai Rencana Pengembang an Kompetensi														Daya Manusia
	SASARAN: MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN PEMERINTAHAN	INDEKS KEPUASAN MASYARA KAT	N/A	82,25		82,85		83,66		84,38		85,05		85,05		
17	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	87,51%	88,11%	0	89,78%	500.000.0 00	91,45 %	574.634.9 92	93,12%	635.120.1 33	94,79%	707.557.2 49	94,79%	2.417.312.3 74	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
18	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil	91,01%	96,50%	0	96,53%	300.000.0 00	96,55 %	344.780.9 95	96,58	381.072.0 41	96,60%	424.534.3 06	96,60%	1.450.387.3 43	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
19	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan data administrasi kependuduka n secara elektronik	100%	100%	724.500.0 00	100%	906.343.6 89	100%	1.024.097. 062	100%	1.139.784. 262	100%	1.278.335. 819	100%	5.073.060.8 32	Dinas Kependuduk an dan Pencatatan Sipil
20	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Dokumen Profil Kependuduk	100%	100%	0	100%	50.000.00 0	100%	75.000.00 0	100%	75.000.00 0	100%	75.000.00 0	100%	275.000.00 0	Dinas Kependuduk an dan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		an yang Tersusun														Pencatatan Sipil
21	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	17.991.12 0.000	100%	33.676.86 8.279	100%	38.703.81 3.867	100%	42.777.71 4.112	100%	47.656.62 4.540	100%	180.806.14 0.798	Sekretariat DPRD
22	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanju ti	100%	100%	2.028.175. 500	100%	877.230.0 00	100%	1.008.176. 000	100%	1.114.300. 000	100%	1.241.400. 000	100%	6.269.281.5 00	Kecamatan Balikpapan Barat
23	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	16%	4.101.604. 978	17%	4.281.845. 000	18%	4.921.020. 000	19%	5.438.950. 000	20%	6.059.345. 000	20%	24.802.764. 978	Kecamatan Balikpapan Barat
24	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	270.000.0 00	100%	281.800.0 00	100%	323.900.0 00	100%	358.000.0 00	100%	398.850.0 00	100%	1.632.550.0 00	Kecamatan Balikpapan Barat
	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanju ti	100%	100%	938.000.0 00	100%	629.000.0 00	100%	1.125.396. 863	100%	1.243.854. 299	100%	1.385.719. 143	100%	5.321.970.3 05	Kecamatan Balikpapan Selatan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	7,99%	8,00%	5.788.383. 885	8,25%	6.393.026. 228	8,50%	6.944.807. 107	8,75%	7.675.806. 163	9%	8.551.251. 976	9%	35.353.275. 359	Kecamatan Balikpapan Selatan
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	351.000.0 00	100%	366.427.3 77	100%	421.123.9 86	100%	465.450.8 09	100%	518.536.6 94	100%	2.122.538.8 66	Kecamatan Balikpapan Selatan
	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanju ti	100%	100%	835.000.0 00	100%	1.035.750. 000	100%	1.106.522. 500	100%	1.177.318. 175	100%	1.248.137. 720	100%	5.402.728.3 95	Kecamatan Balikpapan Kota
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	10,00%	3.827.298. 350	10,20%	3.995.518. 224	10,40 %	4.591.929. 166	10,60%	5.075.268. 131	10,80%	5.654.115. 765	10,80%	23.144.129. 636	Kecamatan Balikpapan Kota
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	188.000.0 00	100%	196.263.0 97	100%	225.559.2 86	100%	249.301.2 88	100%	277.734.7 54	100%	1.136.858.4 25	Kecamatan Balikpapan Kota

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanju ti	100%	100%	824.957.0 00	100%	306.000.0 00	100%	486.000.0 00	100%	1.075.000. 000	100%	1.350.000. 000	100%	4.041.957.0 00	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	16,25%	16,35%	3.860.794. 050	16,45%	4.592.825. 850	16,55 %	5.458.866. 753	16,65%	5.870.000. 000	16,75%	6.078.000. 000	16,75%	25.860.486. 653	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	20%	100%	304.880.0 00	100%	305.000.0 00	100%	665.789.9 74	100%	665.789.9 74	100%	700.000.0 00	100%	2.641.459.9 48	Kecamatan Balikpapan Timur
	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanju ti	100%	100%	1.055.639. 000	100%	1.102.037. 123	100%	1.266.538. 187	100%	1.399.851. 928	100%	1.559.508. 710	81,45	6.383.574.9 48	Kecamatan Balikpapan Utara
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	15%	5.542.200. 700	16%	5.785.795. 063	17%	6.649.440. 600	18%	7.349.349. 859	19%	8.187.562. 475	19%	33.514.348. 697	Kecamatan Balikpapan Utara

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100%	361.675.0 00	100%	377.571.5 72	100%	433.931.6 74	100,00%	479.606.6 14	100%	534.307.0 05	100%	2.187.091.8 65	Kecamatan Balikpapan Utara
	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanju ti	100%	100%	754.603.5 95	100%	848.919.0 58	100%	985.019.3 44	100%	1.050.178. 894	100%	1.161.159. 470	100%	4.799.880.3 61	Kecamatan Balikpapan Tengah
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	N/A	12,75%	4.353.146. 150	12,75%	4.753.766. 916	12,75 %	5.466.831. 954	12,75%	6.081.270. 023	12,75%	6.754.564. 019	12,75%	27.409.579. 062	Kecamatan Balikpapan Tengah
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	N/A	100%	191.905.0 00	100%	246.015.0 10	100%	304.917.2 61	100%	341.208.5 75	100%	390.237.5 59	100%	1.474.283.4 05	Kecamatan Balikpapan Tengah
25	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan	66,0%	67,0%	900.000.0 00	68%	900.000.0 00	69%	1.215.000. 000	70%	1.640.250. 000	71%	2.214.337. 500	71%	6.869.587.5 00	Dinas Penanamam Modal dan Perijinan Terpadu
	MISI 2: MEWUJUDKAN SUMBER DAYA															

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	MANUSIA YANG BERKUALITAS TINGGI															
	TUJUAN: MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL SEHAT DAN BERDAYA SAING	IPM	80,01	80,11		80,31		80,51		80,71		80,91		80,91		
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN	INDEKS PENDIDIKA N	0,7487	0,7500		0,7506		0,7512		0,7518		0,7524		0,7524		
26	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	86,73	86,93	254.941.5 41.801	87,03	307.074.6 99.100	87,13	352.911.7 34.554	87,23	390.058.6 47.430	87,33	432.545.8 58.631	87,33	1.737.532.4 81.516	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pengembang an Kurikulum Muatan Lokal	54,55%	66,67%	423.500.0 00	77,78%	424.384.1 37	88,89 %	487.731.9 51	94,44%	539.069.8 19	100%	600.552.1 45	100%	2.475.238.0 52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
28	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidika n yang Berkualifikas i Minimal D- IV / S1	45,83%	90,95%	1.469.500. 000	91,45%	1.018.624. 347	91,95 %	1.170.674. 387	92,45%	1.293.897. 661	92,95%	3.441.470. 081	92,95%	8.394.166.4 76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
29	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/S MP)	93,73%	98,98%	200.000.0 00	99,03%	208.030.6 80	99,08 %	239.083.4 16	99,13%	264.248.9 46	99,18%	294.387.2 31	99,18%	1.205.750.2 73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKSESIBILITAS KESEHATAN	INDEKS KESEHATA N	0,8383	0,8385		0,8388		0,8391		0,8394		0,8397		0,8397		
30	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,70%	80%	246.809.0 00.000	81%	217.318.7 63.508	82%	249.757.9 31.850	84%	276.047.0 43.904	85%	307.530.9 32.864	85%	1.297.463.6 72.126	Dinas Kesehatan
31	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	80%	82%	1.210.000. 000	84%	1.263.182. 697	86%	1.451.737. 958	88%	1.604.545. 525	90%	1.787.548. 148	90%	7.317.014.3 28	Dinas Kesehatan
32	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan	70%	100%	1.235.000. 000	100%	1.289.281. 513	100%	1.481.732. 544	100%	1.637.697. 292	100%	1.824.480. 961	100%	7.468.192.3 10	Dinas Kesehatan
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase UKBM Aktif	80%	82%	4.750.000. 000	84%	4.958.775. 050	86%	5.698.971. 322	88%	6.298.835. 737	90%	7.017.234. 464	90%	28.723.816. 573	Dinas Kesehatan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	BIDANG KESEHATAN															
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LITERASI MASYARAKAT	INDEKS PEMBANG UNAN LITERASI MASYARA KAT	N/A	10,5		11		11,5		12		12,5		12,5		
34	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	3%	4%	1.055.000.000	5%	1.101.370.037	6%	1.265.771.525	7%	1.399.004.569	8%	1.558.564.707	8%	6.379.710.838	Dinas Perpustakaan dan Arsip
35	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	57%	60%	320.000.000	70%	334.064.845	80%	383.930.700	90%	424.342.618	100%	472.740.006	100%	1.935.078.169	Dinas Perpustakaan dan Arsip
36	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	46%	55%	160.000.000	65%	167.032.423	75%	191.965.350	85%	212.171.309	100%	236.370.003	100%	967.539.085	Dinas Perpustakaan dan Arsip
37	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Perizinan Penggunaan Arsip	0%	0%	40.000.000	0%	41.758.106	100%	47.991.337	100%	53.042.827	100%	59.092.501	100%	241.884.771	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PEMUDA	INDEKS DAYA SAING KEPEMUD AAN DAN KEOLAHRA GAAN	0,020	0,021		0,022		0,023		0,024		0,025		0,025		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
38	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri	0.02%	2.30%	6.400.000. 000	2,40%	7.000.000. 000	2,50%	8.045.000. 000	2,60%	8.900.000. 000	2,70%	9.915.000. 000	2,70%	40.260.000. 000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
39	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	5.9%	25,00%	29.016.00 0.000	7,00%	19.000.00 0.000	6.2%	21.800.00 0.000	7,40%	24.000.00 0.000	26.2%	26.737.00 0.000	26.2%	120.553.00 0.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
40	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	N/A	100%	1.150.000. 000	100%	1.000.000. 000	100%	1.150.000. 000	100%	1.270.000. 000	100%	1.415.000. 000	100%	5.985.000.0 00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA KELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAERAH	INDEKS WARISAN BUDAYA	0,4920	0,4960		0,4962		0,4964		0,4965		0,4975		0,4975		
41	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan	N/A	0%	0	11,11%	254.042.8 09	33,33 %	278.780.3 52	55,56%	336.878.7 21	77,78%	375.300.6 22	77,78%	1.245.002.5 04	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembang an Kebudayaan	N/A	34,90%	1.497.545. 000	45,00%	1.175.217. 243	55,10 %	1.250.641. 902	67,98%	1.492.808. 263	78,08%	1.631.033. 039	78,08%	7.047.245.4 47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
43	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni	19,90%	24,88%	425.000.0 00	27,36%	260.988.1 61	34,83 %	313.129.2 72	37,31%	346.088.7 48	39,80%	385.561.0 77	39,80%	1.730.767.2 58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembang an sejarah lokal	N/A	26,67%	175.000.0 00	33,33%	175.093.2 24	46,67 %	201.229.3 87	60,00%	222.410.4 63	80,00%	247.776.9 59	80,00%	1.021.510.0 33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	87,50%	94,12%	1.100.000. 000	95,59%	1.123.019. 611	97,06 %	1.190.652. 730	98,53%	1.397.750. 325	100,00%	1.589.201. 333	100,00 %	6.400.623.9 99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
46	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase SDM Pengelola Permuseuma n yang tersertifikasi	N/A	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	55,56%	200.000.0 00	55,56%	200.000.00 0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS PEMBANGUNAN BERBASIS PENGARUSUTAM AAN GENDER	PERSENTA SE ANGGARA N RESPONSIF GENDER (ARG)	14,43%	17%		25%		35%		45%		60%		60%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
47	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	27.80%	82,40%	375.000.0 00	88,24%	879.901.9 35	97,06 %	1.108.735. 639	100%	1.255.050. 209	100%	1.480.008. 488	100%	5.098.696.2 71	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
48	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	11,46	9,08	250.000.0 00	8,50	671.111.4 07	8,36	868.778.9 56	8,19	989.836.0 74	8,01	1.184.545. 991	8,01	3.964.272.4 28	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
49	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	57.14%	71.43%	600.000.0 00	71.43%	1.036.494. 831	71.43 %	1.288.703. 155	85.71%	1.453.960. 811	100,00%	1.701.605. 368	100,00 %	6.080.764.1 65	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
50	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	11,76%	14,71%	75.000.00 0	33,33%	332.635.3 84	36,11 %	348.317.0 91	38,89%	348.676.3 54	41,67%	369.131.7 72	41,67%	1.473.760.6 01	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
51	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	0,00%	25,00%	595.000.000	32,00%	899.457.142	40,00 %	972.204.478	45,00%	1.038.233.108	50,00%	1.137.334.282	50,00%	4.642.229.010	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
52	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA	72.31%	65,00%	860.000.000	67,00%	1.331.888.902	68,00 %	1.600.646.848	70,00%	1.798.739.188	71,50%	2.085.706.623	71,50%	7.676.981.561	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
53	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi	N/A	5,88%	750.000.000	11,76%	1.037.303.418	29,41 %	1.158.170.910	44,12%	1.243.774.064	58,82%	1.366.317.722	58,82%	5.555.566.114	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan	83.875.636.859	83.900.000.000	7.154.345.900	83.950.000.000	4.000.000.000	84.050.000	4.500.000.000	84.150.000.000	5.000.000.000	84.550.000.000	5.500.000.000	420.600.000.000	26.154.345.900	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
55	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase tindak lanjut Rekomendasi	60,00%	62,00%	180.000.000	64,00%	880.710.521	66,00 %	978.203.395	68,00%	1.044.863.462	70,00%	1.144.720.844	70,00%	4.228.498.222	Dinas Pemberdayaan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk														Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
56	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	14.04%	13,75%	580.000.0 00	13,40%	859.831.4 68	13,10 %	954.207.7 26	11,25%	1.127.689. 410	11,20%	1.115.174. 594	11,20%	4.636.903.1 98	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan	8,51%	10,74%	1.000.000. 000	12,75%	1.298.291. 578	15,80 %	1.458.116. 769	18,35%	1.575.291. 734	20,35%	1.735.645. 852	20,35%	7.067.345.9 33	Dinas Pemberdayaa n Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	MISI 3: MENYEDIAKAN INFRASTRUKTU R KOTA YANG MEMADAI															

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	TUJUAN: MENINGKATKAN KINERJA LAYANAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN	INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTR UKTUR	82,03	82		82,5		83		83,5		84		84		
	SASARAN: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG TERPADU DAN BERKUALITAS	INDEKS PEMBANG UNAN INFRASTR UKTUR	77,80	78,20		78,78		79,12		79,55		80,02		80,02		
58	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	55,88%	58,82%	60.750.00 0.000	61,76%	185.000.0 00.000	64,71 %	203.500.0 00.000	67,65%	223.850.0 00.000	70,59%	246.235.0 00.000	70,59%	919.335.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum
59	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	96,79%	96,95%	500.000.0 00	97,10%	2.500.000. 000	97,25 %	4.300.000. 000	97,39%	5.500.000. 000	97,53%	6.800.000. 000	97,53%	19.600.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum
60	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	97,98%	98,49%	10.000.00 0.000	98,54%	15.000.00 0.000	98,80 %	20.000.00 0.000	99,05%	285.000.0 00.000	99,29%	330.000.0 00.000	99,29%	660.000.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
61	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	97,82%	97,82%	2.000.000. 000	97,82%	5.000.000. 000	98%	7.500.000. 000	98%	10.000.00 0.000	98,36%	17.400.00 0.000	98,36%	41.900.000. 000	Dinas Pekerjaan Umum
62	PROGRAM PENYELENGGAR A AN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	85,11%	85,36%	45.480.62 2.000	87,36%	164.350.0 00.000	89,12 %	174.183.0 00.000	91,47%	180.993.0 00.000	93,42%	182.962.0 00.000	93,42%	747.968.62 2.000	Dinas Pekerjaan Umum
63	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan	80%	81%	41.000.00 0.000	76,36%	28.000.00 0.000	78,18 %	30.800.00 0.000	80%	33.880.00 0.000	81,82%	37.268.00 0.000	81,82%	170.948.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum
64	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan yang Memiliki Izin	92,38%	92,89%	37.650.00 0.000	93,39%	60.000.00 0.000	93,90 %	66.000.00 0.000	94,41%	72.600.00 0.000	94,91%	79.860.00 0.000	94,91%	316.110.00 0.000	Dinas Pekerjaan Umum
65	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasann ya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	750.000.0 00	100%	1.450.000. 000	100%	1.950.000. 000	100%	1.950.000. 000	100%	1.950.000. 000	100%	8.050.000.0 00	Dinas Pekerjaan Umum
66	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur	52,15%	52,75%	112.000.0 00.000	53,09%	318.827.5 00.000	53,46 %	350.000.0 00.000	53,85%	400.000.0 00.000	54,26%	450.000.0 00.000	54,26%	1.630.827.5 00.000	Dinas Pekerjaan Umum

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota														
67	PROGRAM PENYELENGGAR A AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.	83%	85%	43.726.10 0.000	87%	44.314.56 0.000	89%	44.029.66 0.000	91%	47.160.88 4.620	93%	44.482.36 0.000	93%	223.713.56 4.620	Dinas Perhubungan
		Persentase load faktor angkutan orang umum.	42%	42%	0	47%	10.736.67 3.028	52%	11.610.00 0.000	57%	19.705.00 0.000	62%	16.405.00 0.000	62%	58.456.673. 028	Dinas Perhubungan
68	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan	55%	62%	865.000.0 00	64%	2.150.000. 000	66%	3.425.000. 000	68%	5.425.000. 000	70%	925.000.0 00	70%	12.790.000. 000	Dinas Perhubungan
	SASARAN: MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR YANG TERPADU DAN BERKUALITAS	PERSENTASE PERMUKIMAN LAYAK HUNI	98,59%	99,05%		99,32%		99,55 %		99,78%		100%		100%		
69	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	N/A	0%	10.185.45 0.210	0,71%	10.200.00 0.000	1,42%	11.220.00 0.000	2,13%	12.342.00 0.000	2,84%	13.576.20 0.00 0	2,84%	57.523.650. 210	Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Kabupaten/Kota														
70	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	153,30 Ha	103,39 Ha	1.600.000.000	74,40 Ha	5.250.000.000	49,40 Ha	4.915.000.000	24,40 Ha	6.077.500.000	0 Ha	9.105.000.000	0 Ha	26.947.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
71	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,01%	0,01%	700.000.000	0,01%	40.000.000	0,04%	1.662.000.000	0,08%	2.592.600.000	0,12%	2.623.630.000	0,12%	7.618.230.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
72	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	1,04%	1,39%	1.400.000.000	1,74%	1.500.000.000	2,08%	1.650.000.000	2,43%	1.815.000.000	2,78%	1.996.500.000	2,78%	8.361.500.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
73	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	78,00%	79,00%	195.000.000	80,00%	441.570.765	82,00 %	633.957.770	85,00%	680.583.763	87,00%	608.076.941	87,00%	2.559.189.239	Dinas Sosial
	MISI 4: MEWUJUDKAN KOTA NYAMAN DIHUNI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN															

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	TUJUAN: MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTA N	LIVEABLE CITY INDEX	81,69	81,69		82,19		82,69		83,19		83,69		83,69		
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KUALITAS LINGKUNG AN HIDUP	68,07	68,15		68,23		68,31		68,41		68,51		68,51		
74	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	31,25%	37,50%	100.000.0 00	50,00%	130.000.0 00	75,00 %	980.000.0 00	87,50%	210.000.0 00	100%	190.000.0 00	100%	1.610.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
75	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100%	100%	1.070.000. 000	100%	1.560.000. 000	100%	2.925.000. 000	100%	3.100.000. 000	100%	3.475.000. 000	100%	12.130.000. 000	Dinas Lingkungan Hidup
76	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MA N HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,57%	10,57%	27.050.00 0.000	10,59%	29.200.00 0.000	10,61 %	63.400.00 0.000	10,63%	33.925.00 0.000	10,65%	38.950.00 0.000	10,65%	192.525.00 0.000	Dinas Lingkungan Hidup
77	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN	Persentase Usaha/Kegiat an Penghasil Limbah B3 Yang	26,32%	34,21%	50.000.00 0	44,74%	580.000.0 00	55,26 %	650.000.0 00	65,79%	400.000.0 00	76,32%	350.000.0 00	76,32%	2.030.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Melaporkan Limbahnya														
78	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	18,29%	26,83%	105.000.0 00	29,27%	225.000.0 00	31,71 %	475.000.0 00	32,93%	525.000.0 00	34,15%	575.000.0 00	34,15%	1.905.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
79	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100%	100%	300.000.0 00	100%	370.000.0 00	100%	1.075.000. 000	100%	1.075.000. 000	100%	1.075.000. 000	100%	3.895.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
80	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara	100%	100%	200.000.0 00	100%	250.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	1.650.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup
81	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Persentase Penanganan Pengaduan	100%	100%	125.000.0 00	100%	150.000.0 00	100%	250.000.0 00	100%	300.000.0 00	100%	350.000.0 00	100%	1.175.000.0 00	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	LINGKUNGAN HIDUP	yang tertangani														
82	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan	97,66%	99%	63.233.04 4.600	99%	67.575.00 0.000	99%	79.725.00 0.000	100%	87.675.00 0.000	100%	93.875.00 0.000	100%	392.083.04 4.600	Dinas Lingkungan Hidup
	SASARAN: MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTA SE PEMANFA ATAN RUANG YANG SESUAI DENGAN PERUNTUK KAN	89%	89,2%		89,4%%		89,6%		89,8%		90%		90%		
83	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0%	14%	4.500.000. 000	22%	19.200.00 0.000	27%	19.180.00 0.000	31%	22.850.00 0.000	33%	13.550.00 0.000	33%	79.280.000. 000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
84	PROGRAM PENYELENGGAR A AN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggar aan Penataan Ruang	N/A	0,14	1.900.000. 000	0,15	2.000.000. 000	0,21	2.500.000. 000	0,22	3.000.000. 000	0,27	3.500.000. 000	1	12.900.000. 000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
85	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan	N/A	70,00%	0	72,00%	100.000.0 00	74,00 %	150.000.0 00	76,00%	150.000.0 00	78,00%	150.000.0 00	78,00%	550.000.00 0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
86	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA	Persentase Fasilitasi Penanganan	N/A	41,70%	30.000.00 0	40,00%	30.000.00 0	39,00 %	30.000.00 0	38,00%	30.000.00 0	37,50%	30.000.00 0	37,50%	150.000.00 0	Dinas Pertanahan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	TANAH GARAPAN	Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi														dan Penataan Ruang
87	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	62,16%	66,33%	64.073.76 0.000	69,49%	47.950.00 0.000	72,65 %	50.000.00 0.000	76,44%	60.000.00 0.000	80,24%	70.000.00 0.000	80,24%	292.023.76 0.000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
88	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatka n	88,00%	88,00%	250.000.0 00	89,00%	300.000.0 00	90,00 %	350.000.0 00	91,00%	400.000.0 00	92,00%	450.000.0 00	92,00%	1.750.000.0 00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	SASARAN: MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN BENCANA DAN KETERTIBAN KOTA	INDEKS RESIKO BENCANA	108	107		105		103		101		99				
89	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	14%	14%	2.850.000. 000	13,5%	3.788.007. 600	13%	5.439.407. 660	12,5%	7.738.709. 192	12%	9.645.000. 000	12%	29.461.124. 452	Satuan Polisi Pamong Praja
90	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulan gan Bencana	83,20%	85%	1.110.000. 000	87,50%	1.720.000. 000	90%	2.405.000. 000	92%	3.685.000. 000	94%	7.660.000. 000	94%	16.580.000. 000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
91	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANG AN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulan gan Penyelamata n Kebakaran dan Non Kebakaran	83,20%	85%	5.820.000. 000	87,50%	6.840.000. 000	90%	7.360.000. 000	92,50%	7.860.000. 000	95%	7.240.000. 000	95%	35.120.000. 000	Badan Penanggulan gan Bencana Daerah
	SASARAN: MENINGKATNYA KAPASITAS KETAHANAN BENCANA DAN KETERTIBAN KOTA	INDEKS KETENTRA MAN DAN KETERTIB AN	0,5601	0,8000		0,8267		0,8575		0,8675		0,8794		0,8794		
92	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	N/A	60%	745.000.0 00	62%	777.744.7 18	64%	893.838.6 60	66%	987.922.6 58	68%	1.100.597. 826	68%	4.505.103.8 62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
93	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik	N/A	66,60%	1.554.997. 960	100%	1.623.344. 229	100%	1.865.660. 796	100%	2.062.037. 204	100%	2.297.217. 953	100%	9.403.258.1 42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
95	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT A N	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyaraka tan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	N/A	83%	970.000.0 00	84%	1.012.634. 063	85%	1.163.789. 933	89%	1.286.288. 561	89%	1.432.993. 143	89%	5.865.705.7 00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
95	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN	N/A	80%	600.000.0 00	86%	626.371.5 85	92%	719.870.0 62	95%	795.642.4 09	98%	886.387.5 11	98%	3.628.271.5 67	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
96	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring	64%	80%	1.250.000. 000	83%	1.304.940. 803	88%	1.499.729. 295	88%	1.657.588. 352	89%	1.846.640. 648	89%	7.558.899.0 98	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	MISI 5: MENGEMBANGK A N EKONOMI KERAKYATAN YANG KREATIF															
	TUJUAN: MENINGKATKAN PEMERATAAN EKONOMI LOKAL DAN	INDEKS GINI	0,311	0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		0,300		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PENDAPATAN MASYARAKAT MELALUI EKONOMI INKLUSIF															
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	PERSENTA SE PERTUMBU HAN UMKM	3,09%	3,14%		3,17%		3,19%		3,33%		3,45%		3,45%		
97	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	5,23%	5,44%	0	5,65%	50.000.00 0	5,86%	100.000.0 00	6,07%	100.000.0 00	6,28%	100.000.0 00	6,28%	350.000.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
98	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Melaksana kan RAT	18,20%	19,87%	268.125.7 00	20,92%	268.125.7 00	21,97 %	350.000.0 00	23,01%	350.000.0 00	24,06%	350.000.0 00	24,06%	1.586.251.4 00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
99	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN	Persentase Koperasi yang Meningkat	N/A	50,00%	0	51,85%	50.000.00 0	53,57 %	100.000.0 00	55,17%	150.000.0 00	56,67%	150.000.0 00	56,67%	450.000.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	KSP/USP KOPERASI	Status Kesehatanny a														Kecil, Menengah dan Perindustrian
10 0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya	19,67%	25,10%	0	30,68%	100.000.0 00	37,66 %	150.000.0 00	46,03%	250.000.0 00	55,09%	250.000.0 00	55,09%	750.000.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)	0	0	0	32,78%	1.000.000. 000	41,35 %	1.000.000. 000	50,07%	1.000.000. 000	59,34%	1.000.000. 000	59,34%	4.000.000.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
10 1	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	N/A	3,35%	0	5,02%	50.000.00 0	7,53%	100.000.0 00	10,88%	250.000.0 00	15,06%	250.000.0 00	15,06%	650.000.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
10 2	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	34,75%	81,68%	1.330.200. 000	83,32%	1.330.200. 000	84,98 %	1.450.000. 000	86,68%	1.450.000. 000	88,41%	1.450.000. 000	88,41%	7.010.400.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
10 3	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omsetnya	5,17%	5,21%	2.125.400. 000	5,25%	2.136.326. 051	5,28%	2.800.000. 000	5,32%	3.200.000. 000	5,36%	3.200.000. 000	5,36%	13.461.726. 051	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
10 4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	0	1,10%	3.477.570. 900	1,31%	3.127.570. 900	1,62%	4.111.597. 136	2,12%	4.942.846. 057	2,60%	6.710.699. 926	2,60%	22.370.284. 919	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (Sumber Dana: DAK/Bankeu)	0	0,00%	0	1,31%	22.100.00 0.000	1,62%	22.100.00 0.000	2,12%	22.100.00 0.000	2,60%	22.100.00 0.000	2,60%	88.400.000. 000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
10 5	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	2,88%	12,01%	115.000.0 00	12,96%	115.000.0 00	13,89 %	115.000.0 00	14,80%	120.750.0 00	15,69%	200.000.0 00	15,69%	665.750.00 0	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
10 6	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	22,06%	45,45%	210.000.0 00	58,33%	210.000.0 00	61,54 %	210.000.0 00	64,29%	220.500.0 00	66,67%	300.000.0 00	66,67%	1.150.500.0 00	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	TINGKAT PENGANGG URAN TERBUKA (TPT)	9	9		8,46		8,22		7,98		7,74		7,74		
10 7	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	N/A	3,2%	400.000.0 00	3,3%	115.000.0 00	3,4%	135.440.1 00	3,5%	143.088.8 36	3,6%	160.120.2 72	3,6%	953.649.20 8	Dinas Ketenagakerj aan
10 8	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	54%	54,00%	1.150.000. 000	55,00%	1.094.000. 000	56,00 %	1.257.334. 200	57,00%	1.389.731. 491	58,00%	1.548.299. 854	58,00%	6.439.365.5 45	Dinas Ketenagakerj aan
10 9	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	23%	23,00%	490.000.0 00	23,50%	500.731.0 00	23,60 %	572.219.5 38	23,70%	632.735.7 56	23,80%	704.225.9 05	23,80%	2.899.912.1 99	Dinas Ketenagakerj aan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
110	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	68,10%	69,00%	515.000.000	70,40%	537.608.500	72,00 %	617.873.449	73,00%	682.935.523	75,00%	760.858.466	75,00%	3.114.275.938	Dinas Ketenagakerjaan
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN USAHA MIKRO DAERAH PENURUNAN TINGAKT PENGANGGURAN DAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN	TINGKAT KEMISKINAN	2,57	2,42		2,39		2,38		2,37		2,36		2,36		
111	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan	60%	80%	875.000.000	86,66%	1.361.260.930	90%	1.589.821.335	93,33%	1.794.008.312	96,66%	1.872.357.238	96,66%	7.492.447.815	Dinas Sosial
112	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	75.06%	77.77%	1.183.000.000	78.94%	1.460.489.746	80.00 %	1.678.497.027	80.95%	1.855.172.882	81.81%	2.066.760.213	81.81%	8.243.919.868	Dinas Sosial

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		yang terpenuhi														
11 3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	80.77%	82.92%	1.469.000. 000	85,36%	1.533.566. 431	87.80 %	1.762.481. 868	90.24%	1.947.997. 831	92.68%	2.170.172. 090	92.68%	8.883.218.2 20	Dinas Sosial
11 4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	80,00%	81,00%	650.000.0 00	82,00%	1.032.000. 000	83,00 %	1.101.000. 000	85,00%	1.240.000. 000	85,00%	1.030.000. 161	85,00%	5.053.000.1 61	Dinas Sosial
	TUJUAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI	PERTUMBU HAN EKONOMI	-0,69%	4,10%		4,45%		4,80%		5,15%		5,5,%		5,5,%		
	SASARAN: MENINGKATNYA NILAI REALISASI	NILAI REALISASI INVESTASI (DALAM	3,018	3,330		3,530		3,780		4,080		4,440		4,440		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	INVESTASI DAERAH	TRILIUN RUPIAH)														
11 5	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	N/A	5,0%	300.000.0 00	5%	315.000.0 00	5%	425.250.0 00	5%	574.087.5 00	5%	775.018.0 00	25%	2.389.355.5 00	Dinas Penanamam Modal dan Perijinan Terpadu
11 6	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	30,0%	80,0%	650.000.0 00	85%	662.676.0 00	90%	915.409.0 00	95%	1.024.416. 000	100%	1.096.987. 000	100%	4.349.488.0 00	Dinas Penanamam Modal dan Perijinan Terpadu
11 7	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottleneck ing) yang difasilitasi Permasalah an Penanaman Modalnya	N/A	100%	400.000.0 00	100%	400.000.0 00	100%	540.000.0 00	100%	729.000.0 00	100%	984.150.0 00	100%	3.053.150.0 00	Dinas Penanamam Modal dan Perijinan Terpadu
11 8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif	83,45%	84,0%	500.000.0 00	85%	525.000.0 00	86%	708.750.0 00	87%	956.812.5 00	88%	1.291.696. 000	88%	3.982.258.5 00	Dinas Penanamam Modal dan Perijinan Terpadu

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	SASARAN: MENINGKATNYA KETAHANAN PANGAN	SKOR POLA PANGAN HARAPAN	87	87		87		88		89		90		90		
11 9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Infrastruktur yang Tersedia	N/A	20%	0	25%	50.000.00 0	30%	60.000.00 0	35%	150.000.0 00	40%	200.000.0 00	40%	460.000.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 0	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	N/A	0.024%	325.000.0 00	0.053%	341.250.0 00	0.081 %	450.000.0 00	0.110%	605.000.0 00	0.143%	815.000.0 00	0.143%	2.536.250.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	N/A	50%	0	55%	45.000.00 0	60%	50.000.00 0	65%	65.000.00 0	70%	75.000.00 0	70%	235.000.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	100%	88%	250.000.0 00	89%	250.000.0 00	89%	275.000.0 00	90%	300.000.0 00	90%	350.000.0 00	90%	1.425.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4000	4200	475.000.0 00	4300	375.000.0 00	4400	550.000.0 00	4500	825.000.0 00	4600	1.000.000. 000	22000	3.225.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
12 4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	275	289	1.125.000. 000	297	1.325.000. 000	304	1.430.000. 000	312	1.645.000. 000	319	1.375.000. 000	1,521	6.900.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 5	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	34,50%	40%	375.000.0 00	45%	400.000.0 00	50%	450.000.0 00	55%	480.000.0 00	60%	650.000.0 00	60%	2.355.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 6	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	10%	15%	700.000.0 00	20%	950.000.0 00	25%	1.000.000. 000	30%	1.200.000. 000	35%	1.350.000. 000	35%	5.200.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 7	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	75%	75%	485.000.0 00	75%	1.200.000. 000	85%	1.130.000. 000	85%	1.200.000. 000	90%	1.500.000. 000	90%	5.515.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 8	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	60%	65%	570.000.0 00	70%	600.000.0 00	75%	700.000.0 00	80%	750.000.0 00	85%	900.000.0 00	85%	3.520.000.0 00	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
12 9	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulan gan Bencana	40%	40%	0	45%	30.000.00 0	50%	50.000.00 0	55%	75.000.00 0	60%	100.000.0 00	60%	255.000.00 0	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pertanian (%)														
130	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)	50%	50%	0	55%	25.000.000	60%	35.000.000	65%	45.000.000	70%	60.000.000	70%	165.000.000	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
	SASARAN: MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN LOKAL DAN INTERNASIONAL	ANGKA KUNJUNGAN WISATAWAN (DALAM JUTA ORANG)	1,08	1,20		1,50		1,90		2,50		3,40		3,40		
131	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	10,00%	3,00%	6.100.000.000	3,00%	8.000.000.000	4,00%	9.194.000.000	6,00%	10.200.000.000	6,00%	11.363.000.000	6,00%	44.857.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
132	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	N/A	17,00%	4.750.000.000	20,00%	5.000.000.000	21,00 %	5.750.000.000	24,00%	6.360.000.000	26,00%	7.085.000.000	26,00%	28.945.000.000	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PERTUMBUHAN PELAKU EKONOMI KREATIF	N/A	2,20%		2,42%		2,66%		2,93%		3,22%		3,22%		

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
13 3	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualny a	N/A	12%	300.000.0 00	18%	850.000.0 00	24%	974.000.0 00	29%	1.095.000. 000	35%	1.217.000. 000	35,00%	4.436.000.0 00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
13 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	N/A	8%	800.000.0 00	10%	850.000.0 00	12%	976.800.0 00	14%	1.080.000. 000	16%	1.203.000. 000	16,00%	4.909.800.0 00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	SASARAN: MENINGKATNYA PERTUMBUHAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH	PERSENTA SE PERTUMBU HAN PDRB SEKTOR PERDAGAN GAN	-0,56%	3,50%		3,97%		4%		4,25%		5,00%		5,00%		
13 5	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	50%	50%	355.000.0 00	60,00%	372.750.0 00	65,00 %	300.000.0 00	70,00%	300.000.0 00	75,00%	300.000.0 00	75,00%	1.627.750.0 00	Dinas Perdagangan
13 6	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	80%	80%	11.499.99 6.400	80,00%	12.649.99 6.040	87,00 %	15.812.49 5.050	87,00%	19.716.65 3.210	93,00%	21.499.05 6.151	93,00%	81.178.196. 851	Dinas Perdagangan

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022		2023		2024		2025		2026				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
13 7	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	6%	5,80%	570.000.0 00	5,60%	598.500.0 00	5,40%	748.125.0 00	5,20%	860.343.7 50	5,00%	903.360.0 00	5,00%	3.680.328.7 50	Dinas Perdagangan
13 8	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	1020 juta dollar	1175 juta dollar	680.000.0 00	1350 juta dollar	113.877.0 00	1550 juta dollar	232.809.0 00	1785 juta dollar	363.168.0 00	2050 juta dollar	407.693.0 00	2050 juta dollar	1.797.547.0 00	Dinas Perdagangan
13 9	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	32%	70%	520.000.0 00	71,00%	546.000.0 00	73,00 %	682.500.0 00	74,00%	750.750.0 00	76,00%	788.287.5 00	76,00%	3.287.537.5 00	Dinas Perdagangan
14 0	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkat Omsetnya	50%	60%	120.000.0 00	60,00%	150.000.0 00	70,00 %	275.000.0 00	70,00%	300.000.0 00	80,00%	325.000.0 00	80,00%	1.170.000.0 00	Dinas Perdagangan

Sumber: RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Balikpapan kemudian dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025. Penjabaran tersebut dilakukan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja perangkat daerah yang memuat sasaran, indikator, target, serta program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan menjadi dasar pengukuran kinerja tahunan perangkat daerah dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah dan pengukuran kinerja pada tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 menetapkan sasaran, indikator, target, serta program dan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kinerja perangkat daerah pada Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.14 Perjanjian Kinerja Murni Balikpapan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,89
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30,81
		Indeks SPBE	Poin	3,85
		Maturitas SPIP	Level	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,8
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,95
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7641
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8479
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,29

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4965
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,98
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	78,77
		Persentase Permukiman Layak Huni	%	99,48
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,64
		Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan	%	96
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	101
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8675
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	21
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,09
		Tingkat Kemiskinan	%	2,20
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	24,50
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,68
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	39
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,80

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Seiring berjalannya proses perencanaan dan penyelarasan arah pembangunan jangka menengah pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan sasaran, indikator, target, serta program dan kegiatan pembangunan dengan

kebutuhan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, serta untuk menjaga konsistensi perencanaan selama masa transisi perencanaan jangka menengah.

Di samping itu, tahun 2025 juga merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut menjadikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 perlu memperhatikan kedua dokumen RPJMD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan dan sekaligus menyiapkan arah pembangunan jangka menengah yang baru.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.15 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69,06	70,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,068	82,89
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	26,90	30,81
		Indeks SPBE	Poin	3,96	4
		Maturitas SPIP	Level	3	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,68	0,8
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,93	84,95
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7622	0,7641
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8595	0,8605
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	15,33	16,29
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209	0,209
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4956	0,4965

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,34	90,98
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	81,62	82
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,4	71,64
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	101,43	101
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,85	0,8675
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	19,23	21
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,22	6,09
		Tingkat Kemiskinan	%	2,23	2,20
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	25,705	24,50
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,35	89
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,67	2,68
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	38,57	39
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,77

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Selain Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan juga menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai instrumen penyelarasan arah pembangunan jangka menengah

berikutnya. Dokumen tersebut disusun untuk memastikan keterpaduan antara sasaran, indikator, dan target pembangunan tahunan dengan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025–2029 selama masa transisi perencanaan.

Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.16 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	3,23	4,5
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	2,230	2,15
		<i>Indeks Gini</i>	Indeks	0,324	0,312
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	214,11	223,74
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,75	7,87
		Tingkat Inflasi	%	1,1	2,50±1
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11	7,12
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	64,5	66,1
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,22	6,12
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	N/A	78,93
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	70,61	73,01
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,620	50,62
2	<i>Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim</i>	<i>Penurunan intensitas emisi GRK</i>	%	12,67	24,84
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,4	71,64

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	101,43	99,43
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	<i>4,1</i>	<i>4,08</i>
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,62	83,09
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,178	0,176
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	<i>78,06</i>	<i>78,3</i>
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	69,06	70,02
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,068	82,89
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	75,08	77,5
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,93	84,95
		Indeks SPBE	Indeks	3,96	3,85
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

Setelah penetapan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan didukung oleh alokasi anggaran sebagai instrumen pembiayaan untuk mencapai target kinerja tahunan.

Adapun program, perangkat daerah pengampu beserta alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kinerja sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1.17 Program dan Perangkat Daerah Pengampu beserta Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
I	PROGRAM PRIORITAS		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	488.840.822.223,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	357.410.965,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.146.255.050,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	156.747.721,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.489.980.615,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	456.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	66.130.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.257.093.832,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.639.307.924,00	DINAS KESEHATAN
10	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.547.928.000,00	DINAS KESEHATAN
11	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.335.318.278,00	DINAS KESEHATAN
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.903.425.555,00	DINAS KESEHATAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	38.316.074.839,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.681.459.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
15	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	26.656.438.400,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.588.963.697,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
17	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	157.616.069.484,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	199.872.924.354,16	DINAS PEKERJAAN UMUM
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	576.359.722.035,84	DINAS PEKERJAAN UMUM
20	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.672.499.299,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	10.353.809.552,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.226.951.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
23	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	4.515.548.500,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
24	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	25.059.607.825,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
25	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.288.077.103,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
26	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	4.259.329.968,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.239.513.460,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.416.945.070,00	DINAS SOSIAL
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.030.043.110,00	DINAS SOSIAL
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.095.255.980,00	DINAS SOSIAL
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	562.431.725,00	DINAS SOSIAL
32	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	792.855.210,00	DINAS SOSIAL
33	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	200.801.756,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.281.603.745,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	579.886.383,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
36	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.714.661.034,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
37	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	391.437.662,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
38	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	675.988.885,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
39	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	421.246.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
40	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	116.718.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.819.189.727,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.029.434.321,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
43	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	281.659.077,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
44	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	9.111.490.487,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
45	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	772.426.915,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
46	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.135.395.534,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
47	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.268.138.850,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
48	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	13.573.020.223,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
49	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.561.535.422,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
50	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	5.227.871.588,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
51	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	234.231.300,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	495.046.445,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.959.618.626,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
54	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	72.831.523.387,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	204.014.830,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564.668.149,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
57	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.821.304.099,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
58	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	658.605.023,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
59	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	136.008.518,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
60	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	106.081.131.204,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
61	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.037.286.850,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
62	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.187.539.125,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	254.056.714.200,00	DINAS PERHUBUNGAN
64	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	4.352.237.500,00	DINAS PERHUBUNGAN
65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	22.783.736.680,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
66	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	13.991.946.320,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	685.631.022,50	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	328.433.858,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
69	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	289.431.700,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
70	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	464.324.057,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	508.043.695,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	15.221.263.028,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
73	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	5.982.090.010,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
74	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	8.287.070.431,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
75	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	55.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
76	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	387.217.640,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
77	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	478.112.920,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
78	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	631.490.471,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
79	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.442.129.972,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
80	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	231.272.562,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
81	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	530.819.476,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	7.930.347.977,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	22.898.166.484,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	633.530.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
85	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.455.855.658,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
86	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.933.601.551,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
87	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	915.260.000,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
88	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	863.881.250,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
89	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.577.707.629,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
90	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	419.021.841,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
91	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	58.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
92	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
93	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	756.737.347,50	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
94	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	51.148.050,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
95	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	282.573.750,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
96	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.434.172.803,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	563.771.580,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
98	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	970.485.473,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
99	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.081.266.125,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
100	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	7.515.443,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
101	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	227.076.610,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
102	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	19.371.250,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
103	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	975.602.300,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
104	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	123.348.700,00	DINAS PERDAGANGAN
105	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	42.054.008.726,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
106	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	444.930.855,00	DINAS PERDAGANGAN
107	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	252.842.100,00	DINAS PERDAGANGAN
108	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	680.958.240,00	DINAS PERDAGANGAN
109	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	189.515.325,00	DINAS PERDAGANGAN
110	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.458.243.982,00	SEKRETARIAT DAERAH
111	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.300.138.263,00	SEKRETARIAT DAERAH
112	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	68.350.039.072,00	SEKRETARIAT DPRD
113	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.865.088.215,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
114	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.732.919.278,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
115	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.210.839.467,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
116	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	85.347.611.632,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
117	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.964.975.143,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
118	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.619.100.755,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
119	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.625.352.113,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	889.911.105,00	INSPEKTORAT
121	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.157.922.500,00	INSPEKTORAT
122	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	404.230.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
123	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.370.087.704,81	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
124	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	769.589.383,59	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
125	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	808.008.775,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.745.042.111,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
127	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	901.069.775,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
128	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	598.941.600,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
129	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.805.525.948,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
130	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	286.850.681,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
131	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	539.315.000,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.709.173.973,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
133	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	792.594.160,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
134	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	758.856.920,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
135	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	23.917.949.411,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	652.463.618,00	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
137	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	774.570.015,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
138	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	13.193.466.181,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	607.028.081,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
140	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	7.168.415.032,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
141	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.013.834.715,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
142	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	847.331.680,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
143	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.097.456.690,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
144	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	6.113.927.225,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
II	PROGRAM PENUNJANG		
145	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	517.626.221.773,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
146	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	363.949.889.749,00	DINAS KESEHATAN
147	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.244.821.078,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
148	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.968.316.984,00	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.598.455.474,40	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.953.093.892,30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
151	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.463.341.694,00	DINAS SOSIAL
152	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.102.376.399,00	DINAS KETENAGAKERJAAN
153	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.872.471.898,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
154	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.085.391.532,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
155	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.341.344.754,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.091.869.025,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
157	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.173.033.589,00	DINAS PERHUBUNGAN
158	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.558.199.282,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.009.647.733,00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
160	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.931.562.879,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
161	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.448.101.580,00	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.182.101.818,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
163	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.396.277.018,50	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
164	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.570.042.546,00	DINAS PERDAGANGAN
165	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143.299.091.863,00	SEKRETARIAT DAERAH
166	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.241.968.079,00	SEKRETARIAT DPRD
167	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.724.302.050,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
168	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.784.022.594,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
169	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.208.646.727,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
170	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.360.478.654,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PROGRAM	ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH
171	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.920.445.359,00	INSPEKTORAT
172	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.324.566.414,70	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT
173	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.657.346.743,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH
174	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.280.583.075,00	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
175	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.536.798.796,00	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA
176	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.681.278.973,50	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN
177	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.933.580.543,00	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR
178	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.668.265.168,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL		4.755.014.992.632,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Tabel 1.17 menyajikan program pembangunan daerah beserta perangkat daerah pengampu dan alokasi anggaran yang mendukung pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025. Program-program tersebut merupakan instrumen utama pelaksanaan pembangunan daerah yang secara langsung maupun tidak langsung

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.

Secara umum, dukungan pencapaian kinerja daerah dilaksanakan melalui pelaksanaan **program prioritas** yang berfokus pada pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan infrastruktur, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, ketenteraman dan ketertiban umum, sosial, ketenagakerjaan, serta penguatan perekonomian daerah. Selain itu, pencapaian sasaran kinerja juga didukung oleh **program penunjang urusan pemerintahan daerah** yang berperan dalam memastikan efektivitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Total alokasi anggaran sebesar **Rp 4.755.014.992.631,80** menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengarahkan sumber daya pembangunan secara terintegrasi guna mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah Tahun 2025. Sinergi antar perangkat daerah melalui pelaksanaan berbagai program tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian kinerja pembangunan daerah.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai kontribusi pelaksanaan pembangunan terhadap pencapaian sasaran kinerja daerah, selanjutnya diuraikan kegiatan-kegiatan utama beserta alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan masing-masing program Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 1.18 Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Mendukung Pencapaian Sasaran Kinerja Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	206.744.263.844
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150.621.203.837
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42.205.496.562
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.036.374.480
5	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	357.410.965
6	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.146.255.050
7	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	79.103.910

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
8	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	77.643.811
9	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	583.807.000
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	508.130.800.962
11	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	142.000.000
12	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	344.490.000
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.452.061.276
14	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.800.000
15	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.975.044.135
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.795.218.400
17	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	871.500.000
18	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.418.480.615
19	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
20	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	456.500.000
21	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.130.000
22	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	167.000.000
23	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.090.093.832
24	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.877.024.000
25	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13.297.208.500
26	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.366.863.500
27	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	255.387.500
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	212.085.000
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.038.635.000
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	147.280.000
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39.000.000
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	0,00
DINAS KESEHATAN		
33	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.381.566.050
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.353.723.283
35	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	612.636.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
36	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644.617.245
37	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	217.964.000
38	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200.192.000
39	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.129.772.000
40	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	274.190.600
41	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	191.245.475
42	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	619.036.203
43	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.200.000
44	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75.000.000
45	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150.646.000
46	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000
47	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.168.225
48	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	301.745.730
49	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.575.000
50	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.573.236.179
51	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.592.811.470
52	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.665.164.600
53	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.795.150.000
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.773.991.500

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
UPTD PUSKESMAS MANGGAR		
55	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.732.512.470
56	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.234.000
57	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.250.000.000
UPTD PUSKESMAS TERITIP		
58	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.445.106.595
59	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.934.000
60	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.100.000.000
UPTD PUSKESMAS LAMARU		
61	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.231.946.300
62	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.765.100
63	Peningkatan Pelayanan BLUD	860.000.000
UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU		
64	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.047.509.940
65	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.640.000
66	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.400.000.000
UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU		
67	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.911.347.055
68	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.400.000
69	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.000.000.000
UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA		
70	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.004.956.177
71	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.252.000
72	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.750.000.000
UPTD PUSKESMAS DAMAI		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
73	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.893.790.755
74	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.334.000
75	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.755.000.000
UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR		
76	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.327.268.320
77	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.022.000
78	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.175.000.000
UPTD PUSKESMAS PRAPATAN		
79	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.224.093.320
80	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.751.000
81	Peningkatan Pelayanan BLUD	925.000.000
UPTD PUSKESMAS TELAGASARI		
82	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.173.309.770
83	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.153.000
84	Peningkatan Pelayanan BLUD	626.000.000
UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR		
85	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.310.683.285
86	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.240.000
87	Peningkatan Pelayanan BLUD	750.000.000
UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU		
88	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.199.848.000
89	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.706.000
90	Peningkatan Pelayanan BLUD	625.141.000
UPTD PUSKESMAS MEKARSARI		
91	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.779.593.115

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
92	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.377.000
93	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.725.000.000
UPTD PUSKESMAS KARANG JATI		
94	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.421.253.116
95	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.060.000
96	Peningkatan Pelayanan BLUD	569.320.000
UPTD PUSKESMAS KARANG REJO		
97	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.628.915.884
98	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.830.000
99	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.267.500.000
UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO		
100	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	934.267.370
101	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.560.000
102	Peningkatan Pelayanan BLUD	810.000.000
UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK		
103	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.371.202.040
104	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.670.000
105	Peningkatan Pelayanan BLUD	910.000.000
UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA		
106	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.921.374.585
107	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.010.000
108	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.250.000.000
UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR		
109	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.609.927.850
110	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.168.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
111	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.200.000.000
UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH		
112	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.465.120.465
113	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.253.500
114	Peningkatan Pelayanan BLUD	900.000.000
UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG		
115	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.907.374.515
116	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.876.000
117	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.400.000.000
UPTD PUSKESMAS KARIANGAU		
118	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.840.955.437
119	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.527.000
120	Peningkatan Pelayanan BLUD	675.000.000
UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO		
121	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.354.323.900
122	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.262.000
123	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.092.000.000
UPTD PUSKESMAS BARU ILIR		
124	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.472.667.600
125	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.714.000
126	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.000.000.000
UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH		
127	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.557.053.376
128	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.307.000
129	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.600.000.000
UPTD PUSKESMAS BARU ULU		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
130	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.749.205.764
131	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.466.000
132	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.200.000.000
UPTD PUSKESMAS MARGASARI		
133	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.291.769.254
134	Peningkatan Pelayanan BLUD	700.000.000
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		
135	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.088.013.200
136	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.300.000.000
UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN		
137	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	792.341.000
UPTD Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		
138	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.739.730.456
UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
139	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000.000
140	Peningkatan Pelayanan BLUD	102.606.000.000
UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU		
141	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.387.404.432
142	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.031.900.000
143	Peningkatan Pelayanan BLUD	12.000.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM		
144	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.463.205.584
145	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.257.533.255
146	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.681.459.100
147	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	26.656.438.400
148	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.588.963.697

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
149	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	141.703.935.485
150	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	199.872.924.354
151	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	567.961.506.636
152	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	3.412.499.299
153	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000
154	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.750.000
155	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.363.278.732
156	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.261.047.325
157	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.975.677.753
158	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.279.608.000
159	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.809.144.268
160	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.367.315.000
UPTD DRAINASE DAN BOZEM		
161	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.595.336.000
162	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.912.133.999
UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN		
163	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.398.215.400
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		
164	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	371.900.000
165	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	171.458.500
166	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	445.075.000
167	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	2.671.381.075
168	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	30.000.000
169	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	402.500.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
170	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	89.451.500
171	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.735.000.000
172	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.515.548.500
173	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	25.059.607.825
174	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.868.017
175	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.669.114.206
176	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	826.800.000
177	Administrasi Umum Perangkat Daerah	990.190.251
178	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.159.974.375
179	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.714.250
180	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.655.885
UPTD RUSUNAWA		
181	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6.663.994.977
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
182	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	186.025.470
183	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	383.746.850
184	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	138.057.297
185	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	580.247.486
186	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.860.214.445
187	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	99.351.895
188	Investigasi Kejadian Kebakaran	0,00
189	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	0,00
190	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	299.763.628
191	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	96.207.155
192	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.773.372.708
193	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	836.560.193
194	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.268.118.818

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
195	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.652.400
196	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.244.897.938
197	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.329.646.262
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
198	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.400.474.880
199	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	804.258.350
200	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	34.780.230
201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.549.950
202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.617.936.000
203	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	903.387.020
204	Administrasi Umum Perangkat Daerah	780.119.289
205	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.410.835
206	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	905.069.580
207	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.576.621.218
DINAS SOSIAL		
208	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	597.811.070
209	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	819.134.000
210	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.784.203.110
211	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.245.840.000
212	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.095.255.980
213	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	284.081.765
214	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	278.349.960
215	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	792.855.210
216	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.026.385.000
217	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	753.500.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
218	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.265.668.694
219	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	710.500.000
220	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.729.996.000
221	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	977.292.000
DINAS KETENAGAKERJAAN		
222	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	200.801.756
223	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.155.351.846
224	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	66.056.707
225	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	60.195.192
226	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	249.661.673
227	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	290.373.175
228	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	39.851.535
229	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.714.661.034
230	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.780.848.493
231	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	485.792.000
232	Administrasi Umum Perangkat Daerah	722.768.312
233	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	437.456.094
234	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.375.500
235	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.136.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		
236	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	165.672.662
237	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	225.765.000
238	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	274.418.000
239	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	287.290.000
240	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	114.280.885

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
241	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	421.246.140
242	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	116.718.400
243	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	262.991.108
244	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1.556.198.619
245	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.025.522.610
246	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	747.828.668
247	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.083.043
248	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.189.640
249	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.721.929.544
250	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.186.720.293
251	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	815.936.000
252	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443.513.921
253	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.182.500
254	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	281.659.077
255	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.111.490.487
256	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	286.784.300
257	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	485.642.615

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
258	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	307.658.206
259	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	617.993.172
260	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	890.634.831
261	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	319.109.325
262	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.434.938.850
263	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.833.200.000
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG		
264	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	13.573.020.223
265	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.441.696.400
266	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.408.395.235
267	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	711.443.787
268	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.227.871.588
269	Penerbitan Izin Membuka Tanah	234.231.300
270	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	85.990.000
271	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.265.014.960
272	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	872.242.900
273	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.178.998.397
274	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	343.344.225
275	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.744.500
276	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.056.550
DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
277	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	140.593.633

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
278	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	354.452.812
279	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.113.942.773
280	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.077.885.481
281	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	767.790.372
282	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	64.578.246.884
283	Penyimpanan sementara Limbah B3	204.014.830
284	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	564.668.149
285	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.821.304.099
286	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658.605.023
287	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	136.008.518
288	Pengelolaan Sampah	89.705.295.910
289	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.002.090
290	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.379.841.477
291	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1.652.078.444
292	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000
293	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.706.016.550
294	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.190.945.300
295	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.918.759.743
296	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.211.701.150
UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN		
297	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	8.253.276.503
UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN		
298	Pengelolaan Sampah	16.375.835.294
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
299	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1.037.286.850
300	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	674.375.250

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
301	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	513.163.875
302	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.768.875
303	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.973.192.000
304	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	930.454.000
305	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.054.876.010
306	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	495.350.000
307	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	853.009.640
308	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	769.218.500
DINAS PERHUBUNGAN		
309	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	231.127.536.086
310	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1.690.000.000
311	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	665.100.000
312	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3.548.313.214
313	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.330.563.045
314	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20.052.950
315	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.430.300
316	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	4.352.237.500
317	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
318	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.394.023.542
319	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.449.634.600
320	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.245.373.252
321	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.815.267.651
322	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.329.567.800
323	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.157.052.437
324	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.782.114.307
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
325	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6.127.473.547
UPTD PENGELOLAAN PARKIR		
326	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	8.533.245.058
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
327	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.783.736.680
328	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
329	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.981.946.320
330	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.706.290.000
331	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	968.574.340
332	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.535.225.912
333	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	381.800.000
334	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.407.580
335	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.901.450
336	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	685.631.023
337	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	328.433.858
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		
338	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	289.431.700
339	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	464.324.057
340	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	508.043.695
341	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	15.221.263.028
342	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	5.982.090.010
343	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.434.751.000
344	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	323.150.000
345	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.409.733

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
346	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.600.000
347	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.249.000
348	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.521.488.000
349	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	6.283.185.025
350	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	55.000.000
351	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	387.217.640
UPTD Sentra Industri Kecil Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian		
352	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.003.885.406
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
353	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	478.112.920
354	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	631.490.471
355	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.442.129.972
356	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	231.272.562
357	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	530.819.476
358	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.574.475
359	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.934.264.000
360	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.463.431.265
361	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.600.000
362	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.676.325.500
363	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.465.367.639
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA		
364	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	4.211.783.537

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
365	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.718.564.440
366	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.318.960.802
367	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.989.747.890
368	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.895.386.000
369	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.694.071.792
370	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	633.530.000
371	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.720.381.000
372	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.497.000
373	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.876.593.994
374	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	285.999.996
375	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.369.838.730
376	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.790.860
377	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.445.416.525
378	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	79.777.500
379	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5.933.601.551
380	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	915.260.000
381	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	863.881.250
UPTD Pengelola Kawasan Wisata Pantai Manggar Segara Sari Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata		
382	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.930.661.633
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP		
383	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.347.273.429
384	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.434.200
385	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.923.251.000
386	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	516.000.000
387	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.095.136.300
388	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.107.500

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
389	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.542.782.255
390	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	805.824.763
391	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	308.382.515
392	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	42.539.550
393	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	68.099.776
394	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	17.000.000
395	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	10.000.000
396	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	22.000.000
397	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	9.600.000
398	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	12.000.000
DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN		
399	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	569.513.160
400	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	187.224.188
401	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	51.148.050
402	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	282.573.750
403	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.826.137.400
404	Administrasi Umum Perangkat Daerah	749.401.836
405	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	341.901.983
406	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.123.343.800
407	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.355.492.000
408	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	259.814.300
409	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	303.957.280
410	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	205.389.485
411	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.228.783.318
412	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	894.975.245

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
413	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.510.228
414	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.161.266.125
415	Pembangunan Prasarana Pertanian	920.000.000
416	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	482.439.720
417	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	259.075.723
418	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	227.076.610
419	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.371.250
420	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	975.602.300
DINAS PERDAGANGAN		
421	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	50.959.700
422	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	28.359.500
423	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	44.029.500
424	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	30.885.433.500
425	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.661.685.673
426	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	219.270.855
427	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	225.660.000
428	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	252.842.100
429	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	246.416.240
430	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	189.515.325
431	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.040.000
432	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.940.731.000
433	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	618.722.000
434	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.211.081.125
435	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	454.432.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
436	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.705.596.671
437	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.586.439.750
UPTD Pasar Wilayah I		
438	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	136.813.803
439	UPTD Pasar Wilayah II	129.971.300
440	UPTD Pasar Wilayah III	132.299.250
441	UPTD Pasar Wilayah IV	107.805.200
442	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	434.542.000
SEKRETARIAT DAERAH		
443	Administrasi Tata Pemerintahan	16.680.259.580
444	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18.850.867.379
445	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.763.947.320
446	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	12.163.169.703
447	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.012.510.715
448	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.158.512.382
449	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.129.115.166
450	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222.045.430
451	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.165.745.395
452	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	448.360.000
453	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.470.268.018
454	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.066.981.729
455	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.211.516.010
456	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.553.997.066
457	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.620.084.003
458	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.700.000.000
459	Penataan Organisasi	841.102.822
460	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.998.991.390
SEKRETARIAT DPRD		
461	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	9.850.000.000
462	Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.150.000.000
463	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	8.858.957.167
464	Peningkatan Kapasitas DPRD	21.916.255.150
465	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	7.551.381.200

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
466	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1.029.832.670
467	Pembahasan Kerja Sama Daerah	412.900.000
468	Fasilitasi Tugas DPRD	10.580.712.885
469	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.915.500
470	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.803.787.150
471	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.767.218.400
472	Administrasi Umum Perangkat Daerah	25.636.911.668
473	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	310.499.850
474	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.189.474.307
475	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.200.000.000
476	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	41.837.677.700
477	Layanan Administrasi DPRD	11.452.483.504
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
478	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.057.631.540
479	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.179.729.950
480	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	627.726.725
481	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0,00
482	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	0,00
483	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0,00
484	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
485	Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.000.000
486	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.996.157.000
487	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.165.000.000
488	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.281.362.700
489	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	468.000.000
490	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	476.353.500
491	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.428.850
492	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.082.174.192

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
493	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	118.562.200
494	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.375.000.000
495	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.157.182.886
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
496	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.609.871.106
497	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.901.744.370
498	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.513.332.930
499	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	15.970.476.886
500	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	2.215.414.175
501	Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.291.475.095
502	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.432.620
503	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.440.415.030
504	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
505	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	60.297.635
506	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	683.857.955
507	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.772.946.704
508	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	876.407.850
509	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	593.260.000
510	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.089.404.800
UPTD Pengelolaan dan Perawatan Gedung Pemerintah Badan Pengelola Keuangan Daerah		
511	Pengelolaan Barang Milik Daerah	77.056.136.537
BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
512	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.964.975.143
513	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	101.813.362
514	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.892.551.451
515	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.665.580.108
516	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	867.600.000
517	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	437.816.106

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
518	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.243.285.700
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
519	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.229.540.625
520	Mutasi dan Promosi ASN	515.364.720
521	Pengembangan Kompetensi ASN	1.629.900.105
522	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	244.295.305
523	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00
524	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.143.421.000
525	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	881.588.000
526	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.436.729.104
527	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	553.200.000
528	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.927.000
529	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.613.550
530	Pengembangan Kompetensi Teknis	3.824.392.969
531	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.800.959.144
INSPEKTORAT		
532	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	687.221.105
533	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	202.690.000
534	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	178.350.000
535	Pendampingan dan Asistensi	1.979.572.500
536	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.598.843.000
537	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.357.167.570
538	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.229.526.315
539	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.244.631.486
540	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.727.088
541	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.472.549.900
KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT		
542	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	590.961.669
543	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	39.512.660

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
544	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	139.115.055
545	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.142.482.040
546	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.508.973.520
547	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	404.230.000
548	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.523.250
549	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.661.803.044
550	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.106.310.500
551	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.699.060.216
552	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	662.816.000
553	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.472.370.255
554	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.605.683.150
KELURAHAN BARU ILIR		
555	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.236.354.936
556	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.279.195.113
KELURAHAN BARU TENGAH		
557	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.060.931.685
558	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.096.348.315
KELURAHAN BARU ULU		
559	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.805.476.584
560	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.085.523.227
KELURAHAN MARGASARI		
561	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.179.990.639
562	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	699.067.647
KELURAHAN MARGO MULYO		
563	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.988.848.234
564	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	943.756.256
KELURAHAN KARIANGAU		
565	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.953.699.733
566	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	389.439.776
KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
567	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	506.406.590
568	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	323.893.290
569	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.769.895
570	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	138.181.270
571	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.073.660.910
572	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	808.008.775
573	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.698.521
574	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.945.930.114
575	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	710.030.439
576	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.427.860.916
577	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.600.000
578	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.109.791.053
579	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.112.435.700
KELURAHAN GUNUNG SARI ULU		
580	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.144.956.685
581	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	874.523.470
KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR		
582	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.467.983.520
583	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.407.915.155
KELURAHAN KARANG REJO		
584	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.505.383.316
585	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.715.624.750
KELURAHAN KARANG JATI		
586	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.108.355.080
587	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	727.068.280
KELURAHAN MEKAR SARI		
588	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.117.825.775
589	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	803.738.000
KELURAHAN SUMBER REJO		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
590	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.438.090.900
591	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.221.735.000
KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA		
592	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.591.100
593	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	48.734.040
594	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	73.525.541
595	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.000.000
596	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.554.116.050
597	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	598.941.600
598	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.242.585
599	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.795.915.769
600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	880.623.000
601	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.189.292.486
602	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	517.395.000
603	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.738.831.735
604	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.135.282.500
KELURAHAN KLANDASAN ULU		
605	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.956.930.030
606	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	889.993.989
KELURAHAN KLANDASAN ILIR		
607	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.980.591.600
608	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.323.983.000
KELURAHAN DAMAI		
609	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.702.108.827
610	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	833.665.790
KELURAHAN PRAPATAN		
611	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.200.487.027
612	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	842.326.000
KELURAHAN TELAGA SARI		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
613	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.406.386.795
614	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.014.936.840
KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA		
615	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	507.445.000
616	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	187.560.800
617	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	97.588.360
618	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	135.574.040
619	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	4.353.477.155
620	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	539.315.000
621	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.779.710
622	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.512.351.767
623	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	780.000.000
624	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.015.807.419
625	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	185.000.000
626	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.396.691.870
627	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.609.168.030
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU		
628	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.181.500.000
629	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	856.579.500
KELURAHAN KARANG JOANG		
630	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.934.994.687
631	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.503.912.115
KELURAHAN GRAHA INDAH		
632	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.526.581.771
633	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.706.927.090
KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA		
634	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.340.000.000
635	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.360.808.034
KELURAHAN MUARA RPAK		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
636	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.722.408.255
637	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.912.916.626
KELURAHAN BATU AMPAR		
638	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.394.474.700
639	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.779.020.000
KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN		
640	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	308.772.723
641	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	253.694.030
642	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	89.996.865
643	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	120.094.893
644	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	992.639.250
645	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	758.856.920
646	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.982.820
647	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.682.280.000
648	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	851.909.200
649	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.450.589.657
650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.025.579.775
651	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.431.626.141
652	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.229.311.381
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA		
653	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.080.000.000
654	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	966.786.000
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA		
655	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.483.836.565
656	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	808.863.625
KELURAHAN DAMAI BARU		
657	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.025.043.209
658	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	539.411.555
KELURAHAN SEPINGGAN BARU		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
659	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.527.900.000
660	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.510.932.500
KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA		
661	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.821.667.500
662	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.305.564.000
KELURAHAN SEPINGGAN		
663	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.089.197.560
664	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.619.057.651
KELURAHAN SUNGAI NANGKA		
665	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.952.841.060
666	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.074.114.043
KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR		
667	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	320.151.740
668	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	144.847.601
669	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	142.028.740
670	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	147.791.677
671	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.093.011.079
672	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	774.570.015
673	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000
674	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.463.740.500
675	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.166.438.490
676	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.128.415.203
677	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	252.404.800
678	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.941.910.450
679	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.950.671.100
KELURAHAN LAMARU		
680	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	968.499.434
681	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	752.687.045
KELURAHAN MANGGAR BARU		

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
682	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.354.824.180
683	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.084.216.460
KELURAHAN TERITIP		
684	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.475.696.706
685	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.005.080.000
KELURAHAN MANGGAR		
686	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.351.499.700
687	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.960.159.900
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
688	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.168.415.032
689	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.013.834.715
690	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	847.331.680
691	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	2.097.456.690
692	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6.113.927.225
693	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.990.000
694	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.640.380.196
695	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.444.000
696	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.308.574.366
697	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.000.000
698	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.135.596
699	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.305.741.010
TOTAL		4.755.014.992.632

Sumber: BKAD, 2025

Tabel 1.18 menunjukkan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi program pembangunan daerah yang dirancang untuk mendorong pencapaian target kinerja melalui pelaksanaan intervensi pembangunan pada berbagai urusan pemerintahan. Dukungan kegiatan diarahkan terutama pada pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan publik.

Selain kegiatan yang bersifat substantif, pencapaian sasaran kinerja juga didukung oleh kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang berperan dalam menjaga efektivitas pelaksanaan program, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pelaksanaan kegiatan oleh seluruh perangkat daerah mencerminkan adanya keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kota Balikpapan mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana hal tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan tahun 2025.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19 Program, kegiatan dan Sub kegiatan SPM Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru
2			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
3			Pembangunan Perpustakaan Sekolah
4			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
6			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
7			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
8			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
9			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
10			Pengadaan Perlengkapan Siswa
11			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
12			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
13			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
14			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
15			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
16			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
17			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
18			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
19			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
20			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
21		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
22			Penambahan Ruang Kelas Baru
23			Pembangunan Laboratorium

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
24			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
25			<i>Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah</i>
26			<i>Pengadaan Mebel Sekolah</i>
27			Pengadaan Perlengkapan Siswa
28			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
29			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
30			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
31			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
32			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
33			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
34			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
35		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
36			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
37			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
38			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
39			Pengadaan Mebel PAUD
40			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
41			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
42			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
43			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
44			Pengelolaan Dana BOP PAUD
45			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
46			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
47		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
48			Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
49			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
50			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
51			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Tabel 1.20
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Tabel 1.21
Program kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
			Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman

Tabel 1.22
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
2	Program Pengembangan Perumahan	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
3	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
4	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan rumah bagi korban bencana
5	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Tabel 1.23
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Trantibumlinmas

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
		Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
		Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran
		Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran
		Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
		Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia
		Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi

Tabel 1.24

Program Kegiatan dan Subkegiatan SPM Bidang sosial adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan
			Penyediaan sandang
			Penyediaan alat bantu
			Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
			Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
			Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
			Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
			Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
			Pemberian layanan data dan pengaduan
			Pemberian layanan kedaruratan
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
			Pemberian layanan rujukan
2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan
			Penyediaan sandang
			Penyediaan tempat penampungan pengungsi
			Penanganan khusus bagi kelompok rentan
			Pelayanan dukungan Psikososial
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Honorarium Petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Indikator Kinerja Tahun 2024	Indikator Kinerja Tahun 2025	Perubahan%
1	Indeks Pembangunan Manusia	86, 62	83.23	0.74%
2	Angka Kemiskinan	2.23	1.97	-11. 66%
3	Angka Pengangguran	6.22	25.84	315.43-%
4	Pertumbuhan Ekonomi	3.23	10.24	217.03%
5	Pendapatan Perkapita	214.11	233.4	9.01%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.324	0.325	0.31%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Balikpapan

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Pada indikator kinerja kunci hasil (*Outcome*) merupakan kinerja Kota Balikpapan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	7.267,00	13.600,00	53,43	%
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	96.779,00	96.779,00	100,00	%
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	7.283,00	9.812,00	74,23	%
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	1.951,00	2.531,00	77,08	%
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	2.663,00	3.078,00	86,52	%
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	4,00	11.882,00	0,03	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	66.934,00	66.934,00	100,00	%
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	19.342,00	19.342,00	100,00	%
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	823,00	823,00	100,00	%
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	21.626,00	21.626,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	22.217,00	22.217,00	100,00	%
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	2.567,00	19.285,00	13,31	%
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.882,00	11.882,00	100,00	%
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.882,00	11.882,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.661,00	11.661,00	100,00	%
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	48.320,00	48.320,00	100,00	%
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	111.839,00	111.839,00	100,00	%
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	329.669,00	329.669,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	41.988,00	41.988,00	100,00	%
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1,00	1,00	100,00	%
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	459,00	459,00	100,00	%
1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	372.256,40	430.981,40	86,37	%
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	710.900,00	766.052,00	92,80	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	141.225,00	144.233,00	97,91	%
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	3.786,18	8.694,00	43,55	%
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	1,00	1,00	100,00	%
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	620,00	620,00	100,00	%
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh	4,00	4,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
			Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk				
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	494,00	1.078,00	45,83	%
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	1,00	1,00	100,00	%
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	29,92	29,92	100,00	%
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	100,00	100,00	100,00	%
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	14,00	14,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3,00	3,00	100,00	%
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	69,00	70,00	98,57	%
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	17,00	17,00	100,00	%
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	23.500,00	70.000,00	33,57	%
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	2.746,00	2.746,00	100,00	%
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	143,00	143,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.591,00	1.595,00	99,75	%
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	434,00	1.595,00	27,21	-
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	498,00	1.353,00	36,81	-
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	33,00	33,00	100,00	-
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	3.729,00	3.729,00	100,00	-
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	-	1,00	-	-
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	8,00	8,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
		mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah					
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	116,00	231,00	50,22	%
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	7.140,00	7.500,00	95,20	%
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	166,00	166,00	100,00	%
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	56,00	56,00	100,00	%
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	39,36	25,00	157,45	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2.089.402,00	731.397.054,00	0,29	%
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	31.944.937,00	51.666.170,00	61,83	%
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	51,00	51,00	100,00	%
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	26,00	29,00	89,66	%
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	200.028,48	201.230,52	99,40	%
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	227.492,00	227.638,00	99,94	%
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	210.253,00	215.793,00	97,43	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	-	2,00	-	%
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	547.672,00	550.259,00	99,53	%
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	4.963,00	5.232,00	94,86	%
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	410,00	3.069,00	13,36	%
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	49,00	1.503,00	3,26	%
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	1,00	1,00	100,00	%
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	1,00	1,00	100,00	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	1,00	1,00	100,00	%
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan	2,07	2,19	94,52	%
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15-49 tahun	66.425,00	105.239,00	63,12	%
2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	4,27	11,25	37,96	%
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$	-	0,80	-	0,80	Rasio
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0,48	-	0,48	Rasio
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	2,00	16,00	12,50	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	94,00	94,00	100,00	%
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	96,00	98,00	97,96	%
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	512.028,00	523.109,00	97,88	%
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	289.117.267.618,00	291.154.317.167,00	- 0,70	%
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	13.289,00	53.632,00	24,78	%
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	27.254.061.643.077,00	25.705.587.800.000,00	6,02	%
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada	27.254.061.643.077,00	22.000.000.000.000,00	123,88	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
			kabupaten/kota yang bersangkutan				
2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota	Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di kabupaten/kota	513,00	1.369,00	37,47	%
2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota	19.699,00	193.278,00	10,19	-
2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kabupaten/kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	-	1,00	-	%
2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet peraih medali	Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	104,00	186,00	55,91	%
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	947,00	1.076,00	88,01	%
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	410,00	918,00	44,66	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	151,00	157,00	96,18	%
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	2.105,00	2.487,00	- 15,36	%
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0,15 \times \text{Pra Membaca}) + (0,50 \times \text{Saat Membaca}) + (0,35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	58,76	-	58,76	Nilai
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	22,83	-	22,83	Nilai
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	40,00	-	40,00	%
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	5.940,98	4.812,00	123,46	%
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	56,00	-	56,00	Kg / Kap / Tahun

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	133.580.417.930,00	27.254.061.643.077,00	0,49	%
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah wisatawan asing tahun N-1	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	37.421,00	36.450,00	2,66	%
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	2.767.389,00	2.633.919,00	5,07	%
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	17.111,50	21.832,30	- 21,62	%
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	57.321,32	145.020,40	- 60,47	%
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	21.373,68	23.251,91	- 8,08	%
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveilance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	28.298,07	29.620,83	95,53	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	3.477,00	4.490,00	77,44	%
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	16,84	-	16,84	%
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	206,00	687,00	29,99	%
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	16,00	10,00	60,00	%
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	8.178.572.789.298,00	27.254.061.643.077,00	30,01	%

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	16,00	17,00	94,12	%
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1.142.373.898.647,20	4.755.014.992.631,80	24,02	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	1.249.215.556.861,57	4.139.317.378.738,57	30,18	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2.616.737.166.966,80	2.876.845.432.217,70	90,96	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2.479.364.747.136,61	4.752.014.992.631,80	52,18	%
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.679,00	3.483,00	48,21	%
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	47,00	47,00	100,00	%
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5,00	-	5,00	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	4,00	-	4,00	Nilai
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	5,00	-	5,00	Nilai
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	34,00	34,00	100,00	%
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	9,00	-	9,00	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	23,24	-	23,24	Poin

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	14,65	-	14,65	Poin
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1,00	-	1,00	1. Tepat Waktu dan 2 Tidak Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	6,00	24,00	25,00	%
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	95,57	-	95,57	Nilai

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	8.178.572.789.298,00	27.254.061.643.077,00	30,0086383	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	16	17	94,1176471	%
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1.142.373.898.647,20	4.755.014.992.631,80	24,0246119	%
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	1.249.215.556.861,57	4.139.317.378.738,57	30,1792649	%
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	2.616.737.166.966,80	2.876.845.432.217,70	90,9585596	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
	Belanja Daerah tahun N						
4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	2.479.364.747.136,61	4.752.014.992.631,80	52,1750195	%
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.679	3.483	48,2055699	%
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	47	47	100	%
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	5	-	5	Nilai
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	3	Nilai

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	5	-	5	Nilai
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	34	34	100	%
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	9	-	9	Poin
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	23,24	-	23,24	Poin
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	14,65	-	14,65	Poin
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	1	-	1	1. Tepat Waktu
4.g.2	Persentase penetapan Rancangan	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program	6	24	25	%

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian	Satuan
	Peraturan Daerah tahun N		pembentukan peraturan daerah tahun N				
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	95,57	-	95,57	Nilai

2.3 Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran tidak hanya dilihat dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana mampu mencapai tujuan, sasaran, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efisien, dan berfokus pada hasil. Akuntabilitas kinerja memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemerintah daerah bekerja, apa yang telah dicapai, serta tantangan yang masih perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, akuntabilitas kinerja disusun sebagai alat evaluasi yang menyajikan capaian program dan kegiatan pemerintah daerah secara menyeluruh. Penyajian ini membantu pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, memahami keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program. Informasi yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan angka dan data, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas mengenai kontribusi masing-masing kegiatan terhadap pencapaian sasaran strategis daerah.

Pengukuran kinerja dalam laporan ini merujuk pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025. Setiap indikator dibandingkan antara target dan realisasi capaian, sehingga terlihat sejauh mana program dan kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan. Analisis ini juga memperlihatkan keterkaitan antara program dan sasaran strategis yang ditetapkan, sehingga setiap pencapaian dapat dipahami sebagai bagian dari upaya jangka panjang pemerintah daerah untuk mencapai visi dan misi pembangunan.

Selain menjadi tolok ukur keberhasilan, akuntabilitas kinerja juga berperan sebagai sarana refleksi bagi pemerintah daerah. Dari hasil pengukuran ini, dapat diketahui faktor-faktor yang mendukung pencapaian target, sekaligus kendala yang perlu diatasi. Temuan tersebut menjadi dasar perbaikan perencanaan, penyesuaian strategi, dan pengambilan keputusan yang lebih tepat pada periode berikutnya.

2.3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengukur capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 maka dalam memberikan penilaian dilakukan dengan menggunakan predikat capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2026

Adapun informasi capaian akuntabilitas Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) berperan sebagai alat ukur strategis untuk menilai pencapaian kinerja pembangunan setiap tahunnya. IKU menjadi dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan, sekaligus acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, sehingga memastikan seluruh langkah yang dilakukan selaras dengan sasaran strategis pembangunan daerah.

Tahun 2025 menjadi tahun transisi antara periode RPJMD lama dan RPJMD baru, sehingga penyajian IKU pada tahun ini perlu memperhatikan kedua periode tersebut. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah menilai capaian program yang telah berjalan, memetakan area yang memerlukan perbaikan, dan merencanakan strategi yang lebih tepat untuk mendukung arah pembangunan ke depan. Evaluasi kinerja yang dilakukan melalui IKU juga membantu menyoroti keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih tepat dan terukur.

Sehubungan dengan hal tersebut, IKU Pemerintah Kota Balikpapan 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 telah

mengalami penyesuaian dari dokumen RPJMD awal, sehingga indikator yang disajikan mencerminkan capaian kinerja yang aktual dan relevan untuk tahun berjalan.

Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-429/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-143/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab																																	
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1. Nilai SAKIP	PermenpanRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, digunakan sebagai acuan untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).	Nilai Hasil Akhir dari penjumlahan komponen-komponen AKIP, sebagai berikut : <table><tr><th rowspan="2">Komponen</th><th colspan="3">Sub-Komponen</th><th rowspan="2">Total Bobot</th></tr><tr><th>Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%</th><th>Sub-Komponen 2 Kualitas 30%</th><th>Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%</th></tr><tr><td>Perencanaan Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pengukuran Kinerja</td><td>6</td><td>9</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>Pelaporan Kinerja</td><td>3</td><td>4,5</td><td>7,5</td><td>15</td></tr><tr><td>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</td><td>5</td><td>7,5</td><td>12,5</td><td>25</td></tr><tr><td>Nilai Akuntabilitas Kinerja</td><td>20</td><td>30</td><td>50</td><td>100</td></tr></table>	Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100	LHE SAKIP oleh KemenPAN-RB	Inspektorat, Sekretariat Daerah, Bappeda Litbang
		Komponen	Sub-Komponen				Total Bobot																																	
			Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%																																			
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30																																				
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30																																				
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15																																				
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25																																				
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100																																				
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	IPKD adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu.	Penjumlahan seluruh hasil indeks dimensi didasarkan perhitungan Permendagri 19 tahun 2020, dengan dimensi sebagai berikut: 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1) 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (D.2) 3. Transparansi pengelolaan keuangan (D.3) 4. Penyerapan Anggaran (D.4) 5. Kondisi keuangan daerah (D.5) 6. Opini BPK (D.6) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) = D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6	Analisis Mandiri dari 6 Dimensi yang didasarkan perhitungan Permendagri 19 tahun 2020	Badan Pengelola Keuangan Daerah																																			
3. Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	-	Variabel derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah	$ddf = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$	1. Data PAD 2. Data Total	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah																																			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab																																			
				Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.		Pendapatan Daerah																																				
		4. Indeks SPBE	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.	Penjumlahan dari perhitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus perhitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut : $Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ dimana: • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_i adalah nilai bobot domain ke-i. <table><thead><tr><th>Nomor Domain</th><th>Nama Domain</th><th>Nilai Indeks Domain ND</th><th>Bobot Domain BD (%)</th><th>$ND \times BD$ (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Domain 1</td><td>Kebijakan SPBE</td><td>3,70</td><td>13,00</td><td>48,10</td></tr><tr><td>Domain 2</td><td>Tata Kelola</td><td>3,40</td><td>25,00</td><td>85,00</td></tr><tr><td>Domain 3</td><td>Penerapan Manajemen</td><td>3,00</td><td>16,50</td><td>49,50</td></tr><tr><td>Domain 4</td><td>Layanan SPBE</td><td>3,20</td><td>45,50</td><td>145,60</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah ($ND \times BD$)</td><td>328,20</td></tr><tr><td colspan="4">Indeks SPBE = $1 / 100 \times 328,20$</td><td>3,28</td></tr></tbody></table>	Nomor Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain ND	Bobot Domain BD (%)	$ND \times BD$ (%)	Domain 1	Kebijakan SPBE	3,70	13,00	48,10	Domain 2	Tata Kelola	3,40	25,00	85,00	Domain 3	Penerapan Manajemen	3,00	16,50	49,50	Domain 4	Layanan SPBE	3,20	45,50	145,60	Jumlah ($ND \times BD$)				328,20	Indeks SPBE = $1 / 100 \times 328,20$				3,28	Hasil Asesmen KemenPAN-RB	Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor Domain	Nama Domain	Nilai Indeks Domain ND	Bobot Domain BD (%)	$ND \times BD$ (%)																																						
Domain 1	Kebijakan SPBE	3,70	13,00	48,10																																						
Domain 2	Tata Kelola	3,40	25,00	85,00																																						
Domain 3	Penerapan Manajemen	3,00	16,50	49,50																																						
Domain 4	Layanan SPBE	3,20	45,50	145,60																																						
Jumlah ($ND \times BD$)				328,20																																						
Indeks SPBE = $1 / 100 \times 328,20$				3,28																																						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
		5. Maturitas SPIP	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	0. Belum ada yaitu Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 2,0$) 1. Rintisan yaitu 1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$) 2. Berkembang yaitu 2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$) 3. Terdefinisi yaitu 3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$) 4. Terkelola dan Terukur yaitu 4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$) 5. Optimum yaitu Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)	Penilaian SPIP oleh Inspektorat	Inspektorat
2.	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Permenpan RB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 tahun 2019	Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah.	Perhitungan berdasarkan formulir penilaian pada lampiran Peraturan KASN No 9 tahun 2019	Penilaian Mandiri Daerah yang diverifikasi oleh KASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab																									
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	IKM merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.	Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsu-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$ N = bobot nilai per unsur Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: $\text{SKM Unit pelayanan} \times 25$ <table><thead><tr><th>NILAI PERSEPSI</th><th>NILAI INTERVAL (NI)</th><th>NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)</th><th>MUTU PELAYANAN (x)</th><th>KINERJA UNIT PELAYANAN (y)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>1,00 – 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr><tr><td>2</td><td>2,60 – 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr><tr><td>3</td><td>3,0644 – 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>3,5324 – 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr></tbody></table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)	1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik	Angka hasil survei terhadap 9 unsur SKM	Sekretariat Daerah
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)																												
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																												
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																												
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																												
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																												

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
4.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan harapan lama sekolah (expected years of schooling). Pada proses penentuan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan sebagai salah satu komponen pembentuk IPM	Dimensi Pendidikan $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Indeks kesehatan merupakan ukuran yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dimensi kesehatan, yaitu Umur Panjang dan Hidup Sehat. Indikatornya adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yang merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.	Dimensi Kesehatan $I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	BPS	Dinas Kesehatan
6.	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	$\sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$ Keterangan :	Perhitungan Mandiri dengan memanfaatkan data semua unsur IPLM	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
			Perpustakaan Nasional)		UPMLi : Variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangun literasi masyarakat AM : Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus atau jenis perpustakaan		
7.	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	-	Indeks ini menilai daya saing kepemudaan dan keolahragaan dari sisi prestasi pemuda non keolahragaan dan keolahragaan dari seluruh pemuda dan atlet yang dibina	$\text{Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan} = \frac{\text{Jumlah Prestasi Pemuda bidang non keolahragaan} + \text{Jumlah Peserta bidang keolahragaan}}{\text{Total Pemuda dan Atlet yang dibina}}$	Perhitungan Mandiri Disporapar	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
8.	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud, BPS, Bappenas)	Dimensi warisan budaya menggambarkan upaya yang dilakukan seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap produk budaya, baik warisan budaya benda dan tak benda, dalam pemajuan kebudayaan. Selain itu dalam ditentukan beberapa indikator komponen penyusun yang sederhana namun mempunyai kekuatan yang tinggi untuk menjelaskan aspek pemajuan kebudayaan seperti Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku seni.	$\text{Indeks Warisan Budaya} = \frac{\% \text{ Benda, Bangunan, Struktur dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan} + \% \text{ Penduduk 10 Tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai Pelaku}}{2} \times 100\%$	Perhitungan Mandiri Disdikbu	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
9.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.	$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L}$	BPS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10.	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	-	Indeks Pembangunan Infrastruktur adalah nilai rata-rata capaian kinerja pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah yang terdiri dari infrastruktur aksesibilitas (jalan, dan perhubungan), Infrastruktur drainase, air bersih, air limbah, dan persampahan.	$IPI = \frac{\begin{aligned} &\% \text{ Infrastruktur Jalan dalam kondisi baik} + \% \text{ Infrastruktur Drainase dalam kondisi berfungsi baik} \\ &+ \% \text{ Cakupan Infrastruktur Layanan Air Minum} + \% \text{ Cakupan Infrastruktur Layanan Air Limbah} + \% \\ &\text{Penyediaan Infrastruktur Persampahan} + \% \text{ Tingkat Pelayanan Jalan (level of service)} \end{aligned}}{6}$	Penilaian Mandiri Daerah	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Perhubungan
11.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri LHK Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH adalah gambaran atas hasil pengukuran kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	IKLH Kabupaten/ Kota $IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Perhitungan Mandiri DLH	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	1. Indeks Risiko Bencana	Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020	Indeks Risiko Bencana adalah nilai yang menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah didasarkan atas variable ancaman, kerentanan dan kapasitas.	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut : $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Hasil Asesmen BNPB	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
		2. Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.	$\text{Indeks Ketentraman dan Ketertiban} = \frac{\text{Angka Pelanggaran Perda} + \text{Angka Konflik}}{2}$	Perhitungan Mandiri Satpol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
13.	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	1. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	PP Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jumlah pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun 1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro; 2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil	$\text{Persentase Pertumbuhan UMKM} = \frac{\text{Jumlah UMKM Tahun } n - \text{Jumlah UMKM Tahun } (n-1)}{\text{Jumlah UMKM Tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPS dan Perhitungan Mandiri Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
				atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai aturan yang berlaku.			
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Persentase Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Angkatan Kerja	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	BPS	Dinas Ketenagakerjaan
		3. Tingkat Kemiskinan	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.	$GK = GKM - GKNM$	BPS	Dinas Sosial
14.	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Nilai Total Realisasi Investasi yang ada di Kota Balikpapan	Nilai Total Realisasi Investasi yang ada di Kota Balikpapan	Data Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
15.	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Panduan Perhitungan Pola Pangan Harapan Badan Ketahanan Pangan RI 2015	PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.	Total skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dikenal dengan kualitas konsumsi pangan adalah jumlah dari skor 9 kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai dengan skor kelompok lain-lain	Data Susenas yang diolah oleh DP3	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
16.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Kunjungan wisata adalah banyaknya Jumlah kunjungan wisata yang dilakukan	$\text{Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)} = \frac{\text{Total jumlah kunjungan wisatawan dalam negeri} + \text{Total jumlah kunjungan wisatawan asing dalam satu tahun}}{\text{Jumlah tahun}}$	Perhitungan mandiri oleh Disporapar	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
17.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.	$\text{Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{Pelaku ekonomi kreatif tahun } n - \text{Pelaku ekonomi kreatif tahun } (n-1)}{\text{Pelaku ekonomi kreatif tahun } (n-1)} \times 100\%$	Perhitungan mandiri oleh Disporapar	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Dasar Penetapan IKU	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
18.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	UU No. 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan	PDRB adalah jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. Yang mana yang dihitung adalah PDRB sektor Perdagangan.	$\text{Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan} = \frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } (n-1)}{\text{PDRB Sektor Perdagangan tahun } (n-1)} \times 100\%$	BPS	Dinas Perdagangan

Sumber : Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-429/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-143/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Sementara itu, IKU Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disusun secara baru sesuai arah dan prioritas pembangunan pada periode RPJMD yang baru. Adapun IKU Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.3.3/77/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu ukuran pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu menggunakan persentase. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.	$LPE = \left(\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : LPE : Laju Pertumbuhan Ekonomi $PDRB_t$: Produk Domestik Regional Bruto tahun berjalan $PDRB_{t-1}$: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
2			Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$ Keterangan : α : 0 z : garis kemiskinan y_i : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), dengan $y_i < z$ α : Banvaknva nenduduk vane berada di bawah	Dinas Sosial	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, Dinas Sosial

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
3			Indeks Gini	Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.	$Indeks\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^n (p_i - p_{i-1}) (Y_i - Y_{i-1})$ Keterangan : p_i : Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i : Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n : jumlah observasi	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
4		Meningkatnya produktifitas perekonomian daerah yang merata dan berkelanjutan	PDRB Per Kapita	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.	$PDRB\ per\ Kapita = \frac{PDRB_{ADHB}}{Jumlah\ Penduduk}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
5			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa	Persentase peningkatan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (rupiah) pada sektor lapangan kerja perdagangan, rumah makan, jasa akomodasi, transportasi, pergudangan, komunikasi, lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan dan sosial.	$\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa} = \frac{PDRB_{jasa,t} - PDRB_{jasa,t-1}}{PDRB_{jasa,t-1}} \times 100\%$ Keterangan : $PDRB_{jasa,t}$: Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Sektor Jasa (Tersier)	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
6			Tingkat Inflasi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.	$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ Keterangan : IHK : Indeks Harga Konsumen	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
7			Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks yang menggambarkan tingkat akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand yang terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 1-10. Semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.	$IKAD = \left(\sum_{i=1}^{14} a_i Z_i \right) \times 10$ Keterangan : <i>IKAD</i> : Indeks Akses Keuangan Daerah <i>a_iZ_i</i> : Bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Otoritas Jasa Keuangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
8		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu alat ukur atau indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana infrastruktur yang ada mampu memberikan layanan yang berkualitas kepada pengguna atau masyarakat.	Penilaian IKLI terdiri dari 6 Aspek yaitu: 1. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota: 20% 2. Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service): 10% 3. Kondisi Drainase Baik: 25% 4. Layanan Layak Air Minum (PDAM): 25% 5. Layanan Layak Air Limbah: 10% 6. Kawasan Permukiman Tidak Kumuh: 10%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
9		Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ Keterangan : TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka	Badan Pusat Statistik	Dinas Ketenagakerjaan
10		Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.	$IKP = \sum_{i=1}^{12} a_i x_i$ Keterangan : IKP : Indek Ketahanan Pangan a_i : Bobot masing-masing indikator x_i : Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator	Kementrian Pertanian / Badan Pangan Nasional	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
11		Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban (IKK) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketenteraman dan ketertiban di suatu wilayah. IKK ini biasanya mencakup berbagai aspek seperti keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. IKK yang baik menunjukkan bahwa suatu wilayah aman, nyaman, dan kondusif bagi warganya untuk beraktivitas. Hal ini berdampak positif pada kualitas hidup masyarakat, investasi, dan pembangunan ekonomi. IKK dapat mencakup berbagai indikator, seperti tingkat kejahatan, pelanggaran lalu lintas, pelanggaran ketertiban umum, tingkat kepatuhan terhadap peraturan daerah, dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.	$Indeks\ Trantibum = \sum_{i=1}^n (w_i \times I_i)$ Keterangan : I_i : Skor indikator ke-i (skala 0-100, hasil normalisasi) w_i : Bobot indikator ke-i (jumlah seluruh bobot = 1)	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
12			Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan berbagai aspek kehidupan sosial. IKS dibangun dari aspek-aspek kesejahteraan sosial yang mencakup dimensi-dimensi utama seperti: Ketahanan Keluarga, Ketersediaan dan Akses terhadap Pelayanan Sosial, Partisipasi Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan Layak, Perlindungan Sosial, Pekerjaan dan Pendapatan, dan Lingkungan Sosial. Setiap dimensi diukur menggunakan beberapa indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, dan dinilai dengan menggunakan skala tertentu.	Skor Indeks dihasilkan dari skor pada 3 dimensi yaitu Kebutuhan Dasar, Peranan Sosial dan Keberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
13	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim		Penurunan intensitas emisi GRK	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut. Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan 50 sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.	$\text{Penurunan IE} = \frac{(IE_t - IEB_t)}{IE_t}$ Keterangan : IE_t : Intensitas emisi GRK pada tahun t (ton CO₂e / 2010 IDR miliar) IEB_t : Intensitas emisi GRK baseline tahun t (ton CO₂e / 2010 IDR miliar)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
14		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut, dan Indeks Kualitas Air Laut). IKLH sebagai indikator kualitas lingkungan hidup membantu mendisain program (perumusan kebijakan) dan mempermudah komunikasi dengan publik tentang kondisi lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan sebagai acuan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut. Entitas pengukuran IKLH terdiri dari: (1) IKLH nasional, IKLH Provinsi dan IKLH Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan (2) IKLH tahun 2020-2024 terdiri dari 5 (lima) komponen (sub indeks), yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Dalam penghitungan IKLH, Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Gambut (IKEG) diintegrasikan sebagai Indeks Kualitas Lahan. IKLH berdasarkan komponen pembentuknya, dimana pada tahun 2020-2024 terdiri atas 4 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKL : Indeks Kualitas Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
15		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.	$IRB = \frac{Bahaya \times Kerentanan}{Kapasitas}$ Keterangan : <i>IRB</i> : Indeks Risiko Bencana <i>Bahaya</i> : Bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan dari suatu fenomena alam <i>Kerentanan</i> : Kerentanan dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan <i>Kapasitas</i> : Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Daya Saing Daerah	Instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Seperti IDSD 2022, pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.	Komponen IDSD terdiri dari 4 Aspek, 12 Pilar, dan 23 Dimensi, 78 indikator. Komponen terbanyak terletak pada aspek ekosistem inovasi. Komposisi ini dihasilkan berdasarkan berbagai studi literatur dan masukan para pakar.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
17		Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}} \times 100$ Keterangan : IPM : Indeks Pembangunan Manusia $I_{Kesehatan}$: Indeks Kesehatan (UHH) $I_{Pendidikan}$: Indeks Pendidikan (HLS dan RLS) $I_{Pengeluaran}$: Indeks Pengeluaran	Badan Pusat Statistik	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
18		Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	$IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan : IKG : Indeks Ketimpangan Gender $HARM(G_P, G_L)$: Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik $G_{P,L}$: Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik	Badan Pusat Statistik	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
19	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran reformasi birokrasi dengan melakukan penilaian hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah dalam menerapkan berbagai prinsip reformasi birokrasi, seperti peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.	$Indeks\ RB = \sum (Bobot\ Komponen \times Nilai\ Capaian)$	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
20		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Penilaian AKIP terdiri dari 4 komponen yaitu: • Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 • Pengukuran Kinerja dengan bobot 30 • Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 • Evaluasi Internal dengan bobot 25	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
21			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020.	Skor Indeks adalah gabungan antara skor enam dimensi keuangan daerah dengan formulasi yang secara rinci diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020	Kementerian Dalam Negeri	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
22			Indeks Integritas Pemerintah	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD)	$IIP = \text{Penilaian Internal}(0,305) + \text{Penilaian Eksternal}(0,328) + \text{Penilaian Ekspert}(0,367) - \text{Faktor Koreksi}(0,2)$ Keterangan : <i>IIP</i> : Indeks Integritas Pemerintah	Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia	Inspektorat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi	Metode Pengukuran IKU	Sumber Data	Penanggung Jawab
23		Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam hal memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.	Metode perhitungan IKM didasarkan pada pedoman di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
24			Indeks SPBE	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	$\text{Indeks SPBE} = \frac{1}{BD_i} \times (ND_m \times BD_m + ND_{m+1} \times BD_{m+1} + \dots + ND_n \times BD_n)$ Keterangan : ND_i: nilai indeks domain ke-i BD_i: nilai bobot domain ke-i	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
25			Indeks Pemerintah Digital	Indeks yang menggambarkan tata kelola pemerintahan berbasis digital dan keterpaduan data, transformasi kolaboratif dan berorientasi pengguna, serta sistem digital yang terintegrasi dan terpercaya.	Indeks dihasilkan dari skor kematangan dan transformasi digital pemerintah pada lima aspek: Tata Kelola, Teknologi, Data, Keamanan Siber dan Layanan	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 100.3.3.3/77/2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Dengan penyajian tersebut, setiap capaian kinerja dapat dipetakan secara sistematis, kendala dapat diidentifikasi dengan tepat, dan langkah perbaikan dapat dirancang secara strategis. IKU berfungsi tidak hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai fondasi pengambilan keputusan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

b. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Perjanjian Kinerja menjadi wujud komitmen dan kesepakatan kinerja antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur yang akan dicapai berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan, serta sumber daya yang tersedia.

Target kinerja yang diperjanjikan tidak hanya mencerminkan kinerja yang dihasilkan pada tahun berjalan, tetapi juga mencakup kinerja hasil (*outcome*) yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kinerja antarperiode dan memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan jangka menengah bagi Pemerintah Kota Balikpapan, seiring dengan berakhirnya periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2025 dan dimulainya periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Kondisi tersebut berdampak pada penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, yang disusun menjadi dua Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pertama mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2025 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, sedangkan Perjanjian Kinerja kedua disusun dengan mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bentuk penyesuaian awal terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode berikutnya.

Target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RPJMD yang relevan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan target kinerja. Target kinerja tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian

Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2025.

Adapun target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja pada tahun berjalan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69,06	70,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,068	82,89
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	26,90	30,81
		Indeks SPBE	Poin	3,96	4
		Maturitas SPIP	Level	3	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,68	0,8
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,93	84,95
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7622	0,7641
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8595	0,8605
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	15,33	16,29
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209	0,209
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4956	0,4965
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,34	90,98
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	81,62	82
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,4	71,64
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	101,43	99,43
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,85	0,8675
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	19,23	21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025
	Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,22	6,09
		Tingkat Kemiskinan	%	2,23	2,15
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	25,705	24,50
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87,35	89
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,67	2,68
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	38,57	39
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,77

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025

Selanjutnya, target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 yang disusun dalam rangka penyelarasan awal terhadap RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 pada masa transisi perencanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025 atas RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	3,23	4,5
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	2,230	2,15
		<i>Indeks Gini</i>	Indeks	0,324	0,312
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	214,11	223,74
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,75	7,87
		Tingkat Inflasi	%	1,1	2,50±1
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11	7,12
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	64,5	66,1
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,22	6,09

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET 2025
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	N/A	78,93
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	70,61	73,01
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,620	50,62
2	<i>Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim</i>	<i>Penurunan intensitas emisi GRK</i>	%	<i>12,67</i>	<i>24,84</i>
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,4	71,64
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	101,43	99,43
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	<i>4,1</i>	<i>4,08</i>
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	82,62	83,09
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,178	0,176
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	<i>78,06</i>	<i>78,3</i>
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	69,06	70,16
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,068	82,89
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	75,08	77,5
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,93	84,95
		Indeks SPBE	Indeks	3,96	4
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	N/A

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2025

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Kota Balikpapan diukur melalui indikator kinerja beserta target tahunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan alat ukur

utama untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran strategis pembangunan daerah sekaligus efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dalam kerangka dua periode RPJMD. Penggunaan Perjanjian Kinerja Perubahan tersebut menjadi dasar dalam memastikan kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan, sekaligus menjaga keselarasan arah kebijakan pembangunan daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam masing-masing Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Hasil pengukuran ini tidak hanya menunjukkan tingkat pencapaian target kinerja, tetapi juga menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis pembangunan daerah. Evaluasi atas capaian kinerja ini selanjutnya menjadi dasar dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya.

Adapun capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70,16	70,63	100,67%	Melebihi Target
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,89	89,1528	107,56%	Melebihi Target
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30,81	30,18	97,96%	Tidak Tercapai
		Indeks SPBE	Poin	4	4,22	105,50%	Melebihi Target
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	Tercapai/ Sesuai Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,8	0,68*	85%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,95	87,22	102,67%	Melebihi Target
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7641	0,7641	100%	Tercapai/ Sesuai Target
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8605	0,8652	100,55%	Melebihi Target
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,29	22,83	140,15%	Melebihi Target
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209	0,1163	55,65%	Tidak Tercapai
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4965	0,493	99,30%	Tidak Tercapai
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,98	91,04	100,07%	Melebihi Target
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	82	65,56	79,95%	Tidak Tercapai
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,64	75,55	105,46%	Melebihi Target
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	99,43	89,43	111,18%	Melebihi Target
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8675	1,05	121,04%	Melebihi Target

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	21	14,17	67,48%	Tidak Tercapai
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,09	5,84	104,28%	Melebihi Target
		Tingkat Kemiskinan	%	2,15	1,97	109,14%	Melebihi Target
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	24,5	27,254	111,24%	Melebihi Target
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	90,85	102,08%	Melebihi Target
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,68	2,804	104,63%	Melebihi Target
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	39	34	87,18%	Tidak Tercapai
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,72	99,49%	Tidak Tercapai

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana disajikan pada tabel di atas, secara umum capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup optimal, dimana sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari keseluruhan indikator yang diukur, mayoritas indikator berada pada kategori tercapai dan melebihi target, yang mencerminkan bahwa pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah telah berjalan efektif dan selaras dengan perencanaan kinerja tahunan.

Dari keseluruhan **25 Indikator Kinerja Utama (IKU)** Kota Balikpapan Tahun 2025 yang diukur, terdapat:

- **15 indikator (60%)** melebihi target,
- **2 indikator (8 %)** tercapai sesuai target, dan
- **8 indikator (32%)** belum mencapai target.

Komposisi capaian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas sasaran strategis pembangunan daerah telah terealisasi secara optimal, meskipun masih terdapat beberapa area kinerja yang memerlukan penguatan kebijakan dan intervensi program.

Pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks SPBE berhasil melampaui target yang ditetapkan, yang mengindikasikan semakin meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja, transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Stabilitasnya capaian Maturitas SPIP pada level yang ditargetkan menunjukkan konsistensi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Namun, capaian Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah yang belum mencapai target menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pembiayaan pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Pada aspek kapabilitas birokrasi, capaian Indeks Sistem Merit belum mencapai target yang ditetapkan, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan manajemen talenta, pengembangan kompetensi aparatur, serta optimalisasi penerapan sistem manajemen ASN berbasis merit.

Selanjutnya pada sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan manusia, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta Indeks Pembangunan Gender berhasil melampaui target, yang menunjukkan meningkatnya kualitas layanan publik serta keberhasilan intervensi pembangunan sosial. Indeks Pendidikan berhasil dipertahankan sesuai target, mencerminkan stabilitas kualitas layanan pendidikan daerah. Akan tetapi, capaian Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan masih berada di bawah target, sehingga diperlukan penguatan serta peningkatan partisipasi dan pemberdayaan generasi muda.

Pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang melampaui target menunjukkan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan dan pengendalian pencemaran. Sebaliknya, belum

tercapainya Indeks Pembangunan Infrastruktur mengindikasikan masih adanya kebutuhan percepatan pembangunan dan pemerataan kualitas infrastruktur perkotaan.

Dalam aspek ketahanan daerah dan stabilitas wilayah, capaian Indeks Risiko Bencana serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban yang melampaui target menunjukkan meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mitigasi bencana serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan wilayah.

Sementara itu, pada sasaran pembangunan ekonomi daerah, kinerja menunjukkan tren positif melalui peningkatan realisasi investasi daerah, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan tingkat kemiskinan yang seluruhnya melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan kunjungan wisatawan dan capaian ketahanan pangan juga menunjukkan membaiknya aktivitas ekonomi daerah. Namun, pertumbuhan usaha mikro daerah, ekonomi kreatif, serta pertumbuhan sektor perdagangan belum sepenuhnya mencapai target, yang menunjukkan perlunya penguatan ekosistem usaha dan peningkatan daya saing sektor ekonomi produktif daerah.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan Kota Balikpapan telah berjalan efektif dan mampu mencapai sebagian besar sasaran strategis daerah. Meskipun demikian, indikator yang belum mencapai target menjadi bahan evaluasi penting guna meningkatkan efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan pada periode berikutnya.

Sejalan dengan pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 juga dianalisis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Penyajian capaian kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal mengenai tingkat keselarasan antara hasil pembangunan Tahun 2025 dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode perencanaan yang baru, sekaligus sebagai dasar dalam menilai kesinambungan kinerja pembangunan daerah pada masa transisi perencanaan.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025			Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	4,5	9,73	216,22%	Melebihi Target
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	2,15	1,97	109,14%	Melebihi Target
		<i>Indeks Gini</i>	Indeks	0,312	0,325	96%	Tidak Tercapai
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	223,74	214,11*	95,70%	Tidak Tercapai
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,87	8,08*	102,67%	Melebihi Target
		Tingkat Inflasi	%	2,50±1	2,71	108,40%	Melebihi Target
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,12	7,11*	99,86%	Tidak Tercapai
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	66,1	65,56	99,18%	Tidak Tercapai
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,09	5,84	104,28%	Melebihi Target
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,93	78,93	100%	Tercapai/ Sesuai Target
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	73,01	70,61*	96,71%	Tidak Tercapai
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,62	57,48	113,55%	Melebihi Target
2	<i>Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim</i>	<i>Penurunan intensitas emisi GRK</i>	%	24,84	24,84*	100%	Tercapai/ Sesuai Target

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025			Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,64	75,55	105,46%	Melebihi Target
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	99,43	89,43	111,18%	Melebihi Target
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	4,08	4,12	100,98%	Melebihi Target
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,09	83,23	100,17%	Melebihi Target
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,313*	56,23%	Tidak Tercapai
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	78,3	83,08*	106,10%	Melebihi Target
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	70,16	70,63	100,67%	Melebihi Target
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,89	89,1528	107,56%	Melebihi Target
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	77,5	77,43	99,91%	Tidak Tercapai
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,95	87,22	102,67%	Melebihi Target
		Indeks SPBE	Indeks	4	4,22	105,50%	Melebihi Target
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	-	-	-

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029 sebagaimana tabel di atas, capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun awal periode RPJMD secara umum menunjukkan kinerja yang positif dan progresif. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator strategis telah menunjukkan perkembangan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Dari keseluruhan indikator yang diukur (tidak termasuk indikator yang belum tersedia datanya), mayoritas indikator mencatatkan capaian melampaui maupun sesuai target. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pembangunan pada tahun pertama RPJMD telah berjalan efektif serta konsisten dengan perencanaan yang ditetapkan.

Pada tujuan perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan, laju pertumbuhan ekonomi terealisasi jauh di atas target, disertai dengan penurunan tingkat kemiskinan yang melampaui sasaran yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan adanya akselerasi aktivitas ekonomi yang memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, Indeks Gini belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga pemerataan hasil pembangunan masih perlu diperkuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu diimbangi dengan kebijakan yang semakin mendorong distribusi manfaat pembangunan secara lebih merata.

Pada sasaran peningkatan produktivitas perekonomian daerah, pertumbuhan sektor jasa dan tingkat inflasi menunjukkan capaian yang baik. Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil ditekan di bawah target, yang mencerminkan membaiknya kondisi ketenagakerjaan. Sementara itu, PDRB per kapita dan Indeks Akses Keuangan Daerah belum sepenuhnya mencapai target, yang menunjukkan perlunya optimalisasi peningkatan produktivitas ekonomi dan perluasan inklusi keuangan.

Indeks Ketahanan Pangan tercapai sesuai target, menggambarkan stabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun Indeks Ketenteraman dan Ketertiban belum mencapai target, walaupun Indeks Kesejahteraan Sosial melampaui target secara signifikan dan menunjukkan perbaikan kondisi sosial masyarakat.

Pada tujuan lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca tercapai sesuai target. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana melampaui target, yang mencerminkan efektivitas kebijakan pengelolaan lingkungan serta peningkatan kapasitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Dalam aspek sumber daya manusia, Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia mencatatkan capaian di atas target, yang menunjukkan terjaganya kualitas pembangunan manusia dan meningkatnya daya saing daerah. Sebaliknya, Indeks Ketimpangan Gender belum mencapai target dan menunjukkan deviasi yang cukup signifikan, sehingga penguatan kebijakan yang responsif gender dan inklusif masih perlu menjadi perhatian.

Pada tujuan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat, serta Indeks SPBE seluruhnya melampaui target. Capaian ini mengindikasikan penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta percepatan transformasi digital pemerintahan.

Sebaliknya, Indeks Integritas Pemerintah belum sepenuhnya mencapai target, sehingga penguatan budaya integritas dan sistem pencegahan penyimpangan tetap perlu ditingkatkan. Adapun Indeks Pemerintah Digital belum dapat disajikan karena tahun 2025 belum dilakukan penilaian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 menunjukkan bahwa pembangunan Kota Balikpapan telah bergerak pada arah yang tepat dan menunjukkan tren yang progresif. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, membaiknya daya saing daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan menjadi indikator terbentuknya fondasi awal RPJMD yang cukup kuat.

Namun, beberapa indikator yang belum mencapai target khususnya yang berkaitan dengan pemerataan ekonomi, peningkatan produktivitas per kapita, kualitas infrastruktur, ketimpangan gender, serta aspek integritas dan ketertiban sosial perlu menjadi fokus prioritas pada tahun-tahun berikutnya agar pembangunan daerah dapat berlangsung secara lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk memperoleh gambaran perkembangan kinerja secara berkelanjutan, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya dianalisis terhadap target dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, tetapi juga dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk menilai tren capaian indikator serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dari tahun ke tahun.

Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi antara RPJMD Tahun 2021–2026 dan RPJMD Tahun 2025–2029, maka penyajian perbandingan kinerja dilakukan dalam dua kerangka acuan, yaitu berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD 2021–2026 dan yang mengacu pada RPJMD 2025–2029. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan evaluasi kinerja serta memberikan gambaran yang utuh terhadap dinamika pencapaian sasaran strategis daerah.

Hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	69,28	69,50	68,75	69,06	70,63
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	-	76,5512	81,251	82,068	89,1528
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	-	28,28	28,70	26,90	30,18
		Indeks SPBE	Poin	2,44	3,05	3,75	3,96	4,22
		Maturitas SPIP	Level	3	3	3	3	3
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,62	0,65	0,68	0,68	0,68*
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	82,5	85,24	83,23	84,93	87,22
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7587	0,7593	0,7599	0,7622	0,7641
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8424	0,843	0,8315	0,8595	0,8652
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	-	11,69	14,43	15,33	22,83
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	-	0,064	0,079	0,209	0,1163
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,492	0,464	0,4955	0,4956	0,493
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	92	89,96	90,8	90,34	91,04

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
	Pengarustamaan Gender							
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	-	77,63	77,98	81,62	65,56
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,66	63,96	67,64	68,40	75,55
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	123,46	110,79	118,21	101,43	89,43
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	-	0,8	0,83	0,85	1,05
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	3,09	29,55	20,21	19,23	14,17
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	8,94	6,90	6,09	6,22	5,84
		Tingkat Kemiskinan	%	2,89	2,45	2,31	2,23	1,97
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	3,018	15,426	24,125	25,71	27,254
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	87	86,1	88,60	87,35	90,85
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	1,08	1,729	2,558	2,67	2,804
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	-	28,46	33,53	38,57	34
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-	5,29	5,66	9,77	9,72

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2025 yang dibandingkan dengan realisasi periode 2021–2024 sebagaimana tersaji dalam tabel di atas, secara umum terlihat bahwa kinerja pembangunan daerah menunjukkan tren yang terjaga dan cenderung meningkat pada sebagian besar sasaran strategis, meskipun terdapat beberapa indikator yang mengalami dinamika capaian.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, penguatan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah tercermin dari peningkatan Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, serta Indeks SPBE hingga Tahun 2025. Maturitas SPIP yang konsisten pada Level 3 menunjukkan stabilitas sistem pengendalian intern. Indeks Kepuasan Masyarakat juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perbaikan persepsi publik terhadap kualitas layanan. Indeks Sistem Merit tercatat stabil, dengan capaian Tahun 2025 masih bersifat sementara.

Dalam dimensi pembangunan manusia, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan. Indeks Pembangunan Gender mengalami perbaikan dibandingkan Tahun 2024, mencerminkan penguatan aspek kesetaraan dalam pembangunan. Sementara itu, Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Indeks Warisan Budaya menunjukkan fluktuasi antar tahun, namun secara umum masih berada dalam kisaran yang terkendali.

Pada sektor infrastruktur dan lingkungan hidup, peningkatan signifikan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta tren penurunan Indeks Risiko Bencana mengindikasikan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan dan kapasitas ketahanan daerah. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban juga mengalami peningkatan. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Infrastruktur mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, sehingga menjadi area yang perlu mendapat perhatian dalam kesinambungan pembangunan fisik daerah.

Dalam aspek perekonomian, indikator makro menunjukkan perkembangan yang positif. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan terus menurun secara konsisten. Nilai realisasi investasi, kunjungan wisatawan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan sektor perdagangan memperlihatkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Adapun pertumbuhan usaha mikro dan ekonomi kreatif mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mengindikasikan perlunya penguatan dukungan terhadap sektor tersebut agar tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, capaian Tahun 2025 memperlihatkan konsistensi keberlanjutan pembangunan pada akhir periode RPJMD 2021–2026. Sebagian besar indikator menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan, sementara beberapa indikator lainnya

mengalami fluktuasi yang menjadi fokus evaluasi untuk meningkatkan kualitas kinerja pada periode selanjutnya.

Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	4,57	4,96	6,49	3,23	9,73
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	2,89	2,45	2,31	2,23	1,97
		<i>Indeks Gini</i>	Indeks	0,325	0,334	0,323	0,324	0,325
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	160,3	181,29	201,64	214,11	214,11*
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	4,4	9,3	7,03	8,08	8,08*
		Tingkat Inflasi	%	2,28	5,51	3,6	1,11	2,71
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	-	-	7,11	7,11*
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-	77,96	74,03	65,56
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,94	6,90	6,09	6,22	5,84
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	-	89,47	91,4	91,23	78,93
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	-	-	-	70,61	70,61*
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	-	-	50,62	57,48
2	<i>Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim</i>	<i>Penurunan intensitas emisi GRK</i>	%	-	-	32,76	24,84	24,84*

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,66	63,96	67,64	68,40	75,55
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	123,46	110,79	118,21	101,43	89,43
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	-	3,71	3,60	4,07	4,12
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,71	81,49	82,03	82,62	83,23
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,246	0,344	0,178	0,313	0,313*
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	68,00	68,91	66,13	78,28	83,08*
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	69,28	69,50	68,75	69,06	70,63
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	-	76,5512	81,251	82,068	89,1528
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	70,12	73,52	73,83	75,08	77,43
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	85,24	83,23	84,93	87,22
		Indeks SPBE	Indeks	2,44	3,05	3,75	3,96	4,22
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	-	-	-

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun awal periode perencanaan jangka menengah ini diketahui bahwa kinerja pembangunan daerah secara umum menunjukkan arah yang positif, dengan sebagian besar indikator mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan dinamika dan penyesuaian capaian.

Pada tujuan perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan, Laju Pertumbuhan Ekonomi meningkat signifikan pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2024, mencerminkan akselerasi aktivitas ekonomi daerah. Tingkat Kemiskinan

menunjukkan tren penurunan yang konsisten sejak 2021 hingga 2025. Di sisi lain, Indeks Gini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mengindikasikan tantangan dalam aspek pemerataan distribusi pendapatan. PDRB per kapita dan pertumbuhan sektor jasa relatif terjaga (dengan capaian Tahun 2025 masih bersifat sementara), dengan tingkat inflasi berada dalam kisaran yang terkendali. Sementara itu, Indeks Akses Keuangan Daerah masih dalam tahap awal pengukuran dan capaian Tahun 2025 bersifat sementara.

Pada sasaran infrastruktur, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, sehingga menjadi perhatian dalam menjaga kesinambungan kualitas layanan dasar. Tingkat Pengangguran Terbuka kembali menurun pada Tahun 2025, menunjukkan perbaikan daya serap tenaga kerja. Indeks Ketahanan Pangan mengalami koreksi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan Indeks Kesejahteraan Sosial menunjukkan peningkatan. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban masih berupa angka sementara.

Dalam tujuan lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat secara signifikan pada Tahun 2025. Indeks Risiko Bencana terus menunjukkan tren penurunan, yang mencerminkan penguatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Penurunan intensitas emisi GRK tercatat stabil dengan capaian Tahun 2025 masih bersifat sementara.

Pada dimensi sumber daya manusia, Indeks Daya Saing Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Indeks Ketimpangan Gender masih bersifat sementara dan menunjukkan perlunya perhatian lebih lanjut dalam mendorong pembangunan yang semakin inklusif.

Sementara itu, pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai AKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Indeks Integritas Pemerintah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks SPBE juga terus membaik sebagai indikator peningkatan kualitas layanan dan transformasi digital. Adapun Indeks Pemerintah Digital belum tersedia datanya.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 sebagai tahun awal RPJMD 2025–2029 menunjukkan fondasi pembangunan yang cukup kuat dan arah kebijakan yang mulai terkonsolidasi, dengan mayoritas indikator bergerak positif serta beberapa indikator yang memerlukan penguatan guna memastikan pembangunan berlangsung secara merata, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika daerah pada tahun-tahun berikutnya.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Dalam rangka menilai tingkat ketercapaian sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, dilakukan pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 yang dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Perbandingan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi realisasi kinerja terhadap target akhir periode perencanaan serta menjadi dasar evaluasi atas konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	75,56	70,63	93,48%	75,58	93,45%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82	89,1528	108,72%	83	107,41%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	44,74	30,18	67,46%	44,40	67,97%
		Indeks SPBE	Poin	3,7	4,22	114,05%	4	105,50%
		Maturitas SPIP	Level	4	3	75%	4	75,00%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,8	0,68*	85%	0,84	80,95%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,38	87,22	103,37%	85,05	102,55%
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7518	0,7641	102%	0,7524	101,56%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8394	0,8652	103,08%	0,8397	103,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)		
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	12	22,83	190,25%	12,5	182,64%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,024	0,1163	484,58%	0,025	465,20%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4965	0,493	99,30%	0,4975	99,10%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	-	91,04	-	-	-
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	79,55	65,56	82,41%	80,02	81,93%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,41	75,55	110,44%	68,51	110,28%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	101	89,43	112,94%	99	110,70%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8675	1,05	121,04%	0,8794	119,40%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	3,33	14,17	425,53%	3,45	410,72%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,98	5,84	136,64%	7,74	132,53%
		Tingkat Kemiskinan	%	2,37	1,97	120,30%	2,36	119,80%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	4,08	27,254	667,99%	4,44	613,83%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	90,85	102,08%	90	100,94%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,5	2,804	112,16%	3,4	82,47%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	2,93	34	1160,41%	3,22	1055,90%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)		
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,25	9,72	228,71%	5,00	194,40%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja berada pada kategori baik. Sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mencapai bahkan melampaui target tahunan Tahun 2025 serta menunjukkan progres yang signifikan terhadap pencapaian target akhir RPJMD.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, beberapa indikator seperti Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dan Indeks SPBE telah melampaui target tahun 2025 serta berada di atas target akhir RPJMD. Sementara itu, Nilai SAKIP, Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, dan Maturitas SPIP masih berada di bawah target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, kapasitas fiskal daerah, serta penguatan penerapan sistem pengendalian intern masih perlu terus ditingkatkan.

Selanjutnya, pada aspek pelayanan publik dan pembangunan manusia, beberapa indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik. Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pendidikan, dan Indeks Kesehatan tidak hanya melampaui target tahun 2025, tetapi juga telah melampaui target akhir RPJMD. Selain itu, indikator literasi masyarakat serta daya saing kepemudaan dan keolahragaan juga menunjukkan capaian yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia yang cukup signifikan.

Pada aspek lingkungan dan ketahanan daerah, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Risiko Bencana, serta Indeks Ketenteraman dan Ketertiban juga menunjukkan capaian yang melampaui target tahun 2025 maupun

target akhir RPJMD. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penguatan ketahanan wilayah.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan, salah satunya Indeks Pembangunan Infrastruktur yang realisasinya masih berada di bawah target tahun 2025 maupun target akhir RPJMD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sementara itu, pada aspek pembangunan ekonomi daerah, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat positif. Pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan realisasi investasi daerah, serta pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan sektor perdagangan menunjukkan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Adapun indikator kunjungan wisatawan, meskipun telah melampaui target tahun 2025, capaian terhadap target akhir RPJMD masih berada di bawah target yang direncanakan.

Sebagai tahun awal pelaksanaan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, capaian kinerja Tahun 2025 juga dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Tahun 2025-2029. Analisis ini dimaksudkan untuk melihat posisi awal capaian terhadap target lima tahunan yang baru serta mengukur keselarasan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan target pembangunan jangka menengah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)		
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	4,5	9,73	216,22%	5,75	169,22%
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	2,15	1,97	109,14%	1,72	87,31%
		<i>Indeks Gini</i>	<i>Indeks</i>	0,312	0,325	96%	0,285	87,69%
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	223,74	214,11*	95,70%	288,97	74,09%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,87	8,08*	102,67%	8,52	94,84%
		Tingkat Inflasi	%	2,5±1	2,71	108,40%	2,5±1	108,40%
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,12	7,11*	99,86%	7,15	99,44%
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	66,1	65,56	99,18%	78,15	83,89%
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,12	5,84	104,79%	5,2	89,04%
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,93	78,93	100,00%	82,14	96,09%
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	73,01	70,61*	96,71%	85	83,07%
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,62	57,48	113,55%	53,12	108,21%
2	<i>Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim</i>	<i>Penurunan intensitas emisi GRK</i>	%	24,84	24,84*	100,00%	47,25	52,57%
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,64	75,55	105,46%	72,49	104,22%
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	99,43	89,43	111,18%	89,43	100,00%
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	4,08	4,12	100,98%	4,15	99,28%
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,09	83,23	100,17%	84,6	98,38%
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,313*	56,23%	0,166	53,04%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Terhadap Akhir RPJMD (%)
				Target RPJMD	Realisasi	Capaian (%)		
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	78,3	83,08*	106,10%	79	105,16%
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	70,02	70,63	100,87%	71,54	98,73%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,89	89,1528	107,56%	83,89	106,27%
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	77,5	77,43	99,91%	81,2	95,36%
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,95	87,22	102,67%	88,48	98,58%
		Indeks SPBE	Indeks	3,85	4,22	109,61%	-	-
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	-	-	3	-

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan tabel tersebut, capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target pembangunan jangka menengah dalam kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menunjukkan variasi tingkat pencapaian antar indikator. Apabila diklasifikasikan berdasarkan tingkat ketercapaian terhadap target tahun 2025 dan target akhir RPJMD Tahun 2026, terlihat bahwa sebagian indikator telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, sementara beberapa indikator lainnya masih memerlukan penguatan upaya pencapaian.

Indikator yang **telah melampaui target tahun 2025 sekaligus melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026** antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, Indeks Kesejahteraan Sosial, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Reformasi Birokrasi, serta Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada beberapa aspek pembangunan, kinerja yang dicapai telah melampaui ekspektasi pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Selanjutnya, terdapat indikator yang **telah melampaui target tahun 2025 namun belum melampaui target akhir RPJMD Tahun 2026**, antara lain Tingkat Kemiskinan, Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Risiko Bencana, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Nilai AKIP, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan pada

indikator tersebut telah berada pada jalur yang positif, namun masih memerlukan upaya lanjutan agar dapat mencapai target akhir RPJMD.

Di sisi lain, terdapat indikator yang **telah memenuhi target tahun 2025 namun belum mencapai target akhir RPJMD Tahun 2026**, yaitu Indeks Ketahanan Pangan dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target tahunan telah tercapai, masih diperlukan peningkatan kinerja secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah secara penuh.

Sementara itu, beberapa indikator **belum mencapai target tahun 2025 sekaligus masih berada di bawah target akhir RPJMD Tahun 2026**, antara lain Indeks Gini, PDRB Per Kapita, Indeks Akses Keuangan Daerah, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, Indeks Integritas Pemerintah, serta Indeks Ketimpangan Gender. Selain itu, Indeks SPBE telah melampaui target tahun 2025, namun belum dapat dibandingkan dengan target akhir RPJMD karena indikator Indeks Pemerintah Digital sebagai pengganti indikator dalam kerangka RPJMD yang baru belum memiliki realisasi pada tahun berjalan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beberapa aspek pembangunan masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan dan program pembangunan agar pencapaian target jangka menengah dapat lebih optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah berada pada jalur yang mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah. Meskipun masih diperlukan upaya penguatan pada beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal agar target RPJMD dapat tercapai secara lebih maksimal.

e. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Mengacu Pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Untuk memberikan gambaran posisi capaian kinerja Kota Balikpapan secara komparatif, dilakukan perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan capaian pada tingkat nasional, Provinsi Kalimantan Timur, serta kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Perbandingan ini mengacu pada indikator yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026. Perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.

Tabel 2.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kota Balikpapan dengan Capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70,63	64,57	71,42	61,14	61,96	66,71	63,60	60,45	54	63,58	77,82	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	89,1528	79,861	82,06	81,545	80,996	85,228	65,148	79,664	64,321	86,491	-	-
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks SPBE	Poin	4,22	-	3,76	3,28	-	3,23	2,65	3,16	-	2,48	4,13	-
		Maturitas SPIP	Level	3	3	3	2	3	2	2	2	2	3	3	-
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,68*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7641	0,7961	0,7510	0,6518	0,6733	0,6941	0,6726	0,6832	0,6473	0,6927	0,7267	0,6718
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8652	0,8408	0,8517	0,8408	0,8408	0,8408	0,8408	0,8408	0,8408	0,8408	0,8505	0,8408
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	22,83	8,71	42,85	18,2	5,51	12,81	4,04	10,05	-	9,39	44,11	-
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,1163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,493	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	91,04	91,01	88,84	87,7	74,03	81,71	86,23	79,1	83,89	88,88	87,48	-
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	65,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,55	Belum rilis secara resmi										
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan	Indeks Resiko Bencana	Poin	89,43	71,48	85,25	88,54	136,60	106,40	140,51	200,10	103,74	155,27	117,73	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
	Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	14,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,84	5,31	6,36	-	4,62	4,4	5,21	6,20	2,84	4,4	5,20	4,85
		Tingkat Kemiskinan	%	1,97	3,45	3,21	6,69	8,31	7,28	8,72	8,01	10,09	4,44	5,19	8,25
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	27.254	4.586	3.077	1.659	2.521	12.816	6.604	20.007	497	8.762	87.787	1.931,2 triliun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	90,85	88,01	89,76	94,34	90,49	92,33	89,96	90,29	72,53	84,99	89,43	95,1
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, capaian kinerja Kota Balikpapan secara umum menunjukkan posisi yang cukup kompetitif dibandingkan daerah lainnya pada sejumlah indikator pembangunan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan sebesar 89,1528 menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat pertama di antara kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara relatif baik dibandingkan daerah lain. Selanjutnya, Indeks SPBE Kota Balikpapan dengan nilai 4,22 juga berada pada peringkat pertama di antara kabupaten/kota lainnya serta melampaui capaian Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu, Nilai SAKIP Kota Balikpapan sebesar 70,63 menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat kedua setelah Kota Bontang, yang mencerminkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berada pada kategori yang cukup baik di tingkat provinsi.

Dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat, Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan sebesar 1,97 persen merupakan yang terendah di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sehingga menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan relatif lebih berhasil dibandingkan sebagian besar daerah lain di provinsi yang sama. Selain itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan sebesar 91,04 juga menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat pertama di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan relatif lebih terkendali.

Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pendidikan Kota Balikpapan sebesar 0,7641 berada pada peringkat kedua setelah Kota Samarinda, yang menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sektor pendidikan di Kota Balikpapan masih berada pada kelompok daerah dengan capaian tinggi di tingkat provinsi. Sementara itu, Indeks Kesehatan Kota Balikpapan sebesar 0,8652 menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat pertama dibandingkan kabupaten/kota lainnya, yang menunjukkan bahwa capaian pembangunan sektor kesehatan relatif lebih baik dibandingkan sebagian besar daerah di Kalimantan Timur.

Dari sisi perekonomian daerah, Nilai Realisasi Investasi Kota Balikpapan mencapai sekitar 27,254 triliun rupiah, sehingga menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat pertama. Capaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi investasi yang cukup besar di Provinsi Kalimantan Timur serta memiliki daya tarik ekonomi yang relatif kuat bagi para investor.

Sementara itu, dalam aspek ketahanan bencana, Indeks Risiko Bencana Kota Balikpapan sebesar 89,43 menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat ketiga dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya. Adapun Skor Pola Pangan Harapan Kota Balikpapan sebesar 90,85 menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat kelima, yang menunjukkan bahwa kualitas konsumsi pangan masyarakat tergolong cukup baik meskipun masih terdapat beberapa daerah dengan capaian yang lebih tinggi. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan sebesar 5,84 persen menempatkan Kota Balikpapan pada peringkat ketujuh dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kinerja pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025 relatif baik dan cukup kompetitif di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, kesehatan masyarakat, pengendalian tingkat kemiskinan, serta kesetaraan gender. Di sisi lain, beberapa indikator masih memerlukan penguatan agar posisi kinerja Kota Balikpapan dapat semakin meningkat dan lebih merata pada berbagai sektor pembangunan di masa yang akan datang.

Selain itu, perbandingan capaian kinerja juga dilakukan dengan mengacu pada indikator yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Adapun perbandingan capaian kinerja dimaksud disajikan pada tabel berikut sebagai berikut:

Tabel 2.16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Kota Balikpapan dengan Capaian Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam Kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	9,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Tingkat Kemiskinan</i>	%	1,97	3,45	3,21	6,69	8,31	7,28	8,72	8,01	10,09	4,44	5,19	8,25
		<i>Indeks Gini</i>	Indeks	0,325	0,308	0,349	0,319	0,273	0,285	0,261	0,305	0,296	0,294	0,310	0,363
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	214,11*	114,69*	363,67*	87,14*	193,14*	259,19*	222,07*	344,49*	110,2*	194,08*	212,18*	78,6*
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	8,08*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tingkat Inflasi	%	2,71	2,70	-	2,08	-	-	-	-	-	2,82	2,68	2,92
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,11*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	65,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,84	5,31	6,36	-	4,62	4,4	5,21	6,20	2,84	4,4	5,20	4,85
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,93	77,94	77,63	82,23	83,46	86,5	78,00	80,17	66,31	82,00	80,82	-
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	70,61*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Penurunan intensitas emisi GRK	%	24,84*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,55	Belum rilis secara resmi										
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	89,43	71,48	85,25	88,54	136,60	106,40	140,51	200,10	103,74	155,27	117,73	-
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	4,12	4,32	3,57	3,50	3,48	3,58	3,46	3,38	2,94	3,60	3,63	-
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,23	83,53	83,04	75,82	75,85	77,25	75,38	76,48	71,53	77,72	79,39	75,90
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,313*	0,243*	0,313*	0,474*	0,527*	0,439*	0,477*	0,517*	0,339*	0,421*	0,441*	0,421*
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	83,08*	83,27*	85,37*	70,36*	80,91*	79,83*	65,26*	74,38*	58,18*	76,45*	88,07*	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2025											
				Balikpapan	Samarinda	Bontang	Penajam Paser Utara	Paser	Kutai Kartanegara	Kutai Barat	Kutai Timur	Mahakam Ulu	Berau	Provinsi Kalimantan Timur	Nasional
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	70,63	64,57	71,42	61,14	61,96	66,71	63,60	60,45	54	63,58	77,82	-
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	89,1528	79,861	82,06	81,545	80,996	85,228	65,148	79,664	64,321	86,491	-	-
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	77,43	75,90	73,92	71,80	76,01	71,59	69,63	66,36	70,08	69,17	69,78	72,32
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks SPBE	Indeks	4,22	-	3,76	3,28	-	3,23	2,65	3,16	-	2,48	4,13	-
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	Belum dilakukan penilaian di tahun 2025											

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Berdasarkan tabel tersebut, kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan capaian yang relatif kompetitif pada sejumlah indikator strategis.

Pada indikator tingkat kemiskinan, Kota Balikpapan mencatat realisasi sebesar 1,97% dan menempati peringkat pertama dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (5,19%) maupun nasional (8,25%), yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam menjaga tingkat kemiskinan tetap rendah.

Untuk indikator Indeks Gini, nilai Kota Balikpapan sebesar 0,325 menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-8 di antara kabupaten/kota yang memiliki data pembandingan. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Balikpapan masih relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah lain, namun nilainya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (0,363) meskipun sedikit di atas rata-rata provinsi (0,310).

Pada indikator PDRB per kapita, capaian sebesar 214,11 juta rupiah menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-5 di Kalimantan Timur. Sementara itu, pada indikator tingkat pengangguran terbuka, realisasi sebesar 5,84% menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-6 dan masih berada di atas rata-rata provinsi (5,20%) maupun nasional (4,85%), sehingga menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam perluasan kesempatan kerja.

Selanjutnya, pada indikator indeks ketahanan pangan, nilai Kota Balikpapan sebesar 78,93 menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-7 dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian ketahanan pangan daerah masih berada pada posisi menengah jika dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di provinsi.

Di sisi lain, pada indikator Indeks Risiko Bencana, nilai Kota Balikpapan sebesar 89,43 menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-3 terbaik setelah Kota Samarinda dan Kota Bontang, yang mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan bencana relatif lebih terkendali dibandingkan sebagian besar daerah lainnya.

Pada indikator Indeks Daya Saing Daerah, Kota Balikpapan memperoleh nilai 4,12 dan berada pada peringkat ke-2 setelah Kota Samarinda. Sejalan dengan hal tersebut, pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian Balikpapan sebesar 83,23 juga menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-2 dan berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (79,39) maupun nasional (75,90).

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 83,08 menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-3 setelah Kota Bontang dan Kota Samarinda, sedangkan pada indikator Nilai AKIP, capaian sebesar 70,63 menempatkan Balikpapan pada peringkat ke-2 setelah Kota Bontang.

Sementara itu, pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai 89,1528, Indeks Integritas Pemerintah sebesar 77,43, serta Indeks SPBE sebesar 4,22, Kota Balikpapan menempati peringkat pertama di antara kabupaten/kota di Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan memiliki posisi yang cukup kuat terutama pada indikator penurunan kemiskinan, daya saing daerah, pembangunan manusia, serta tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, beberapa indikator seperti tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan PDRB per kapita masih menunjukkan posisi yang relatif menengah sehingga memerlukan penguatan kebijakan pembangunan agar kinerja daerah dapat semakin meningkat pada periode berikutnya.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Untuk memberikan gambaran capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 secara lebih komprehensif, dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun belum optimalnya pencapaian indikator kinerja. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi kondisi pendukung, kendala pelaksanaan program dan kegiatan, serta keterkaitannya dengan hasil kinerja yang dicapai sebagai dasar perbaikan pada periode berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan maupun kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.17 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70,16	70,63	100,67%	Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain: • Perbaikan implementasi manajemen kinerja pada beberapa komponen penilaian SAKIP, khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan tata kelola kinerja serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja; • Pada komponen perencanaan kinerja, peningkatan nilai menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja telah semakin selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta telah mulai menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan program	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah, guna memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan; • Penyempurnaan Perjanjian Kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, termasuk target dan penyesuaian indikator kinerja agar lebih mencerminkan <i>outcome</i> pembangunan pada masing-masing level jabatan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga telah melakukan penguatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan reviu dan penyesuaian terhadap sasaran strategis dalam dokumen perencanaan kinerja, baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah, sehingga setiap level memiliki sasaran strategis yang sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing; • Melakukan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, khususnya dalam memastikan bahwa indikator kinerja pada level kepala daerah mencerminkan <i>outcome</i> pembangunan daerah, sementara indikator pada level perangkat daerah mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian sasaran tersebut;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Beberapa faktor penghambat dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain: • Masih adanya ketidaksesuaian level sasaran strategis antara pemerintah daerah dan perangkat daerah, sehingga terdapat indikator kinerja yang sama digunakan pada dua level yang berbeda; • Belum optimalnya penyesuaian target kinerja pada beberapa perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja secara progresif;	melalui pemanfaatan sistem informasi monitoring kinerja untuk memantau capaian kinerja perangkat daerah secara berkala; • Upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP pada perangkat daerah secara mandiri dan dilaksanakan secara <i>on going</i>, yang bertujuan untuk menilai tingkat penerapan manajemen kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.	• Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pengukuran dan monitoring kinerja agar seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan pengukuran kinerja secara konsisten dan terintegrasi, sehingga proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif. • Melakukan penguatan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja, sehingga target kinerja pada tahun berikutnya dapat disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan; • Melakukan peningkatan kualitas evaluasi internal implementasi SAKIP, dengan memastikan bahwa hasil evaluasi mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta memberikan rekomendasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Pemanfaatan sistem informasi monitoring kinerja perangkat daerah sebagai sarana pengukuran dan pengawasan kinerja masih belum diimplementasikan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah, sehingga proses pemantauan kinerja belum berjalan secara optimal; - Hasil evaluasi internal implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik dan implementatif.		perbaikan yang lebih spesifik dan implementatif.
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,89	89,1528	107,56%	Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, di mana setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD disusun secara sistematis serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Keterpaduan ini memastikan bahwa pengalokasian anggaran	Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan beberapa langkah perbaikan, antara lain: Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran daerah agar seluruh program dan kegiatan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPKD pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: Meningkatkan kualitas penyajian LKPD melalui penguatan sistem pencatatan keuangan, pengelolaan aset daerah, serta penataan administrasi keuangan yang lebih tertib;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							mendukung prioritas pembangunan daerah secara konsisten; - Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian belanja pada sektor-sektor prioritas dilakukan secara disiplin sehingga struktur belanja daerah menjadi lebih proporsional dan terarah; - Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif mempublikasikan dokumen keuangan daerah dan memastikan keteraksesannya oleh masyarakat. Upaya ini didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan publikasi 29 dokumen yang dipersyaratkan dalam dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah; - Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi antara Inspektorat Kota Balikpapan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sinergi tersebut berperan dalam	tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah; - Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan kewajiban publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemenuhan 29 dokumen transparansi; - Mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam mendukung publikasi dokumen keuangan daerah melalui media resmi pemerintah daerah agar lebih mudah diakses oleh Masyarakat; - Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi antara Inspektorat Kota Balikpapan dan BPK dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mencegah potensi penyimpangan; - Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya	- Memperkuat digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kemudahan pemantauan realisasi anggaran; - Mendorong peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi publikasi dokumen keuangan pada media resmi pemerintah daerah; - Mengoptimalkan pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar potensi temuan dapat diminimalkan serta kualitas tata kelola keuangan semakin meningkat; - Melanjutkan program peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah guna memastikan kompetensi teknis dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan terus berkembang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							mencegah potensi penyimpangan serta memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, efisien, dan akuntabel; Optimalisasi penyerapan anggaran dan kondisi fiskal daerah yang relatif sehat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer yang optimal, serta pengendalian belanja yang efisien turut memperkuat stabilitas keuangan daerah dan mendukung pencapaian nilai IPKD yang tinggi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Temuan terkait penyajian laporan keuangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan.	manusia (SDM) melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah; Menyusun timeline kerja yang terstruktur dalam penyusunan LKPD agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah.	
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30,81	30,18	97,96%	Beberapa faktor yang memengaruhi belum tercapainya target tersebut antara lain sebagai berikut:	Upaya strategis yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain:	Untuk meningkatkan capaian derajat desentralisasi fiskal daerah pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							• Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan belanja daerah, sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan. • Partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah masih perlu diperkuat, khususnya dalam hal penyampaian informasi terkait objek pajak daerah yang dimiliki serta pemutakhiran data perpajakan. • Pemanfaatan fasilitas layanan pajak secara daring (online) oleh sebagian wajib pajak masih belum optimal sehingga potensi penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya tergali secara maksimal. • Tingkat ketergantungan terhadap Dana Transfer dari Pemerintah Pusat masih memengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah, terutama dalam menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah.	• Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah secara langsung kepada masyarakat dan wajib pajak guna meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerah; • Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah melalui perluasan basis wajib pajak dan optimalisasi potensi objek pajak daerah; • Mengembangkan sistem pembayaran pajak secara daring guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak serta meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak daerah; • Mengoptimalkan berbagai program peningkatan penerimaan daerah seperti penungguan wajib pajak, mobil pelayanan pajak keliling, gebyar pajak daerah,	perbaikan yang perlu dilakukan antara lain: • Meningkatkan kepatuhan dan partisipasi wajib pajak melalui penguatan sosialisasi, edukasi perpajakan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam layanan perpajakan daerah; • Mengoptimalkan pemutakhiran data objek dan subjek pajak daerah guna meningkatkan akurasi basis data perpajakan serta memperluas potensi penerimaan daerah; • Mendorong diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui pengembangan sektor ekonomi non-migas, termasuk sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif; • Memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih inovatif dan berbasis data; • Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Kondisi eksternal seperti perlambatan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, serta dinamika sektor migas juga turut memengaruhi aktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya berdampak terhadap kemampuan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi. Di sisi lain, meskipun target belum sepenuhnya tercapai, terdapat beberapa faktor yang turut mendorong peningkatan kinerja indikator ini dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: - Penambahan dua jenis pajak daerah pada tahun 2025, yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang turut memperkuat struktur penerimaan pajak daerah; - Penambahan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan	pemasangan alat perekam transaksi usaha, penghapusan piutang pajak daerah, pemasangan stiker wajib pajak menunggak, serta pemeriksaan pajak kendaraan bermotor; - Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah serta pengembangan sektor ekonomi potensial, termasuk sektor pariwisata, perdagangan, dan ekonomi kreatif sebagai sumber alternatif peningkatan PAD; - Melaksanakan digitalisasi dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan fiskal daerah.	melalui pelatihan dan penguatan kompetensi dalam pengelolaan fiskal daerah; Mengoptimalkan efisiensi dan reorientasi belanja daerah agar lebih mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							penerimaan pada komponen retribusi daerah; • Terjadinya pertumbuhan basis wajib pajak, yaitu penambahan 83 wajib pajak baru pada Pajak Air Tanah serta peningkatan 167 wajib pajak aktif pada Pajak Reklame, yang berdampak pada meningkatnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah dibandingkan tahun sebelumnya; • Berbagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.		
		Indeks SPBE	Poin	4	4,22	105,50%	Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain sebagai berikut: • Telah ditetapkannya Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang	Untuk mendukung peningkatan implementasi SPBE, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain: • Menyusun kebijakan dan regulasi SPBE, termasuk penetapan pedoman tata kelola TIK sebagai acuan pelaksanaan	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks SPBE secara berkelanjutan, beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain: • Memperkuat kebijakan dan regulasi SPBE melalui penyempurnaan pedoman teknis serta standar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							menjadi landasan dalam penyelenggaraan SPBE yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan selaras dengan arah pembangunan daerah; • Meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam implementasi SPBE serta peran aktif Tim Koordinasi SPBE, yang didukung oleh pendampingan dari instansi pembina seperti Kementerian PANRB, Komdigi, dan BSSN dalam memperkuat penerapan SPBE; • Adanya peningkatan cakupan, kualitas, dan interoperabilitas layanan publik serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai aplikasi seperti e-Manuntung, e-Retribusi, dan Reaksi; • Penguatan struktur, proses, dan mekanisme tata kelola SPBE, antara lain melalui peningkatan penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPL), optimalisasi Jaringan Intra Pemerintahan (JIP) untuk komunikasi dan distribusi data, serta keselarasan dokumen Renstra perangkat daerah dengan RPJMD yang didukung	SPBE di lingkungan pemerintah daerah; • Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah melalui peran aktif Tim Koordinasi SPBE serta pendampingan dari instansi Pembina; • Melakukan pengembangan dan optimalisasi layanan publik berbasis elektronik, seperti e-Manuntung, e-Retribusi, dan Reaksi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat; • Mengoptimalkan penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPL) serta penguatan Jaringan Intra Pemerintahan (JIP) untuk meningkatkan integrasi dan pertukaran data antarperangkat daerah; • Melaksanakan audit internal dan evaluasi rutin terhadap aplikasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk	operasional prosedur yang lebih terintegrasi; • Meningkatkan kualitas infrastruktur digital, termasuk penguatan jaringan TIK, peningkatan kapasitas pusat data, serta penguatan sistem keamanan siber; • Mengoptimalkan integrasi aplikasi dan layanan digital pemerintahan agar layanan publik dapat diakses secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi; • Melaksanakan evaluasi berkala terhadap aplikasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan digital; • Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang transformasi digital pemerintahan; • Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							oleh penerapan manajemen risiko dalam kerangka SPIP; • Peningkatan indeks pada setiap domain SPBE dibandingkan tahun sebelumnya yang mencerminkan perbaikan pada aspek kebijakan, tata kelola, layanan digital, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik; • Dilaksanakannya evaluasi rutin terhadap aplikasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan untuk memastikan aplikasi yang digunakan tetap relevan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal; • Adanya kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten/kota lainnya, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, transfer pengetahuan, serta adopsi praktik terbaik dalam implementasi SPBE. Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa hal yang perlu	memastikan efektivitas dan relevansi sistem yang digunakan; • Memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan kebijakan digitalisasi serta koordinasi implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; • Mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam pengembangan SPBE.	daerah lain, sektor swasta, serta akademisi guna mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam mendukung implementasi SPBE.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							terus diperhatikan dalam implementasi SPBE agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: • Kebutuhan penguatan dan pembaruan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan digital serta integrasi sistem antarperangkat daerah; • Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan dan pengembangan layanan digital agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan lebih optimal di seluruh perangkat daerah; • Tantangan dalam menjaga konsistensi integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan agar seluruh layanan digital dapat berjalan secara terpadu dan efektif.		
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	Keberhasilan pencapaian Level 3 Maturitas SPIP didukung oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain sebagai berikut:	Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SPIP serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, Pemerintah Kota Balikpapan telah	Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan SPIP serta mendorong peningkatan tingkat maturitas SPIP pada masa mendatang,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Pemerintah Kota Balikpapan telah mampu merumuskan kinerja organisasi dengan baik sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsi perangkat daerah; - Pemerintah daerah telah menyusun indikator dan target kinerja yang relatif berkualitas sebagai dasar dalam pengukuran dan pengendalian kinerja organisasi; - Adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat penerapan SPIP melalui berbagai kegiatan evaluasi, pembinaan, dan pendampingan kepada perangkat daerah; - Pelaksanaan berbagai kegiatan koordinasi dan evaluasi SPIP yang melibatkan perangkat daerah serta instansi pembina turut mendukung peningkatan kualitas implementasi sistem pengendalian intern pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi penerapan SPIP	melakukan beberapa upaya perbaikan, antara lain sebagai berikut: - Membangun sistem pengendalian intern pemerintah dan mengimplementasikannya pada seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan di lingkungan perangkat daerah; - Menyusun serta mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko organisasi, termasuk pengelolaan risiko strategis, risiko fraud, dan risiko kemitraan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi; - Melakukan perbaikan dalam perumusan indikator kinerja, penetapan target kinerja, serta penyusunan strategi pencapaian kinerja agar lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah; - Melaksanakan pendampingan penerapan SPIP dan manajemen	beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: - Melakukan penyempurnaan kualitas perencanaan kinerja, khususnya dalam perumusan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja agar lebih selaras antara tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah serta memenuhi prinsip SMART-C; - Memperkuat implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern pada seluruh perangkat daerah sehingga penerapan SPIP dapat terintegrasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah; - Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan indikator kinerja berbasis hasil, pengelolaan risiko organisasi, serta penerapan pengendalian intern yang efektif pada setiap proses bisnis pemerintahan;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							secara menyeluruh. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut: • Terdapat indikator sasaran strategis pemerintah daerah yang belum cukup menggambarkan sasaran strategis secara komprehensif sehingga menyebabkan target dari indikator tersebut menjadi kurang tepat; • Sebagian besar target atas sasaran strategis pemerintah daerah maupun perangkat daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya, sehingga masih terdapat penetapan target yang berada di bawah realisasi tahun sebelumnya; • Masih terdapat sasaran strategis perangkat daerah yang belum selaras dengan sasaran strategis pemerintah daerah pada tingkat yang lebih tinggi; • Beberapa indikator sasaran strategis perangkat daerah belum berorientasi pada hasil, tidak cukup menggambarkan sasaran, serta belum spesifik dan relevan sehingga target yang ditetapkan belum memenuhi prinsip SMART-C;	risiko kepada perangkat daerah secara berkelanjutan agar implementasi pengendalian intern tidak hanya bergantung pada Inspektorat tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah; • Melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi melalui kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah, antara lain evaluasi perencanaan dan penganggaran sektoral, rapat pengarahan tim fasilitator SPIP, pembahasan dan verifikasi kertas kerja SPIP, koordinasi penilaian mandiri serta penjaminan kualitas SPIP terintegrasi, pembahasan tindak lanjut penilaian SPIP, serta persiapan evaluasi maturitas SPIP; • Melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas melalui	• Melakukan perbaikan tata kelola aset daerah, khususnya dalam aspek pencatatan, pengamanan, dan pengelolaan aset guna meminimalkan temuan berulang terkait aset serta meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah; • Memperkuat sinergi antara perangkat daerah, Inspektorat sebagai APIP, serta instansi pembina seperti BPKP dalam pelaksanaan evaluasi, pembinaan, dan penguatan SPIP terintegrasi agar sistem pengendalian intern dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							• Program, kegiatan, dan subkegiatan pada beberapa perangkat daerah belum memiliki sasaran yang jelas serta belum sepenuhnya selaras dengan sasaran pada tingkat yang lebih tinggi; • Indikator pada tingkat program belum sepenuhnya spesifik, relevan, dan berorientasi pada hasil sehingga belum cukup menggambarkan sasaran program secara tepat; • Indikator kegiatan masih ditemukan yang tidak spesifik, tidak relevan, dan overlapping antara sasaran, program, dan kegiatan sehingga target kegiatan yang ditetapkan belum memenuhi prinsip SMART-C; • Indikator pada tingkat subkegiatan belum cukup menggambarkan sasaran serta target subkegiatan yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART-C; • Implementasi SPIP dan manajemen risiko pada perangkat daerah belum berjalan secara optimal dan masih cukup bergantung pada peran Inspektorat	bimbingan teknis penguatan lini kedua dan lini ketiga dalam penerapan SPIP terintegrasi serta bimbingan teknis penyusunan register risiko strategis dan risiko kemitraan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; • Melakukan koordinasi dan reviu dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk reviu RPJMD Kota Balikpapan periode 2025–2029 bersama BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah.	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP); - Masih terdapat sasaran strategis pemerintah daerah maupun perangkat daerah yang realisasinya belum sepenuhnya tercapai; - Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK, dalam lima tahun terakhir masih terdapat temuan berulang terkait pengamanan aset daerah yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan asset; - Jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun terakhir yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan masih lebih dari lima temuan.		
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,8	0,68*	85%	Capaian indikator yang belum mencapai target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: Realisasi indikator masih menggunakan nilai penilaian terakhir yang dilakukan oleh KASN pada tahun sebelumnya. Sampai dengan akhir Desember 2025 belum dilaksanakan penilaian sistem	Dalam rangka meningkatkan penerapan sistem merit serta menindaklanjuti perubahan kebijakan pengawasan sistem merit secara nasional, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain sebagai berikut:	Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian indeks sistem merit pada periode berikutnya, beberapa langkah perbaikan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: Melakukan penyesuaian kebijakan dan praktik manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							merit terbaru sejak diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dari KASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN); - Terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN pada tanggal 31 Desember 2025 yang memuat perubahan kriteria serta aspek penilaian sistem merit dibandingkan dengan regulasi sebelumnya. Perubahan ini menyebabkan mekanisme penilaian sistem merit perlu menyesuaikan dengan kerangka penilaian yang baru; - Sampai dengan akhir tahun 2025 belum diterbitkan peraturan teknis Kepala BKN yang mengatur secara rinci mengenai metode dan instrumen penilaian sistem merit berdasarkan ketentuan terbaru. Kondisi ini menyebabkan proses penilaian sistem merit sesuai dengan kriteria terbaru	- Melakukan peningkatan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang saat ini memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penilaian sistem merit pada instansi pemerintah, khususnya terkait mekanisme penilaian dan pengendalian penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; - Melakukan pemetaan terhadap kondisi penerapan aspek-aspek sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Pemetaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan pemerintah daerah	Balikpapan agar sepenuhnya selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2025 serta peraturan teknis yang akan diterbitkan oleh BKN; - Memperkuat implementasi sistem merit pada seluruh aspek manajemen ASN, termasuk perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan ASN, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, promosi dan mutasi berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem manajemen talenta ASN; - Meningkatkan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan BKN terkait pelaksanaan evaluasi serta penilaian sistem merit di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan setelah peraturan teknis penilaian sistem merit diterbitkan; - Melakukan penguatan kapasitas aparatur pengelola kepegawaian dalam penerapan sistem merit, termasuk melalui pelatihan,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							belum dapat dilaksanakan sehingga nilai indeks sistem merit masih menggunakan capaian sebelumnya. Di sisi lain, capaian nilai indeks sistem merit sebesar 0,68 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya dalam menerapkan prinsip sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara. Hal ini tercermin dari upaya penguatan tata kelola manajemen ASN yang meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja pegawai, serta penguatan sistem manajemen talenta yang dilaksanakan secara bertahap di lingkungan pemerintah daerah.	dalam memenuhi kriteria penilaian sistem merit yang baru; Melakukan penyesuaian awal terhadap kebijakan dan praktik manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah agar selaras dengan aspek-aspek sistem merit yang diatur dalam regulasi terbaru, khususnya dalam penguatan perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, serta pengembangan sistem manajemen talenta ASN.	bimbingan teknis, dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian yang mendukung pengelolaan ASN secara transparan, objektif, dan akuntabel; Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan sistem merit di seluruh perangkat daerah guna memastikan bahwa pengelolaan ASN telah dilaksanakan secara profesional, berbasis kompetensi, serta mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,95	87,22	102,67%	Kebhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut: Adanya komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan Masyarakat;	Dalam rangka mengatasi berbagai faktor penghambat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan sejumlah langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut: Mengembangkan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis bagi Aparatur	Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah perbaikan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: Memperkuat budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan secara cepat dan efisien, seperti layanan perizinan secara daring serta berbagai aplikasi pelayanan berbasis digital; - Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan profesionalisme serta responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat; - Penerapan standar pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait prosedur, waktu penyelesaian, serta biaya layanan secara lebih jelas; - Tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kualitas layanan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala, yang menjadi dasar bagi	Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, penerapan standar pelayanan berbasis nilai dasar ASN BerAKHLAK terus diperkuat melalui supervisi dan evaluasi secara berkala; - Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat melalui berbagai media seperti sistem LAPOR, media sosial resmi pemerintah daerah, serta berbagai layanan pengaduan lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait pelayanan public; - Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap pengaduan masyarakat guna memastikan bahwa setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan solutif, serta memperkuat koordinasi	peningkatan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap implementasi etika pelayanan oleh Aparatur Sipil Negara; - Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, khususnya dalam mempercepat proses verifikasi, tindak lanjut, serta penyelesaian pengaduan agar masyarakat memperoleh respons yang cepat dan solutif; - Mengoptimalkan digitalisasi layanan publik serta integrasi sistem pelayanan antar perangkat daerah guna meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan meminimalkan potensi keterlambatan penyelesaian layanan; - Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan keterampilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang masih menjadi kendala antara lain sebagai berikut: • Implementasi etika pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum sepenuhnya konsisten di seluruh unit pelayanan. Meskipun berbagai pelatihan telah dilaksanakan, masih ditemukan adanya perbedaan tingkat responsivitas, keramahan, dan kualitas interaksi pelayanan di beberapa unit kerja, sehingga diperlukan penguatan budaya pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan Masyarakat; • Penanganan pengaduan masyarakat masih memerlukan peningkatan dari sisi kecepatan dan efektivitas tindak lanjut. Meskipun berbagai kanal pengaduan telah tersedia secara digital, sebagian	antar perangkat daerah dalam penyelesaian pengaduan; • Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus; • Melaksanakan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan, seperti perbaikan ruang pelayanan, ruang tunggu, area parkir, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan; • Menyediakan berbagai peralatan pendukung pelayanan, seperti mesin antrian, sistem informasi pelayanan, serta fasilitas penyampaian pengaduan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan;	pelayanan publik berbasis teknologi informasi; • Melakukan penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap, termasuk peningkatan fasilitas ruang pelayanan, sistem antrian, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh lapisan Masyarakat; • Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan lebih komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							masyarakat masih merasakan bahwa respons terhadap pengaduan belum selalu cepat dan solutif; • Ketepatan waktu dalam penyelesaian beberapa layanan publik masih menjadi tantangan. Walaupun digitalisasi layanan telah membantu mempercepat proses administrasi, pada beberapa layanan tertentu masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan oleh tingginya beban kerja maupun mekanisme birokrasi yang belum sepenuhnya efisien; • Dari sisi sarana dan prasarana pelayanan, masih terdapat beberapa unit layanan yang belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang optimal, seperti keterbatasan ruang tunggu yang memadai, sistem antrian yang masih perlu dioptimalkan, serta pemanfaatan teknologi pelayanan yang belum merata di seluruh sektor layanan publik.	• Melaksanakan survei kualitas fasilitas dan pelayanan secara berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.	
4	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7641	0,7641	100%	Keberhasilan pencapaian Indeks Pendidikan didukung oleh beberapa faktor utama yang mendorong peningkatan kualitas layanan	Dalam rangka mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan sektor pendidikan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui	Sebagai upaya untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian Indeks Pendidikan pada periode mendatang, beberapa langkah perbaikan dan tindak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pendidikan di Kota Balikpapan, antara lain sebagai berikut: - Keberhasilan implementasi berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan pemerataan aksesibilitas serta kualitas layanan pendidikan. Upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi sekolah, serta mendorong peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS); - Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), pembangunan ruang kelas, penyediaan mebel sekolah, pengadaan alat praktik dan alat peraga peserta didik, serta kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan; - Optimalisasi pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta penguatan peran Sanggar Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut: - Melakukan identifikasi ulang seluruh subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya agar seluruh kebutuhan layanan pendidikan dapat terakomodasi secara lebih optimal; - Melaksanakan kerja sama dengan sekolah swasta pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui skema perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025. Melalui kerja sama ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan biaya pendidikan berupa uang pangkal bagi peserta didik pada SMP/MTs swasta, sebagai	lanjut yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: - Melakukan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan pendidikan, khususnya dengan memastikan bahwa seluruh subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dapat terakomodasi secara optimal dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; - Meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan pada seluruh wilayah guna memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas; - Memperkuat kerja sama dengan satuan pendidikan swasta dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan, khususnya dalam mengatasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Belajar (SKB) dalam mendukung layanan pendidikan formal maupun nonformal; • Penyediaan perlengkapan peserta didik, termasuk melalui kebijakan seragam gratis bagi peserta didik baru pada jenjang SD, SMP/MTs, PAUD, serta peserta didik pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C); • Pemberian dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik melalui kebijakan subsidi SPP bagi peserta didik sekolah swasta serta pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang tidak menerima Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan mendorong keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan; • Upaya pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan perhitungan kebutuhan, pemetaan, serta penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan.	upaya untuk memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak usia sekolah yang belum tertampung pada sekolah negeri; • Merencanakan rekrutmen tenaga pendidik melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) pada tahun 2026 guna meningkatkan pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik pada satuan pendidikan, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat lebih merata di seluruh wilayah. Berbagai upaya tersebut juga didukung melalui pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan, antara lain Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, serta Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang meliputi kegiatan pengelolaan pendidikan pada jenjang SD, SMP, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, penetapan	keterbatasan daya tampung pada sekolah negeri; • Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk melalui rekrutmen tenaga pendidik tambahan serta penguatan sistem pemetaan kebutuhan guru pada setiap satuan Pendidikan; • Melanjutkan program bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, termasuk bantuan biaya pendidikan, perlengkapan sekolah, serta dukungan lainnya guna mencegah potensi putus sekolah dan meningkatkan partisipasi Pendidikan; • Mengoptimalkan program peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kurikulum, termasuk penguatan kurikulum muatan lokal dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar kualitas pendidikan di Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Meskipun indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut: - Masih terdapat beberapa subkegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, sehingga optimalisasi capaian layanan pendidikan masih perlu diperkuat pada periode berikutnya; - Pemerataan aksesibilitas pendidikan serta ketersediaan fasilitas pendidikan pada beberapa wilayah masih belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi sarana prasarana pendidikan maupun ketersediaan tenaga pendidik yang merata di seluruh satuan pendidikan.	kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, serta kegiatan pemerataan kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan.	Balikpapan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.
5	Meningkatnya Kualitas	Indeks Kesehatan	Poin	0,8605	0,8652	100,55%	Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi capaian indeks Kesehatan tahun 2025, yaitu;	Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi sekaligus mempertahankan capaian indikator	Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mengantisipasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
	Kesehatan Masyarakat						Faktor penghambat. Meskipun kinerja indikator melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Salah satunya adalah terjadinya beban ganda penyakit, yaitu masih tingginya kasus penyakit menular seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah Dengue, sementara pada saat yang sama penyakit tidak menular seperti Diabetes Mellitus, Hipertensi, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Selain itu, tingkat literasi kesehatan masyarakat yang masih terbatas menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami informasi kesehatan secara benar, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pencarian layanan kesehatan maupun ketidakpatuhan terhadap pengobatan. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya stigma sosial terhadap penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, gangguan jiwa, dan kusta yang menyebabkan penderita cenderung menutup diri dan tidak segera mengakses layanan kesehatan. Di beberapa komunitas, kepercayaan terhadap	kesehatan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain: • Upaya yang dilakukan antara lain melalui pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terintegrasi dengan kegiatan lintas program dan lintas sektor guna mempercepat penanganan kasus secara lebih efektif; • Promosi dan edukasi kesehatan kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), baik melalui penyuluhan di fasilitas kesehatan maupun kegiatan skrining kesehatan di Masyarakat, • Penguatan kapasitas pelayanan di puskesmas juga terus dilakukan, disertai dengan monitoring layanan kesehatan secara berkala serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dan peran keluarga	berbagai tantangan yang masih dihadapi, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan, sebagai berikut: • Pemerintah Kota Balikpapan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif melalui peningkatan literasi kesehatan masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya perilaku hidup sehat serta mampu melakukan pencegahan penyakit sejak dini; • Penguatan deteksi dini terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular akan diperluas cakupannya melalui optimalisasi layanan skrining di fasilitas kesehatan maupun di tingkat masyarakat; • Pengembangan inovasi layanan kesehatan berbasis siklus kehidupan akan terus didorong untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh kelompok usia secara lebih komprehensif;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pengobatan tradisional juga masih cukup kuat sehingga penanganan medis seringkali tertunda; Faktor keberhasilan. Di sisi lain, capaian indikator yang melampaui target dipengaruhi oleh berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang relatif merata serta mudah dijangkau masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya akses layanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan juga semakin baik melalui dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, ketersediaan obat-obatan, serta pemenuhan peralatan medis yang memadai. Selain itu, keberadaan sistem pembiayaan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan turut meringankan beban biaya berobat masyarakat sehingga meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan. Keberhasilan juga didukung oleh berbagai program kesehatan masyarakat seperti kegiatan imunisasi, pelayanan posyandu, skrining penyakit, serta	dalam mendukung keberlanjutan pelayanan bagi penderita penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, gangguan jiwa, dan kusta sesuai standar pelayanan Kesehatan; • Berbagai inovasi kesehatan dikembangkan pada setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan, masa anak, usia produktif, hingga lanjut usia, termasuk inovasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular.	• Peningkatan kolaborasi lintas sektor, keterlibatan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat dalam program kesehatan akan terus diperkuat guna mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan secara berkelanjutan di Kota Balikpapan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pelaksanaan program promotif dan preventif yang semakin intensif.		
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,29	22,83	140,15%	Adapun capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan yang mendukung peningkatan pembangunan literasi masyarakat di Kota Balikpapan. Peningkatan nilai IPLM dipengaruhi oleh kontribusi berbagai komponen penilaian yang meliputi variabel sumber daya manusia, koleksi, pelayanan, pengelolaan, dan kepatuhan yang secara keseluruhan membentuk dimensi kinerja perpustakaan daerah. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai masing-masing komponen menunjukkan kontribusi positif, yaitu variabel SDM sebesar 0,303; koleksi sebesar 0,259; pelayanan sebesar 0,316; pengelolaan sebesar 0,396; serta kepatuhan sebesar 0,281, yang secara kumulatif menghasilkan dimensi kinerja sebesar 0,356 dan membentuk capaian IPLM Kota Balikpapan sebesar 22,83 poin. Selain itu, keberhasilan capaian indikator juga dipengaruhi oleh peningkatan kualitas dan ragam layanan literasi yang diberikan kepada	Dalam rangka meningkatkan pembangunan literasi masyarakat serta memperluas jangkauan layanan perpustakaan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui perangkat daerah terkait telah melakukan berbagai langkah strategis. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan jumlah serta variasi layanan literasi berbasis masyarakat dan teknologi digital agar akses terhadap bahan bacaan dan sumber informasi dapat semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pengembangan inovasi layanan literasi seperti pojok baca digital, spot baca, serta layanan literasi berbasis daring melalui Web Book Pustaka Balikpapan turut menjadi alternatif untuk meningkatkan pemanfaatan perpustakaan di era digital.	Untuk menjaga keberlanjutan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat serta memperkuat budaya literasi di Kota Balikpapan, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan terus memperluas jangkauan layanan perpustakaan berbasis komunitas dan teknologi digital agar akses terhadap bahan bacaan semakin merata di seluruh wilayah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan juga perlu dilakukan guna mendukung kualitas pelayanan literasi yang lebih optimal. Selanjutnya, penguatan kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, serta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							masyarakat. Pada tahun 2025 terdapat penambahan 7 layanan literasi, sehingga total layanan yang tersedia menjadi 29 layanan. Penambahan layanan tersebut antara lain berupa Titik Baca (Pojoy Baca Digital), Spot Baca, Web Book Pustaka Balikpapan, BapaK RM (BalikpapanKu Rajin Membaca), POCADI (Pojoy Baca Digital), Theater Literasi (Therasi), serta program Pelajar Inovatif Bersinergi untuk Literasi Digital (Pisang Gapit). Beragam inovasi layanan tersebut turut memperluas akses masyarakat terhadap sumber bacaan, meningkatkan minat baca, serta memperkuat pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan literasi. Upaya peningkatan budaya literasi tersebut juga didukung melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang secara langsung mendorong pengembangan perpustakaan daerah dan pembudayaan gemar membaca di masyarakat, antara lain melalui Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota serta kegiatan pembudayaan	Di samping itu, penguatan program pembudayaan gemar membaca terus dilakukan melalui berbagai kegiatan literasi yang melibatkan pelajar, komunitas, dan masyarakat umum, termasuk melalui kegiatan literasi kreatif seperti Theater Literasi (Therasi) dan program literasi digital bagi pelajar melalui kegiatan Pelajar Inovatif Bersinergi untuk Literasi Digital (Pisang Gapit).	berbagai pemangku kepentingan lainnya perlu terus ditingkatkan guna memperluas gerakan pembudayaan gemar membaca di masyarakat. Di samping itu, pengembangan inovasi layanan literasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat juga perlu terus didorong untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan literasi masyarakat secara berkelanjutan di Kota Balikpapan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.		
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209	0,1163	55,65%	Adapun kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya capaian indikator. Salah satu faktor utama adalah keterbatasan cakupan serta keberlanjutan program pembinaan kepemudaan dan keolahragaan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh potensi pemuda dan atlet di Kota Balikpapan. Partisipasi pemuda dan atlet dalam berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, pembinaan prestasi olahraga, maupun aktivitas kepemudaan juga belum merata, sehingga kontribusi terhadap peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan masih terbatas. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana olahraga serta fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga masih perlu ditingkatkan agar program yang dilaksanakan dapat berjalan lebih terpadu dan	Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi serta mendorong peningkatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Disporapar Kota Balikpapan telah melakukan berbagai langkah perbaikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan kualitas dan jangkauan program pembinaan kepemudaan serta olahraga prestasi agar mampu menjangkau lebih banyak pemuda dan atlet potensial. Selain itu, fasilitasi kegiatan pelatihan, pembinaan atlet, serta penyelenggaraan event olahraga dan kegiatan kepemudaan juga terus dilakukan secara lebih terarah guna meningkatkan motivasi, partisipasi, dan prestasi pemuda di berbagai bidang.	Untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan pada periode selanjutnya, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan memperluas cakupan serta keberlanjutan program pembinaan kepemudaan dan olahraga prestasi agar lebih banyak pemuda dan atlet yang terfasilitasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas dan peningkatan prestasi. Selain itu, peningkatan kualitas serta pemerataan sarana dan prasarana olahraga perlu terus dilakukan secara bertahap guna mendukung pengembangan potensi atlet dan kegiatan kepemudaan secara lebih optimal.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							saling mendukung. Sistem pendataan dan pemutakhiran data kepemudaan serta olahraga juga belum sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi ketepatan dalam perencanaan dan evaluasi program. Faktor lain yang turut mempengaruhi capaian indikator adalah dinamika kebijakan nasional, khususnya dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada pengurangan alokasi anggaran untuk paket meeting, kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/sosialisasi, serta belanja perjalanan dinas lainnya. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi intensitas pelaksanaan kegiatan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan selama tahun berjalan.	Di samping itu, Disporapar juga memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah, organisasi kepemudaan, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan sinergi program pengembangan kepemudaan dan keolahragaan. Upaya pembenahan sarana dan prasarana olahraga juga dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah. Selain itu, penguatan sistem pendataan dan evaluasi kinerja program terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat lebih terukur serta memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan nilai indeks.	Selanjutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepemudaan, lembaga pendidikan, dan komunitas olahraga perlu terus ditingkatkan guna menciptakan ekosistem pembinaan kepemudaan dan olahraga yang lebih terpadu. Di samping itu, pengembangan sistem pendataan kepemudaan dan keolahragaan yang lebih terintegrasi juga perlu terus dilakukan agar perencanaan kebijakan dan program dapat disusun secara lebih tepat sasaran serta berbasis data.
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4965	0,493	99,30%	Salah satu kendala yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah objek yang dapat ditetapkan sebagai cagar budaya dalam satu tahun anggaran. Hal ini disebabkan oleh proses penyidikan yang memerlukan waktu	Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi serta mendorong peningkatan capaian indikator warisan budaya, Pemerintah Kota Balikpapan melalui perangkat daerah	Untuk meningkatkan capaian indikator Indeks Warisan Budaya pada periode selanjutnya, diperlukan beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							cukup panjang, mulai dari tahapan identifikasi, kajian, hingga proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Selain itu, ketersediaan waktu dari tim ahli yang terlibat dalam proses penilaian juga menjadi faktor pembatas, yang pada akhirnya turut berkorelasi dengan keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung proses tersebut. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung upaya pelestarian warisan budaya di Kota Balikpapan. Salah satunya adalah adanya kolaborasi yang cukup baik antara perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk unsur masyarakat, pihak swasta, dan instansi seperti Kodam VI/Mulawarman, dalam mendukung proses identifikasi, pengusulan, dan penetapan objek cagar budaya. Sinergi tersebut turut membantu memperkuat upaya pelestarian dan perlindungan warisan budaya daerah.	terkait telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) di Kota Balikpapan secara lebih komprehensif. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi, melaporkan, serta menjaga keberadaan objek yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan proses identifikasi dan pengusulan objek cagar budaya dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga terus dilakukan guna mendukung proses pengusulan dan penetapan cagar budaya secara	Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan efektivitas proses identifikasi, kajian, dan penetapan objek cagar budaya melalui penguatan koordinasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya serta pemangku kepentingan terkait. Selain itu, peningkatan alokasi sumber daya, baik dari sisi anggaran maupun dukungan teknis, juga perlu dipertimbangkan guna mempercepat proses penetapan cagar budaya. Selanjutnya, penguatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya perlu terus dilakukan agar kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga objek budaya semakin meningkat. Di samping itu, pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelestarian budaya perlu terus dioptimalkan, antara lain melalui Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, yang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
								lebih efektif, termasuk melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga terkait, serta komunitas pemerhati budaya.	mencakup kegiatan pengelolaan kebudayaan, pelestarian kesenian tradisional, pembinaan lembaga adat, penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota, serta pengelolaan cagar budaya di Kota Balikpapan.
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,98	91,04	100,07%	Faktor yang mendorong keberhasilan: - Meningkatnya capaian Umur Harapan Hidup (UHH) baik secara umum maupun menurut jenis kelamin dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kota Balikpapan semakin baik, yang tercermin dari meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan, kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta dukungan program pembangunan di sektor kesehatan; - Peran sektor pendidikan juga memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan IPG. Pendidikan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membuka kesempatan yang lebih luas bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan, sehingga	Dalam rangka meningkatkan kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya strategis melalui program pembangunan di berbagai sektor, antara lain: - Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, program pencegahan penyakit, serta peningkatan fasilitas kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas hidup Masyarakat; - Pemerintah Kota Balikpapan juga terus mendorong peningkatan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, melalui	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender pada periode berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis yang berfokus pada penguatan indikator penyusun IPG, antara lain: - Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat guna mendorong peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) melalui penguatan layanan kesehatan preventif dan promotif serta peningkatan akses layanan kesehatan yang merata; - Melakukan peningkatan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan memperluas akses pendidikan serta meningkatkan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							mampu mendukung pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan; Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesetaraan akses pendidikan bagi laki-laki dan perempuan. Mayoritas keluarga di Kota Balikpapan tidak lagi membatasi kesempatan pendidikan hanya bagi laki-laki, namun juga mendorong perempuan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini berkontribusi pada meningkatnya rata-rata lama sekolah serta kualitas sumber daya manusia perempuan di daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berpotensi mempengaruhi peningkatan IPG secara lebih optimal, antara lain: Masih adanya kesenjangan kesempatan kerja dan partisipasi ekonomi antara laki-laki dan perempuan pada beberapa sektor usaha. Kondisi ini menyebabkan kontribusi perempuan dalam aktivitas	penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta berbagai program yang mendukung peningkatan partisipasi pendidikan Masyarakat; - Melaksanakan program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas perempuan, antara lain melalui pelatihan keterampilan, penguatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor Pembangunan; - Penguatan implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan.	kualitas layanan pendidikan sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi; - Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) melalui berbagai program yang mendorong keberlanjutan pendidikan serta peningkatan partisipasi pendidikan Masyarakat; - Melakukan penguatan pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi dan pembangunan, sehingga perempuan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan Keputusan; - Melakukan penguatan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender secara lebih terintegrasi di seluruh perangkat daerah, sehingga setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang lebih

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							ekonomi belum sepenuhnya setara dengan laki-laki; - Pada sebagian kelompok masyarakat masih terdapat tantangan sosial dan budaya yang mempengaruhi peran perempuan dalam pembangunan, seperti keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan karier atau usaha akibat tanggung jawab domestik yang lebih besar; - Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam seluruh program pembangunan daerah, sehingga manfaat pembangunan pada beberapa sektor belum sepenuhnya terdistribusi secara setara antara laki-laki dan perempuan.		setara bagi laki-laki dan perempuan serta mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia secara berkelanjutan di Kota Balikpapan.
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	82	65,56	79,95%	Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target indikator tersebut adalah penyediaan air bersih yang merupakan salah satu komponen dalam perhitungan indeks pembangunan infrastruktur. Ketersediaan sumber air baku baru belum optimal karena rencana pemanfaatan Embung Aji Raden masih menghadapi kendala pada proses pengadaan lahan sehingga pembangunan	Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan melalui pembangunan, peningkatan, serta rehabilitasi beberapa ruas jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi;	Pemerintah Kota Balikpapan perlu mempercepat penyelesaian proses pengadaan lahan untuk pembangunan Embung Aji Raden sehingga pengembangan sumber air baku baru dapat segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan layanan air bersih bagi Masyarakat;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							embung belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, rencana pemanfaatan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi masih memerlukan evaluasi lebih lanjut terkait kelayakan skema pembiayaan dan mekanisme kerja sama penyediaan air baku, sehingga pemanfaatannya untuk mendukung peningkatan cakupan layanan air bersih di Kota Balikpapan belum dapat direalisasikan secara optimal. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber air baku yang dimiliki Kota Balikpapan, sehingga penyediaan air bersih sangat bergantung pada pengembangan sumber air baru dan kerja sama dengan wilayah sekitar. Kondisi geografis dan keterbatasan sumber daya air permukaan menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan sistem penyediaan air minum. Meskipun demikian, pada beberapa aspek infrastruktur lainnya telah menunjukkan	• Pada aspek tingkat pelayanan jalan, pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai upaya peningkatan manajemen lalu lintas serta penataan jaringan jalan untuk meningkatkan kelancaran arus lalu lintas pada beberapa ruas jalan utama; • Pada aspek infrastruktur drainase, dilakukan peningkatan kapasitas saluran drainase serta kegiatan normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase guna mengurangi potensi genangan air pada kawasan perkotaan; • Pada aspek kualitas lingkungan, pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai program peningkatan pengelolaan lingkungan, antara lain melalui pengelolaan persampahan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan;	• Diperlukan percepatan evaluasi serta penyusunan skema pembiayaan yang tepat terkait pemanfaatan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi, sehingga potensi sumber air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu terus meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas jalan dengan tingkat mobilitas tinggi guna meningkatkan kualitas dan kenyamanan mobilitas Masyarakat; • Pada aspek drainase, diperlukan peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan drainase perkotaan, termasuk normalisasi saluran drainase pada kawasan rawan genangan guna meningkatkan kemampuan sistem drainase dalam mengalirkan air; • Perlu dilakukan penguatan pengelolaan lingkungan perkotaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							perkembangan yang cukup baik dan turut mendukung peningkatan kualitas infrastruktur daerah, antara lain pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengelolaan drainase perkotaan, serta upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.	Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan optimalisasi sistem penyediaan air minum yang telah tersedia, termasuk peningkatan efisiensi distribusi air dan pengurangan tingkat kehilangan air pada jaringan perpipaan.	secara berkelanjutan, termasuk peningkatan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, serta peningkatan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas lingkungan perkotaan.
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,64	75,55	105,46%	Adapun faktor keberhasilan yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut: - Perubahan metode penilaian dan perhitungan IKLH yang mempengaruhi hasil pengukuran indeks; - Konsistensi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah; - Penerapan pendekatan spasial dalam pengelolaan lingkungan sehingga intervensi program lebih tepat sasaran; - Pengendalian sumber pencemar secara langsung melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha dan aktivitas Masyarakat; - Kolaborasi dengan dunia usaha melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i>	Dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan serta mempertahankan capaian kualitas lingkungan hidup, beberapa langkah telah dilakukan, antara lain: - Melakukan perencanaan pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan media lingkungan yang representatif sesuai kriteria dalam Permen LH Nomor 14 Tahun 2025; - Mengintegrasikan program pengelolaan kualitas air, udara, dan lahan dalam satu pendekatan spasial agar intervensi lingkungan lebih efektif; - Mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha melalui	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian IKLH pada periode berikutnya, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain: - Penguatan sistem pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perkembangan metode penilaian IKLH, serta peningkatan integrasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga kebijakan lingkungan dapat terimplementasi secara lebih efektif dalam berbagai sektor Pembangunan; - Perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							(CSR) yang mendukung kegiatan perlindungan dan pemulihan lingkungan; - Pemanfaatan teknologi serta sistem informasi lingkungan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi lingkungan. Selain itu, faktor keberhasilan lainnya apabila dilihat dari indeks penyusun IKLH yang meliputi indeks kualitas lahan, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air, sebagai berikut: - Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Lahan (IKL) Peningkatan kualitas lahan dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan lingkungan daerah, antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, KLHS RPJPD, serta kajian lingkungan pada dokumen penataan ruang seperti KLHS Revisi RTRW Kota Balikpapan 2024–2043 dan KLHS Revisi	program CSR yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup; - Menerapkan pendekatan intervensi lingkungan berbasis segmen wilayah untuk meningkatkan ketepatan penanganan permasalahan lingkungan; - Sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), Pemerintah Kota Balikpapan telah mendorong penerapan kebijakan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada pembangunan kawasan perdagangan dan jasa sehingga setiap pembangunan baru tetap menyediakan ruang terbuka hijau yang mampu meningkatkan daya serap air serta mengurangi potensi banjir. Selain itu, dilakukan penguatan perlindungan kawasan hijau melalui penyediaan ruang	kepentingan lainnya perlu terus didorong dalam upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan dengan komunitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan, antara lain melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							RDTR Kota Balikpapan 2021–2041. Dokumen tersebut memuat kebijakan perlindungan kawasan lindung, peningkatan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, serta pengembangan kawasan sempadan dan kawasan penyangga hutan lindung. Selain itu, upaya pemulihan fungsi lahan juga dilakukan melalui program rehabilitasi lahan kritis, reforestasi, penataan kawasan sempadan sungai dan pesisir, konservasi lahan, penanaman pohon, serta perlindungan kawasan lindung seperti hutan kota, rimba kota, dan taman lingkungan yang berkontribusi dalam meningkatkan daya dukung lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Udara (IKU) Peningkatan kualitas udara dipengaruhi oleh berbagai intervensi pengendalian pencemaran udara, khususnya pada sektor transportasi dan pengelolaan jalur hijau perkotaan. Penyesuaian target juga	terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota yang terdiri atas ruang terbuka hijau publik seperti taman kota dan koridor hijau jalan serta ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman vertikal; Upaya lain yang telah dilakukan adalah penerapan konsep urban green <i>infrastructure</i> atau infrastruktur hijau perkotaan serta pengembangan program Bapak Asuh RTH Tematik yang melibatkan partisipasi dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pendanaan, pengelolaan, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau. Hingga akhir tahun 2025 telah tercatat tujuh perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu juga dilakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman buah pada kawasan daerah tangkapan air serta rehabilitasi dan penanaman	Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; - Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan penguatan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% secara konsisten melalui pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada pembangunan kawasan baru. Selain itu, kemitraan dengan dunia usaha melalui program CSR perlu diperluas untuk mendukung kegiatan penanaman pohon, pengembangan taman kota, serta rehabilitasi kawasan pesisir dan daerah tangkapan air; - Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara, diperlukan penguatan sistem pemantauan kualitas udara melalui penambahan titik pemantauan serta optimalisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							dipengaruhi oleh perubahan metode penilaian kualitas udara berdasarkan kesepakatan rapat teknis Ditjen PPKL melalui Berita Acara Nomor BA-23/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 yang memasukkan parameter PM2.5 sebagai komponen baru dalam pengukuran kualitas udara. Selain itu, upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui penanaman pohon pada median dan jalur hijau jalan protokol sebagai kompensasi penebangan pohon, pengendalian penebangan pohon melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penebangan Pohon, pelaksanaan uji emisi kendaraan dan kegiatan traffic counting secara rutin, serta penambahan titik pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dan sistem pemantauan kualitas udara perkotaan. Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Air (IKA)	mangrove di kawasan pesisir menggunakan metode planter bag dan buispot; - Pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), alternatif solusi yang dilakukan meliputi penambahan titik pemantauan kualitas udara melalui metode <i>passive sampler</i> pada beberapa lokasi yang mewakili aktivitas transportasi, pemukiman, perkantoran, dan industri. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin alat pantau kualitas udara milik pemerintah daerah serta pemantauan kualitas udara secara manual aktif pada beberapa titik pantau yang telah ditetapkan dalam dokumen informasi kinerja lingkungan daerah; - Upaya lainnya adalah pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala di berbagai lokasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya	pemanfaatan alat pemantau yang tersedia. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan frekuensi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian emisi dari kegiatan industri, serta perluasan program penanaman pohon pada koridor jalan dan kawasan perkotaan guna meningkatkan kapasitas penyerapan emisi; Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan penguatan pengendalian pencemaran air melalui peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sepanjang aliran sungai, perluasan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal, serta percepatan implementasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah berbasis <i>wetland</i> pada kawasan hulu sungai. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk menyinkronkan sistem

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Pencapaian kualitas air dipengaruhi oleh hasil pemantauan kualitas air pada tujuh sungai utama di Kota Balikpapan yang menjadi objek pemantauan nasional, yaitu Sungai Manggar, Sungai Sember, Sungai Klandasan Besar, Sungai Klandasan Kecil, Sungai Teritip, Sungai Wain, dan Sungai Brenga. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala dua kali dalam setahun pada musim kemarau dan musim hujan sesuai titik pantau yang telah disepakati dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Upaya peningkatan kualitas air juga didukung oleh kolaborasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan usaha, pengawasan kegiatan usaha di sepanjang aliran sungai, serta penambahan sistem pemantauan kualitas air secara daring melalui perangkat ONLIMO pada Waduk Manggar dan Waduk Wonorejo.	pengendalian emisi kendaraan. Pengujian juga dilakukan terhadap sumber emisi tidak bergerak seperti cerobong genset pada berbagai kegiatan usaha. Di samping itu, pemerintah daerah menegakkan regulasi terkait pengendalian penebangan pohon serta mendorong penanaman kembali pohon pada median jalan dan jalur hijau sebagai kompensasi dari kegiatan penebangan yang dilakukan oleh pelaku usaha atau kegiatan Pembangunan; • Pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA), upaya yang telah dilakukan antara lain penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan usaha sebagai bentuk pengendalian pencemaran air. Selain itu dilakukan kolaborasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal dan fasilitas pengolahan limbah	pemantauan kualitas air serta memperkuat basis data pemantauan lingkungan hidup secara terpadu.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama terkait perubahan kebijakan dan metode penilaian IKLH. Tantangan tersebut muncul seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang membawa penyesuaian terhadap komponen, indikator, serta metode penghitungan IKLH. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam proses pengukuran, pemantauan, serta pengelolaan data lingkungan hidup di daerah.	domestik lainnya bersama perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengelolaan air limbah Masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyusun kajian studi kelayakan pembangunan IPAL <i>wetland</i> di Waduk Wonorejo sebagai upaya pengolahan air limbah secara alami sebelum memasuki badan sungai, serta menyusun kajian rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air DAS Manggar sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran air di wilayah kota. Selain itu dilakukan pemantauan kualitas air Waduk Manggar sebagai sumber air baku kota secara rutin, serta penyesuaian metode pemantauan kualitas air sesuai ketentuan teknis dari kementerian terkait dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah provinsi dalam	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
								sinkronisasi titik pengambilan sampel air.	
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	99,43	89,43	111,18%	Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan kolaboratif oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama pemangku kepentingan terkait dalam upaya pengurangan risiko bencana, antara lain: - Keberhasilan tersebut didukung oleh telah terpenuhinya dokumen dasar kebencanaan yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon) dan berbagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana; - Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif melaksanakan rapat koordinasi terkait Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait guna mengumpulkan bukti dukung	- Pemerintah Kota Balikpapan secara rutin melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur daerah, tim penanggulangan bencana, serta relawan kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat; - Program edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai media, termasuk pemanfaatan media sosial, pelaksanaan pelatihan kebencanaan di sekolah, serta simulasi kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan Masyarakat; - Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi, forum kebencanaan, serta pembinaan kepada	- Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Risiko Bencana pada periode berikutnya, perlu dilakukan penguatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam kebijakan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana; - Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data serta informasi kebencanaan perlu terus dilakukan secara berkala, termasuk pemetaan wilayah rawan bencana berbasis spasial guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran; - Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebencanaan, penguatan koordinasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							kinerja penanggulangan bencana. Kegiatan ini mendorong terwujudnya sinergi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana; - Kontribusi data dan informasi dari berbagai perangkat daerah, antara lain Bappeda Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta seluruh kecamatan di Kota Balikpapan, sehingga memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan dalam penilaian IRB dan IKD; - Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur daerah serta memperbaiki kualitas data dan indikator yang digunakan	perangkat daerah terkait guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana; Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, respons tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	lintas sektor, serta peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; - Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu terus diperluas melalui penguatan program kelurahan tangguh bencana, peningkatan literasi kebencanaan, serta pembinaan relawan kebencanaan di tingkat Masyarakat; - Optimalisasi pelaksanaan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural, termasuk penguatan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana perlu terus dilakukan untuk mengurangi potensi dampak bencana di masa mendatang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							dalam pengukuran ketahanan daerah terhadap bencana; Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta dukungan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana turut memperkuat kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap potensi bencana yang terjadi. Dari sisi kendala yang masih dihadapi, risiko bencana di Kota Balikpapan masih dipengaruhi oleh potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, yang dipicu oleh faktor perubahan iklim, dinamika penggunaan lahan, serta meningkatnya kepadatan penduduk pada kawasan tertentu yang berpotensi meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana.		
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8675	1,05	121,04%	Salah satu faktor yang mendukung peningkatan capaian tersebut adalah penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda)	Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penguatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui	Penguatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara konsisten melalui peningkatan intensitas patroli,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui pelaksanaan patroli rutin, operasi penertiban, serta penanganan berbagai pelanggaran ketertiban umum seperti aktivitas perdagangan di zona terlarang, operasional pom mini dan penjualan bensin eceran ilegal, serta tempat hiburan malam yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan jam operasional. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan operasi penertiban dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pembentukan Regu <i>Service Center</i> (SC) dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang beroperasi selama 24 jam turut meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani laporan dan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.	peningkatan intensitas patroli serta operasi penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, seperti penertiban pedagang kaki lima di zona terlarang, penertiban pom mini ilegal, serta pengawasan operasional tempat hiburan malam; • Upaya peningkatan ketertiban juga dilakukan melalui penguatan kapasitas dan respons cepat Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain melalui pembentukan Regu <i>Service Center</i> (SC) dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas merespons laporan masyarakat secara cepat selama 24 jam; • Pemerintah Kota Balikpapan juga meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perkada melalui berbagai media komunikasi seperti spanduk, selebaran, media sosial, serta penyuluhan langsung	operasi penertiban terpadu, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum; • Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja perlu terus dilakukan melalui penambahan jumlah personel, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan di lapangan; • Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan ketertiban umum perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui optimalisasi sistem pemantauan berbasis CCTV dan integrasi data pengawasan dengan perangkat daerah terkait guna mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran ketertiban; • Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum perlu terus didorong melalui peningkatan sosialisasi Perda dan Perkada, penguatan forum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Di sisi lain, meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Dinamika sosial akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Balikpapan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya kepadatan lalu lintas, munculnya permukiman tidak teratur, serta aktivitas ekonomi informal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang sedang berlangsung di Kota Balikpapan juga berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap ketertiban masyarakat, khususnya terkait lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek.	kepada kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan ketertiban umum. - Pemerintah Kota Balikpapan juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, serta organisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan aturan dan menjaga stabilitas keamanan di Masyarakat; - Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga dioptimalkan melalui kegiatan deteksi dini potensi konflik sosial, pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, serta penguatan forum komunikasi masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di masyarakat.	komunikasi masyarakat, serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.; Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kota Balikpapan.
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah,	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	21	14,17	67,48%	Salah satu faktor utama yang mempengaruhi belum tercapainya target adalah masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum melengkapi perizinan usaha berupa Nomor	Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan usaha mikro melalui pendampingan,	Penguatan pendataan dan legalisasi usaha mikro, khususnya melalui percepatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
	Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan						Induk Berusaha (NIB). Kondisi ini menyebabkan sebagian unit usaha mikro belum tercatat secara formal dalam sistem pendataan usaha, sehingga mempengaruhi kelengkapan basis data usaha mikro dan berdampak pada capaian indikator pertumbuhan usaha mikro yang dihitung berdasarkan data usaha formal. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha mikro yang menjalankan kegiatan usaha secara informal dan belum melakukan proses legalisasi usaha karena keterbatasan informasi mengenai proses perizinan, keterbatasan kapasitas administrasi, maupun persepsi bahwa proses perizinan usaha cukup kompleks. Namun, perkembangan usaha mikro di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang cukup positif. Berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) Tahun 2025, jumlah pelaku usaha mikro yang telah terdaftar mencapai 13.291 pelaku usaha mikro yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Balikpapan.	peningkatan kapasitas, serta fasilitasi promosi produk UMKM guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro di daerah; • Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain kemitraan usaha mikro, layanan UMKM terpadu, serta pendampingan perizinan dan legalitas usaha, termasuk sosialisasi terkait sertifikasi halal, informasi nilai gizi, kekayaan intelektual, standar nasional Indonesia (SNI Bina UMK), serta registrasi hak cipta, merek, dan sertifikasi halal. • Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia UMKM melalui berbagai kegiatan pelatihan, seperti pelatihan kerajinan, pelatihan kewirausahaan digital, kurasi dan pendampingan	mikro yang belum memiliki legalitas usaha; • Peningkatan sosialisasi dan pendampingan terkait kemudahan perizinan berusaha berbasis risiko perlu terus dilakukan agar pelaku usaha mikro lebih memahami manfaat legalitas usaha, termasuk kemudahan akses terhadap pembiayaan, program pembinaan pemerintah, serta peluang perluasan pasar; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, perguruan tinggi, komunitas wirausaha, serta dunia usaha untuk mendukung pengembangan usaha mikro melalui program kemitraan, akses pembiayaan, serta peningkatan kapasitas usaha; • Penguatan program pengembangan usaha mikro berbasis inovasi dan digitalisasi, termasuk peningkatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Kecamatan Balikpapan Utara tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelaku usaha mikro tertinggi, diikuti oleh Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur. Sementara itu, berdasarkan jumlah unit usaha mikro secara keseluruhan, hingga Tahun 2025 tercatat sebanyak 100.688 unit usaha mikro yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan dan pemerataan usaha mikro di Kota Balikpapan telah berkembang cukup baik dan menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat.	UMKM, serta dukungan tenaga pendamping UMKM untuk membantu pelaku usaha dalam pengembangan usaha dan peningkatan kualitas produk; Pemerintah Kota Balikpapan memberikan fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM melalui berbagai kegiatan, antara lain pelaksanaan bazaar UMKM, gebyar UMKM, promosi produk di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggah Balikpapan, kegiatan fashion dan lomba batik, operasional Galeri Dekranasda, serta partisipasi dalam berbagai pameran produk UMKM di dalam maupun luar daerah.	literasi digital bagi pelaku UMKM, pemanfaatan platform pemasaran digital, serta pengembangan desain dan teknologi produk guna meningkatkan daya saing usaha mikro di pasar yang lebih luas; Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan UMKM juga perlu terus dilakukan, khususnya melalui Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM, sehingga dapat mendorong peningkatan jumlah usaha mikro formal, peningkatan skala usaha, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,09	5,84	104,28%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: Terjalinnya kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) milik kementerian serta PPSDM Cepu dalam penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga memberikan kesempatan bagi pencari	Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan kerja sama dengan BBPVP milik kementerian dan PPSDM Cepu dalam rangka memperluas akses pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja di daerah;	Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode berikutnya, perlu dilakukan penguatan program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							kerja untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry; • Peningkatan kerja sama dengan perusahaan di Kota Balikpapan terkait penyampaian informasi lowongan kerja dan peluang pemagangan turut memberikan kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia; • Dukungan terhadap stabilitas ketenagakerjaan juga diperkuat melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan hubungan industrial serta keberadaan mediator hubungan industrial yang telah memiliki kompetensi, sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara lebih efektif dan kondusif; • Upaya membangun kesadaran para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat turut berkontribusi dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan Perusahaan;	• Penguatan kerja sama dengan perusahaan di Kota Balikpapan juga dilakukan untuk meningkatkan akses informasi lowongan kerja serta peluang pemagangan bagi pencari kerja, sehingga dapat mempercepat proses penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan hubungan industrial, termasuk peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial agar proses penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara profesional dan efektif; • Upaya lain yang dilakukan adalah membangun kesadaran para pihak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pendekatan musyawarah mufakat, sehingga konflik ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara damai	• Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu memperluas kerja sama dengan perusahaan, lembaga pelatihan kerja, serta lembaga sertifikasi profesi guna meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas peluang sertifikasi kompetensi bagi pencari kerja; • Peningkatan program pemagangan di perusahaan sebagai jembatan bagi pencari kerja baru untuk memperoleh pengalaman kerja yang relevan sebelum memasuki pasar kerja secara penuh; • Penguatan sistem informasi pasar kerja juga perlu terus dilakukan melalui optimalisasi layanan antar kerja, pengelolaan informasi lowongan kerja secara digital, serta peningkatan koordinasi dengan perusahaan dalam penyampaian kebutuhan tenaga kerja; • Peningkatan kualitas hubungan industrial perlu terus dilakukan melalui penguatan peran mediator hubungan industrial, peningkatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan koordinasi dengan perusahaan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, sehingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain: - Sebagian besar lowongan kerja yang tersedia masih mempersyaratkan pengalaman kerja, sementara sasaran peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagian besar merupakan pencari kerja baru (<i>fresh graduate</i>) yang belum memiliki pengalaman kerja; - Program pemagangan yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pengalaman kerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh peserta pelatihan, karena masih terdapat peserta	dan tidak berdampak pada stabilitas hubungan kerja; - Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja serta penyampaian informasi lowongan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga informasi pasar kerja dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas; - Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui beberapa program strategis, antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	kesadaran hukum ketenagakerjaan bagi pekerja dan pengusaha, serta peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara dialogis dan konstruktif; Optimalisasi pelaksanaan berbagai program ketenagakerjaan, khususnya Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, juga perlu terus dilakukan guna memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							yang belum bersedia memanfaatkan peluang pemagangan di Perusahaan; - Jumlah kejuruan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Balikpapan masih terbatas, serta masih terbatasnya keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja; - Dalam aspek hubungan industrial, hambatan juga dapat terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena masing-masing pihak seringkali memiliki pendirian yang kuat sehingga sulit mencapai kesepakatan, serta terdapat pula kondisi dimana perusahaan mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
		Tingkat Kemiskinan	%	2,15	1,97	109,14%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: Peran aktif Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara konsisten melakukan pendataan dan verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), monitoring penyaluran bantuan	Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pembentukan tim petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan daerah yang bertugas	Sebagai upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem pemutakhiran data kemiskinan secara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							sosial, serta memberikan sosialisasi terkait peningkatan gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta upaya pencegahan stunting. Pendampingan ini membantu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat; • Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan melalui kegiatan bimbingan dan sosialisasi kepada peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) turut mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan peralatan usaha seperti alat memasak dan pembuatan kue memberikan kesempatan bagi kelompok sasaran untuk mengembangkan usaha kecil sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga; • Upaya peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga dilakukan melalui pemutakhiran	melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSN). Melalui kegiatan ini diharapkan data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan mutakhir sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah terkait dan pemerintah pusat, dalam rangka memastikan proses pemutakhiran data kemiskinan serta penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.	berkala melalui integrasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan akses pelatihan keterampilan, dukungan usaha produktif, serta fasilitasi pemasaran produk usaha mikro sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pengelolaan program perlindungan sosial, khususnya dalam hal pemutakhiran data penerima bantuan dan percepatan penyaluran bantuan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							kepesertaan BPJS Kesehatan, baik bagi peserta yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, sehingga masyarakat miskin tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dasar tanpa terkendala biaya; - Dukungan perlindungan sosial juga diberikan melalui pemberian bantuan makanan siap saji dan bantuan sembako secara rutin kepada kelompok rentan seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas berat, anak terlantar, serta masyarakat terlantar yang berada di rumah penampungan sementara seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Lanjut Usia Terlantar (RPLUT), dan Rumah Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (RPODGJ). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan alat bantu seperti kaki palsu bagi penyandang disabilitas fisik untuk meningkatkan kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari; - Fasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asal serta pemberian akses		sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penguatan layanan rehabilitasi sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat rentan sehingga upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							perawatan kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang mengalami kondisi sakit, sehingga membantu mengurangi beban sosial serta memastikan kelompok rentan memperoleh penanganan yang layak. Namun, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: • Keterbatasan sumber daya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga belum seluruh permasalahan sosial dapat ditangani secara optimal; • Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang bersifat dinamis terkadang membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah; • Proses pemutakhiran dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang menjadi kewenangan		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sehingga proses penetapan penerima bantuan seringkali membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan mempengaruhi kecepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.		
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	24,5	27,254	111,24%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: - Salah satu faktor utama yang mendukung capaian tersebut adalah posisi strategis Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan pembangunan IKN memberikan efek pengganda (<i>multiplier effect</i>) terhadap pertumbuhan investasi di Kota Balikpapan, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, logistik, perumahan, dan berbagai industri pendukung yang terkait dengan kebutuhan pembangunan dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut; - Peningkatan kualitas pelayanan perizinan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan berbasis <i>Online Single Submission Risk Based Approach</i> (OSS-	Dalam rangka mendukung peningkatan realisasi investasi daerah, Pemerintah Kota Balikpapan melalui DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan inovasi pelayanan. - Salah satu langkah yang dilakukan adalah evaluasi terhadap metode penetapan target kinerja tahunan, dimana target realisasi investasi daerah disesuaikan dengan target turunan dari target investasi Provinsi Kalimantan Timur kepada Kota Balikpapan, sehingga perencanaan target menjadi lebih realistis dan terukur; - Pemerintah Kota Balikpapan memberikan layanan konsultasi	Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian realisasi investasi pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain; - Memperluas promosi potensi investasi daerah melalui penyusunan dan pemutakhiran peta potensi investasi yang lebih komprehensif serta promosi investasi yang lebih aktif kepada investor potensial baik di tingkat nasional maupun internasional; - Pemerintah Kota Balikpapan perlu mendorong diversifikasi investasi pada berbagai sektor ekonomi, khususnya sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							RBA). Penerapan sistem perizinan berbasis risiko, percepatan waktu pelayanan, serta pendampingan teknis kepada pelaku usaha memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan meningkatkan kepercayaan investor untuk merealisasikan investasinya di Kota Balikpapan; • Terealisasinya beberapa proyek investasi berskala besar pada tahun berjalan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total nilai investasi daerah; • Koordinasi dan sinergi lintas sektor yang efektif antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) dengan perangkat daerah teknis serta instansi terkait dalam mendukung kelancaran proses perizinan, penyelesaian kendala teknis, serta percepatan realisasi investasi di lapangan; • Kondisi stabilitas ekonomi daerah serta situasi keamanan yang kondusif juga menjadi faktor pendukung yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor dalam merealisasikan rencana investasinya di Kota Balikpapan.	dan pendampingan perizinan kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun melalui layanan daring. Pendampingan ini juga dilaksanakan melalui inovasi SiJEMPOL (Sistem Jemput Bola Langsung) yang memberikan layanan pendampingan perizinan secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan berkolaborasi bersama kecamatan maupun perangkat daerah teknis; • Pemerintah Kota Balikpapan melakukan fasilitasi percepatan perizinan bagi proyek-proyek strategis dan bernilai investasi besar, salah satunya melalui inovasi LKPM Hunter yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal; • Peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah teknis dalam rangka mempercepat penyelesaian	usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga struktur investasi daerah tidak hanya bergantung pada proyek-proyek berskala besar; • Upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga perlu terus dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan usaha yang telah memperoleh perizinan; • Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat pengawasan pasca perizinan dan monitoring realisasi investasi di lapangan, sehingga dapat memastikan bahwa investasi yang telah memperoleh izin benar-benar direalisasikan dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta penciptaan lapangan kerja; • Penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, peningkatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							Meskipun capaian indikator menunjukkan kinerja yang sangat baik, masih terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: • Struktur realisasi investasi yang masih bergantung pada beberapa investor atau proyek berskala besar, sehingga penyebaran investasi antar sektor maupun antar skala usaha belum sepenuhnya merata; • Kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kelengkapan dan akurasi data realisasi investasi yang menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja investasi daerah; • Keterbatasan pengawasan pasca perizinan terhadap realisasi kegiatan usaha di lapangan, baik dari sisi ketersediaan sumber daya pengawas maupun luasnya cakupan kegiatan usaha yang harus dipantau.	berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses perizinan maupun realisasi kegiatan investasi; Pemerintah Kota Balikpapan juga terus mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan aplikasi pelayanan perizinan, antara lain melalui optimalisasi sistem perizinan online SPONTAN, guna memberikan kemudahan, kecepatan, serta transparansi dalam proses pelayanan perizinan berusaha.	kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, serta optimalisasi pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan Program Promosi Penanaman Modal juga perlu terus dilakukan guna menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif dan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	90,85	102,08%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain; - Perbaikan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi kelompok pangan sayur dan buah, pangan hewani, serta kacang-kacangan terhadap komposisi konsumsi pangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi; - Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan yang cukup tinggi, dimana laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai sekitar 7,97% (<i>year-on-year</i>). Pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan akses terhadap pangan yang lebih berkualitas dan bergizi; - Terkendalinya tingkat inflasi daerah juga turut mendukung keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Pada Maret 2025, inflasi <i>year-on-year</i> Kota Balikpapan tercatat sebesar 1,38%, sehingga harga	Dalam rangka meningkatkan kualitas pola konsumsi pangan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya strategis, antara lain: - Penguatan promosi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, lomba penganekaragaman pangan, serta kampanye konsumsi pangan lokal kepada masyarakat; - Pemerintah Kota Balikpapan juga meningkatkan frekuensi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) guna memperluas akses masyarakat, khususnya kelompok masyarakat menengah ke bawah, terhadap pangan bergizi dengan harga yang terjangkau; - Mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, khususnya pemanfaatan komoditas seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan sebagai	Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian skor Pola Pangan Harapan di Kota Balikpapan, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut, yaitu: - Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA secara lebih luas dan berkelanjutan, khususnya kepada kelompok keluarga, sekolah, dan masyarakat perkotaan agar kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi semakin meningkat; - Penguatan program diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, dengan mendorong pemanfaatan komoditas pangan alternatif seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, serta produk olahan lokal sebagai sumber energi dan protein yang mudah diakses Masyarakat; - Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan juga perlu terus dilakukan melalui penguatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							pangan relatif stabil dan tidak menimbulkan tekanan yang signifikan terhadap konsumsi Masyarakat; • Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dilakukan secara berkelanjutan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk sekolah, instansi pemerintah, serta kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pola konsumsi pangan yang sehat dan seimbang; • Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara rutin juga memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan segar dengan harga terjangkau, khususnya komoditas sayur dan buah lokal yang menjadi komponen penting dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam peningkatan skor	alternatif sumber energi dan protein yang mudah diakses oleh Masyarakat; • Kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk dengan Dinas Perdagangan dan perangkat daerah terkait lainnya, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah; • Program peningkatan konsumsi pangan juga diintegrasikan dengan program percepatan penurunan stunting, melalui penyediaan pangan bergizi bagi kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, balita, dan keluarga berisiko stunting.	koordinasi lintas sektor serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program seperti Gerakan Pangan Murah; • Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan konsumsi energi masyarakat sesuai dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) melalui penyediaan pangan yang cukup secara kuantitas maupun kualitas, sehingga kebutuhan gizi masyarakat dapat terpenuhi secara optimal; • Penguatan program penyuluhan pertanian, pengembangan perikanan, serta peningkatan produksi pangan lokal juga perlu terus dilakukan guna menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Balikpapan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							PPH, salah satunya adalah belum optimalnya tingkat konsumsi energi masyarakat. Berdasarkan data tahun 2025, konsumsi energi rata-rata penduduk Kota Balikpapan baru mencapai 1.876,61 kkal/kapita/hari atau sekitar 89,36% dari target Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun keberagaman konsumsi pangan masyarakat telah mengalami peningkatan, namun dari sisi kuantitas konsumsi energi masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi secara optimal dan mendukung peningkatan skor PPH yang lebih tinggi di masa mendatang.		
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,68	2,804	104,63%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain; Meningkatnya intensitas promosi pariwisata, khususnya melalui pemanfaatan media digital dan berbagai platform media sosial. Strategi promosi yang lebih aktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi mampu menjangkau pasar wisata yang lebih luas	Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) telah melaksanakan berbagai langkah strategis, sebagai berikut: Penguatan promosi pariwisata berbasis digital, melalui pemanfaatan berbagai platform	Untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja sektor pariwisata di Kota Balikpapan, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain: Meningkatkan promosi pariwisata secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital dan kerja sama dengan berbagai platform

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							serta meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke Kota Balikpapan; • Kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, seperti pengelola destinasi wisata, pelaku usaha perhotelan, agen perjalanan, serta pelaku ekonomi kreatif, turut memperkuat promosi dan pengembangan produk wisata yang lebih menarik bagi wisatawan; • Penyelenggaraan berbagai event daerah maupun event berskala nasional juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Event-event tersebut tidak hanya menarik wisatawan dari dalam daerah, tetapi juga dari luar daerah, sehingga mampu meningkatkan mobilitas wisatawan ke Kota Balikpapan; • Faktor lain yang mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan adalah membaiknya konektivitas transportasi, baik transportasi udara maupun darat, yang memudahkan akses wisatawan menuju Kota Balikpapan sebagai salah satu pintu gerbang utama menuju kawasan Kalimantan Timur;	media sosial, website pariwisata, serta media promosi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata Kota Balikpapan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga menyelenggarakan berbagai event strategis di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan potensi budaya, kuliner, dan produk kreatif daerah kepada wisatawan; • Peningkatan kualitas destinasi wisata, baik melalui penataan kawasan wisata, peningkatan fasilitas pendukung, maupun pengembangan daya tarik wisata yang lebih inovatif; • Pengembangan sektor ekonomi kreatif juga terus didorong sebagai bagian dari ekosistem pariwisata daerah, sehingga mampu memperkaya pengalaman wisata sekaligus meningkatkan nilai	promosi pariwisata nasional maupun internasional; • Pengembangan dan diversifikasi produk wisata, termasuk wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, serta wisata berbasis ekonomi kreatif, sehingga mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan serta memperluas daya tarik destinasi; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan kualitas destinasi wisata dan fasilitas pendukung, baik dari sisi infrastruktur, kebersihan, kenyamanan, maupun aksesibilitas menuju lokasi wisata; • Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas masyarakat juga perlu terus didorong agar pengembangan sektor pariwisata dapat berjalan secara lebih sinergis dan berkelanjutan; • Penguatan sistem pendataan dan monitoring kunjungan wisatawan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							• Peningkatan kualitas destinasi wisata serta penataan kawasan wisata juga turut mendukung peningkatan daya tarik wisata daerah. Perbaikan fasilitas wisata, pengembangan sarana pendukung, serta penguatan identitas destinasi memberikan pengalaman wisata yang lebih baik bagi pengunjung; • Dukungan dari sektor perhotelan, kuliner, serta ekonomi kreatif juga menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, karena mampu menyediakan layanan dan produk wisata yang semakin beragam bagi wisatawan; • Stabilitas keamanan daerah serta citra Kota Balikpapan sebagai kota jasa dan gerbang menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) turut memberikan dampak positif terhadap meningkatnya mobilitas wisatawan, baik untuk tujuan wisata, bisnis, maupun kegiatan lainnya. Meskipun capaian indikator menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat beberapa	tambah bagi perekonomian Masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha pariwisata, komunitas, serta instansi terkait, serta meningkatkan sistem pendataan kunjungan wisatawan guna mendukung perencanaan dan evaluasi pengembangan sektor pariwisata secara lebih akurat.	yang terintegrasi, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan serta evaluasi pengembangan sektor pariwisata di masa mendatang.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, diantaranya: • Belum optimalnya pengembangan dan diversifikasi produk wisata, sehingga sebagian besar kunjungan wisatawan masih bersifat kunjungan singkat atau transit; • Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pada beberapa destinasi wisata masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kenyamanan dan daya tarik destinasi wisata secara optimal; • Belum optimalnya integrasi promosi pariwisata antar pemangku kepentingan, serta masih terbatasnya sistem pendataan kunjungan wisatawan yang terintegrasi, sehingga potensi pengembangan sektor pariwisata belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara maksimal.		
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	39	34	87,18%	Belum tercapainya kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi pengembangan usaha maupun dukungan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain:	Dalam rangka mendorong pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar)	Untuk meningkatkan pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut, antara lain:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							- Keterbatasan jangkauan fasilitasi dan pembinaan terhadap seluruh subsektor ekonomi kreatif, sehingga upaya pengembangan pelaku usaha kreatif belum dapat menjangkau secara optimal seluruh komunitas dan pelaku usaha yang potensial. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha baru di sektor ekonomi kreatif; - Sebagian pelaku ekonomi kreatif masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha, seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), perizinan usaha, maupun perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sehingga menghambat pengembangan usaha secara lebih luas dan profesional; - Keterbatasan akses permodalan yang dihadapi oleh sebagian pelaku usaha kreatif, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan usaha rintisan yang masih berada pada tahap awal pengembangan usaha; - Akses pasar yang masih terbatas serta tingginya tingkat persaingan usaha juga	telah melaksanakan berbagai upaya strategis, sebagai berikut: - Penguatan fasilitasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha kreatif melalui berbagai kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan keterampilan, serta pendampingan dalam pengelolaan dan manajemen usaha; - Memberikan pendampingan dalam proses legalitas usaha dan perizinan, termasuk fasilitasi pendaftaran usaha serta penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); - Melakukan dukungan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif, antara lain melalui partisipasi pelaku usaha dalam berbagai kegiatan pameran, festival, dan event ekonomi kreatif, serta pemanfaatan platform digital untuk memperluas akses pasar;	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperluas jangkauan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor-sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar namun belum berkembang secara optimal; - Melakukan penguatan fasilitasi legalitas usaha dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku usaha kreatif, sehingga usaha yang dijalankan memiliki dasar hukum yang kuat serta memiliki daya saing yang lebih tinggi; - Meningkatkan akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pembiayaan, baik melalui kerja sama dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan, maupun program pembiayaan usaha mikro yang disediakan oleh pemerintah; - Upaya penguatan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif juga perlu terus ditingkatkan, baik melalui kegiatan event daerah,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan usaha dan memperluas jangkauan pemasaran produk kreatif yang dihasilkan; - Dinamika kondisi perekonomian serta perubahan tren pasar juga mempengaruhi perkembangan usaha kreatif, sehingga sebagian pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam melakukan inovasi produk dan menjaga keberlanjutan usahanya; - Sistem pendataan pelaku ekonomi kreatif yang masih memerlukan pemutakhiran dan integrasi yang lebih optimal juga menjadi salah satu kendala dalam mengukur pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif secara lebih akurat. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan riil pelaku usaha kreatif di lapangan belum sepenuhnya tercermin dalam data persentase kinerja yang terukur.	Mendorong kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, lembaga perbankan, komunitas kreatif, serta pelaku industri lainnya guna memperluas akses permodalan, meningkatkan jejaring usaha, dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di daerah.	promosi digital, maupun pengembangan <i>marketplace</i> produk lokal; penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran database pelaku ekonomi kreatif secara terintegrasi, sehingga perkembangan jumlah pelaku usaha kreatif dapat teridentifikasi secara lebih akurat dan menjadi dasar dalam perencanaan program pengembangan ekonomi kreatif di masa mendatang.
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,72	99,49%	Capaian kinerja indikator ini hampir mencapai target namun belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan relatif stabil, namun masih dipengaruhi oleh beberapa dinamika	Dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan	Sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan pada periode berikutnya, diperlukan beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan secara berkelanjutan, sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
							ekonomi yang berdampak pada laju pertumbuhan sektor tersebut. Salah satu faktor yang mempengaruhi belum optimalnya capaian kinerja adalah perlambatan konsumsi rumah tangga, yang disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini berdampak pada menurunnya aktivitas transaksi perdagangan, khususnya pada sektor ritel dan perdagangan barang konsumsi. Selain itu, penurunan kinerja ekspor juga turut mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan. Fluktuasi permintaan pasar dan dinamika perdagangan global menyebabkan volume perdagangan barang yang berorientasi ekspor mengalami perlambatan, sehingga berpengaruh terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB daerah. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah penurunan belanja pemerintah sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi di beberapa sektor yang memiliki keterkaitan dengan sektor perdagangan.	berbagai langkah strategis, antara lain: • Penguatan kelancaran distribusi barang melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, guna memastikan ketersediaan pasokan serta menjaga stabilitas harga, khususnya untuk komoditas kebutuhan pokok Masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, antara lain melalui revitalisasi dan penataan pasar rakyat, sehingga mampu meningkatkan kenyamanan dan daya tarik masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan di pasar tradisional; • Pemberdayaan pelaku usaha perdagangan, melalui fasilitasi promosi produk daerah, dukungan pemasaran produk dalam negeri, serta penguatan akses pasar yang lebih luas, termasuk mendorong	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran distribusi barang, khususnya komoditas strategis, sehingga stabilitas pasokan dan harga dapat tetap terjaga serta mendukung aktivitas perdagangan daerah; • Melakukan pengembangan digitalisasi sektor perdagangan, termasuk mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital dan perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>) guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha perdagangan, khususnya usaha mikro dan kecil, melalui fasilitasi promosi produk, peningkatan kapasitas usaha, serta penguatan akses pemasaran baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional;

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TAHUN 2025			PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	ALTERNATIF SOLUSI (YANG SUDAH DILAKUKAN)	REKOMENDASI PERBAIKAN/RENCANA TINDAKLANJUT
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
								potensi produk lokal untuk dapat menembus pasar ekspor.	Melakukan penguatan pengembangan pasar rakyat dan infrastruktur perdagangan secara berkelanjutan agar mampu mendukung pertumbuhan aktivitas perdagangan serta meningkatkan daya tarik pusat-pusat perdagangan di Kota Balikpapan.

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

Seiring dengan dimulainya kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah yang baru, analisis terhadap capaian kinerja Tahun 2025 juga dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang selaras dengan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pada tahun awal periode RPJMD dapat memberikan gambaran mengenai arah dan kecenderungan kinerja pembangunan daerah pada periode perencanaan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelaahan lebih lanjut terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat capaian indikator kinerja, baik yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian target maupun yang menjadi penyebab belum optimalnya kinerja. Selain itu, diidentifikasi pula upaya-upaya perbaikan serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dalam kerangka RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	<i>Perekonomian daerah yang tumbuh berkeadilan dan menyejahterakan</i>	<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	%	4,5	9,73	216,22%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: - Meningkatnya aktivitas ekonomi pada beberapa sektor utama penyumbang PDRB, seperti sektor perdagangan besar dan eceran, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Peningkatan aktivitas pada sektor-sektor tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas usaha, serta perkembangan kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan; - Peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi yang masuk ke Kota Balikpapan mendorong berkembangnya kegiatan usaha, peningkatan aktivitas produksi dan distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang kerja bagi Masyarakat;	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha guna mendorong masuknya investasi yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi daerah; - Melakukan pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif melalui berbagai program pemberdayaan pelaku usaha serta peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); - Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah guna mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta meningkatkan konektivitas wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi; - Penguatan sinergi pembangunan daerah dengan pengembangan kawasan Ibu Kota Nusantara, sehingga peluang ekonomi	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan penyempurnaan metode proyeksi dan penetapan target pertumbuhan ekonomi, sehingga target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja dapat lebih mencerminkan potensi dan dinamika ekonomi daerah; - Melakukan diversifikasi sektor ekonomi daerah guna mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu serta meningkatkan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi; - Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari perkembangan investasi dan pembangunan kawasan sekitar;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							• Posisi strategis Kota Balikpapan sebagai salah satu daerah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memberikan dampak <i>multiplier effect</i> terhadap peningkatan aktivitas ekonomi, terutama pada sektor konstruksi, perdagangan, jasa, dan transportasi; • Penetapan target pertumbuhan ekonomi pada awal perencanaan masih menggunakan asumsi yang relatif moderat, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh perkembangan investasi, pembangunan infrastruktur, serta dinamika ekonomi regional yang berkembang lebih cepat dari perkiraan. Meskipun capaian pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, masih terdapat faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain potensi ketergantungan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor tertentu serta pengaruh dinamika ekonomi nasional dan global yang dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang.	yang muncul dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha dan masyarakat di Kota Balikpapan.	• Penguatan koordinasi pembangunan ekonomi antar perangkat daerah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih terintegrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Tingkat Kemiskinan	%	2,15	1,97	109,14%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: - Peran aktif Tim Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang secara konsisten melakukan pendataan dan verifikasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), monitoring penyaluran bantuan sosial, serta memberikan sosialisasi terkait peningkatan gizi keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta upaya pencegahan stunting. Pendampingan ini membantu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat; - Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat rentan melalui kegiatan bimbingan dan sosialisasi kepada peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) turut mendukung peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan peralatan usaha seperti alat memasak dan pembuatan kue memberikan kesempatan bagi kelompok sasaran untuk mengembangkan usaha kecil	Dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pembentukan tim petugas verifikasi dan validasi data kemiskinan daerah yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi data fakir miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS/DTSN). Melalui kegiatan ini diharapkan data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan mutakhir sehingga penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, Pemerintah Kota Balikpapan juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah terkait dan pemerintah pusat, dalam rangka memastikan proses pemutakhiran data kemiskinan serta penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.	Sebagai upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem pemutakhiran data kemiskinan secara berkala melalui integrasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan akses pelatihan keterampilan, dukungan usaha produktif, serta fasilitasi pemasaran produk usaha mikro sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga; - Upaya peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga dilakukan melalui pemutakhiran kepesertaan BPJS Kesehatan, baik bagi peserta yang dibiayai oleh APBN maupun APBD, sehingga masyarakat miskin tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan dasar tanpa terkendala biaya; - Dukungan perlindungan sosial juga diberikan melalui pemberian bantuan makanan siap saji dan bantuan sembako secara rutin kepada kelompok rentan seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas berat, anak terlantar, serta masyarakat terlantar yang berada di rumah penampungan sementara seperti Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Lanjut Usia Terlantar (RPLUT), dan Rumah Perlindungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (RPODGJ). Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan alat bantu seperti kaki palsu bagi penyandang disabilitas fisik untuk		pengelolaan program perlindungan sosial, khususnya dalam hal pemutakhiran data penerima bantuan dan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penguatan layanan rehabilitasi sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat rentan sehingga upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							meningkatkan kemandirian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari; • Fasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asal serta pemberian akses perawatan kesehatan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sedang mengalami kondisi sakit, sehingga membantu mengurangi beban sosial serta memastikan kelompok rentan memperoleh penanganan yang layak. Namun, dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain: • Keterbatasan sumber daya dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga belum seluruh permasalahan sosial dapat ditangani secara optimal; • Perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang bersifat dinamis terkadang membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, sehingga memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah;		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Proses pemutakhiran dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sehingga proses penetapan penerima bantuan seringkali membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan mempengaruhi kecepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.		
		<i>Indeks Gini</i>	<i>Indeks</i>	<i>0,312</i>	<i>0,325</i>	96%	Capaian indikator ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat masih relatif terkendali, namun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi capaian tersebut, antara lain: Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tercatat cukup tinggi sehingga aktivitas ekonomi daerah meningkat secara signifikan, namun manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok Masyarakat;	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperluas kesempatan berusaha; - Melakukan program peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan kerja dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia agar masyarakat dapat mengakses peluang kerja pada sektor-sektor ekonomi yang berkembang; - Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program perlindungan	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan Masyarakat; - Melakukan penguatan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan kerja, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif; - Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, termasuk

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Struktur perekonomian Kota Balikpapan yang didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, konstruksi, dan industri cenderung memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, keterampilan, serta peluang usaha yang lebih baik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; - Meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan ekonomi di Kota Balikpapan, termasuk yang berkaitan dengan perkembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi tersebut masih lebih banyak dinikmati oleh sektor usaha tertentu dan tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih tinggi; - Perbedaan tingkat keterampilan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga sebagian masyarakat belum sepenuhnya mampu	sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kelompok masyarakat rentan tetap mendapatkan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan; Pengembangan sektor ekonomi lokal dan ekonomi kreatif, sehingga peluang ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu, tetapi juga dapat berkembang pada berbagai sektor usaha masyarakat.	melalui peningkatan akses permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar bagi pelaku usaha lokal; Melakukan penguatan sinergi antar perangkat daerah dalam program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan ekonomi, sehingga upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							memanfaatkan peluang ekonomi yang berkembang; Mobilitas penduduk yang cukup tinggi ke Kota Balikpapan sebagai pusat kegiatan ekonomi juga berpotensi mempengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan, terutama apabila tenaga kerja yang masuk memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang berbeda-beda.		
1.1	Meningkatnya Produktifitas Perekonomian Daerah yang Merata dan Berkelanjutan	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	223,74	214,11*	95,70%	PDRB Per Kapita Kota Balikpapan Tahun 2025 tercatat sebesar 214,11 juta rupiah, yang merupakan capaian tahun sebelumnya karena data resmi tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh BPS Kota Balikpapan. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini mencapai 95,70%, sehingga belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan ekonomi daerah serta perkembangan jumlah penduduk, antara lain: Peningkatan jumlah penduduk yang relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nilai tambah ekonomi daerah, sehingga peningkatan total PDRB belum sepenuhnya mampu meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita secara signifikan;	Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, antara lain melalui penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha guna menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kota Balikpapan; Melakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial, seperti sektor perdagangan, jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif guna meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan nilai tambah ekonomi; Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, serta dukungan promosi produk daerah guna	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan PDRB; - Melakukan penguatan daya saing pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, agar mampu meningkatkan skala usaha dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah; - Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan peluang ekonomi dari pembangunan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara, sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Struktur perekonomian daerah yang masih didominasi oleh sektor perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya menyebabkan peningkatan nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya merata pada seluruh sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; - Belum meratanya distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi, sehingga peningkatan aktivitas ekonomi daerah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat secara merata; - Perubahan kondisi ekonomi nasional dan regional, termasuk dinamika investasi, aktivitas perdagangan, serta perkembangan sektor usaha yang berkontribusi terhadap pembentukan PDRB daerah.	meningkatkan kapasitas dan pendapatan pelaku usaha local; Penguatan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas wilayah, sehingga dapat mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat.	dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; Penguatan program pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya meningkatkan nilai PDRB secara agregat, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata.
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa	%	7,87	8,08*	102,67%	Persentase pertumbuhan PDRB sektor jasa Kota Balikpapan Tahun 2025 tercatat sebesar 8,08%, yang menggunakan capaian tahun sebelumnya karena data resmi tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh BPS Kota Balikpapan. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini mencapai 102,67% dari target yang diperjanjikan, sehingga menunjukkan bahwa	Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui peningkatan fasilitas perdagangan, penguatan aktivitas distribusi barang, serta pengembangan kawasan ekonomi yang mendukung kegiatan usaha;	Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus mendorong pengembangan sektor jasa yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti sektor perdagangan, logistik, transportasi, pariwisata, serta ekonomi kreatif; Melakukan peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah,

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							pertumbuhan sektor jasa telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: • Meningkatnya aktivitas ekonomi pada berbagai subsektor jasa, seperti perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa perusahaan. Peningkatan aktivitas pada sektor-sektor tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan berkembangnya kegiatan usaha di Kota Balikpapan; • Posisi strategis Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan Timur turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor jasa, terutama pada kegiatan distribusi barang, logistik, serta jasa pendukung kegiatan usaha; • Meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan infrastruktur, yang memberikan dampak positif terhadap berkembangnya berbagai layanan jasa penunjang kegiatan ekonomi; • Perkembangan pembangunan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) juga	• Penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, sehingga mampu mendorong berkembangnya kegiatan usaha pada berbagai subsektor jasa di Kota Balikpapan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur daerah, termasuk sarana transportasi dan konektivitas wilayah yang mendukung kelancaran aktivitas jasa dan distribusi barang; • Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor jasa.	sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi serta memperkuat peran Kota Balikpapan sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan Timur; Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor jasa, termasuk melalui pelatihan, pendampingan usaha, serta peningkatan kualitas layanan agar mampu bersaing dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah; Melakukan pemanfaatan peluang ekonomi dari pembangunan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara, sehingga perkembangan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut dapat memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor jasa di Kota Balikpapan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							memberikan dampak <i>multiplier effect</i> terhadap peningkatan aktivitas jasa di Kota Balikpapan, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, jasa konstruksi, serta jasa pendukung lainnya. Meskipun capaian pertumbuhan sektor jasa telah melampaui target, masih terdapat faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain ketergantungan aktivitas jasa terhadap dinamika sektor ekonomi lainnya serta potensi fluktuasi aktivitas ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional maupun regional.		
		Tingkat Inflasi	%	2,50±1	2,71	108,40%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: • Terjaganya stabilitas harga barang dan jasa di pasar, terutama pada kelompok komoditas pangan, transportasi, serta barang kebutuhan pokok lainnya yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan inflasi; • Penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) turut berperan dalam menjaga stabilitas harga, khususnya melalui	• Pemerintah Kota Balikpapan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, antara lain melalui pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok secara berkala di pasar-pasar tradisional maupun modern; • Melaksanakan operasi pasar dan pasar murah guna menjaga keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok bagi Masyarakat;	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi daerah melalui TPID, terutama dalam melakukan pemantauan harga, pengendalian pasokan, serta penanganan potensi gejolak harga pada komoditas strategis; • Penguatan sistem distribusi dan logistik pangan, sehingga pasokan barang kebutuhan pokok dapat terjaga dengan baik dan tidak menimbulkan lonjakan harga di pasar;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan operasi pasar, serta penguatan distribusi barang; - Kelancaran distribusi barang dan logistik juga menjadi salah satu faktor yang mendukung stabilitas harga di Kota Balikpapan. Peningkatan konektivitas transportasi serta dukungan infrastruktur distribusi barang turut membantu menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan masyarakat. Adapun kendala yang masih berpotensi mempengaruhi fluktuasi inflasi daerah, antara lain: - Dinamika harga komoditas tertentu, khususnya komoditas pangan yang dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi cuaca, serta pasokan dari daerah pemasok; - Ketergantungan pasokan beberapa komoditas kebutuhan pokok dari daerah lain juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas harga apabila terjadi gangguan pada distribusi atau pasokan barang.	- Pemerintah Kota Balikpapan melakukan penguatan koordinasi dengan instansi terkait serta daerah pemasok komoditas pangan, guna memastikan kelancaran distribusi barang serta menjaga ketersediaan pasokan di pasar; - Melaksanakan pengembangan program peningkatan ketahanan pangan daerah, termasuk melalui dukungan terhadap kegiatan produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu mendorong peningkatan produksi pangan lokal dan penguatan ketahanan pangan daerah, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah; - Penguatan sistem informasi harga dan ketersediaan komoditas pangan, sehingga Pemerintah Kota Balikpapan dapat melakukan langkah antisipatif secara lebih cepat apabila terjadi potensi kenaikan harga barang.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	7,12	7,11*	99,86%	Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 tercatat sebesar 7,11%, yang menggunakan capaian tahun sebelumnya karena data resmi tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh instansi terkait. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini mencapai 99,86% dari target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sehingga secara umum menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal di daerah telah mendekati target yang ditetapkan Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: • Meningkatnya pemanfaatan layanan keuangan oleh masyarakat, seperti kepemilikan rekening tabungan, penggunaan layanan pembayaran non-tunai, serta pemanfaatan kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha. Peningkatan jumlah masyarakat yang menggunakan layanan perbankan dan transaksi digital turut mendukung peningkatan akses keuangan di daerah; • Perkembangan layanan keuangan digital dan sistem pembayaran non-tunai juga	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, antara lain melalui sosialisasi penggunaan layanan perbankan, edukasi pengelolaan keuangan, serta pengenalan produk-produk keuangan kepada Masyarakat; • Melakukan penguatan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan, khususnya dalam mendorong penyaluran kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah guna memperluas akses pembiayaan usaha; • Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong pemanfaatan layanan keuangan digital, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai dalam transaksi ekonomi Masyarakat; • Melaksanakan pemberdayaan UMKM melalui fasilitasi akses pembiayaan, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha dari lembaga keuangan formal.	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat, khususnya pada kelompok usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih memahami manfaat penggunaan layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit usaha, serta layanan pembayaran digital. • Diperlukan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dan lembaga pembiayaan guna mendukung pengembangan usaha Masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu mendorong peningkatan pemanfaatan layanan keuangan digital, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara lebih mudah, cepat, dan efisien; • Diperlukan penguatan ekosistem keuangan daerah, antara lain melalui integrasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan akses pembiayaan, sehingga peningkatan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga keuangan. - Keberadaan lembaga jasa keuangan seperti kantor bank, lembaga pembiayaan, agen layanan keuangan, serta fasilitas layanan keuangan digital turut mempengaruhi tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Kota Balikpapan sebagai pusat kegiatan ekonomi memiliki jaringan layanan keuangan yang relatif lebih berkembang dibandingkan wilayah lainnya di Kalimantan Timur. - Penyaluran kredit dan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut mendorong peningkatan akses keuangan masyarakat, terutama dalam mendukung kegiatan usaha dan peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha lokal. Meskipun capaian indeks telah mendekati target, masih terdapat faktor penghambat dalam peningkatan akses keuangan masyarakat, antara lain masih adanya sebagian masyarakat yang belum memanfaatkan layanan keuangan formal		akses keuangan dapat secara langsung mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							secara optimal, keterbatasan literasi keuangan pada kelompok masyarakat tertentu, serta masih terbatasnya pemanfaatan layanan pembiayaan formal oleh sebagian pelaku usaha mikro.		
1.2	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	66,1	65,56	99,18%	Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai upaya peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain: • Pada aspek infrastruktur jalan, pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan ruas jalan secara berkala turut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah; • Pada aspek tingkat pelayanan jalan, penataan lalu lintas serta peningkatan kapasitas jaringan jalan pada beberapa kawasan turut berkontribusi dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas, meskipun pada waktu tertentu masih terjadi peningkatan volume kendaraan pada ruas jalan utama; • Pada aspek infrastruktur drainase, peningkatan kapasitas saluran drainase serta kegiatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase pada beberapa kawasan	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas layanan infrastruktur melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah; • Pada aspek drainase, dilakukan pembangunan serta peningkatan kapasitas jaringan drainase dan kegiatan normalisasi saluran drainase untuk meningkatkan kemampuan sistem drainase dalam mengalirkan air dan mengurangi potensi genangan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program peningkatan kualitas lingkungan melalui pengelolaan persampahan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta pengendalian pencemaran lingkungan;	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu mempercepat penyelesaian pengadaan lahan pembangunan Embung Aji Raden agar pembangunan sumber air baku baru dapat segera direalisasikan untuk mendukung peningkatan layanan air bersih bagi Masyarakat; • Diperlukan percepatan evaluasi serta penyusunan skema pembiayaan yang tepat terkait pemanfaatan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi sehingga potensi sumber air tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu terus meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta meningkatkan pengelolaan lalu lintas guna menjaga kelancaran mobilitas Masyarakat;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							telah dilakukan untuk mengurangi potensi genangan di wilayah perkotaan; • Pada aspek kualitas lingkungan, peningkatan pengelolaan persampahan, pengembangan ruang terbuka hijau, serta pengendalian pencemaran lingkungan turut mendukung peningkatan kualitas lingkungan perkotaan. Namun, masih terdapat faktor yang mempengaruhi belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada aspek penyediaan air bersih yang merupakan salah satu komponen dalam perhitungan indeks. Salah satu penyebabnya adalah belum tersedianya sumber air baku baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih bagi masyarakat. Rencana pembangunan Embung Aji Raden sebagai salah satu sumber air baku masih menghadapi kendala pada proses pengadaan lahan sehingga pembangunan embung belum dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Selain itu, rencana pemanfaatan air baku dari Bendungan Sepaku Semoi masih memerlukan	• Pada aspek penyediaan air bersih, pemerintah daerah melakukan optimalisasi sistem penyediaan air minum yang telah tersedia, termasuk peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air serta upaya pengurangan tingkat kehilangan air pada jaringan distribusi; • Dilakukan peningkatan pengelolaan lalu lintas serta penataan jaringan jalan guna meningkatkan tingkat pelayanan jalan pada kawasan dengan mobilitas tinggi.	• Pada aspek drainase, perlu dilakukan peningkatan kapasitas jaringan drainase perkotaan serta pemeliharaan saluran drainase secara berkelanjutan untuk mengurangi potensi genangan pada kawasan perkotaan; • Perlu dilakukan penguatan program pengelolaan lingkungan perkotaan, termasuk peningkatan pengelolaan persampahan, pengendalian pencemaran lingkungan, serta peningkatan ruang terbuka hijau guna menjaga kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							evaluasi lebih lanjut terkait kelayakan skema pembiayaan serta mekanisme kerja sama penyediaan air baku sehingga pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan air bersih di Kota Balikpapan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan sumber air baku yang dimiliki Kota Balikpapan, sehingga pengembangan layanan air bersih sangat bergantung pada pembangunan sumber air baru maupun kerja sama penyediaan air baku dengan wilayah sekitar. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi juga turut meningkatkan kebutuhan air bersih masyarakat sehingga menuntut peningkatan kapasitas sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan.		
1.3	Meningkatnya kesempatan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,09	5,84	104,28%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: • Terjalannya kerja sama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) milik kementerian serta PPSDM Cepu dalam penyelenggaraan pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga memberikan	• Pemerintah Kota Balikpapan terus meningkatkan kerja sama dengan BBPVP milik kementerian dan PPSDM Cepu dalam rangka memperluas akses pelatihan kerja berbasis kompetensi bagi pencari kerja di daerah; • Penguatan kerja sama dengan perusahaan di Kota Balikpapan juga dilakukan untuk	Sebagai upaya untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan capaian kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain dengan memperkuat sistem pemutakhiran data kemiskinan secara berkala melalui integrasi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							kesempatan bagi pencari kerja untuk memperoleh keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Peningkatan kerja sama dengan perusahaan di Kota Balikpapan terkait penyampaian informasi lowongan kerja dan peluang pemagangan turut memberikan kontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja yang tersedia; • Dukungan terhadap stabilitas ketenagakerjaan juga diperkuat melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan hubungan industrial serta keberadaan mediator hubungan industrial yang telah memiliki kompetensi, sehingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dilakukan secara lebih efektif dan kondusif; • Upaya membangun kesadaran para pihak untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial melalui musyawarah mufakat turut berkontribusi dalam menjaga hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan Perusahaan;	meningkatkan akses informasi lowongan kerja serta peluang pemagangan bagi pencari kerja, sehingga dapat mempercepat proses penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan hubungan industrial, termasuk peningkatan kapasitas mediator hubungan industrial agar proses penyelesaian perselisihan dapat dilakukan secara profesional dan efektif; • Upaya lain yang dilakukan adalah membangun kesadaran para pihak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pendekatan musyawarah mufakat, sehingga konflik ketenagakerjaan dapat diselesaikan secara damai dan tidak berdampak pada stabilitas hubungan kerja; • Pemerintah Kota Balikpapan terus mendorong partisipasi aktif perusahaan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja serta penyampaian informasi lowongan kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan, sehingga informasi pasar	data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga data penerima bantuan sosial menjadi lebih akurat dan responsif terhadap kondisi masyarakat. Selain itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui peningkatan akses pelatihan keterampilan, dukungan usaha produktif, serta fasilitasi pemasaran produk usaha mikro sehingga masyarakat tidak hanya menerima bantuan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam pengelolaan program perlindungan sosial, khususnya dalam hal pemutakhiran data penerima bantuan dan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan koordinasi dengan perusahaan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kerja, sehingga perencanaan kebutuhan tenaga kerja menjadi lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha. Selain itu, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain: - Sebagian besar lowongan kerja yang tersedia masih mempersyaratkan pengalaman kerja, sementara sasaran peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagian besar merupakan pencari kerja baru (<i>fresh graduate</i>) yang belum memiliki pengalaman kerja; - Program pemagangan yang menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pengalaman kerja belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh peserta pelatihan, karena masih terdapat peserta yang belum bersedia memanfaatkan peluang pemagangan di Perusahaan; - Jumlah kejuruan pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Balikpapan masih	kerja dapat diakses oleh masyarakat secara lebih luas; Berbagai upaya tersebut dilaksanakan melalui beberapa program strategis, antara lain Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.	Di samping itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penguatan layanan rehabilitasi sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sosial kepada kelompok masyarakat rentan sehingga upaya pengurangan kemiskinan dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							terbatas, serta masih terbatasnya keberadaan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja; • Dalam aspek hubungan industrial, hambatan juga dapat terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena masing-masing pihak seringkali memiliki pendirian yang kuat sehingga sulit mencapai kesepakatan, serta terdapat pula kondisi dimana perusahaan mengalami keterbatasan dalam memenuhi hak pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
1.4	Terpenuhinya kebutuhan pangan yang berkualitas	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78,93	78,93	100%	Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa hal, antara lain: • Ketersediaan pasokan pangan yang relatif terjaga, baik yang berasal dari produksi lokal maupun pasokan dari daerah lain. Kelancaran distribusi pangan dari daerah pemasok turut berperan dalam menjaga stabilitas ketersediaan pangan di Kota Balikpapan; • Penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ketahanan pangan daerah juga turut mendukung tercapainya indikator ini,	Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, antara lain; • Pemantauan ketersediaan dan harga komoditas pangan strategis secara berkala; • Melaksanakan penguatan koordinasi dengan daerah pemasok pangan, sehingga pasokan komoditas pangan utama dapat terjaga dan tidak menimbulkan kelangkaan di pasar;	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus memperkuat sistem ketahanan pangan daerah, khususnya melalui peningkatan ketersediaan cadangan pangan serta penguatan sistem distribusi komoditas pangan strategis; • Perlu dilakukan pengembangan produksi pangan lokal secara lebih optimal, termasuk melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan pertanian perkotaan guna mengurangi

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							terutama melalui pengawasan ketersediaan pangan, pengendalian harga komoditas strategis, serta penguatan sistem distribusi pangan; • Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi capaian indeks ketahanan pangan, antara lain melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat serta stabilitas harga pangan yang relatif terjaga; • Dukungan program pengembangan ketahanan pangan lokal, seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan produksi pangan lokal skala rumah tangga, turut memberikan kontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Meskipun target telah tercapai, masih terdapat faktor yang perlu menjadi perhatian, antara lain keterbatasan kapasitas produksi pangan lokal di wilayah perkotaan, ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain, serta potensi gangguan distribusi pangan yang dapat mempengaruhi stabilitas ketersediaan pangan di Kota Balikpapan.	• Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan program pengembangan produksi pangan lokal, seperti pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan pertanian skala rumah tangga untuk mendukung ketersediaan pangan Masyarakat; • Penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah, guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan pada waktu tertentu.	ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan ketahanan pangan, termasuk penguatan sistem pemantauan harga dan ketersediaan komoditas pangan; • Perlu melaksanakan penguatan program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pangan keluarga, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
1.5	Meningkatnya kondusivitas dan perlindungan sosial masyarakat	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Indeks	73,01	70,61*	96,71%	Salah satu faktor yang mendukung peningkatan capaian tersebut adalah penguatan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) melalui pelaksanaan patroli rutin, operasi penertiban, serta penanganan berbagai pelanggaran ketertiban umum seperti aktivitas perdagangan di zona terlarang, operasional pom mini dan penjualan bensin eceran ilegal, serta tempat hiburan malam yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan jam operasional. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perangkat daerah terkait, sehingga pelaksanaan operasi penertiban dapat dilakukan secara lebih terpadu dan efektif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pembentukan Regu <i>Service Center</i> (SC) dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang beroperasi selama 24 jam turut meningkatkan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani laporan dan pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat.	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan penguatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah melalui peningkatan intensitas patroli serta operasi penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran ketertiban umum, seperti penertiban pedagang kaki lima di zona terlarang, penertiban pom mini ilegal, serta pengawasan operasional tempat hiburan malam; - Upaya peningkatan ketertiban juga dilakukan melalui penguatan kapasitas dan respons cepat Satuan Polisi Pamong Praja, antara lain melalui pembentukan Regu <i>Service Center</i> (SC) dan Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertugas merespons laporan masyarakat secara cepat selama 24 jam; - Pemerintah Kota Balikpapan juga meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Perda dan Perkada melalui berbagai media komunikasi seperti spanduk, selebaran, media sosial, serta penyuluhan langsung kepada kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak kebijakan ketertiban umum.	- Penguatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara konsisten melalui peningkatan intensitas patroli, operasi penertiban terpadu, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketertiban umum; - Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja perlu terus dilakukan melalui penambahan jumlah personel, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan di lapangan; - Pemanfaatan teknologi dalam pengawasan ketertiban umum perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui optimalisasi sistem pemantauan berbasis CCTV dan integrasi data pengawasan dengan perangkat daerah terkait guna mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran ketertiban; - Penguatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum perlu terus didorong melalui peningkatan sosialisasi Perda dan Perkada, penguatan forum komunikasi masyarakat, serta

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Di sisi lain, meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi. Dinamika sosial akibat pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Kota Balikpapan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya kepadatan lalu lintas, munculnya permukiman tidak teratur, serta aktivitas ekonomi informal yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan ketertiban umum. Selain itu, proyek pembangunan infrastruktur skala besar yang sedang berlangsung di Kota Balikpapan juga berpotensi menimbulkan gangguan sementara terhadap ketertiban masyarakat, khususnya terkait lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek.	- Pemerintah Kota Balikpapan juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, TNI, kejaksaan, serta organisasi masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan aturan dan menjaga stabilitas keamanan di Masyarakat; - Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga dioptimalkan melalui kegiatan deteksi dini potensi konflik sosial, pembinaan wawasan kebangsaan, pendidikan politik masyarakat, serta penguatan forum komunikasi masyarakat guna menjaga stabilitas sosial dan mencegah potensi konflik di masyarakat.	pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.; Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan daerah di Kota Balikpapan.
		Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	50,62	57,48	113,55%	Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan berbagai indikator yang menjadi komponen pembentuk indeks kesejahteraan sosial, antara lain; Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial, program perlindungan sosial, serta berbagai upaya pemberdayaan	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, antara lain melalui pemberian bantuan sosial serta layanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan; - Melaksanakan program pemberdayaan sosial masyarakat, seperti penguatan kapasitas kelompok masyarakat,	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus memperkuat program perlindungan sosial yang tepat sasaran, sehingga kelompok masyarakat rentan dapat memperoleh dukungan yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraannya; - Melaksanakan penguatan program pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemampuan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan; - Penguatan program penanganan permasalahan sosial, seperti penanganan kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kondisi kesejahteraan sosial Masyarakat; - Meningkatnya aktivitas ekonomi daerah yang berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga secara tidak langsung turut mendukung peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang cukup baik, masih terdapat tantangan dalam peningkatan kesejahteraan sosial, antara lain masih adanya kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara sosial dan ekonomi serta masih perlunya penguatan pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kemandirian sosial dan ekonomi.	pengembangan usaha ekonomi produktif, serta berbagai kegiatan yang mendorong kemandirian Masyarakat; - Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan penguatan pelayanan sosial, termasuk peningkatan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial; - Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan permasalahan sosial, sehingga berbagai program kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi.	ekonomi masyarakat agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi; - Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan kelembagaan pelayanan sosial di daerah; - Melaksanakan penguatan integrasi program kesejahteraan sosial dengan program pembangunan ekonomi daerah, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
2	Lingkungan yang berkualitas dan berketahanan iklim	Penurunan intensitas emisi GRK	%	24,84	24,84*	100%	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kota Balikpapan Tahun 2025 tercatat sebesar 24,84%, yang menggunakan capaian tahun sebelumnya karena data resmi tahun 2025 masih dalam proses rilis oleh instansi terkait. Berdasarkan capaian tersebut, indikator ini mencapai 100% dari target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, sehingga menunjukkan bahwa upaya pengendalian emisi GRK di daerah telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dipengaruhi beberapa hal, antara lain: • Pelaksanaan berbagai program pengendalian emisi dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain melalui peningkatan pengelolaan sampah, pengembangan ruang terbuka hijau, serta penguatan upaya konservasi lingkungan; • Penguatan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan juga turut mendukung upaya penurunan emisi GRK, termasuk melalui penerapan berbagai program yang mendorong efisiensi penggunaan energi serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program pengendalian emisi GRK, antara lain melalui penguatan pengelolaan sampah, pengurangan timbulan sampah, serta peningkatan kegiatan daur ulang; • Melakukan pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai area resapan karbon dan mendukung kualitas lingkungan perkotaan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program efisiensi energi dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk mendorong penggunaan energi secara lebih efisien pada berbagai sektor; • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan, melalui berbagai kegiatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan rendah karbon, khususnya melalui pengendalian emisi pada sektor energi, transportasi, dan pengelolaan limbah; • Peningkatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, termasuk pengurangan timbulan sampah, peningkatan kegiatan daur ulang, serta penguatan sistem pengolahan sampah yang ramah lingkungan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan pengembangan ruang terbuka hijau dan kawasan konservasi, sehingga dapat mendukung penyerapan emisi karbon dan menjaga kualitas lingkungan perkotaan; • Penguatan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta dalam upaya pengendalian emisi GRK, sehingga upaya pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Program pengelolaan sampah dan pengurangan timbulan sampah, yang berkontribusi dalam menurunkan emisi GRK dari sektor limbah. Meskipun capaian indikator telah mencapai target, masih terdapat tantangan dalam upaya pengendalian emisi GRK, antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang berpotensi meningkatkan konsumsi energi, timbulan sampah, serta penggunaan kendaraan bermotor yang dapat mempengaruhi tingkat emisi di daerah.		
2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,64	75,55	105,46%	Adapun faktor keberhasilan yang mempengaruhi capaian kinerja tersebut antara lain sebagai berikut: - Perubahan metode penilaian dan perhitungan IKLH yang mempengaruhi hasil pengukuran indeks; - Konsistensi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan lingkungan hidup daerah;	Dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan serta mempertahankan capaian kualitas lingkungan hidup, beberapa langkah telah dilakukan, antara lain: Melakukan perencanaan pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup dengan mempertimbangkan media lingkungan yang representatif sesuai kriteria dalam Permen LH Nomor 14 Tahun 2025;	Untuk menjaga dan meningkatkan capaian IKLH pada periode berikutnya, beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain: Penguatan sistem pemantauan dan pengukuran kualitas lingkungan hidup yang adaptif terhadap perkembangan metode penilaian IKLH, serta peningkatan integrasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ke dalam dokumen

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Penerapan pendekatan spasial dalam pengelolaan lingkungan sehingga intervensi program lebih tepat sasaran; - Pengendalian sumber pencemar secara langsung melalui pengawasan terhadap kegiatan usaha dan aktivitas Masyarakat; - Kolaborasi dengan dunia usaha melalui program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang mendukung kegiatan perlindungan dan pemulihan lingkungan; - Pemanfaatan teknologi serta sistem informasi lingkungan untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kondisi lingkungan. Selain itu, faktor keberhasilan lainnya apabila dilihat dari indeks penyusun IKLH yang meliputi indeks kualitas lahan, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air, sebagai berikut: - Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Lahan (IKL) Peningkatan kualitas lahan dipengaruhi oleh konsistensi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan lingkungan daerah, antara lain	- Mengintegrasikan program pengelolaan kualitas air, udara, dan lahan dalam satu pendekatan spasial agar intervensi lingkungan lebih efektif; - Mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha melalui program CSR yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup; - Menerapkan pendekatan intervensi lingkungan berbasis segmen wilayah untuk meningkatkan ketepatan penanganan permasalahan lingkungan; - Sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL), Pemerintah Kota Balikpapan telah mendorong penerapan kebijakan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada pembangunan kawasan perdagangan dan jasa sehingga setiap pembangunan baru tetap menyediakan ruang terbuka hijau yang mampu meningkatkan daya serap air serta mengurangi potensi banjir. Selain itu, dilakukan penguatan perlindungan kawasan hijau melalui penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas	perencanaan pembangunan daerah sehingga kebijakan lingkungan dapat terimplementasi secara lebih efektif dalam berbagai sektor Pembangunan; - Perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus didorong dalam upaya pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kemitraan dengan komunitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan; - Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup perlu terus dilakukan, antara lain melalui Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, KLHS RPJPD, serta kajian lingkungan pada dokumen penataan ruang seperti KLHS Revisi RTRW Kota Balikpapan 2024–2043 dan KLHS Revisi RDTR Kota Balikpapan 2021–2041. Dokumen tersebut memuat kebijakan perlindungan kawasan lindung, peningkatan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas wilayah kota, serta pengembangan kawasan sempadan dan kawasan penyangga hutan lindung. Selain itu, upaya pemulihan fungsi lahan juga dilakukan melalui program rehabilitasi lahan kritis, reforestasi, penataan kawasan sempadan sungai dan pesisir, konservasi lahan, penanaman pohon, serta perlindungan kawasan lindung seperti hutan kota, rimba kota, dan taman lingkungan yang berkontribusi dalam meningkatkan daya dukung lahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Udara (IKU)	wilayah kota yang terdiri atas ruang terbuka hijau publik seperti taman kota dan koridor hijau jalan serta ruang terbuka hijau privat seperti pekarangan dan taman vertikal; - Upaya lain yang telah dilakukan adalah penerapan konsep urban green <i>infrastructure</i> atau infrastruktur hijau perkotaan serta pengembangan program Bapak Asuh RTH Tematik yang melibatkan partisipasi dunia usaha, komunitas, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pendanaan, pengelolaan, serta pemeliharaan ruang terbuka hijau. Hingga akhir tahun 2025 telah tercatat tujuh perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut. Selain itu juga dilakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman buah pada kawasan daerah tangkapan air serta rehabilitasi dan penanaman mangrove di kawasan pesisir menggunakan metode planter bag dan buispot; - Pada komponen Indeks Kualitas Udara (IKU), alternatif solusi yang dilakukan meliputi penambahan titik pemantauan	Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, serta Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; - Dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Kualitas Lahan, perlu dilakukan penguatan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% secara konsisten melalui pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) pada pembangunan kawasan baru. Selain itu, kemitraan dengan dunia usaha melalui program CSR perlu diperluas untuk mendukung kegiatan penanaman pohon, pengembangan taman kota, serta rehabilitasi kawasan pesisir dan daerah tangkapan air; - Untuk meningkatkan Indeks Kualitas Udara, diperlukan penguatan sistem pemantauan kualitas udara melalui penambahan titik pemantauan serta optimalisasi pemanfaatan alat pemantau yang tersedia. Selain itu, perlu dilakukan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Peningkatan kualitas udara dipengaruhi oleh berbagai intervensi pengendalian pencemaran udara, khususnya pada sektor transportasi dan pengelolaan jalur hijau perkotaan. Penyesuaian target juga dipengaruhi oleh perubahan metode penilaian kualitas udara berdasarkan kesepakatan rapat teknis Ditjen PPKL melalui Berita Acara Nomor BA-23/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 yang memasukkan parameter PM2.5 sebagai komponen baru dalam pengukuran kualitas udara. Selain itu, upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui penanaman pohon pada median dan jalur hijau jalan protokol sebagai kompensasi penebangan pohon, pengendalian penebangan pohon melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penebangan Pohon, pelaksanaan uji emisi kendaraan dan kegiatan traffic counting secara rutin, serta penambahan titik pemantauan kualitas udara menggunakan metode passive sampler dan sistem pemantauan kualitas udara perkotaan.	kualitas udara melalui metode <i>passive sampler</i> pada beberapa lokasi yang mewakili aktivitas transportasi, pemukiman, perkantoran, dan industri. Selain itu, dilakukan pemeliharaan rutin alat pantau kualitas udara milik pemerintah daerah serta pemantauan kualitas udara secara manual aktif pada beberapa titik pantau yang telah ditetapkan dalam dokumen informasi kinerja lingkungan daerah; • Upaya lainnya adalah pelaksanaan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor secara berkala di berbagai lokasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengendalian emisi kendaraan. Pengujian juga dilakukan terhadap sumber emisi tidak bergerak seperti cerobong genset pada berbagai kegiatan usaha. Di samping itu, pemerintah daerah menegakkan regulasi terkait pengendalian penebangan pohon serta mendorong penanaman kembali pohon pada median jalan dan jalur hijau sebagai kompensasi dari kegiatan penebangan yang dilakukan	peningkatan frekuensi pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian emisi dari kegiatan industri, serta perluasan program penanaman pohon pada koridor jalan dan kawasan perkotaan guna meningkatkan kapasitas penyerapan emisi; Dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan penguatan pengendalian pencemaran air melalui peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sepanjang aliran sungai, perluasan pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal, serta percepatan implementasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah berbasis <i>wetland</i> pada kawasan hulu sungai. Upaya tersebut juga perlu didukung dengan peningkatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk menyinkronkan sistem pemantauan kualitas air serta memperkuat basis data pemantauan lingkungan hidup secara terpadu.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Faktor keberhasilan dari sisi Indeks Kualitas Air (IKA) Pencapaian kualitas air dipengaruhi oleh hasil pemantauan kualitas air pada tujuh sungai utama di Kota Balikpapan yang menjadi objek pemantauan nasional, yaitu Sungai Manggar, Sungai Somber, Sungai Klandasan Besar, Sungai Klandasan Kecil, Sungai Teritip, Sungai Wain, dan Sungai Brenga. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala dua kali dalam setahun pada musim kemarau dan musim hujan sesuai titik pantau yang telah disepakati dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Upaya peningkatan kualitas air juga didukung oleh kolaborasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal bersama Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan usaha, pengawasan kegiatan usaha di sepanjang aliran sungai, serta penambahan sistem pemantauan kualitas air secara daring melalui perangkat ONLIMO pada Waduk Manggar dan Waduk Wonorejo.	oleh pelaku usaha atau kegiatan Pembangunan; - Pada komponen Indeks Kualitas Air (IKA), upaya yang telah dilakukan antara lain penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi kegiatan usaha sebagai bentuk pengendalian pencemaran air. Selain itu dilakukan kolaborasi pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal dan fasilitas pengolahan limbah domestik lainnya bersama perangkat daerah terkait untuk meningkatkan pengelolaan air limbah Masyarakat; - Pemerintah Kota Balikpapan juga telah menyusun kajian studi kelayakan pembangunan IPAL <i>wetland</i> di Waduk Wonorejo sebagai upaya pengolahan air limbah secara alami sebelum memasuki badan sungai, serta menyusun kajian rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air DAS Manggar sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran air di wilayah kota. Selain itu dilakukan pemantauan kualitas air Waduk Manggar sebagai sumber air baku kota secara rutin,	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, terutama terkait perubahan kebijakan dan metode penilaian IKLH. Tantangan tersebut muncul seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang membawa penyesuaian terhadap komponen, indikator, serta metode penghitungan IKLH. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam proses pengukuran, pemantauan, serta pengelolaan data lingkungan hidup di daerah.	serta penyesuaian metode pemantauan kualitas air sesuai ketentuan teknis dari kementerian terkait dan koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah provinsi dalam sinkronisasi titik pengambilan sampel air.	
2.2	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	99,43	89,43	111,18%	Capaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya strategis yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan kolaboratif oleh Pemerintah Kota Balikpapan bersama pemangku kepentingan terkait dalam upaya pengurangan risiko bencana, antara lain: Keberhasilan tersebut didukung oleh telah terpenuhinya dokumen dasar kebencanaan yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan	- Pemerintah Kota Balikpapan secara rutin melaksanakan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur daerah, tim penanggulangan bencana, serta relawan kebencanaan guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam menghadapi situasi darurat; - Program edukasi dan sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai media, termasuk pemanfaatan media sosial, pelaksanaan pelatihan kebencanaan di	- Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks Risiko Bencana pada periode berikutnya, perlu dilakukan penguatan integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam kebijakan penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana; - Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data serta informasi kebencanaan perlu

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Bencana (RPB), serta Rencana Kontinjensi (Renkon) dan berbagai regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana; • Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif melaksanakan rapat koordinasi terkait Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana (IRB) yang melibatkan berbagai perangkat daerah terkait guna mengumpulkan bukti dukung kinerja penanggulangan bencana. Kegiatan ini mendorong terwujudnya sinergi lintas perangkat daerah dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana; • Kontribusi data dan informasi dari berbagai perangkat daerah, antara lain Bappeda Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta seluruh	sekolah, serta simulasi kebencanaan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan Masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan penguatan koordinasi lintas sektor melalui rapat koordinasi, forum kebencanaan, serta pembinaan kepada perangkat daerah terkait guna memastikan sinergi dalam pelaksanaan program mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana; • Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan, respons tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.	terus dilakukan secara berkala, termasuk pemetaan wilayah rawan bencana berbasis spasial guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran; • Penguatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana perlu terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kebencanaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; • Partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu terus diperluas melalui penguatan program kelurahan tangguh bencana, peningkatan literasi kebencanaan, serta pembinaan relawan kebencanaan di tingkat Masyarakat; • Optimalisasi pelaksanaan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural, termasuk penguatan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>), peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana perlu terus

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							kecamatan di Kota Balikpapan, sehingga memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan dalam penilaian IRB dan IKD; • Pelaksanaan bimbingan teknis dan asistensi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas teknis aparatur daerah serta memperbaiki kualitas data dan indikator yang digunakan dalam pengukuran ketahanan daerah terhadap bencana; • Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta dukungan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan bencana turut memperkuat kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, serta respons terhadap potensi bencana yang terjadi. Dari sisi kendala yang masih dihadapi, risiko bencana di Kota Balikpapan masih dipengaruhi oleh potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, yang dipicu oleh faktor perubahan iklim, dinamika penggunaan lahan, serta meningkatnya kepadatan penduduk pada kawasan tertentu		dilakukan untuk mengurangi potensi dampak bencana di masa mendatang.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							yang berpotensi meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana.		
3	<i>Sumber daya manusia yang berdaya saing</i>	<i>Indeks Daya Saing Daerah</i>	Indeks	4,08	4,12	100,98%	Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain: • Perkembangan aktivitas ekonomi daerah yang cukup dinamis, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan industri pendukung yang berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas investasi serta posisi strategis Kota Balikpapan sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah Kalimantan; • Ketersediaan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah yang relatif memadai turut mendukung peningkatan daya saing daerah, termasuk dukungan infrastruktur transportasi, pelayanan publik, serta fasilitas perkotaan yang menunjang aktivitas ekonomi dan investasi; • Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi di daerah. Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa tantangan dalam	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha, antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan serta penguatan pelayanan perizinan berbasis sistem elektronik; • Melaksanakan penguatan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan publik yang dapat mendorong peningkatan produktivitas daerah; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja, serta pengembangan kompetensi tenaga kerja; • Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan sektor pendukung lainnya yang memiliki potensi untuk meningkatkan daya saing daerah.	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja agar mampu mendukung perkembangan sektor ekonomi yang semakin kompetitif; • Penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pada berbagai sektor Pembangunan; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu memperkuat iklim investasi yang kondusif, termasuk melalui peningkatan kemudahan berusaha, kepastian regulasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik; • Pengembangan sektor ekonomi unggulan daerah secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat posisi daya saing Kota Balikpapan di tingkat regional maupun nasional.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							peningkatan daya saing daerah, antara lain masih perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan produktivitas sektor ekonomi agar mampu bersaing secara lebih kompetitif di tingkat regional maupun nasional.		
3.1	Sumber daya manusia Balikpapan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	83,09	83,23	100,17%	Peningkatan IPM dipengaruhi oleh perbaikan pada komponen penyusunnya yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, antara lain: • Pada dimensi kesehatan, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan serta program pelayanan kesehatan masyarakat turut mendukung peningkatan kualitas kesehatan Masyarakat; • Pada dimensi pendidikan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dasar dan menengah serta dukungan program pendidikan daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; • Pada dimensi standar hidup layak, pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif tinggi turut mendorong peningkatan aktivitas	• Pemerintah Kota Balikpapan telah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, peningkatan pelayanan di puskesmas, serta pelaksanaan program kesehatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan pencegahan penyakit; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan peningkatan kualitas pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu; • Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti pengembangan usaha mikro, kecil,	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan fasilitas kesehatan, peningkatan tenaga kesehatan, serta penguatan program promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; • Diperlukan peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, serta perluasan akses pendidikan menengah dan pendidikan tinggi bagi masyarakat; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu memperkuat program peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, pelatihan kerja, serta pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian, antara lain masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, masih adanya kelompok masyarakat yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta perlunya peningkatan pemerataan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kota. Selain itu, fluktuasi kondisi ekonomi juga dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan masyarakat yang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan IPM.	dan menengah (UMKM), pelatihan kewirausahaan, serta dukungan terhadap pengembangan sektor jasa dan perdagangan yang menjadi sektor dominan dalam perekonomian daerah; • Pelaksanaan program perlindungan sosial dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.	kewirausahaan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah; • Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas agar peningkatan pendapatan masyarakat dapat terus mendorong peningkatan standar hidup layak serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia secara berkelanjutan.
3.2	Masyarakat yang harmonis dan inklusif	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,176	0,313*	56,23%	Adapun faktor yang mempengaruhi capaian tersebut Adalah: • Masih adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi formal, khususnya pada sektor pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Sebagian perempuan masih bekerja pada sektor informal dengan tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif lebih rendah;	• Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program pengarusutamaan gender melalui integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah; • Upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui berbagai program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif	• Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dalam seluruh perangkat daerah agar program pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan secara seimbang; • Melaksanakan peningkatan program pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, akses

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pada jabatan strategis di pemerintahan, lembaga politik, maupun sektor ekonomi masih belum optimal sehingga mempengaruhi indikator keterwakilan perempuan yang menjadi salah satu komponen dalam penghitungan indeks; - Pada aspek kesehatan reproduksi, meskipun layanan kesehatan ibu dan anak telah tersedia dengan baik, masih diperlukan penguatan upaya peningkatan kualitas kesehatan reproduksi perempuan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan secara menyeluruh; - Adanya kesenjangan akses terhadap kesempatan peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi perempuan, serta pengaruh faktor sosial dan budaya yang dalam beberapa kondisi masih membatasi peran perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengambilan keputusan.	- bagi perempuan, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro yang dikelola oleh Perempuan; - Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan program peningkatan kualitas kesehatan perempuan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan kesehatan reproduksi, serta program pencegahan dan penanganan stunting; - Melakukan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan kepemimpinan, peningkatan peran perempuan dalam organisasi masyarakat, serta dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat masyarakat.	- pembiayaan usaha, serta pendampingan pengembangan usaha bagi pelaku usaha perempuan; - Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan serta dukungan terhadap keterwakilan perempuan pada berbagai lembaga dan organisasi; - Penguatan program peningkatan kualitas kesehatan perempuan, khususnya pada layanan kesehatan reproduksi, guna mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan secara berkelanjutan serta menurunkan tingkat ketimpangan gender di Kota Balikpapan.
4	<i>Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	Indeks	78,3	83,08*	106,10%	Faktor Keberhasilan: Pemerintah Kota Balikpapan berhasil mencapai skor Indeks Reformasi Birokrasi yang tinggi karena adanya implementasi rencana aksi yang cukup terstruktur dan konsisten. Program-	Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai langkah strategis untuk mendorong Reformasi Birokrasi. Salah satunya adalah penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi yang	Menyelaraskan seluruh sasaran, program, dan rencana aksi Reformasi Birokrasi dengan strategi pembangunan daerah secara konsisten agar semua

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							program perbaikan birokrasi dan pelayanan publik dijalankan secara bertahap dan terukur, sehingga mendukung tercapainya target reformasi. Peningkatan kapasitas aparatur, kesadaran akan pentingnya integritas, dan penerapan prinsip akuntabilitas juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung administrasi dan pelayanan publik membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah. Faktor Penghambat/ Tantangan: Meskipun banyak keberhasilan dicapai, masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat kinerja secara optimal. Beberapa sasaran dan program belum sepenuhnya selaras dengan strategi pembangunan daerah atau kebutuhan masyarakat. Keterbatasan kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta dukungan teknologi di beberapa sektor masih menjadi kendala. Sistem pengawasan dan manajemen risiko belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu penguatan agar pencapaian hasil lebih terjamin. Selain itu, beberapa mekanisme koordinasi	disesuaikan dengan sasaran strategis daerah, meskipun masih perlu penyempurnaan lebih lanjut; • Penguatan kapasitas aparatur dilakukan melalui pelatihan, penambahan tenaga, dan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi SDM serta kesadaran akan prinsip integritas; • Peningkatan kualitas layanan publik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem digitalisasi administrasi, dan mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih responsif; • Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan sosialisasi aturan dan kebijakan terkait integritas, pengelolaan gratifikasi, dan pengawasan internal agar pegawai memahami dan menerapkan praktik birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.	intervensi tepat sasaran dan berdampak signifikan; • Memperkuat sistem pengawasan, manajemen risiko, dan monitoring pelaksanaan program agar setiap kegiatan dapat diukur keberhasilannya secara objektif dan dapat diperbaiki secara berkelanjutan; • Meningkatkan kapasitas SDM, sarana, prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efisiensi, efektivitas, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan; • Terus meningkatkan kualitas layanan publik dengan mengembangkan mekanisme pelayanan yang responsif, inovatif, dan mudah diakses masyarakat, serta mengevaluasi kepuasan masyarakat secara berkala; • Memperkuat budaya integritas di seluruh jajaran pemerintahan melalui sosialisasi, pelatihan, dan penegakan aturan yang konsisten, sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							lintas perangkat daerah dan kolaborasi eksternal masih dapat ditingkatkan agar rencana aksi lebih terintegrasi dan berdampak nyata.		Mendorong koordinasi lintas perangkat daerah dan kolaborasi dengan pihak eksternal (stakeholder, dunia usaha, dan masyarakat) untuk memastikan rencana aksi Reformasi Birokrasi lebih terintegrasi dan berdampak nyata.
4.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	70,16	70,63	100,67%	Adapun penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain: - Perbaikan implementasi manajemen kinerja pada beberapa komponen penilaian SAKIP, khususnya pada komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan tata kelola kinerja serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja; - Pada komponen perencanaan kinerja, peningkatan nilai menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja telah semakin selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta telah mulai menggambarkan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melakukan reviu dan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah, guna memastikan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan; - Penyempurnaan Perjanjian Kinerja kepala daerah dan perangkat daerah, termasuk target dan penyesuaian indikator kinerja agar lebih mencerminkan <i>outcome</i> pembangunan pada masing-masing level jabatan; - Pemerintah Kota Balikpapan juga telah melakukan penguatan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah, termasuk melalui pemanfaatan sistem informasi monitoring kinerja untuk memantau	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan reviu dan penyesuaian terhadap sasaran strategis dalam dokumen perencanaan kinerja, baik pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah, sehingga setiap level memiliki sasaran strategis yang sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing; - Melakukan penyempurnaan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Perangkat Daerah, khususnya dalam memastikan bahwa indikator kinerja pada level kepala daerah mencerminkan <i>outcome</i> pembangunan daerah, sementara indikator pada level perangkat daerah mencerminkan kontribusi terhadap pencapaian sasaran tersebut; - Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu mengoptimalkan pemanfaatan sistem

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							kinerja, dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah; • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Beberapa faktor penghambat dalam peningkatan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain: • Masih adanya ketidaksesuaian level sasaran strategis antara pemerintah daerah dan perangkat daerah, sehingga terdapat indikator kinerja yang sama digunakan pada dua level yang berbeda; • Belum optimalnya penyesuaian target kinerja pada beberapa perangkat daerah berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya, sehingga target yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kinerja secara progresif; • Pemanfaatan sistem informasi monitoring kinerja perangkat daerah sebagai sarana	capaian kinerja perangkat daerah secara berkala; • Upaya lain yang dilakukan adalah pelaksanaan evaluasi internal implementasi SAKIP pada perangkat daerah secara mandiri dan dilaksanakan secara <i>on going</i>, yang bertujuan untuk menilai tingkat penerapan manajemen kinerja serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.	informasi pengukuran dan monitoring kinerja agar seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan pengukuran kinerja secara konsisten dan terintegrasi, sehingga proses pemantauan dan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif. • Melakukan penguatan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan kinerja, sehingga target kinerja pada tahun berikutnya dapat disusun dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan; • Melakukan peningkatan kualitas evaluasi internal implementasi SAKIP, dengan memastikan bahwa hasil evaluasi mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik dan implementatif.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							pengukuran dan pengawasan kinerja masih belum diimplementasikan secara maksimal oleh seluruh perangkat daerah, sehingga proses pemantauan kinerja belum berjalan secara optimal; Hasil evaluasi internal implementasi SAKIP masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu mengidentifikasi akar permasalahan yang dihadapi perangkat daerah serta memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih spesifik dan implementatif.		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,89	89,1528	107,56%	Pencapaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: - Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, di mana setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD disusun secara sistematis serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Keterpaduan ini memastikan bahwa pengalokasian anggaran mendukung prioritas pembangunan daerah secara konsisten; - Komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi ketentuan mandatory spending	Sebagai upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan beberapa langkah perbaikan, antara lain: - Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran daerah agar seluruh program dan kegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah; - Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam pemenuhan kewajiban publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah, termasuk pemenuhan 29 dokumen transparansi;	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPKD pada tahun-tahun mendatang, beberapa langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain: - Meningkatkan kualitas penyajian LKPD melalui penguatan sistem pencatatan keuangan, pengelolaan aset daerah, serta penataan administrasi keuangan yang lebih tertib; - Memperkuat digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta kemudahan pemantauan realisasi anggaran;

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian belanja pada sektor-sektor prioritas dilakukan secara disiplin sehingga struktur belanja daerah menjadi lebih proporsional dan terarah; • Penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui keterbukaan informasi publik. Pemerintah Kota Balikpapan secara aktif mempublikasikan dokumen keuangan daerah dan memastikan keteraksesannya oleh masyarakat. Upaya ini didukung oleh koordinasi lintas perangkat daerah dalam pemenuhan publikasi 29 dokumen yang dipersyaratkan dalam dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah; • Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi antara Inspektorat Kota Balikpapan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sinergi tersebut berperan dalam mencegah potensi penyimpangan serta memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara tertib, efisien, dan akuntabel; • Optimalisasi penyerapan anggaran dan kondisi fiskal daerah yang relatif sehat.	• Mengoptimalkan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam mendukung publikasi dokumen keuangan daerah melalui media resmi pemerintah daerah agar lebih mudah diakses oleh Masyarakat; • Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal melalui koordinasi antara Inspektorat Kota Balikpapan dan BPK dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan serta mencegah potensi penyimpangan; • Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi aparatur di bidang perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah; • Menyusun timeline kerja yang terstruktur dalam penyusunan LKPD agar proses penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah.	• Mendorong peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi publikasi dokumen keuangan pada media resmi pemerintah daerah; • Mengoptimalkan pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan agar potensi temuan dapat diminimalkan serta kualitas tata kelola keuangan semakin meningkat; • Melanjutkan program peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah guna memastikan kompetensi teknis dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan terus berkembang.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer yang optimal, serta pengendalian belanja yang efisien turut memperkuat stabilitas keuangan daerah dan mendukung pencapaian nilai IPKD yang tinggi. Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memerlukan perbaikan berkelanjutan. Temuan terkait penyajian laporan keuangan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan.		
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	77,5	77,43	99,91%	Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat integritas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Balikpapan relatif baik dan risiko korupsi berada pada tingkat yang cukup terkendali. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta penerapan berbagai sistem digital dalam pelayanan publik yang dapat mengurangi potensi praktik korupsi.	- Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai program pencegahan korupsi melalui penguatan implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); - Pemerintah Kota Balikpapan juga mendorong penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada unit-unit pelayanan publik guna memperkuat komitmen integritas	- Pemerintah Kota Balikpapan perlu memperkuat implementasi program pencegahan korupsi secara terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, khususnya pada area yang memiliki tingkat risiko korupsi tinggi seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pengelolaan anggaran; - Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan yang lebih transparan, penyederhanaan prosedur

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							Namun, capaian yang belum sepenuhnya mencapai target menunjukkan masih terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi persepsi integritas pada instansi pemerintah. Salah satunya adalah masih adanya potensi praktik gratifikasi, konflik kepentingan, maupun penyimpangan prosedur dalam proses pelayanan publik atau pengelolaan kegiatan tertentu. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi nilai SPI adalah: • Persepsi masyarakat terhadap transparansi pelayanan publik, konsistensi penerapan standar pelayanan, serta tingkat kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan. Apabila masih terdapat pengalaman pelayanan yang tidak sesuai standar, hal tersebut dapat mempengaruhi penilaian integritas secara keseluruhan; • Belum meratanya penerapan budaya integritas di seluruh perangkat daerah, sehingga masih diperlukan penguatan	aparatur dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; • Penerapan berbagai sistem digital dalam proses administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, seperti sistem perizinan berbasis elektronik, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta digitalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meminimalkan potensi penyimpangan; • Pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai integritas kepada aparatur pemerintah daerah, termasuk penerapan pengendalian gratifikasi dan pelaporan potensi konflik kepentingan.	layanan, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah daerah; • Penguatan budaya integritas di lingkungan aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, serta penguatan sistem pengawasan internal agar setiap aparatur memiliki pemahaman dan komitmen yang kuat dalam mencegah praktik korupsi; • Pemerintah Kota Balikpapan juga perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan potensi interaksi langsung yang berisiko menimbulkan praktik penyimpangan dalam pelayanan publik.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							komitmen aparatur dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan korupsi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.		
4.2	Pelayanan publik yang semakin prima dan adaptif transformasi digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,95	87,22	102,67%	Keberhasilan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target didukung oleh beberapa faktor utama sebagai berikut: - Adanya komitmen Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi serta penerapan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan Masyarakat; - Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan secara cepat dan efisien, seperti layanan perizinan secara daring serta berbagai aplikasi pelayanan berbasis digital; - Peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi guna meningkatkan	Dalam rangka mengatasi berbagai faktor penghambat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan sejumlah langkah perbaikan, antara lain sebagai berikut: - Mengembangkan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kualitas pelayanan publik. Selain itu, penerapan standar pelayanan berbasis nilai dasar ASN BerAKHLAK terus diperkuat melalui supervisi dan evaluasi secara berkala; - Mengoptimalkan kanal pengaduan masyarakat melalui berbagai media seperti sistem LAPOR, media sosial resmi pemerintah daerah, serta berbagai layanan pengaduan lainnya untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait pelayanan public;	Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun-tahun berikutnya, beberapa langkah perbaikan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut: - Memperkuat budaya pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui peningkatan pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap implementasi etika pelayanan oleh Aparatur Sipil Negara; - Meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, khususnya dalam mempercepat proses verifikasi, tindak lanjut, serta penyelesaian pengaduan agar masyarakat memperoleh respons yang cepat dan solutif; - Mengoptimalkan digitalisasi layanan publik serta integrasi sistem pelayanan antar perangkat daerah guna

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							profesionalisme serta responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat; • Penerapan standar pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait prosedur, waktu penyelesaian, serta biaya layanan secara lebih jelas; • Tingginya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap kualitas layanan melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik. Meskipun capaian indikator ini telah melebihi target, dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Beberapa faktor yang masih menjadi kendala antara lain sebagai berikut: • Implementasi etika pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum sepenuhnya konsisten di seluruh unit pelayanan. Meskipun berbagai pelatihan	• Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap pengaduan masyarakat guna memastikan bahwa setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan solutif, serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam penyelesaian pengaduan; • Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan publik guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas dan kelompok berkebutuhan khusus; • Melaksanakan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan, seperti perbaikan ruang pelayanan, ruang tunggu, area parkir, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses layanan; • Menyediakan berbagai peralatan pendukung pelayanan, seperti mesin antrian, sistem informasi pelayanan, serta fasilitas penyampaian pengaduan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan;	meningkatkan efisiensi proses pelayanan dan meminimalkan potensi keterlambatan penyelesaian layanan; • Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan keterampilan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; • Melakukan penguatan sarana dan prasarana pelayanan publik secara bertahap, termasuk peningkatan fasilitas ruang pelayanan, sistem antrian, serta penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh lapisan Masyarakat; • Melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan lebih komprehensif sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							telah dilaksanakan, masih ditemukan adanya perbedaan tingkat responsivitas, keramahan, dan kualitas interaksi pelayanan di beberapa unit kerja, sehingga diperlukan penguatan budaya pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan Masyarakat; • Penanganan pengaduan masyarakat masih memerlukan peningkatan dari sisi kecepatan dan efektivitas tindak lanjut. Meskipun berbagai kanal pengaduan telah tersedia secara digital, sebagian masyarakat masih merasakan bahwa respons terhadap pengaduan belum selalu cepat dan solutif; • Ketepatan waktu dalam penyelesaian beberapa layanan publik masih menjadi tantangan. Walaupun digitalisasi layanan telah membantu mempercepat proses administrasi, pada beberapa layanan tertentu masih ditemukan keterlambatan yang disebabkan oleh tingginya beban kerja maupun mekanisme birokrasi yang belum sepenuhnya efisien; • Dari sisi sarana dan prasarana pelayanan, masih terdapat beberapa unit layanan yang belum sepenuhnya didukung oleh fasilitas yang optimal, seperti keterbatasan ruang	• Melaksanakan survei kualitas fasilitas dan pelayanan secara berkala untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia telah sesuai dengan kebutuhan serta harapan masyarakat.	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							tunggu yang memadai, sistem antrean yang masih perlu dioptimalkan, serta pemanfaatan teknologi pelayanan yang belum merata di seluruh sektor layanan publik.		
		Indeks SPBE	Indeks	4	4,22	105,50%	Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor yang mendorong peningkatan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, antara lain sebagai berikut: - Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-407/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan SPBE yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan selaras dengan arah pembangunan daerah; - Meningkatnya koordinasi lintas perangkat daerah dalam implementasi SPBE serta peran aktif Tim Koordinasi SPBE, yang didukung oleh pendampingan dari instansi pembina seperti Kementerian PANRB, Komdigi, dan BSSN dalam memperkuat penerapan SPBE;	Untuk mendukung peningkatan implementasi SPBE, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain: - Menyusun kebijakan dan regulasi SPBE, termasuk penetapan pedoman tata kelola TIK sebagai acuan pelaksanaan SPBE di lingkungan pemerintah daerah; - Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah melalui peran aktif Tim Koordinasi SPBE serta pendampingan dari instansi Pembina; - Melakukan pengembangan dan optimalisasi layanan publik berbasis elektronik, seperti e-Manuntung, e-Retribusi, dan Reaksi, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat; - Mengoptimalkan penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPL) serta penguatan Jaringan Intra Pemerintah (JIP)	Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian Indeks SPBE secara berkelanjutan, beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain: - Memperkuat kebijakan dan regulasi SPBE melalui penyempurnaan pedoman teknis serta standar operasional prosedur yang lebih terintegrasi; - Meningkatkan kualitas infrastruktur digital, termasuk penguatan jaringan TIK, peningkatan kapasitas pusat data, serta penguatan sistem keamanan siber; - Mengoptimalkan integrasi aplikasi dan layanan digital pemerintahan agar layanan publik dapat diakses secara lebih cepat, mudah, dan terintegrasi; - Melaksanakan evaluasi berkala terhadap aplikasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							- Adanya peningkatan cakupan, kualitas, dan interoperabilitas layanan publik serta layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, yang semakin mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai aplikasi seperti e-Manuntung, e-Retribusi, dan Reaksi; - Penguatan struktur, proses, dan mekanisme tata kelola SPBE, antara lain melalui peningkatan penggunaan Sistem Penghubung Layanan (SPL), optimalisasi Jaringan Intra Pemerintah (JIP) untuk komunikasi dan distribusi data, serta keselarasan dokumen Renstra perangkat daerah dengan RPJMD yang didukung oleh penerapan manajemen risiko dalam kerangka SPIP; - Peningkatan indeks pada setiap domain SPBE dibandingkan tahun sebelumnya yang mencerminkan perbaikan pada aspek kebijakan, tata kelola, layanan digital, serta infrastruktur teknologi informasi yang mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik; - Dilaksanakannya evaluasi rutin terhadap aplikasi layanan publik dan layanan	- untuk meningkatkan integrasi dan pertukaran data antarperangkat daerah; - Melaksanakan audit internal dan evaluasi rutin terhadap aplikasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk memastikan efektivitas dan relevansi sistem yang digunakan; - Memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan kebijakan digitalisasi serta koordinasi implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; - Mendorong kolaborasi dan pertukaran praktik baik dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam pengembangan SPBE.	- meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan digital; - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan bimbingan teknis di bidang transformasi digital pemerintahan; - Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah lain, sektor swasta, serta akademisi guna mendorong inovasi dan pengembangan teknologi dalam mendukung implementasi SPBE.

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							administrasi pemerintahan untuk memastikan aplikasi yang digunakan tetap relevan, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara optimal; - Adanya kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kabupaten/kota lainnya, yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman, transfer pengetahuan, serta adopsi praktik terbaik dalam implementasi SPBE. Meskipun capaian indikator telah melampaui target, masih terdapat beberapa hal yang perlu terus diperhatikan dalam implementasi SPBE agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut: - Kebutuhan penguatan dan pembaruan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara berkelanjutan untuk mendukung peningkatan kapasitas layanan digital serta integrasi sistem antarperangkat daerah; - Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2025			Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana TindakLanjut
				Target	Realisasi	Capaian (%)			
							dan pengembangan layanan digital agar pemanfaatan teknologi informasi dapat berjalan lebih optimal di seluruh perangkat daerah; Tantangan dalam menjaga konsistensi integrasi dan interoperabilitas aplikasi pemerintahan agar seluruh layanan digital dapat berjalan secara terpadu dan efektif.		
		Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	-	-	Belum dilakukan penilaian pada tahun 2025	Belum dilakukan penilaian pada tahun 2025	Belum dilakukan penilaian pada tahun 2025

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis/menggunakan realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Bagian Organisasi, diolah 2026

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai tugasnya, sebagai instrumen utama pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Melalui hal tersebut, pemerintah daerah memastikan kebijakan dan pembangunan berdampak pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan pembangunan daerah berada dalam masa transisi perencanaan antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Kondisi ini menyebabkan pengukuran kinerja organisasi pada tahun berjalan menggunakan dua kerangka Perjanjian Kinerja yang berbeda. Meskipun demikian, program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang dilaksanakan tetap mengacu pada dokumen perencanaan tahunan yang sama yaitu RKPD dan APBD Tahun 2025, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam satu kerangka perencanaan pembangunan yang terpadu.

Dalam penyajian analisis pada subbab ini, pengelompokan program dan kegiatan tidak dipisahkan secara khusus antara sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029. Hal ini disebabkan karena beberapa sasaran strategis pada RPJMD yang baru memiliki cakupan yang lebih luas dan bersifat lintas program sehingga keterkaitan antara program dan sasaran strategis tidak selalu bersifat satu banding satu. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026, tetapi juga mulai mendukung pencapaian sasaran strategis RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029.

Adapun analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja disajikan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja yang diukur pada Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.19

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	100,67%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama	100	100	100%	Sekretariat Daerah
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100	100	100%	Sekretariat Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	78,60	97,04%	Sekretariat Daerah
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Sakip Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja	32,79	20,56	62,71%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85,65	85,71	100,07%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	107,56%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, PAPBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Peningkatan BMD yang terkelola	100	100	100%	Badan Keuangan dan Aset Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,50	85,00	106,92%	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	97,96%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	1192,01	993,89	83,38%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	87,64	103,11%	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
		Indeks SPBE	105,50%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	90	100	111,11%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	80	93,20	116,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah;	80	100	125%	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan	90	96,26	106,96%	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
					domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara;				
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87,15	87,22	100,08%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Maturitas SPIP	100%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	89,33	89,33	100%	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan	86,67	86,67	100%	Inspektorat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88	88,14	100,16%	Inspektorat
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	85%	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik	98.36	98	100%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	18,95	35	184,70%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	83	85,96	103,57%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	102,67%	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk	99,81	98,99	99,18%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100	100	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	87,89	87,08	99,08%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Prosentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100	75	75%	Sekretariat DPRD
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	85,25	112,17%	Sekretariat DPRD
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	19	19	100%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72	71	98,61%	Kecamatan Balikpapan Barat
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,65	16,66	100,06%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,70	81,50	102,26%	Kecamatan Balikpapan Selatan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan	10,60	16	150,94%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79,70	80,07	100,46%	Kecamatan Balikpapan Kota
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	8,75	18	205,71%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	81	109,46%	Kecamatan Balikpapan Timur
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	18	18,12	100,67%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82,95	82,35	99,28%	Kecamatan Balikpapan Utara
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	12,75	24,24	190,12%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal	100	100	100%	Kecamatan Balikpapan Tengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70,45	82	116,39%	Kecamatan Balikpapan Tengah
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	94	95,80	101,91%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	87,23	99,50	114,07%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1	92,45	100,00	108,17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	94,44	98,73	104,54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)	99,13	95,57	96,41%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88,18	88,21	100,03%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAAN	
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	100,55%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87,69	104,39%	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	88	100	113,64%	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Ijin Usaha Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan minum yang diterbitkan	100	100	100%	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif	88	65,96	74,95%	Dinas Kesehatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,10	78,06	92,82%	Dinas Kesehatan
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	140,15%	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	7	7,40	105,71%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Arsip	Persentase Arsip yang dikelola	90	100	111,11%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan	85	85	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase perizinan penggunaan arsip	100	100	100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	81	82,86	102,30%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	55,65%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Mandiri	2,3	2,794	121,48%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100	100	100%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang berprestasi	6,30	15,82	251,11%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAAN	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	89	104,71%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	99,30%	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	67,98	79,01	116,23%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	37,31	69,23	185,55%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	60	80	133,33%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	98,53	100	101,49%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100,07%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase OPD yang telah menyusun anggaran yang Responsif Gender (jumlah OPD yg telah menyusun PPRG/jumlah seluruh OPD x100%)	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan (Jumlah Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO dibagi Jumlah Perempuan dikali 100.000)	8,19	11	-31,94%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Ketersediaan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di tingkat Kecamatan	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah (jumlah OPD memiliki data terpilah dibagi Jumlah OPD dikali 100)	38,89	52,94	136,13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase tindak lanjut rekomendasi Gugus Tugas KLA	70	70	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA (jumlah klien UPTD PPA yang sudah tuntas penanganannya dibagi jumlah klien yang ditangani UPTD PPA kalikan 100)	90	94,14	104,60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Prosentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi	100	100	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan	85550000000	89616791709	104,75%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pengendalian Penduduk	Prosentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	68	92	135,29%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%)	11,25	4,28	38,04%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan (Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan dibagi jumlah keluarga versi DALLAP BKKBN dikalikan 100)	18,35	9,40	51,23%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	81	96,43%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	79,95%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	67,65	70,59	104,35%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	97,39	94	96,52%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	99,05	94,63	95,54%	Dinas Pekerjaan Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98	98	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	91,47	92,63	101,27%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan yang memiliki ijin	94,41	93,53	99,07%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	100	100%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,85	56,31	104,57%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	84	97,67%	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penyelenggara An Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi	57	42	73,68%	Dinas Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan	68	68	100%	Dinas Perhubungan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	68	68	100%	Dinas Perhubungan
				Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0,47	0,04	8,51%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Kawasan Permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	17,86	17,86	102,91%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan	10,40	10,40	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0.17	0.17	102,91%	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	87	102,35%	Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	85	85	100%	Dinas Sosial
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	105,46%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	89	89	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Rimba Kota, Taman Kota, TPU dan Pembibitan dikelola	10,63	10,63	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan	100	100	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	100	113,04	113,04%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan	Persentase limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola	65,79	65,79	100%	Dinas Lingkungan Hidup

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	32,93	59,25	179,93%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH	100	151,61	151,61%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Persampahan	100	99,40	99,40%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,66	78,66	100%	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	53,85	53,85	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,60	1,64	102,50%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80,21	80,21	100%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	91	92	101,10%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	84	98,82%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	111,18%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	92	92	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	92,50	92,50	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				dan Penyelamatan Non Kebakaran					
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	76	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	121,04%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda	12,50	12,40	99,20%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	77	96,25%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat terhadap 4 Konsensus Nasional	66	100	151,52%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik	100	195	195%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan	89	100	112,36%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pemuda yang mengikuti sosialisasi konsep P4GN	95	100	105,26%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring	88	100	113,64%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	77	89,53%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	67,48%	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT	17,36	15,27	87,96%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
	Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	10,88	7,32	67,28%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	86,68	88,82	102,47%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	8,65	9,11	105,32%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	11,35	12,66	111,54%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	14,80	15,33	103,58%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAAN	
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	64,29	30,96	48,16%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Pengelola Koperasi yang Meningkatkan Kapasitasnya	46,03	51,95	112,86%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	86	86,04	100,05%	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	104,28%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun	3,50	3,50	100%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur	63	49,04	77,84%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	30,50	37,30	122,30%	Dinas Ketenagakerjaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	73,40	48,30	65,80%	Dinas Ketenagakerjaan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	90,57	106,55%	Dinas Ketenagakerjaan
		Tingkat Kemiskinan	109,14%	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan	93,33	86,00	92,15%	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase layanan rehabilitasi sosial PMKS yang terpenuhi	80,95	70,75	87,40%	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	90,24	88,55	98,13%	Dinas Sosial
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	85	100	117,65%	Dinas Sosial
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	76	76	100%	Dinas Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	111,24%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Presentase pelaku usaha yang mendapat manfaat insentif bidang penanaman modal	1	0	0,00%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	95	95	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100	100	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang berlaku efektif	87	95,83	110,15%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	94,50	86,35	91,38%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	102,08%	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	65	100	153,85%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,11	0,27	245,45%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman	90	98,75	109,72%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4500	5170,40	114,90%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	312	770,95	247,10%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani	55	70,42	128,04%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia	85	119	140%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	30	45	150%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	80	100	125%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	74	80,55	108,85%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)	55	123,16	223,93%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan	65	100	153,85%	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	104,63%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Presentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	4	4	100%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Presentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	5	5,03	100,60%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	87,18%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya	29	30	103,45%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	20	34	170,00%	Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	99,49%	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi	70	33	47,14%	Dinas Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola	87	80	91,95%	Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu	5,20	5,05	102,97%	Dinas Perdagangan
				Program Pengembangan Ekspor	Nilai ekspor bersih non migas	2000	3256,74	162,84%	Dinas Perdagangan
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya	70	81,25	116,07%	Dinas Perdagangan
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	74	77,40	104,59%	Dinas Perdagangan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	75,24	91,76%	Dinas Perdagangan

Sumber: Bagian Organisasi dan Bappeda Litbang Kota Balikpapan, diolah tahun 2026

Analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kinerja pembangunan daerah telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Balikpapan. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 18 sasaran strategis, sebagian besar sasaran menunjukkan capaian yang memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dari keseluruhan sasaran tersebut, 12 sasaran strategis telah mencapai atau melampaui target, sedangkan 6 sasaran strategis lainnya masih belum mencapai target secara optimal sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pada umumnya telah mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah, meskipun masih terdapat beberapa program yang memerlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan.

Upaya mewujudkan sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel tercermin dari capaian beberapa indikator kinerja seperti Nilai SAKIP sebesar 100,67%, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 107,56%, Indeks SPBE sebesar 105,50%, serta Maturitas SPIP sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh berbagai program antara lain Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan, serta Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang secara umum mencapai target kinerja. Selain itu, Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga memberikan kontribusi positif terhadap capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Di bidang transformasi digital pemerintahan, capaian Indeks SPBE didukung oleh pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, serta Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Meskipun demikian, masih terdapat program yang belum optimal seperti Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang hanya mencapai 62,71% serta Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan capaian 83,38%, yang berpengaruh terhadap capaian Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah sebesar 97,96%.

Peningkatan kapasitas birokrasi yang profesional menjadi fokus dalam sasaran strategis menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel. Indikator Indeks Sistem Merit menunjukkan capaian sebesar 85%, yang mencerminkan adanya peningkatan dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian tersebut didukung oleh Program Kepegawaian Daerah yang mencapai 100%, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian 184,70%, serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan capaian 103,57%. Capaian yang melampaui target pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya peningkatan upaya dalam pengembangan kompetensi aparatur.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin pada sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian 102,67%. Keberhasilan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang mencapai 100%, Program Pendaftaran Penduduk dengan capaian 99,18%, serta berbagai program pelayanan publik pada tingkat kecamatan yang secara umum mencapai 100%. Selain itu, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di beberapa kecamatan juga menunjukkan capaian yang tinggi, seperti di Kecamatan Balikpapan Timur sebesar 205,71% dan Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar 190,12%. Namun demikian, masih terdapat program yang belum optimal seperti Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang hanya mencapai 75%.

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan tercermin dari capaian Indeks Pendidikan sebesar 100%. Capaian tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Pendidikan dengan capaian 114,07%, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar 108,17%, serta Program Pengembangan Kurikulum sebesar 104,54%. Walaupun demikian, masih terdapat program yang belum mencapai target secara optimal yaitu Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dengan capaian 96,41%.

Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tercermin pada sasaran strategis meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang diukur melalui Indeks

Kesehatan dengan capaian 100,55%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat yang mencapai 104,39%, serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan capaian 113,64%. Namun demikian, masih terdapat beberapa program yang belum optimal seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan capaian 74,95%.

Penguatan budaya literasi masyarakat tercermin pada sasaran strategis meningkatnya kualitas literasi masyarakat yang diukur melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 140,15%. Capaian tersebut didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan dengan capaian 105,71% serta Program Pengelolaan Arsip dengan capaian 111,11%, yang berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber informasi dan literasi.

Dalam rangka pengembangan potensi generasi muda, sasaran strategis meningkatnya kualitas pemuda diukur melalui Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan dengan capaian 55,65%. Meskipun beberapa program menunjukkan capaian tinggi seperti Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan capaian 121,48% serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan capaian 251,11%, capaian indikator secara keseluruhan masih memerlukan peningkatan lebih lanjut.

Pelestarian nilai budaya daerah menjadi fokus dalam sasaran strategis meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah yang diukur melalui Indeks Warisan Budaya dengan capaian 99,30%. Capaian ini didukung oleh Program Pengembangan Kebudayaan dengan capaian 116,23%, Program Pengembangan Kesenian Tradisional sebesar 185,55%, serta Program Pembinaan Sejarah sebesar 133,33%.

Penerapan pembangunan berbasis kesetaraan tercermin dalam sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender yang diukur melalui Indeks Pembangunan Gender dengan capaian 100,07%. Program yang mendukung sasaran ini antara lain Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, serta Program Pengendalian Penduduk. Namun demikian, masih terdapat

program yang belum optimal seperti Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan capaian 38,04%.

Pembangunan sarana dan prasarana daerah menjadi bagian penting dalam sasaran strategis meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas. Indeks Pembangunan Infrastruktur tercatat sebesar 79,95%, yang menunjukkan bahwa capaian indikator ini belum optimal. Beberapa program menunjukkan capaian baik seperti Program Penyelenggaraan Jalan sebesar 101,27%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase sebesar 104,57%, serta Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebesar 104,35%. Namun demikian, terdapat program yang masih rendah seperti Program Pengembangan Perumahan yang hanya mencapai 8,51%.

Kualitas lingkungan hidup juga menjadi perhatian melalui sasaran strategis meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian 105,46%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan yang mencapai 179,93% serta Program Peningkatan Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup sebesar 151,61%.

Ketahanan daerah dalam menghadapi potensi bencana tercermin dalam sasaran strategis meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota. Indikator Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 111,18% serta Indeks Ketentraman dan Ketertiban sebesar 121,04%, yang menunjukkan capaian yang sangat baik. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan serta Penanggulangan Kebakaran yang masing-masing mencapai 100%.

Penguatan perekonomian masyarakat tercermin dalam sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan. Beberapa indikator menunjukkan capaian yang cukup baik seperti Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 104,28% serta Tingkat Kemiskinan sebesar 109,14%, namun indikator Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah masih mencapai 67,48% sehingga memerlukan peningkatan efektivitas program pemberdayaan usaha mikro.

Peningkatan investasi daerah menjadi fokus dalam sasaran strategis meningkatnya nilai realisasi investasi daerah dengan capaian indikator sebesar

111,24%. Keberhasilan ini didukung oleh Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Namun demikian, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal belum terealisasi sehingga capaian program tersebut tercatat 0%.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah tercermin dalam sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan yang diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan dengan capaian 102,08%. Capaian tersebut didukung oleh beberapa program seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat serta Program Pengelolaan Perikanan Budidaya yang menunjukkan capaian tinggi.

Pengembangan sektor pariwisata tercermin pada sasaran strategis meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional yang diukur melalui angka kunjungan wisatawan dengan capaian 104,63%. Capaian ini didukung oleh Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata serta Program Pemasaran Pariwisata yang menunjukkan capaian baik.

Penguatan sektor ekonomi kreatif menjadi perhatian melalui sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif yang diukur melalui persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif dengan capaian 87,18%. Program yang mendukung sasaran ini antara lain Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya, pengembangan sektor unggulan daerah tercermin dalam sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah yang diukur melalui persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dengan capaian 99,49%. Capaian ini didukung oleh Program Pengembangan Ekspor, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Namun demikian, terdapat program yang belum optimal yaitu Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan capaian 47,14%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. Program-program yang dilaksanakan mampu

mendukung pencapaian sebagian besar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target sehingga memerlukan penguatan pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun-tahun selanjutnya.

Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 tidak hanya berperan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada akhir periode RPJMD Tahun 2021–2026, tetapi juga menjadi landasan awal dalam mendukung pencapaian sasaran strategis pada RPJMD Tahun 2025–2029, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah.

h. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 memerlukan alokasi anggaran yang tepat untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Tahun 2025 merupakan masa transisi antara RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Mengingat beberapa sasaran strategis RPJMD 2025–2029 bersifat lintas program, penyajian alokasi anggaran tetap mengacu pada program/kegiatan yang sama seperti dalam RKPD dan APBD Tahun 2025, tanpa memaksakan tabel perbandingan satu banding satu.

Pada tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dianggarkan melalui APBD Kota Balikpapan sebesar Rp 4.755.014.992.632,-. Adapun alokasi anggaran belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Alokasi Anggaran Belanja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	ALOKASI (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	62.356.389.738	1,31%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	115.558.451.099	2,43%
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	10.964.975.143	0,23%
		Indeks SPBE	37.789.747.881	0,79%
		Maturitas SPIP	3.047.833.605	0,06%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	10.244.452.868	0,22%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	218.651.758.356	4,60%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	491.501.235.959	10,34%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	247.425.979.757	5,20%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2.067.329.470	0,04%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	31.462.044.461	0,66%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	4.269.704.447	0,09%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	21.023.125.998	0,44%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	1.315.121.875.496	27,66%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	210.348.578.814	4,42%
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	5.547.407.071	0,12%
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	28.480.478.802	0,60%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	31.194.440.561	0,66%
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.776.952.918	0,08%
		Tingkat Kemiskinan	8.104.675.885	0,17%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	ALOKASI (%)
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	1.871.695.429	0,04%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	8.103.720.732	0,17%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	12.389.457.209	0,26%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	1.779.141.250	0,04%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	43.745.603.946	0,92%
Jumlah			2.926.827.056.894,40	62%
Program/kegiatan penunjang			1.828.187.935.737,40	38%
Total Belanja			4.755.014.992.631,80	100%

Sumber: BKAD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi tahun 2026

Berdasarkan tabel di atas, sektor dengan alokasi anggaran terbesar adalah Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas, yang mendapat Rp 1.315.121.875.496 atau 27,66% dari total anggaran. Disusul oleh Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan sebesar Rp 491.501.235.959 (10,34%), serta Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dengan alokasi Rp 247.425.979.757 (5,20%).

Sementara itu, sektor dengan alokasi terkecil antara lain Meningkatkan Kualitas Literasi Masyarakat yang hanya memperoleh Rp 2.067.329.470 (0,04%), diikuti oleh Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi Daerah sebesar Rp 1.871.695.429 (0,04%), serta Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan alokasi Rp 1.779.141.250 (0,04%).

Untuk sektor tata kelola pemerintahan, beberapa indikator kinerja mendapatkan alokasi yang berbeda, antara lain Nilai SAKIP sebesar 1,31%, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 2,43%, Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah 0,23%, Indeks SPBE 0,79%, dan Maturitas SPIP 0,06%.

Secara keseluruhan, alokasi program/kegiatan utama mencakup Rp 2.926.827.056.894,40 atau 62% dari total belanja, sedangkan program/kegiatan penunjang mendapat Rp 1.828.187.935.737,40 (38%). Total belanja yang direncanakan untuk Tahun 2025 mencapai Rp 4.755.014.992.631,80, yang digunakan untuk menunjang pencapaian sasaran strategis pemerintah kota sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut dari alokasi tersebut, pemanfaatan anggaran dalam bentuk realisasi belanja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 4.147.972.142.156,- atau 87,23% dari total anggaran belanja yang dialokasikan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	523.212.105.341	447.717.509.206	85,57%
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	26.604.931.522	22.484.360.310	84,51%
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	474.399.750.006	416.941.900.076	87,89%
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1.009.127.457.732	906.720.729.198	89,85%
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	611.375.869.506	396.438.532.956	64,84%
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	16.249.431.288	12.793.215.463	78,73%
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	47.910.146.041	40.187.406.637	83,88%
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	4.269.704.447	4.150.848.226	97,22%
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	34.895.597.896	31.035.098.859	88,94%
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	1.410.508.047.147	1.337.502.562.860	94,82%
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	250.775.315.100	224.825.773.762	89,65%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	137.247.700.408	121.116.096.023	88,25%
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan	79.651.435.190	72.049.698.217	90,46%
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	18.803.258.308	15.236.418.719	81,03%
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	30.499.997.750	26.337.556.211	86,35%
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	12.389.457.209	11.837.672.036	95,55%
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	1.779.141.250	1.731.758.069	97,34%
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	65.315.646.492	58.865.005.328	90,12%
Total Belanja		4.755.014.992.631,80	4.147.972.142.156	87,23%

Sumber: BKAD Kota Balikpapan, diolah Bagian Organisasi tahun 2026

Secara keseluruhan, realisasi anggaran pada berbagai sasaran strategis mencapai 82,67% dari total anggaran sebesar Rp 4,755 triliun, dengan total realisasi sebesar Rp 4,147 triliun. Tingkat pencapaian ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya untuk mengukur sejauh mana tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, PAKi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, PAKi merujuk pada pagu anggaran kinerja i. Sedangkan RAKi yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CKi yang merujuk pada capaian kinerja i.

Berdasarkan rumus di atas diketahui bahwa dari 25 indikator kinerja terdapat 17 indikator kinerja yang capaiannya 100% atau lebih sehingga dapat dikatakan efisiensi. Sementara itu, 8 indikator kinerja lainnya memiliki capaian di bawah 100% sehingga tidak dapat diakui efisiensi.

Beberapa indikator yang menunjukkan efisiensi tinggi antara lain Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian 140,15% dan efisiensi 43,82%, Indeks Kesehatan (100,55% capaian, efisiensi 35,51%), Indeks Ketentraman dan Ketertiban (121,04% capaian, efisiensi 28,31%), Nilai Realisasi Investasi (111,24% capaian, efisiensi 27,16%), Tingkat Kemiskinan (109,14% capaian, efisiensi 19,68%), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (104,28% capaian, efisiensi 18,98%) serta Indeks Resiko Bencana (111,18% capaian, efisiensi 18,47%).

Di sisi lain, beberapa indikator tidak diakui efisiensinya karena capaian kinerjanya belum memenuhi target, meskipun penggunaan anggarannya relatif rendah. Contohnya termasuk Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah, Indeks Sistem Merit, Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Indeks Warisan Budaya, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran harus selalu dikaitkan dengan pencapaian kinerja, bukan hanya penghematan belanja.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.22
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	70,16	70,63	100,67%	220.379.783.651	188.183.268.595	85,39%	15,18%	Efisien
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	82,89	89,1528	107,56%	144.342.473.693	128.059.657.956	88,72%	17,51%	Efisien
		Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah	%	30,81	30,18	97,96%	83.173.621.870	67.665.132.287	81,35%	16,95%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
		Indeks SPBE	Poin	4	4,22	105,50%	49.347.947.163	41.258.097.132	83,61%	20,75%	Efisien
		Maturitas SPIP	Level	3	3	100%	25.968.278.964	22.551.353.236	87%	13%	Efisien
2	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Indeks Sistem Merit	Poin	0,8	0,68*	85%	26.604.931.522	22.484.360.310	84,51%	0,57%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
											tidak tercapai
3	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	84,95	87,22	102,67%	474.399.750.006	416.941.900.076	87,89%	14,40%	Efisien
4	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	0,7641	0,7641	100%	1.009.127.457.732	906.720.729.198	89,85%	10,15%	Efisien
5	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,8605	0,8652	100,55%	611.375.869.506	396.438.532.956	64,84%	35,51%	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	16,29	22,83	140,15%	16.249.431.288	12.793.215.463	78,73%	43,82%	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	Poin	0,209	0,1163	55,65%	47.910.146.041	40.187.406.637	83,88%	-50,74%	Tidak diakui efisiensi karena

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
											capaian kinerja tidak tercapai
8	Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	Poin	0,4965	0,493	99,30%	4.269.704.447	4.150.848.226	97,22%	2,09%	Tidak di akui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai
9	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90,98	91,04	100,07%	34.895.597.896	31.035.098.859	88,94%	11,12%	Efisien
10	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Poin	82	65,56	79,95%	1.410.508.047.147	1.337.502.562.860	94,82%	-18,60%	Tidak di akui efisiensi karena capaian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
											kinerja tidak tercapai
11	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	71,64	75,55	105,46%	250.775.315.100	224.825.773.762	89,65%	14,99%	Efisien
12	Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Indeks Resiko Bencana	Poin	99,43	89,43	111,18%	52.145.862.545	47.267.704.115	90,65%	18,47%	Efisien
		Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Poin	0,8675	1,05	121,04%	85.101.837.862	73.848.391.908	86,78%	28,31%	Efisien
13	Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah	%	21	14,17	67,48%	43.204.088.294	40.571.366.563	93,91%	-39,17%	Tidak diakui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
	Tingkat Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,09	5,84	104,28%	14.879.329.317	12.570.917.238	84,49%	18,98%	Efisien
		Tingkat Kemiskinan	%	2,15	1,97	109,14%	21.568.017.579	18.907.414.416	88%	19,68%	Efisien
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	Triliun Rupiah	24,5	27,254	111,24%	18.803.258.308	15.236.418.719	81,03%	27,16%	Efisien
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	89	90,85	102,08%	30.499.997.750	26.337.556.211	86,35%	15,41%	Efisien
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	Juta Orang	2,68	2,804	104,63%	12.389.457.209	11.837.672.036	95,55%	8,68%	Efisien
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	%	39	34	87,18%	1.779.141.250	1.731.758.069	97,34%	-11,65%	Tidak diakui efisiensi karena capaian kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN		
											tidak tercapai
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	9,77	9,72	99,49%	65.315.646.492	58.865.005.328	90,12%	9,41%	Tidak diakui efisiensi karena capaian kinerja tidak tercapai

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber : Bagian Organisasi dan BKAD Kota Balikpapan, diolah 2026

2.3.2 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 25 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23
Prestasi dan Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan
Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
1	Arindama Bidang Kesetaraan Gender	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
2	Arindama Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
3	Arindama Bidang Pembangunan Perhubungan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
4	Arinama Bidang Pembangunan Insfrakturtur	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
5	Arindama Bidang Pembangunan Komunikasi dan Informatika	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
6	Arindama Bidang Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
7	Arindama Bidang Pembangunan Investasi Daerah	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
8	Camat Terbaik Se-Kaltim	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Camat Balikpapan Utara
9	Terbaik Ketiga Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik Secara Nasional Kategori Kota	Nasional	Kemendagri	Wali Kota
10	Terbanyak Kedua Kerjasama dengan BPSDM Provinsi Kaltim	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Sekretaris Daerah
11	Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas LKPD Tahun 2024	Nasional	Bpk Perwakilan Kaltim	Wali Kota

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
12	Kota Berkinerja Terbaik Regional Kalimantan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024	Regional	Kementerian Dalam Negeri	Asisten Tata Pemerintahan
13	Penghargaan Kota Layak Anak Predikat Utama	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Wali Kota
14	Penghargaan Delegasi Kota Balikpapan di Ajang Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
15	Terbaik I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kaltim untuk Puskesmas Margo Mulyo	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Asisten Tata Pemerintahan
16	Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025	Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Inspektur
17	Juara Umum POPDA XVIII Tingkat Kaltim	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Kontingen Popda Balikpapan
18	Kota Dengan TP2D Terbaik di Wilayah Kalimantan	Regional	Bank Indonesia	Wali Kota
19	Duta Olahraga Provinsi Kaltim 2025 Atas Nama M. Raihan	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	Kepala DPOP
20	Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Kategori Kinerja Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Nasional	Kementerian Dalam Negeri	Wali Kota
21	Sutami Award Peringkat II Sistem Pengelolaan Sampah Terbaik Kategori Kota	Nasional	Kementerian PU	Asisten Ekbang Kesra
22	Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Predikat Sangat Baik	Provinsi	Pemerintah Provinsi Kaltim	DPPP
23	Pemerintah Daerah Dengan Tingkat Penyelesaian Tertinggi Atas Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025	Regional	BPK Perwakilan Kaltim	Inspektur

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi Yang Memberikan	Penerima
24	Penghargaan kepada Pemerintah Kota Balikpapan Atas Penerapan Kebijakan Pengarus Utamaan Gender melalui Penempatan ASN Perempuan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tahun 2025	Nasional	Ikatan Pimpinan Tinggi Perempuan Indonesia	Asisten Administrasi Umum
25	Apresiasi Atas Pelaporan Aksi Ham Terbaik, Tercepat dan Paling Responsif Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025	Provinsi	Kepala Kantor Wilayah	Kementerian Hak Asasi Manusia RI

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2026

Adapun beberapa dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut ini:

Tabel 2.24

Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan Tahun 2025

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
1		Arindama Bidang Kesetaraan Gender	Penyerahan tujuh Arindama keberhasilan pembangunan Kota Balikpapan yang diterima saat upacara HUT Ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, dimana pada penghargaan tahun ini, Balikpapan kembali menjadi juara umum Arindama Pembangunan Kota se-Kalimantan Timur.
		Arindama Bidang Ketentraman Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	
		Arindama Bidang Pembangunan Perhubungan	
		Arinama Bidang Pembangunan Infrastruktur	Kemudian Bidang Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM serta Bidang Pembangunan Investasi Daerah yang diserahkan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Balikpapan juga menerima Grand Arindama Bidang Pelayanan Publik yang diserahkan pada Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
		Arindama Bidang Pembangunan Komunikasi Dan Informatika	
		Arindama Bidang Pembangunan Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Umkm	
		Arindama Bidang Pembangunan Investasi Daerah	

Sumber:
<https://web.balikipapan.go.id/berita/read/9772>

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
2		Camat Terbaik Se-Kaltim	Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memacu kinerja para ASN guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Salah satunya dengan memberikan apresiasi khusus dalam bentuk penghargaan bagi Camat berprestasi yang memiliki kinerja optimal di berbagai sektor. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik tepat di Hari Ulang Tahun (HUT) ke 68 Provinsi Kalimantan Timur di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Kamis (9/1/202). Pada momen spesial ini, Camat Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, dinobatkan sebagai Camat Berprestasi Terbaik I. Posisi Terbaik II diraih oleh Camat Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Abdul Rasyid, sedangkan posisi Terbaik III diberikan kepada Camat Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Aditya Koesprayogi. Program dan kegiatan di Kecamatan Balikpapan Utara selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemerintah Kota Balikpapan serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Empat program prioritas, yaitu pengelolaan pembatasan wilayah administrasi, program pembangunan yang mencakup infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, ketiga program kemasyarakatan, serta program pemberdayaan masyarakat. Sumber: https://kaltimprov.go.id/detailberita/prestasi-membanggakan-muhammad-fadli

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
			pathurrahman-dinobatkan-sebagai-camat-berprestasi-terbaik-i
3		Terbaik Ketiga Penghargaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik Secara Nasional Kategori Kota	Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024, berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota tahun 2023 pada 3 provinsi, 10 Kabupaten dan 10 Kota yang berprestasi tertinggi secara nasional, Kota Balikpapan termasuk dalam pemerintah kota yang mendapat penghargaan penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik secara nasional. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Masud, S.E. M.E. Sumber: https://web.balikipapan.go.id/berita/read/9808
4		Opini Wajar Tanpa Pengecualian Atas Lkpd Tahun 2024	Pemerintah Kota Balikpapan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024. Opini WTP yang diberikan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Pemkot Balikpapan dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber: https://korankaltim.com/read/undefined/79145/balikipapan-kembali-raih-opini-wtp-atas-lhp-dalam-lkpd-tahun-2024

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
5		Kota Berkinerja Terbaik Regional Kalimantan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Tahun Anggaran 2024.	Kota Balikpapan kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kali ini, Balikpapan dinobatkan sebagai Kota Berkinerja Terbaik Regional Kalimantan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam ajang SPM Awards 2025 yang digelar di Kantor Ditjen Bangda Kemendagri Jakarta, pada hari Jumat, 23 Mei 2025. Pemerintah Kota Balikpapan diwakili oleh Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, Zulkipli, hadir menerima penghargaan tersebut mewakili Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas'ud. Sumber: https://beritakaltim.co/2025/05/24/balikpapan-raih-predikat-kota-berkinerja-terbaik-regional-kalimantan-dalam-penerapan-spm/
6		Penghargaan Kota Layak Anak Predikat Utama	Kota Balikpapan kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Utama 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia. Penghargaan KLA merupakan apresiasi tahunan KemenPPPA bagi daerah yang dinilai berhasil memenuhi indikator pembangunan berbasis hak anak. Kategori Utama adalah peringkat tertinggi kedua setelah Kategori Utama Paripurna. Penganugerahan penghargaan KLA ini sejalan dengan amanat konstitusi yang mewajibkan negara untuk memenuhi seluruh hak anak, memberikan perlindungan, serta menghargai pandangan mereka, sebagaimana diatur dalam

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
			Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber: https://www.inibalikpapan.com/balikpapan-kembali-raih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama-2025
7		Penghargaan Delegasi Kota Balikpapan di Ajang Pemilihan Duta Wisata Dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025	Penghargaan Delegasi Kota Balikpapan di Ajang Pemilihan Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kalimantan Timur 2025
8		Terbaik I Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kaltim Untuk Puskesmas Margo Mulyo	Puskesmas Margo Mulyo menorehkan prestasi gemilang. Fasilitas kesehatan ini meraih peringkat pertama kategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada ajang Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang digelar di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim.

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
9		Inspektur Berkinerja Terbaik Tahun 2025	Inspektorat Kota Balikpapan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Penghargaan Inspektur Berkinerja Terbaik Nasional Tahun 2025 diberikan kepada Inspektur Kota Balikpapan, Ibu Hj. Silvia Rahmadina, A.P., CGCAE., CGRE., QIA, pada Rapat Paripurna Peringatan HUT Kota Balikpapan ke-129, yang diselenggarakan pada 9 Februari 2026. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Balikpapan, Dr. H. Rahmad Mas'ud, S.E., M.E., sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, dan komitmen dalam mewujudkan pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Inspektorat Kota Balikpapan untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sumber: https://www.instagram.com/p/DUjyxLAEydx/?img_index=1
10		Juara Umum Popda XVII Tingkat Kaltim	Balikpapan tampil sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) XVII Kalimantan Timur Tahun 2025 yang ditutup di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kontingen Balikpapan berhasil pulang dengan membawa 174 medali. Di antaranya 59 emas, 57 perak, dan 58 perunggu. Sumber: https://kaltimprov.go.id/detailberita/selamat-balikpapan-juara-umum-popda-xvii-kaltim-2025-raih-174-medali

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
11		Kota Dengan TP2DD Terbaik Di Wilayah Kalimantan	Balikpapan dinobatkan sebagai TP2DD Kota Terbaik 2025 untuk Kawasan Kalimantan pada pertemuan tahunan Bank Indonesia 2025. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan secara langsung kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud. Pengakuan ini mengukuhkan konsistensi Pemkot Balikpapan dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi, sekaligus mendukung arah kebijakan nasional menuju percepatan transaksi nontunai dan penguatan <i>smart city</i>. Sumber: https://kaltimpost.jawapos.com/balikpapan/2386897691/balikpapan-raih-tp2dd-kota-terbaik-2025-kawasan-kalimantan-wujud-komitmen-perkuat-digitalisasi-layanan-keuangan-daerah
12		Duta Olahraga Provinsi Kaltim 2025 Atas Nama M. Raihan	Duta Olahraga Kota Balikpapan M. Raihan Dari Cabang Olahraga Korfball Balikpapan Akan Mengikuti Pemilihan Duta Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan Duta Olahraga Adalah Sebuah Ajang Pencarian Generasi Muda Yang Berasal Dari Atlet Dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Memiliki Perhatian Terhadap Perkembangan Dunia Olahraga Sehingga Dapat Membantu Meningkatkan Semangat Untuk Membudayakan dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Kalimantan Timur. Sumber: https://www.instagram.com/p/D Rb0vsID822/

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
13		Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Kategori Kinerja Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional	Pemerintah Kota Balikpapan menerima Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 kategori Kinerja Akselerasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional dari Kementerian Dalam Negeri. Balikpapan menjadi satu-satunya kota di Kalimantan yang meraih penghargaan ini. Capaian tersebut sejalan dengan performa ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren positif. Pada semester I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Balikpapan mencapai 8,35% (CTC), tertinggi di antara kelompok provinsi yang pertumbuhannya ditopang sektor pertambangan dan pengolahan. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan kelompok hanya berada di angka 0,08%, bahkan kontraksi terdalam menyentuh -4,84%. Hasil ini menegaskan kuatnya aktivitas produksi dan peningkatan nilai tambah di sektor unggulan pertambangan sebagai motor penggerak ekonomi Balikpapan. Sumber: https://www.instagram.com/p/D Rv4BEUAY1X/
14		Sutami Award Peringkat II Sistem Pengelolaan Sampah Terbaik Kategori Kota	Kota Balikpapan meraih peringkat kedua nasional dalam Sutami Awards 2025 atas kinerja terbaik dalam pengelolaan sampah. Sebuah pengakuan bahwa langkah-langkah yang ditempuh selama ini berada di jalur yang benar. Setiap hari, Kota Balikpapan menghasilkan lebih dari 540 ton sampah. Tantangan besar yang tak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Namun dengan kerja sama masyarakat, swasta, dan pemerintah, kota ini membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Mulai dari kebijakan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir di TPA Manggar, setiap tahapan dilakukan dengan tujuan yang sama: menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman bagi seluruh warga. Pemerintah Kota terus

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
			berinovasi, dari larangan kantong plastik, lomba Green, Clean, and Healthy, hingga pemanfaatan gas TPA menjadi LPG. Tahun ini, dua fasilitas baru hadir: TPST KM 12 Karang Joang dan TPST Graha Indah, yang mampu mengolah 30 ton sampah per hari dengan metode daur ulang, kompos, hingga maggot. Namun, perjalanan ini belum selesai. Penghargaan hanyalah bonus, yang terpenting adalah komitmen bersama untuk menjaga Balikpapan tetap hijau, bersih, dan layak huni, hari ini dan di masa depan. Sumber: https://www.instagram.com/balikpapan/p/DR_q6ZzkiaY/?hl=gu&img_index=2
15		Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Balikpapan Atas Penerapan Kebijakan Pengarus Utamaan Gender Melalui Penempatan ASN Perempuan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Tahun 2025	

No	Dokumentasi Penghargaan	Nama Penghargaan	Keterangan
16		Apresiasi Atas Pelaporan Aksi Ham Terbaik, Tercepat Dan Paling Responsif Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025	Kota Balikpapan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima piagam penghargaan atas pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) terbaik, tercepat, dan paling responsif dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2025. Penghargaan diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Timur, Umi Laili kepada Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo didampingi Asisten Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkipli, di Vip Room Balai Kota Balikpapan, pada hari Rabu, 18 Februari 2026. Untuk tahun 2025, Balikpapan memperoleh nilai tertinggi dengan capaian 99 persen. Sumber: https://beritakaltim.co/2026/02/18/balikpapan-raih-penghargaan-pelaporan-aksi-ham-terbaik-2025/

Sumber: Bagian Organisasi, diolah 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2025, **Pemerintah Kota Balikpapan tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

- a. Pendidikan Usian Dini;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2. Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut adalah jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Tahun 2024 :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi HIV.

3. **Pekerjaan Umum**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terdiri dari :

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

4. **Perumahan Rakyat**

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari;

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Trantibumlinmas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Privinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, bahwa Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kota Balikpapan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran dan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

6. Sosial

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti;
- 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti;
- 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti;
- 4) Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti; dan
- 5) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM

1. Pendidikan

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%

2. Kesehatan

Tabel 4.2

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	TARGET
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN	TARGET
		elayanan kesehatan	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

3. Pekerjaan Umum

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	100 %

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah	100%

4. Perumahan Rakyat

Tabel 4.4

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100 %
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100 %
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100 %
	Subsidi Uang Sewa	100 %
	Penyediaan Rumah Layak Huni	100 %

5. Trantibumlinmas

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Standar sarana prasarana Satpol PP	100%
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	100%
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat	100%

NO	JENIS LAYANAN	INDIKATOR	TARGET
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	100%
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	100%
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	100%
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	100%
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Sarana prasarana penanggulangan bencana	100%
		Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	100%

6. Sosial

Tabel 4.6

Indikator Kinerja Pencapaian Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%

C. ANGGARAN

1. Pendidikan

Tabel 4.7

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629			183,961,523,710	178,650,397,387	97.11 %
		1	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	274,513,700	5,046,060	1.84 %
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	50,000,000	47,117,100	94.23 %
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	333,238,000	309,834,902	92.98 %
		4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1,500,000,000	1,483,747,384	98.92 %
		5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	600,000,000	589,896,592	98.32 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	600,000,000	589,381,012	98.23 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	600,000,000	592,666,113	98.78 %
		8	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,000,000,000	989,487,215	98.95 %
		9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	1,000,000,000	991,984,468	99.20 %
		10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	149,999,700	130,995,200	87.33 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	15,658,000,000	15,444,853,826	98.64 %
		12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,517,700,200	1,395,607,749	91.96 %
		13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	7,830,000,000	7,685,655,829	98.16 %
		14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,229,055,900	1,067,667,569	86.87 %
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	96,128,289,400	93,539,669,939	97.31 %
		16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	500,000,000	500,000,000	100.00 %
		17	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	794,231,600	725,460,878	91.34 %
		18	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	166,999,790	140,616,600	84.20 %
		19	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	11,699,999,300	11,605,611,505	99.19 %
		20	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	5,010,996,000	3,974,600,344	79.32 %
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	4,581,465,620	4,282,598,393	93.48 %
		22	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	29,186,672,500	29,042,825,880	99.51 %
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,550,362,000	3,515,072,829	99.01 %
	JUMLAH INDIKATOR				183,961,523,710	178,650,397,387	97.11 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647			219,367,260,743	196,517,975,016	89.58 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	66,300,000,000	60,064,159,227	90.59 %
		2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1,010,244,784	1,001,267,098	99.11 %
		3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	1,200,000,000	967,365,274	80.61 %
		4	Pembangunan Laboratorium	Ruang	3,859,790,488	2,983,451,703	77.30 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6,441,736,786	6,073,460,716	94.28 %
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,498,010,860	2,257,824,629	90.38 %
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	215,895,474	214,095,969	99.17 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,049,795,122	849,955,969	80.96 %
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2,601,538,034	2,579,178,806	99.14 %
		10	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	2,200,000,000	2,123,440,169	96.52 %
		11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	300,000,000	270,750,000	90.25 %
		12	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,600,000,000	1,353,436,568	84.59 %
		13	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	9,044,750,000	6,026,526,915	66.63 %
		14	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1,000,000,000	743,446,453	74.34 %
		15	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	63,245,686,743	55,011,967,229	86.98 %
		16	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	300,000,000	286,559,945	95.52 %
		17	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	389,860,000	195,864,000	50.24 %
		18	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	34,637,360,000	34,567,527,923	99.80 %
		19	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	10,000,000,000	7,886,594,185	78.87 %
		20	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	11,300,000,000	10,890,775,324	96.38 %
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	172,592,452	170,326,914	98.69 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				219,367,260,743	196,517,975,016	89.58 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			44,692,949,500	39,707,237,835	88.84 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	406,937,000	353,865,731	86.96 %
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	180,000,000	177,065,926	98.37 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	448,617,500	441,499,964	98.41 %
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	2,675,000,000	2,658,451,802	99.38 %
		5	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	11,447,500,000	11,239,422,218	98.18 %
		6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	247,555,000	247,000,000	99.78 %
		7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	16,502,600,000	12,880,184,724	78.05 %
		8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	2,324,800,000	2,097,917,338	90.24 %
		9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	10,219,940,000	9,384,967,132	91.83 %
		10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	110,000,000	98,967,250	89.97 %
	JUMLAH INDIKATOR				44,692,949,500	39,707,237,835	88.84 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			33,329,261,800	31,577,213,927	94.74 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	1,303,655,000	1,138,622,628	87.34 %
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	17,536,400,000	16,350,940,017	93.24 %
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	760,220,000	472,968,822	62.21 %
		4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	3,664,350,000	3,664,350,000	100.00 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	100,000,000	91,565,200	91.57 %
		6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	100,000,000	97,825,750	97.83 %
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	7,162,000,000	7,133,221,420	99.60 %
		8	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	300,000,000	299,100,000	99.70 %
		9	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	1,740,000,000	1,674,809,823	96.25 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	662,636,800	653,810,267	98.67 %
	JUMLAH INDIKATOR				33,329,261,800	31,577,213,927	94.74 %
	JUMLAH PROGRAM				481,350,995,753	446,452,824,165	92.75 %

2. Kesehatan

Tabel 4.8

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,024,594,000	901,973,924	88.03 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	719,942,000	600,588,260	83.42 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	564,111,210	476,344,890	84.44 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	400,000,000	383,630,000	95.91 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	760,500,000	707,111,750	92.98 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	625,000,000	563,090,730	90.09 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	400,000,000	354,322,100	88.58 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	250,000,000	218,241,700	87.30 %
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,535,062,816	1,444,184,195	94.08 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	250,000,000	239,759,750	95.90 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,836,976,700	1,757,723,050	95.69 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	517,350,000	475,498,050	91.91 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %
	JUMLAH PROGRAM				8,883,536,726	8,122,468,399	91.43 %

3. Pekerjaan Umum

Tabel 4.9

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN			14,980,691,100	13,150,127,428	87.78 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			8,457,689,000	7,912,210,271	93.55 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			8,457,689,000	7,912,210,271	93.55 %
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem	Dokumen	742,027,000	724,201,500	97.60 %

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	7,715,662,000	7,188,008,771	93.16 %
	JUMLAH INDIKATOR			8,457,689,000	7,912,210,271	93.55 %
	JUMLAH PROGRAM			8,457,689,000	7,912,210,271	93.55 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			6,523,002,100	5,237,917,157	80.30 %
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			6,523,002,100	5,237,917,157	80.30 %
	1	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	100,000,000	94,284,500	94.28 %
	2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	4,112,500,600	3,141,538,219	76.39 %
	3	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M³/Hari	845,445,000	647,192,041	76.55 %
	4	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	415,940,000	322,089,000	77.44 %
	5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	1,049,116,500	1,032,813,397	98.45 %
	JUMLAH INDIKATOR			6,523,002,100	5,237,917,157	80.30 %
	JUMLAH PROGRAM			6,523,002,100	5,237,917,157	80.30 %

4. Perumahan Rakyat

Tabel 4.10

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				1,813,820,000	488,172,776	26.91 %
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1,578,820,000	388,161,297	24.59 %
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			225,000,000	197,175,476	87.63 %
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	75,000,000	60,906,930	81.21 %
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	100,000,000	88,418,236	88.42 %
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	50,000,000	47,850,310	95.70 %
	JUMLAH INDIKATOR				225,000,000	197,175,476	87.63 %
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			1,353,820,000	190,985,821	14.11 %
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	1,000,000,000	63,192,311	6.32 %
		2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
		4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	100,000,000	21,447,600	21.45 %
		8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
		9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	253,820,000	106,345,910	41.90 %
		10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
		12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,353,820,000	190,985,821	14.11 %
	JUMLAH PROGRAM				1,578,820,000	388,161,297	24.59 %
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
		1	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana		100,000,000	96,761,479	96.76 %
		2	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		75,000,000	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		60,000,000	3,250,000	5.42 %

5. TrantibumLinmas

Tabel 4.11

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas

Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				21,807,170,900	20,740,465,112	95.11 %
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				10,067,170,900	9,584,086,682	95.20 %
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			8,929,552,800	8,471,863,558	94.87 %
		1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	3,101,859,400	3,076,902,448	99.20 %
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	261,949,000	244,540,088	93.35 %
		3	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	698,664,000	640,283,328	91.64 %
		4	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	4,867,080,400	4,510,137,694	92.67 %
	JUMLAH INDIKATOR				8,929,552,800	8,471,863,558	94.87 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			1,112,040,500	1,086,757,224	97.73 %
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	163,397,800	160,469,700	98.21 %
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	267,345,300	261,421,700	97.78 %
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	681,297,400	664,865,824	97.59 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,112,040,500	1,086,757,224	97.73 %
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota K2023457			25,577,600	25,465,900	99.56 %
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	25,577,600	25,465,900	99.56 %
	JUMLAH INDIKATOR				25,577,600	25,465,900	99.56 %
	JUMLAH PROGRAM				10,067,170,900	9,584,086,682	95.20 %
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1,915,000,000	1,872,751,138	97.79 %
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota K2023456			100,000,000	95,422,220	95.42 %
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	100,000,000	95,422,220	95.42 %
	JUMLAH INDIKATOR				100,000,000	95,422,220	95.42 %
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			650,000,000	629,543,200	96.85 %
		1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	178,000,000	174,213,200	97.87 %
		2	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	200,000,000	186,591,000	93.30 %
		3	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	272,000,000	268,739,000	98.80 %
	JUMLAH INDIKATOR				650,000,000	629,543,200	96.85 %
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana K2023445			300,000,000	296,914,900	98.97 %
		1	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100,000,000	98,724,900	98.72 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	200,000,000	198,190,000	99.10 %
	JUMLAH INDIKATOR				300,000,000	296,914,900	98.97 %
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana K2023446			865,000,000	850,870,818	98.37 %
		1	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	865,000,000	850,870,818	98.37 %
	JUMLAH INDIKATOR				865,000,000	850,870,818	98.37 %
	JUMLAH PROGRAM				1,915,000,000	1,872,751,138	97.79 %
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				9,825,000,000	9,283,627,292	94.49 %
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota K2023449			6,966,130,000	6,541,860,622	93.91 %
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5,000,000,000	4,591,625,722	91.83 %
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	566,130,000	565,364,900	99.86 %
		3	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	Dokumen	200,000,000	200,000,000	100.00 %
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	1,200,000,000	1,184,870,000	98.74 %
	JUMLAH INDIKATOR				6,966,130,000	6,541,860,622	93.91 %
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran K2023450			450,000,000	443,261,500	98.50 %
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	200,000,000	196,959,000	98.48 %
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	250,000,000	246,302,500	98.52 %
	JUMLAH INDIKATOR				450,000,000	443,261,500	98.50 %
	10	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran K2023459			1,400,000,000	1,296,482,130	92.61 %
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	300,000,000	287,647,300	95.88 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	1,100,000,000	1,008,834,830	91.71 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,400,000,000	1,296,482,130	92.61 %
	11	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia K2023458			1,008,870,000	1,002,023,040	99.32 %
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	83,870,000	82,853,040	98.79 %
		2	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	925,000,000	919,170,000	99.37 %
	JUMLAH INDIKATOR				1,008,870,000	1,002,023,040	99.32 %
	JUMLAH PROGRAM				9,825,000,000	9,283,627,292	94.49

6. Sosial

Tabel 4.12

Rincian Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA BALIKPAPAN				2,545,852,590	2,072,957,229	81.42 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2,545,852,590	2,072,957,229	81.42 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2,103,737,266	1,667,771,229	79.28 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	1,578,495,900	1,177,580,600	74.60 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	54,998,566	50,844,400	92.45 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	350,242,800	337,167,171	96.27 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20,000,000	12,485,500	62.43 %
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	80,000,000	73,077,858	91.35 %
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	20,000,000	16,615,700	83.08 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,103,737,266	1,667,771,229	79.28 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			442,115,324	405,186,000	91.65 %
		1	Penyediaan makanan	Orang	187,425,000	155,790,000	83.12 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	149,691,000	147,691,000	98.66 %
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	54,999,700	53,345,000	96.99 %
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	24,999,624	23,800,000	95.20 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	25,000,000	24,560,000	98.24 %
	JUMLAH INDIKATOR				442,115,324	405,186,000	91.65 %
	JUMLAH PROGRAM				2,545,852,590	2,072,957,229	81.42 %

D. DUKUNGAN PERSONIL

1. Pendidikan

Tabel 4.13

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	5
Kepala Seksi	
Kepala Sub Bagian	1
Kepala UPT	
Kepala TU	
Ketua Tim Kerja	16
Pengawas	24
Penilik	1

Jabatan	Jumlah (Orang)
Administrator/Fungsional/Staff	315
JOLP	
Guru	3450
Jasa Keamanan	189
Jasa Kebersihan	311

2. Kesehatan

Tabel 4.14

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (Orang)
Struktural	
Kepala Dinas	1
Sekretaris	0
Kepala Bidang	3
Kepala Sub Bagian	2
Kepala UPTD	3
Kepala Sub Bagian TU	23
Fungsional Tertentu	
Dokter	74
Dokter Gigi	35
Perawat	140
Perawat Gigi	25
Apoteker	37
Asisten Apoteker	30
Bidan	151
Nutrisionis	31
Sanitarian/ kesling	21
Promkes	32
Perekam Medis	11
Adminkes	25
Entomologi	1
Epidemiologi	4
Pranata Labkes	46
Fisioterapi	5

Jabatan	Jumlah (Orang)
Pranata SDM	1
Perencana	3
Analisis Kebijakan	1
Jabatan Pelaksana	
Penelaah teknis Kebijakan	57
Pengolah Data dan Informasi	15
Pengadministrasi Perkantoran	118
Tenaga teknis dan jaringan	27

3. Pekerjaan Umum

Tabel 4.15

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman	1
Staff	12
Total	15

4. Perumahan Rakyat

Tabel 4.16

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	0
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0

Jabatan	Jumlah (Orang)
Penata Penyehatan Lingkungan Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0
Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0
Staff	34
Total	40

5. Trantibumlinmas

Tabel 4.17

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang TrantibumLinmas Satpol PP Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	-	PNS
2	Sekretaris Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satuan Polisi Pamong Praja)	1	-	PNS
3	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1	-	PNS
4	Kepala Bidang Penegakan	1	-	PNS
5	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	-	PNS
6	Kepala Subbagian Umum	1	-	PNS
7	Kepala Subbagian Program dan Keuangan	1	-	PNS
8	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	1	-	PNS

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
9	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	-	1	PNS
10	Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Aparatur	1	-	PNS
11	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	1	-	PNS
12	Kepala Seksi Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1	-	PNS
13	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	-	1	PNS
14	Analisis Kepegawaian (Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur) Ahli Pertama	-	1	PNS
15	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	-	1	PNS
16	Penelaah Teknis Kebijakan	-	1	PNS
17	Penata Laksana Barang Terampil	-	1	PNS
18	Polisi Pamong Praja Terampil	12	5	PNS
19	Polisi Pamong Praja Penyelia	4	-	PNS
20	Polisi Pamong Praja Mahir	96	3	PNS
21	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	6	1	PNS
22	Pengadministrasi Perkantoran	14	-	PNS
23	Operator Layanan Operasional	3	-	PNS

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
24	Operator Layanan Operasional	18	4	PPPK
25	Penata Layanan Operasional	5	1	PPPK
26	Pengadministrasi Perkantoran	3	6	PPPK
27	Pranata Trantibum	12	5	PPPK
JUMLAH		184	31	

**Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang TrantibumLinmas BPBD
Tahun 2025**

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3
Kepala Seksi	6
Kepala Sub Bagian	3
Kepala UPTD	6
Kepala Sub Bagian TU UPTD	6
Staf PNS	130
Staf PPPK	130
Staf PPPK Paruh Waktu	5
Pejabat Fungsional	0
Naban	0
Total	291

6. Sosial

Tabel 4.18

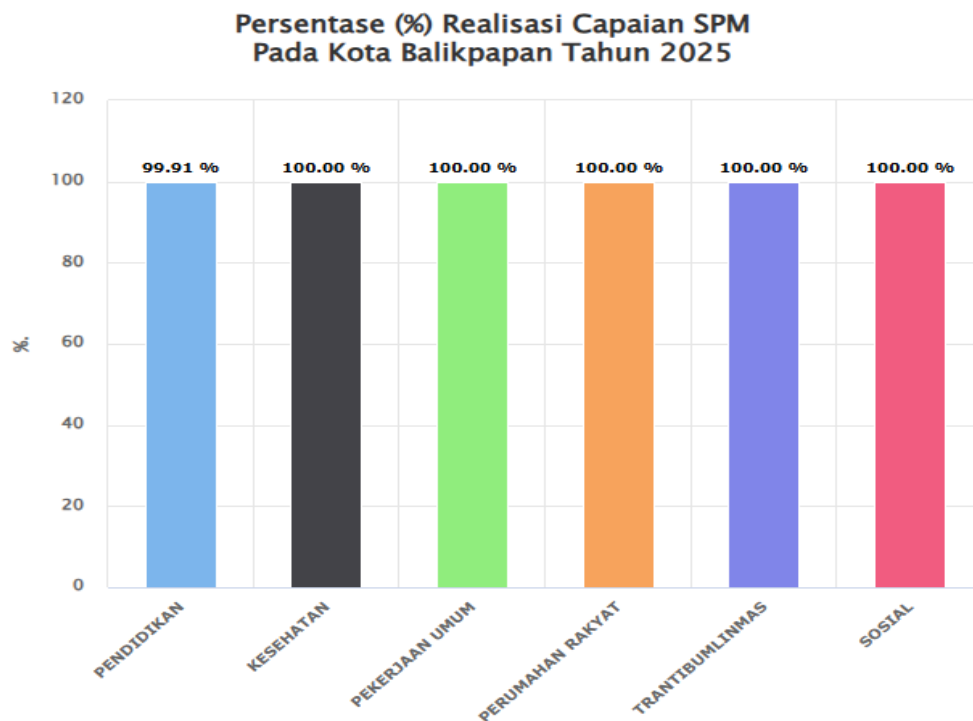
Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2025

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Dinas	1
Sekretaris	1
Kepala Bidang	3

Jabatan	Jumlah (Orang)
Kepala Seksi	0
Kepala Sub Bagian	1
Staf (Fungsional Umum)	31
Pejabat Fungsional (Peksos & Pensos)	10
Naban	
Total	47

E. HASIL CAPAIAN

Capaian SPM Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut;



Gambar 4.1 Persentase capaian SPM Tahun 2025

Sumber data Aplikasi Pelaporan SPM :

<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/2025/home>

1. PENDIDIKAN

Capaian Penerapan SPM urusan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.19

Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI					97.28 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Yang Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.39 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	14.856	14.371	-485	96.74 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						19.89 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	99.44 %
1	Angka partisipasi sekolah	%	100	100	0	100%
2	Angka partisipasi murni	%	41,17	47,68	-6,51	100%
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	72,03	69,12	2,91	95.96 %
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	82,92	82,06	-0,86	98.96 %
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	2,63	6	-3,37	100%
6	Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100%
7	Indeks distribusi guru	%	0,4	0,8	-0,64	100%
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	13,51	61,15	-47,64	100%
9	Proporsi PTK penggerak*	%	1,23	4,76	-3,53	100%

Tabel 4.20

Realisasi Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dasar Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	PENDIDIKAN DASAR					93.32 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	73.37 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	119.112	109.245	9.867	91.72 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.95 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	99.74 %
	SD					99.48 %
1	Angka partisipasi kasar	%	105,85	105,85	0,0	100%
2	Angka partisipasi sekolah	%	100,00	99,81	0,19	99.81 %
3	Kemampuan literasi	Nilai	87,10	87,10	0	100%
4	Kemampuan numerasi	Nilai	72,25	72,25	0	100%
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	5,67	5,31	0,36	93.65 %
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,14	4,05	-1,91	100%
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	73,54	73,37	0,17	99.77 %
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,59	74,59	0	100%
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	55,59	55,59	0	100%
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	47,96	47,96	0	100%
11	Indeks distribusi guru	%	0,40	0,40	0	100%
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	42,29	42,29	0,00	100%
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,11	0,22	-0,11	100%
	SMP					100%
14	Angka partisipasi kasar	%	109,05	109,05	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
15	Angka partisipasi sekolah	%	99,26	99,26	0	100%
16	Kemampuan literasi	Nilai	76,24	89,75	-13,51	100%
17	Kemampuan numerasi	Nilai	65,75	85,01	-19,26	100%
18	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,00	5,31	-1,31	100%
19	Perbedaan skor numerasi	Nilai	4,57	8,29	-3,72	100%
20	Indeks iklim keamanan	Nilai	70,27	72,45	-2,18	100%
21	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,38	76,17	-2,79	100%
22	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	57,24	59,22	-1,98	100%
23	Kecukupan formasi guru N	%	35,67	35,67	0	100%
24	Indeks distribusi guru	%	0,29	0,29	0	100%
25	Proporsi PTK bersertifikat	%	43,71	43,71	0	100%
26	Proporsi PTK penggerak*	%	0,11	2,80	-2,69	100%

Tabel 4.21

Realisasi SPM pendidikan Kesetaraan

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	PENDIDIKAN EKSETARAAN					97.65 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	78.36 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	8.003	7.839	164	97.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19.29 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	96.46 %
1	Kemampuan literasi	%	8,01	7,25	0,76	90.51 %
2	Angka partisipasi sekolah	%	54,44	54,44	0	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
3	Kemampuan literasi	Nilai	69,90	71,28	-1,38	100%
4	Kemampuan numerasi	Nilai	62,95	67,23	-4,28	100%
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3	4	-1	100%
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	3	0	100%
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	68,54	67,29	1,3	98.18 %
8	Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	68,54	63,27	5,27	100%
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,55	54,14	-0,59	100%
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	11,88	14,81	2,08	100%
11	Indeks distribusi guru	%	15,01	9,80	5,21	65.29 %
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	0,00	0,00	0	100%
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0,00	0,00	0	100%

Tabel 4.22

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	$(77.39\% + 19.89\%) = 9.08 \%$	Tuntas Utama
2	Pendidikan Anak Usia Dasar	$(73.37\% + 19.95 \%) = 93.32 \%$	Tuntas Utama
3	Pendidikan Kesenjangan	$(78.36\% + 19.29\%) = 97.65 \%$	Tuntas Utama

2. KESEHATAN

Capaian Penerapan SPM urusan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.23

Realisasi Capaian SPM Kesehatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT	TOTAL PENCAPAIAN
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00 %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	8723	8723	0	100.00 %
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	1962720	1962720	0	100.00 %
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	1636	2746	-1110	100.00 %
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10904	10926	-22	100.00 %
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10904	10926	-22	100.00 %
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	727	727	0	100.00 %
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	342	558	-216	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	739	739	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selma periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	10904	10926	-22	100.00 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	10409	10441	-32	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	100.00 %
1	Formulir partograf	Formulir	10409	10441	-32	100.00 %
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	10409	10926	-517	100.00 %
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	10409	10926	-517	100.00 %
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	342	558	-216	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	739	739	0	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	9913	10315	-402	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	9913	10315	-402	100.00 %
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	9913	10315	-402	100.00 %
3	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	9913	10315	-402	100.00 %
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	9913	10315	-402	100.00 %
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	29739	30945	-1206	100.00 %
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	10904	10926	-22	100.00 %
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	143	143	0	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	739	739	0	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	27	27	0	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	27	27	0	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
14	Kader Kesehatan	Orang	7500	7500	0	100.00 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	48775	51614	-2839	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	48775	51614	-2839	100.00 %
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	48775	51614	-2839	100.00 %
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	48775	51614	-2839	100.00 %
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	4999	4999	0	100.00 %
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	33145	33145	0	100.00 %
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	9913	9913	0	100.00 %
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	9913	9913	0	100.00 %
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	10038	10038	0	100.00 %
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	9884	9884	0	100.00 %
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	9884	9884	0	100.00 %
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	19965	59795	-39830	100.00 %
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	27	27	0	100.00 %
15	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	72	72	0	100.00 %
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	143	143	0	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	739	739	0	100.00 %
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	835	2250	-1415	100.00 %
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
20	Guru PAUD	Orang	0	0	0	100.00 %
21	Kader Kesehatan	Orang	7500	7500	0	100.00 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	84246	101088	-16842	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang	Jumlah Mutu	Mutu Yang	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku	84246	101088	-16842	100.00 %
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku	84246	101088	-16842	100.00 %
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	84246	101088	-16842	100.00 %
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	84246	101088	-16842	100.00 %
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	84246	101088	-16842	100.00 %
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	2140840	2140840	0	100.00 %
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	100	100	0	100.00 %
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	4580	4580	0	100.00 %
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	54	54	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	27979	29439	-1460	100.00 %
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	54	146	-92	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	414	414	0	100.00 %
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	7500	7500	0	100.00 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	313962	313965	-3	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	27	27	0	100.00 %
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	81	81	0	100.00 %
3	Alat : Tensimeter	Unit	135	135	0	100.00 %
4	Alat : Glukometer	Unit	54	54	0	100.00 %
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	100	100	0	100.00 %
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	313962	313965	-3	100.00 %
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	27	27	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	5000	5000	0	100.00 %
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	27	27	0	100.00 %
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	313962	313965	-3	100.00 %
11	Alat Pelayanan KB	Unit	135	135	0	100.00 %
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	108	108	0	100.00 %
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	12793	12793	0	100.00 %
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7500	7500	0	100.00 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	40450	41011	-561	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	27	28	-1	100.00 %
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	54	54	0	100.00 %
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	27	28	-1	100.00 %
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	40450	41011	-561	100.00 %
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	27	27	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	40450	41011	-561	100.00 %
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	54	54	0	100.00 %
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	7500	7500	0	100.00 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	64603	64605	-2	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	27	27	0	100.00 %
2	Obat Hipertensi	Paket	64603	64605	-2	100.00 %
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	135	135	0	100.00 %
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	27	27	0	100.00 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	54	54	0	100.00 %
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27	27	0	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	17552	20253	-2701	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Obat Diabetes Melitus	Paket	17552	20253	-2701	100.00 %
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	81	81	0	100.00 %
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	17552	20253	-2701	100.00 %
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	108	108	0	100.00 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	81	81	0	100.00 %
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	27	28	-1	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	27	33	-6	100.00 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	718	773	-55	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku	27	27	0	100.00 %
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis	718	773	-55	100.00 %
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	27	54	-27	100.00 %
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	27	27	0	100.00 %
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	54	54	0	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	27	108	-81	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	108	126	-18	100.00 %
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	27	27	0	100.00 %
9	Tenaga profesional lainnya	Orang	1	1	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	15184	18032	-2848	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1500	1500	0	100.00 %
2	Reagen Zn TB	Kit	89	89	0	100.00 %
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	15184	15184	0	100.00 %
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	15184	15184	0	100.00 %
5	Katrid tes cepat molekuler	Test	15184	15184	0	100.00 %
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	2060	2060	0	100.00 %
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	10	10	0	100.00 %
8	Tuberkulin	Vial	200	200	0	100.00 %
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	117	117	0	100.00 %
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	54	69	-15	100.00 %
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	27	28	-1	100.00 %
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	30	33	-3	100.00 %
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	30	30	0	100.00 %
15	Kader Kesehatan	Orang	34	34	0	100.00 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	19275	22835	-3560	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	5	5	0	100.00 %
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	14125	14125	0	100.00 %
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	19275	19275	0	100.00 %
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	1381	1381	0	100.00 %
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	35	132	-97	100.00 %
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	135	138	-3	100.00 %
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	108	126	-18	100.00 %
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	35	35	0	100.00 %
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	27	27	0	100.00 %
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	18	18	0	100.00 %

Tabel 4.24

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan Kesehatan Balita	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna

3. Pekerjaan Umum

Tabel 4.25

Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	1684	1684	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
	JARINGAN PERPIPAAN					

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	350	350	0	100.00 %
2	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	350	350	0	100.00 %
BUKAN JARINGAN PERPIPAAN						
3	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	71	71	0	100.00 %
4	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	71	71	0	100.00 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1600	1600	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	400	400	0	100.00 %
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	400	400	0	100.00 %
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	0	0	0	100.00 %

Tabel 4.26

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Paripurna
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Paripurna

4. Perumahan Rakyat

Tabel 4.27

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output				Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian SPM		TUNTAS PARIPURNA				100.00%
01.00	Penyediaan & Rehabiitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						100.00%
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)							
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani		Jumlah Totalyang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		1		1	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)						20.00%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi		Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%
1	Melakukan Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Dan Perencanaan Kebutuhan Sesuai Dengan Nomenklatur Program/Kegiata n/Sub Kegiatan (Dilakukan Dengan Mengunggah Dokumen Form	Jumlah Kab/Kota	1		1	0	100.00 % 100.00

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Dan/Atau Dokumen Pendukung Lainnya)					
02.00	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100.00 %
			Tidak terdapat Relokasi Program Pemerintah			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		Tidak ada program Relokasi Pemerintah	N/A	N/A	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / Sdm		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %
1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah Dan/Atau Bangunan	Rumah	N/A	N/A	N/A	0.00 % 0
2	Subsidi Uang Sewa	Rumah	N/A	N/A	N/A	0.00 % 0
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	Rumah	N/A	N/A	N/A	0.00 % 0

Tabel 4.28

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
	Korban Bencana Kabupaten/Kota		
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	(80.00% + 20.00%) = 100 %	Tuntas Paripurna

5. Trantibumlinmas

Tabel 4.29

Capaian Indeks Pencapaian (IP) SPM TrantibumLinmas

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM					100.00 %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	2894	2894	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Unit	58	58	0	100.00 %
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	6	6	0	100.00 %
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah	Orang	155	155	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	mengikuti peningkatan kapasitas SDM***					
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00 %
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	0	0	0	100.00 %
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	0	0	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						100.00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	100500	100500	0	100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	Dokumen	1	1	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	70000	70000	0	100.00 %
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Orang	23500	23500	0	100.00 %
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	150	150	0	100.00 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	300	300	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	Unit	20	20	0	100.00 %
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	Orang	300	300	0	100.00 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				-80%	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
		Orang	1700	1700	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				-20%	20.00 %
			Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang	

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Belum Terlayani	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00 %
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Posko	2	2	0	100.00 %
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Orang	1700	1700	0	100.00 %
3	Melakukan respon cepat darurat bencana	Dokumen	1	1	0	100.00 %
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Layanan	1	1	0	100.00 %
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan	12	12	0	100.00 %
KATEGORI PENCAPAIAN SPM DAMKAR						100.00 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					-80%	80.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	250	250	0	100.00 %
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	50	50	0	100,00%
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	12	12	0	100.00 %
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	332	332	0	100.00 %
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Orang	250	250	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	50	50	0	100.00 %
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	15	15	0	100.00 %

Tabel 4.30

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang TrantibumLinmas Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
2	Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
3	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
4	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna
5	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	$(80.00\% + 20.00\%) = 100\%$	Tuntas Paripurna

6. Sosial

Tabel 4.31

Realisasi Capaian SPM Sosial Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	210	210	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	80	80	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2	Penyediaan permakanan	Orang	80	80	0	100.00 %
3	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	210	210	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	25	25	0	100.00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	13	13	0	100.00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	210	210	0	100.00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	80	80	0	100.00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100.00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	80	80	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	20	20	0	100.00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	20	20	0	100.00 %
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	150	150	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	50	50	0	100.00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	150	150	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	150	150	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	20	20	0	100.00 %
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	20	20	0	100.00 %
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	20	20	0	100.00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	20	20	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %
12	Layanan rujukan(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	5	5	0	100.00 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	210	210	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	80	80	0	100.00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	20	20	0	100.00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	210	210	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	10	10	0	100.00 %
5	Penyediaan alat bantu	Orang	1	1	0	100.00 %
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5	5	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	210	210	0	100.00 %
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	20	20	0	100.00 %
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5	5	0	100.00 %
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	20	20	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang	20	20	0	100.00 %
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2	2	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanjar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	10	10	0	100.00 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	30	30	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	100.00 %
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	5	5	0	100.00 %
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5	5	0	100.00 %
3	Penyediaan permakanan	Orang	30	30	0	100.00 %
4	Penyediaan sandang	Orang	8	8	0	100.00 %
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	5	5	0	100.00 %
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	30	30	0	100.00 %
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	5	5	0	100.00 %
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	3	3	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang	3	3	0	100.00 %
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang	1	1	0	100.00 %
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	2	2	0	100.00 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	1904	1904	0	80.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Mutu Yang Harus Dilayani	Jumlah Mutu Yang Terlayani	Mutu Yang Belum Terlayani	86.90 %
1	Penyediaan permakanan	Orang	1904	1904	0	100.00 %
2	Penyediaan sandang	Orang	407	407	52	100.00 %
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2	2	0	100.00 %
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	50	50	0	100.00 %
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7	7	0	100.0

Tabel 4.32

Tabel Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	$(80.00\% + 20.00\%) = 100.00\%$	Tuntas Parpurna
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	$(80.00\% + 20.00\%) = 100.00\%$	Tuntas Parpurna
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	$(80.00\% + 20.00\%) = 100.00\%$	Tuntas Parpurna
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	$(80.00\% + 20.00\%) = 100.00\%$	Tuntas Parpurna
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana	$(80.00\% + 20.00\%) = 100.00\%$	Tuntas Parpurna

F. Permasalahan dan Solusi

1. Pendidikan

Tabel 4.33

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pendidikan

No	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Belum optimalnya pengelolaan data pendidikan	mengoptimalkan pengelolaan data pendidikan melalui : (a) kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga terkait dan para pemangku	Belum optimalnya pemenuhan dan pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan	melaksanakan pemetaan dan perhitungan kebutuhan SDM (pendidik dan tenaga kependidikan); menyusun	Belum optimalnya pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk mencukupi kebutuhan	melakukan sosialisasi kepada sekolah dan pendampingan implementasi perencanaan berbasis data (PBD)	Pelaksanaan pencapaian SPM walaupun belum maksimal tetapi sudah diupayakan melalui kegiatan-kegiatan yang	melakukan penyesuaian nomenklatur sub kegiatan dengan rekomendasi hasil rapor pendidikan pada pengang

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	langsung dikerjakan. Beberapa data berdasarkan rapor pendidikan sedangkan rapor pendidikan PAUD dan Kesetaraan baru mulai TA 2023/2024 • . belum tersedia data terpilah gender pada rapor pendidikan sebagai sumber referensi data capaian (contoh : rata-rata skor literasi dan numerasi, skor literasi numerasi peserta didik dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah)-Form 1.A.9 Belum optimalnya monitoring evaluasi kinerja pencapaian SPM	kepentingan; (b) mengoptimalkan monev evaluasi capaian SPM	pemenuhan daya tampung peserta didik (masih terdapat kesenjangan antara jumlah ruang kelas dan jumlah peserta didik)	formasi dan menguskan kebutuhan pendidik	investasi, operasional dan personal sekolah • . Belum optimalnya implementasi perencanaan berbasis data (PBD) • . Belum teralokasinya anggaran SPM pada nomenklatur sub kegiatan SPM berdasar kepmendikbud • . Belum terdapat sinkronisasi penetapan target yang ditetapkan PD dengan Kemendikbud		mendukung ketercapaian SPM	garantahun 2025

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	• . Masih diperlukan penyesuaian/penyamaan persepsi dalam memahami indikator SPM dan cara membaca data pada rapor pendidikan							

2. Kesehatan

Tabel 4.34

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Kesehatan

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Keterbatasan petugas kesehatan dan beban kerja ganda di Puskesmas	Berkolaborasi dengan program lain saat turun ke masyarakat dan berkoordinasi dengan kader melalui pemberdayaan kader	Belum terselenggarakan forum koordinasi rutin untuk evaluasi pola konsumsi BMHP dan identifikasi kendala operasional, sehingga perencanaan kebutuhan kurang akurat dan berisiko menimbulkan kekurangan/kelebihan stok	Melakukan Rapat Koordinasi Rutin untuk penentuan sasaran SPM dan pemenuhan kebutuhan Obat dan BMHP SPM Urusan Kesehatan	Penyerapan anggaran masih belum optimal (88,95%), menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran	Diperlukan optimalisasi perencanaan dan penyerapan anggaran agar selaras dengan capaian layanan	Belum seluruh fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan ANC berkualitas, termasuk kepatuhan terhadap SOP	Evaluasi kepatuhan pelaksanaan SOP ANC terintegrasi secara berkala
Pergantian penanggung jawab program sehingga harus mengulang mempelajari definisi	Melakukan pelatihan berkala bagi tenaga kesehatan di puskesmas			Terjadi kesalahan penginputan jenis satuan/kemasan barang pada belanja anggaran sehingga	Telah melakukan perbaikan dengan menginput pada	Fasilitas kesehatan sering melakukan mutasi/rolling petugas terlatih atau PJ program tanpa	Melakukan pemetaan kompetensi petugas pemberi layanan ANC sebelum

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
operasional SPM				tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai e-katalog	aplikasi Sidirga (Sistem terpadu untuk perencanaan standar harga satuan daerah yang terintegrasi dan akurat) yang sesuai dengan jenis barang versi e-katalog	mempertimbangkan kompetensi	mutasi/rolling
Belum tersedia tools atau sistem terintegrasi untuk melakukan pengumpulan data secara cepat dan akurat , sehingga proses rekapitulasi dan analisis masih manual dan rentan kesalahan	Mengoptimalkan penggunaan teknologi sederhana seperti Google Form untuk pengumpulan data					Integrasi pelayanan ANC lintas program belum berjalan baik	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan ANC secara mandiri/self assessment
						Meningkatnya tren persalinan non-fasilitas kesehatan	Melakukan analisa permasalahan faktor penyebab peningkatan tren persalinan non-faskes dan membuat regulasi terkait pelayanan persalinan di faskes termasuk kemitraan bidan-dukun
						Kurangnya pemahaman masyarakat terkait persalinan bersih dan aman	Melakukan pendekatan edukasi masif melalui berbagai media dan

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
							penyuluhan langsung oleh kader serta bidan melalui kunjungan rumah dan kelas ibu hamil
						Keterlambatan masyarakat dalam mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan	Memberikan edukasi kepada masyarakat agar mampu melakukan deteksi dini risiko tinggi secara mandiri
						Aplikasi yang belum terintegrasi sehingga harus melakukan input ganda (SIGIZI KESGA dan e-Kohort)	Melakukan penginputan laporan secara Google Spreadsheet selain melalui aplikasi sebagai cadangan
						Aplikasi sering eror dan maintenance padahal jumlah data yang harus diinput sangat banyak dan by name	Pelaporan manual tetap diisi dan dimaksimalkan sebagai antisipasi jika aplikasi mengalami kendala
						Capaian pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat telah melampaui target (103,13%), namun penyerapan anggaran masih belum optimal (88,95%). Meningkatkan jumlah ODGJ berat yang terlayani memerlukan dukungan SDM, kecukupan	Diperlukan optimalisasi perencanaan dan penyerapan anggaran selaras dengan capaian layanan, penguatan kapasitas puskesmas, monitoring layanan kesehatan jiwa berkala, serta peningkatan

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
						obat, dan kesinambungan layanan	kolaborasi lintas sektor dan peran keluarga
						Sering terjadi kekurangan logistik terutama BMHP cartridge TCM	Melakukan permintaan ke Dinkes Provinsi untuk buffer logistik TCM dan tetap melakukan pemeriksaan secara mikroskopis selama cartridge kosong
						Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan ke Puskesmas	Meningkatkan promosi kesehatan terkait TB ke masyarakat melalui berbagai media dan penyuluhan
						Banyak terduga TB yang tidak mengantarkan dahak untuk dilakukan pemeriksaan TCM/mikroskopis	Mengoptimalkan pengambilan dahak saat pasien datang pertama kali ke Puskesmas sehingga tetap ada sampel yang dapat diperiksa

3. Pekerjaan Umum

Tabel 4.35

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Pekerjaan Umum

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
Penambahan Jumlah penduduk di Kota Balikpapan akibat Pembangunan Kilat dan Pembangunan IKN sangat masip dan menjadi permasalahan klasik Kota Besar dalam Pengumpulan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Rumah Tangga	Mencari Sumber Air Baku dan/atau Air Bersih lainnya	Menghitung Jumlah Rumah Tangga dengan dasar Jumlah Kartu Keluarga dari DISDUKCAPIL Kota Balikpapan tidak dapat menggambarkan kondisi Rumah Tangga yang sesungguhnya, karena masih ada 1 Rumah Tangga dihuni lebih dari 1 Kartu Keluarga, bahkan ada yang dalam 1 Rumah Tangga memiliki 4 sampai 5 Kartu Keluarga	Perlu melakukan survey kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, baik pertambahan karena pernikahan, pertambahan pendatang baru, dan lain sebagainya	Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Balikpapan masih dapat mengatasinya	Sumber pendanaan yang mencukupi	Keterbatasan Air Baku sehingga tidak tersedia Idle Capacity di Kota Balikpapan yang diakibatkan Kemarau Panjang, sehingga debit Air di Waduk Manggar dan Waduk Teritip sebagai Sumber Utama Air Bersih juga ikut turun, selain itu Ijin pengambilan Air Baku juga harus sesuai dengan ijin dari BWS	Mencari Sumber Air Baku dan/atau Air Bersih lainnya
Data yang tersedia dari Disdukcapil Kota Balikpapan adalah Data Kartu Keluarga	Perlu melakukan survey kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Balikpapan	Pelanggan Air Minum yang tidak dapat diakses oleh PTMB (PDAM) untuk Data BNBA, karena ada saja Pelanggan yang memiliki 2/lebih Rumah, sebagai contoh Pak Andi memiliki Rumah di Kecamatan A Kelurahan A.2 dan di Kecamatan C Kelurahan C.1, sehingga data yang terdaftar di PTMB adalah Pak Andi memiliki SR 2 di Kecamatan A Kelurahan A.2 (Rumah yang	PTMB segera melakukan verifikasi ulang terhadap pelanggan sesuai dengan data eksisting dilapangan	Penganggaran perlu adanya dukungan dari APBN dan sumber-sumber Pendanaan Lainnya	Pengajuan melalui Dana DAK, KPBU, Banku, dan Sumber Dana lainnya	Capaian Air Limbah Domestik adalah 70% dari Sumber Air Bersih yang tersedia di suatu Kota, hal ini menyebabkan capaian Air Limbah Domestik Kota Balikpapan kurang maksimal dengan melihat permasalahan Air Bersih yang ada	Mencari Sumber Air Baku dan/atau Air Bersih lainnya

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
		terdaftar di PTMB), sehingga Data BNBA Rumah Pak Andi di Kecamatan C Kelurahan C.1 tidak terdaftar					
				Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan menggunakan sistem Tender dan Seleksi, sehingga nilai Kontrak yang didapat menjadi dibawah nilai Pagu Dana dan terdapat Silpa terhadap nilai Anggaran yang telah ditetapkan diawal Tahun Anggaran	Penggunaan Dana dibawah Pagu Dana akibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa sudah menjadi ketentuan Pemerintah	Kondisi Topografi Kota Balikpapan yang penuh tantangan, antara lain: Daerah Pesisir Laut, Daerah Perbukitan dan Daerah Rawan Banjir	Perlu Teknologi baru terutama dalam pengelolaan Air Limbah
						Kurang keterbukaan Masyarakat terkait Tangki Septik yang dimiliki, baik karena tidak paham dan/atau tidak tahu, karena banyak Masyarakat yang tidak tahu letak Tangki Septik (membeli rumah second), Masyarakat kurang terbuka dengan kondisi Tangki Septik yang dimilikinya karena menganggap itu hal tabu, selain itu masih ada anggapan di Masyarakat yaitu “Tangki Septik yang Baik/bagus adalah yang tahan lama dan tidak pernah	Perlu pendekatan dari berbagai sektor dan lapisan Masyarakat yang mendukung terlaksananya kegiatan Standar Pelayanan Minimal

PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	PERMASALAHAN	SOLUSI
						penuh (tidak perlu disedot)”	
						Pelaporan eSPM Kota Balikpapan Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun Anggaran 2024 sampai dengan Triwulan Ke-2 (Bulan Juni 2024) masih dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga tidak dapat dimunculkan angka capaian dari Target, baik Target Triwulan maupun Target Tahunan 2024	Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa

4. Perumahan Rakyat

Tabel 4.36

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Pendataan rumah di lokasi/kawasan rawan bencana terakhir dilaksanakan di tahun 2022, sehingga diperlukan updating data rumah	Updating data akan dilaksanakan setiap tahun berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana	Untuk pemberian bantuan rehabilitasi dan pembangunan kembali rumah yang terdampak bencana, masyarakat calon penerima bantuan meminta	Telah disusun draft juknis pemberian bantuan SPM Perumahan Rakyat, yang didalamnya telah memperhitungkan upah tukang dan biaya material	-	-	dokumen Surat Ketetapan Bencana oleh Kepala Daerah dan Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program	Meningkatkan koordinasi antar OPD dalam penyediaan dokumen tersebut.

N O	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
			agar bantuan dapat diberikan berupa upah tukang dan material bangunan				Pemerintah Daerah untuk direlokasi dibutuhkan sebagai dasar pelaksanaan bantuan SPM Perumahan Rakyat	
	Adanya resistensi data dari masyarakat dikarenakan banyaknya pendataan terkait bencana, sedangkan pemberian bantuan belum tentu dilaksanakan dikarenakan harus memenuhi aturan teknis pemberian bantuan terkait SPM Perumahan Rakyat	Meningkatkan koordinasi bersama pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT setempat dan memastikan tenaga survey lapangan memahami mengenai prosedur dan persyaratan terkait pendataan dan pemberian bantuan SPM Perumahan Rakyat	Belum tersedianya lahan yang bisa digunakan sebagai lokasi relokasi bagi korban bencana atau dampak program pemerintah	Berkoordinasi bersama OPD terkait dalam hal penyiapan lahan yang sesuai sebagai lokasi relokasi bagi korban bencana atau dampak program pemerintah	-	-	-	-

5. Trantibumlinmas

Tabel 4.37

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Trantibumlinmas

N O	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasa lahan	Solusi	Permasa lahan	Solusi	Permasala han	Solusi	Permasa lahan	Solusi
	Kesulitan mendapatkan data warga negara di wilayah rawan bencana (<i>by name by address</i>), tidak bisa menarik data kependudukan.	Keterlibatan peran dan fungsi dari Disdukcapil dan didukung penuh oleh Kemen dagri	Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan dari segi lokasi bisa mengalami perubahan setiap tahun.	Update data tiap tahun berdasarkan data kependudukan	Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap tahun untuk semua orang yang berada di lokasi rawan bencana, tidak ada dukungan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait SPM Trantibumlinmas	Dukungan dana dari Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat terkait SPM Trantibumlinmas	Keahlian petugas terkait SPM perlu ditingkatkan.	Bimtek dan Diklat yang difasilitasi oleh BKPSDM

6. Sosial

Tabel 4.38

Permasalahan dan solusi SPM Urusan Sosial

N O	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGAN KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi	Permasalahan	Solusi
	Belum tersedia aplikasi yang menunjang pengelolaan data PMKS secara maksimal, jumlah	Mengoptimalkan peran serta mitra-mitra Dinas Sosial Kota Balikpapan di	Kesulitan melakukan penghitungan kebutuhan karena keterbatasan	Melakukan pendataan secara sistematis	Anggaran yang tersedia relatif belum dapat memberikan pelayanan yang	Melakukan pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan sebagai	Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk mendirikan rumah penampungan yang	Meningkatkan intensitas koordinasi serta pengajuan usulan PMKS yang telah

N O	PENGUMPULAN DATA		PENGHITUNGA N KEBUTUHAN		PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		PELAKSANAAN	
	Permasalah an	Solusi	Permasalah an	Solusi	Permasalah an	Solusi	Permasalah an	Solusi
	gelandangan dan pengemis tidak menentu/fluktuatif dan berasal dari luar daerah	lapangan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat, Tagana untuk membantu melaksanakan tahap pengumpulan data dan updating data	sumber data		maksimal kepada seluruh PMKS dalam rangka mendukung penerapan SPM di Dinas Sosial Kota Balikpapan	dasar pengajuan penambahan anggaran	memiliki standar pelayanan minimal maksimal selama 7 (tujuh) hari, sedangkan kapasitas panti sosial milik Pemerintah Provinsi sebagai layanan rujukan memiliki kapasitas yang terbatas	menjadi penerima layanan di Dinas Sosial Kota Balikpapan dan telah melebihi batas waktu maksimal pelayanan kabupaten/kota kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Balikpapan Menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial milik Kementerian Sosial dan pihak swasta non pemerintah

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 yang akan dipublikasikan secara luas melalui *website* Pemerintah Kota Balikpapan, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan menginputan Sistem Informasi Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) Tahun 2025 Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Terima kasih.

Balikpapan Kota Beriman (Bersih, Indah, Aman dan Nyaman)

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela (Kubangun dengan Amal,

Kujaga dengan Iman dan Kubela dengan Doa).



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025